



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 2, DESEMBER 2020

### Daftar Isi

|   |         |
|---|---------|
| PAGEBLUG DAN PERILAKU IRASIONAL DI VORSTENLANDEN ABAD XIX<br><b>Heri Priyatmoko dan Hendra Kurniawan</b> .....  | 125-137 |
| <i>COVID-19: INSIDE INDONESIA'S ISLAMIC STATE SOCIAL MEDIA NETWORK</i><br><b>Prakoso Permono, Amanah Nurish, dan Abdul Muta'ali</b> .....                     | 138-149 |
| <i>CONSPIRACY THEORIES AND MODERN DISJUNCTURE AMIDST THE SPREAD OF COVID-19 IN INDONESIA</i><br><b>Ibnu Nadzir</b> .....                                      | 150-167 |
| REAKSI PENDUDUK DI WILAYAH MINIM AKSES PADA FASE AWAL PANDEMI COVID-19<br><b>Mochammad Wahyu Ghanidan Marya Yenita Sitohang</b> .....                         | 168-179 |
| PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENULARAN PANDEMI CORONA KLASTER EKS IJTIMA ULAMA DI GOWA<br><b>Ali Kusno dan Nurul Masfufah</b> .....                               | 180-193 |
| KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19<br><b>Muhammad Saiful Aziz dan Moddie Alvianto Wicaksono</b> .....                           | 194-207 |
| KEBANGKITAN DOKTER PRIBUMI DALAM LAPANGAN KESEHATAN: MELAWAN WABAH PES, LEPRO, DAN INFLUENZA DI HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX<br><b>Siti Hasanah</b> ..... | 208-220 |
| DINAMIKA INDUSTRI MUSIK INDIE JAKARTA DAN WILAYAH SEKITARNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 GELOMBANG PERTAMA<br><b>Puji Hastuti</b> .....                        | 221-239 |
| RUMAH SAKIT BERI-BERI PADA PERANG DI ACEH DAN MUNCULNYA KEBIJAKAN KESEHATAN KOLONIAL 1873-1900-AN<br><b>Wahyu Suri Yani dan Agus Suwignyo</b> .....           | 240-254 |
| TINJAUAN BUKU<br>COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA<br><b>Riqko Nur Ardi Windayanto</b> .....        | 255-266 |



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 2, DESEMBER 2020

### Daftar Isi

|  |                |
|--|----------------|
| PAGEBLUG DAN PERILAKU IRASIONAL DI VORSTENLANDEN ABAD XIX<br><b>Heri Priyatmoko dan Hendra Kurniawan .....</b>   | <b>125-137</b> |
| <i>COVID-19: INSIDE INDONESIA'S ISLAMIC STATE SOCIAL MEDIA NETWORK</i><br><b>Prakoso Permono, Amanah Nurish, dan Abdul Muta'ali.....</b>                     | <b>138-149</b> |
| <i>CONSPIRACY THEORIES AND MODERN DISJUNCTURE AMIDST THE SPREAD OF COVID-19 IN INDONESIA</i><br><b>Ibnu Nadzir.....</b>                                      | <b>150-167</b> |
| REAKSI PENDUDUK DI WILAYAH MINIM AKSES PADA FASE AWAL PANDEMI COVID-19<br><b>Mochammad Wahyu Ghan dan Marya Yenita Sitohang .....</b>                        | <b>168-179</b> |
| PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENULARAN PANDEMI CORONA KLASSTER EKS IJTIMA ULAMA DI GOWA<br><b>Ali Kusno dan Nurul Masfufah .....</b>                             | <b>180-193</b> |
| KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19<br><b>Muhammad Saiful Aziz dan Moddie Alvianto Wicaksono .....</b>                          | <b>194-207</b> |
| KEBANGKITAN DOKTER PRIBUMI DALAM LAPANGAN KESEHATAN: MELAWAN WABAH PES, LEPRO, DAN INFLUENZA DI HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX<br><b>Siti Hasanah.....</b> | <b>208-220</b> |
| DINAMIKA INDUSTRI MUSIK INDIE JAKARTA DAN WILAYAH SEKITARNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 GELOMBANG PERTAMA<br><b>Puji Hastuti.....</b>                        | <b>221-239</b> |
| RUMAH SAKIT BERI-BERI PADA PERANG DI ACEH DAN MUNCULNYA KEBIJAKAN KESEHATAN KOLONIAL 1873-1900-AN<br><b>Wahyu Suri Yani dan Agus Suwignyo.....</b>           | <b>240-254</b> |
| TINJAUAN BUKU<br>COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA<br><b>Riqko Nur Ardi Windayanto.....</b>        | <b>255-266</b> |





# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 2, DESEMBER 2020

DDC: 304.2

### PAGEBLUG DAN PERILAKU IRASIONAL DI *VORSTENLANDEN* ABAD XIX

**Heri Priyatmoko dan Hendra Kurniawan****ABSTRAK**

Wabah penyakit atau dalam bahasa Jawa disebut pageblug tidak hanya terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini. Pada abad XIX pernah terjadi pageblug. Akan tetapi, penanganannya pada saat itu banyak yang menganggapnya sebagai “perilaku irasional.” Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peristiwa pageblug di Vorstenlanden atau wilayah kekuasaan kerajaan pada abad XIX dengan memakai perspektif sejarah lokal. Dengan metode sejarah, diketahui bahwa pageblug adalah kondisi nestapa yang disebabkan oleh wabah penyakit seperti kolera yang memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Dalam alam pemikiran irasional, pageblug dipahami sebagai ulah setan dan Nyai Ratu Kidul. Sementara itu, dalam pemikiran logis kala itu, wabah dipicu oleh perubahan musim kemarau yang berkepanjangan yang pada saat itu perkara perilaku sehat masyarakat belum mengemuka. Penduduk menyikapi pageblug dengan aneka tindakan irasional, misalnya mandi dan minum air kolam yang dipakai mandi oleh raja. Mereka juga mempercayai obat kolera berbahan rumput teki yang diberikan oleh Sunan Lawu. Dengan ilmu titen atau pengalaman empiris tersebut, mereka membuktikan bahwa unsur alam itu dapat menghalau pageblug, tanpa harus pergi ke dokter yang jumlahnya terbatas pada abad XIX.

**Kata kunci:** Pageblug, Perilaku Irasional, Vorstenlanden

DDC: 303.23

### COVID-19: MELACAK JEJAK ISLAMIC STATE DI INDONESIA DALAM JARINGAN MEDIA SOSIAL

**Prakoso Permono, Amanah Nurish, & Abdul Muta’ a****ABSTRAK**

Para pendukung ISIS di Indonesia menunjukkan keaktifan di media sosial khususnya pada masa pandemi Covid-19. Artikel ini berusaha mengeksplorasi dan menganalisis narasi Islamic State di jejaring media sosial didasari pendekatan etnografi digital yang dilaksanakan pada Maret hingga Juli 2020 menyusul merebaknya pandemi Covid-19. Etnografi yang dilakukan berfokus pada empat grup atau kanal pendukung ISIS berbahasa Indonesia di Telegram. Penelitian ini menunjukkan bahwa ISIS dan jaringannya di Indonesia sebagai aktor rasional tengah berusaha memanfaatkan berbagai kesempatan serta kerentanan masyarakat yang muncul menyusul pandemi Covid-19 untuk kepentingan memperkuat radikalisme dan usaha untuk mendapatkan dukungan akar rumput dengan menjangkau komunitas Islam yang lebih luas. Penelitian ini juga menemukan bahwa jaringan ISIS di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 mengeluarkan narasi-narasi anti-pemerintah maupun anti-etnis Tionghoa yang lebih mutakhir dan personal. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa di balik narasi yang disebarkan oleh jaringan ISIS di Indonesia terdapat sebuah ancaman tersembunyi bagi masyarakat Indonesia.

**Kata kunci:** Covid-19; Etnografi Digital; Islamic State; Indonesia; Media Sosial

---

DDC: 302.23

## **TEORI KONSPIRASI DAN KETERPUTUSAN MODERN DI TENGAH PERSEBARAN COVID-19 DI INDONESIA**

**Ibnu Nadzir**

### **ABSTRAK**

Di tengah penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, pemerintah banyak mendapatkan kritik karena ketidakmampuan dalam merumuskan strategi penanganan yang tepat. Selain dari tidak berfungsinya birokrasi, tingkat kepatuhan yang rendah dari warga negara Indonesia terhadap protokol kesehatan, menambah kerumitan dampak COVID-19. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam perilaku tersebut adalah tersebarnya informasi palsu dan teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan virus tersebut. Bagaimana kita bisa menjelaskan luasnya persebaran teori konspirasi di tengah ancaman virus COVID-19 di Indonesia? Artikel ini mengajukan argumen bahwa persebaran teori konspirasi di tengah pandemi merefleksikan kontestasi yang tengah berlangsung terhadap legitimasi politik di antara negara dan masyarakat. Untuk menjelaskan argumen tersebut, artikel ini akan memaparkan tiga momen kritis yang menjadi landasan dari persebaran teori konspirasi di Indonesia. Pertama, teori konspirasi digunakan sebagai pondasi dari rezim otoritarian Soeharto, dan kemudian melekat dalam institusi sebagai instrumen penting untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, pertautan antara ekosistem demokratis dan penggunaan media sosial memungkinkan masyarakat untuk merebut teori konspirasi sebagai alat perlawanan dan skeptisisme terhadap pemerintah. Ketiga, ketegangan negara dan masyarakat terkait otoritas kebenaran tersebut menguat dalam konflik terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mencoba mempertahankan legitimasinya melalui ketidakterbukaan terhadap informasi tentang COVID-19. Sebaliknya, sebagian kelompok masyarakat merespons ketidakterbukaan tersebut dengan melakukan penyebaran teori konspirasi yang menjustifikasi ketidakpatuhan pada protokol kesehatan. Kontestasi ini memperburuk dampak dari penyebaran COVID-19 di Indonesia

***Kata Kunci:** teori konspirasi, COVID-19, Indonesia, media sosial*

---

DDC: 362.89

## **REAKSI PENDUDUK DI WILAYAH MINIM AKSES PADA FASE AWAL PANDEMI COVID-19**

**Mochammad Wahyu Ghani1 dan Marya Yenita Sitohang**

### **ABSTRAK**

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan reaksi penduduk di wilayah minim akses yaitu Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pada awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengetahuan tentang COVID-19 yang cenderung terbatas membuat akses terhadap informasi yang benar dari sumber terpercaya menjadi sangat penting. Hasil observasi partisipan yang dilakukan menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Silat Hilir memiliki kemampuan literasi informasi yang masih minim terkait COVID-19. Salah satunya ditunjukkan dengan perilaku reaktif dalam menanggapi hoax terkait pencegahan COVID-19. Berdasarkan hasil observasi yang didukung oleh data sekunder, variabel seperti topografi wilayah, minimnya akses listrik dan internet, serta rendahnya tingkat pendidikan membuat penduduk Kecamatan Silat Hilir tidak berdaya mengolah informasi terkait COVID-19 di fase awal pandemi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah minim akses, khususnya di Kecamatan Silat Hilir harus juga disertai dengan peningkatan kemampuan literasi sumberdaya manusia, salah satunya melalui aspek pendidikan.

***Kata kunci:** akses informasi, pengetahuan COVID-19, Kecamatan Silat Hilir*

---

DDC: 302.4

## **PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENULARAN PANDEMI CORONA KLASTER EKS IJTIMA ULAMA DI GOWA**

**Ali Kusno1 dan Nurul Masfufah**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi publik yang berkembang terhadap eks peserta Ijtima Ulama di Gowa yang dianggap sebagai salah satu klaster persebaran pandemi corona di Indonesia. Pendekatan penelitian menggunakan analisis wacana kritis model Fairclough. Pendekatan itu memungkinkan penggunaan bahasa dalam

wacana ditempatkan sebagai praktik sosial; wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu; dan wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu. Data penelitian berupa wacana tanggapan para pengguna Facebook terhadap pemberitaan tentang pandemi corona kluster Gowa. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kegiatan Ijtima Ulama di Gowa, para eks peserta kegiatan tersebut mendapat beragam stigma negatif. Sebagian besar warganet beranggapan bahwa eks peserta kegiatan di Gowa sebagai salah satu penyebar wabah corona di Indonesia. Meskipun para eks peserta kegiatan Gowa sudah menjalani proses karantina dan pengobatan, tetap mereka mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari masyarakat sekitar, terkesan eks kegiatan Gowa dan keluarga dikucilkan meskipun sebenarnya masyarakat lebih menaruh diri. Berdasarkan hal itu, dapat dinyatakan bahwa pemahaman agama yang terkesan membabi buta akan sangat berbahaya bagi kehidupan umat Islam. Penanganan lebih tegas terhadap kejadian serupa agar masyarakat agar lebih patuh terhadap kebijakan pemerintah.

**Kata kunci:** kluster Gowa, pandemi korona, wacana kritis

---

DDC: 303.3

## **KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19**

**Muhammad Saiful Aziz dan Moddie Alvianto Wicaksono**

### **ABSTRAK**

Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, dunia sedang dihinggapi oleh krisis pandemi Covid-19. Pandemi ini menjangkit lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Secara global, imbasnya tidak hanya pada krisis kesehatan dan krisis ekonomi, melainkan juga krisis politik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kasus dan metode pengumpulan data studi literatur. Adapun artikel ini berkesimpulan strategi rebuilding posture yang berisikan langkah apologia dan compensation menjadi pilihan terbaik bagi Pemerintah Indonesia. Lalu terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama adalah kecepatan dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat, kedua konsistensi dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat, ketiga prinsip keterbukaan, keempat menunjukkan sense of crisis dari berbagai elemen pemerintah kepada publik dan stakeholder, kelima perlunya memperkuat komunikasi internal dari unsur pemerintah, keenam perlunya memperkuat transmisi pesan komunikasi kepada publik.

**Kata kunci:** Komunikasi Krisis, Pandemi, Covid-19, Pemerintah Indonesia

---

DDC: 305.5

## **KEBANGKITAN DOKTER PRIBUMI DALAM LAPANGAN KESEHATAN: MELAWAN WABAH PES, LEPRO, DAN INFLUENZA DI HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX**

**Siti Hasanah**

### **ABSTRAK**

Dalam upaya memutus mata rantai wabah dibutuhkan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, antara dokter dan masyarakat, maupun sesama dokter itu sendiri. Dalam tatanan birokrasi kesehatan kolonial, awalnya dokter pribumi selalu mengalami diskriminasi dan pada beberapa kasus hubungan dengan dokter Eropa tidak harmonis. Namun terjadinya wabah-wabah mengharuskan mereka tetap bersinergi. Awalnya dokter Eropa lebih dominan untuk menjadi tokoh-tokoh kunci dalam penelitian laboratorium dan pencarian solusi ketika terjadi wabah. Lalu trend-nya berubah sejak awal abad ke-19. Kebangkitan dokter pribumi yang tidak terlepas dari revolusi pendidikan STOVIA dan kemunculan Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige, sebuah perkumpulan dokter pribumi pada tahun 1909. Dua faktor ini mendorong para dokter pribumi semakin melibatkan diri dalam kerja-kerja penelitian hingga tahap mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aspek utama yang dibicarakan ialah kebangkitan dan sinergitas yang dibangun antara para dokter khususnya dokter pribumi dalam menangani beberapa wabah. Dr. Cipto Mangoenkoesoemo dalam pemberantasan wabah pes di Malang, dr. Abdul Rivai yang lantang bersuara di Volksraad mendorong pemerintah segera tanggap saat terjadi wabah influenza, dan JB Sitanala yang menjadi tokoh kunci penyelesaian wabah Lepra hingga prestasinya terdengar di forum-forum kesehatan internasional.

**Kata Kunci:** Kebangkitan dokter pribumi, kesehatan masa kolonial, Wabah pes, influenza, dan lepra

---

DDC: 303.48

**DINAMIKA INDUSTRI MUSIK INDIE JAKARTA DAN WILAYAH SEKITARNYA  
PADA MASA PANDEMI COVID-19 GELOMBANG PERTAMA**

**Puji Hastuti**

**ABSTRAK**

Tulisan ini bermaksud menguraikan dinamika kehidupan pekerja industri musik indie Jakarta dan sekitarnya yang mengalami perubahan pada masa Pandemi Covid-19. Ekosistem industri musik indie yang semula sangat mengandalkan ruang pertemuan fisik dan komunal harus beradaptasi dengan kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi. Kondisi tersebut menarik perhatian penulis untuk mengamati dinamika kehidupan para pekerja industri musik indie dalam menghadapi keterbatasan tersebut. Dalam kurun waktu pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial hingga adaptasi kebiasaan baru atau dikenal dengan new normal, penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan pekerja industri musik indie yang ditampilkan dalam beberapa platform media digital. Hasilnya, penulis menemukan geliat para pekerja industri musik indie Jakarta dan sekitarnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 mencakup beberapa aspek berikut: 1) solidaritas komunal, 2) adaptasi kebiasaan, 3) eksplorasi ruang komunal digital, dan 4) masa kontemplasi dan menghasilkan karya baru. Kesimpulan dari hasil temuan tersebut, pandemi Covid-19 telah menumbuh-kembangkan kembali semangat komunalitas, meski sekaligus juga menampilkan celah bagi absennya peran negara terhadap jaminan kesejahteraan layak bagi pekerja industri musik. Di samping menguatnya ikatan komunalitas pekerja, keterbatasan yang dialami akibat masa-masa pandemi justru membuka peluang usaha lain bagi para pekerja industri musik. Terakhir, pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi era baru ekosistem industri musik indie Jakarta bahkan kota-kota lainnya di Indonesia dengan kemajuan teknologi pertunjukan digital dan rilisan karya baik audio maupun video yang dapat digarap menggunakan media rekam sederhana dari rumah atau home recording.

***Kata Kunci:** pekerja industri musik, musik indie Jakarta, pandemi Covid-19, adaptasi, ruang komunal digital*

---

DDC: 353.6

**RUMAH SAKIT BERI-BERI PADA PERANG DI ACEH DAN MUNCULNYA KEBIJAKAN  
KESEHATAN KOLONIAL 1873-1900-AN**

**Wahyu Suri Yani dan Agus Suwignyo**

**ABSTRAK**

Selama Perang di Aceh (1873-1900an), penyakit beri-beri menyerang tentara Belanda dan menyebabkan banyak kematian di pihak Belanda. Namun tenaga medis kolonial memerlukan waktu lama—hampir 20 tahun—untuk mempelajari jenis penyakit ini dan cara pengobatannya. Artikel ini mengkaji upaya-upaya pemerintah kolonial dalam menangani dan memitigasi penyebaran penyakit beri-beri selama perang di Aceh. Melalui arsip Algemene Secreterie Atjeh Zaken, Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie dan sumber primer lain, artikel menunjukkan perubahan konsep tentang kesehatan dalam kebijakan medis kolonial antara lain didirikannya rumah sakit khusus beri-beri di Sumatra Westkust. Artikel ini menegaskan bahwa usaha pengobatan di rumah sakit khusus dalam menghadapi beri-beri sebagai wabah baru, menjadi etalase utama dalam menjawab persoalan beri-beri yang juga telah merebak di berbagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Diskursus tempat sehat dan topografi kesehatan Sumatra Westkust yang menekankan pendekatan lokalitas dalam penanganan kesehatan masyarakat, menjadi bagian dari proses panjang dalam penemuan zat anti beri-beri atau tiamin.

***Kata Kunci:** perang Aceh, wabah beri-beri, topografi kesehatan, kebijakan medis kolonial, Sumatra Westkust*

---

DDC: 353.9.

**TINJAUAN BUKU**

**COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA  
DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA**

**Riqko Nur Ardi Windayanto**

Judul Buku: Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal. Penulis: Para Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada serta Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti (Eds) (2020). Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, xxii + 372 hlm.



# MASYARAKAT INDONESIA

## MAJALAH ILMU-ILMU SOSIAL INDONESIA

VOLUME 46

NOMOR 2, DESEMBER 2020

DDC: 304.2

### EPIDEMIC AND THE IRRATIONAL ATTITUDE OF VORSTENLANDEN IN 19TH CENTURY

**Heri Priyatmoko and Hendra Kurniawan****ABSTRACT**

Epidemic, in Javanese called pageblug, not only happened in this Covid-19 era, but also happened in the 19th century. But, the way to handle the epidemic at that time is considered as irrational. This article aims to discuss the events of the pageblug in Vorstenlanden or the royal domain in the nineteenth century using the perspective of local history. With historical method, it is known that pageblug is a miserable condition caused by an epidemic such as cholera which takes many lives and causes panic in the community. In the realm of irrational thought, pageblug is understood to be the work of Satan and Nyai Ratu Kidul. Whereas in logical thinking at the time, the plague was triggered by prolonged dry season changes, not the healthy behavior of the people. Residents respond to the pageblug with various irrational actions, such as bathing and drinking pool water which is used by the king to bathe. They also believe in cholera drug made from grass puzzles given by Sunan Lawu. With the knowledge of titen or empirical experience proving them natural elements can drive the pageblug, without having to go to a doctor who is very few in the nineteenth century.

*Keywords: Pageblug, Irrational Behavior, Vorstenlanden*

DDC: 303.23

### COVID-19: INSIDE INDONESIA'S ISLAMIC STATE SOCIAL MEDIA NETWORK

**Prakoso Permono, Amanah Nurish, and Abdul Muta'a****ABSTRACT**

ISIS affiliates in Indonesia have been involved actively in social media particularly during the Covid-19 pandemic. This article is trying to explore and analyze Islamic State affiliates daily narrative in their social media network based on digital ethnography conducted between March to July 2020 following the Covid-19 outbreak. The ethnography focuses on four ISIS affiliate's Telegram channel and group. We found that ISIS affiliates in Indonesia as a rational actor have been capitalizing on opportunities brought by Covid-19 and vulnerabilities in Indonesia's society to strengthen radicalization and grassroots support from broader Muslim communities. This research also finds more advanced and personalized anti-government and anti-Chinese rhetoric being emphasized by Islamic State affiliates in Indonesia during the pandemic and concludes that behind Indonesian ISIS narratives during the Covid-19 pandemic emerges hidden imminent threats to the society.

*Keywords: Covid-19; Digital Ethnography; Islamic State; Indonesia; Social Media*



---

DDC: 302.23

## **CONSPIRACY THEORIES AND MODERN DISJUNCTURE AMIDST THE SPREAD OF COVID-19 IN INDONESIA**

**Ibnu Nadzir**

### **ABSTRACT**

Amidst the global outbreak of COVID-19 in Indonesia, the government has been under the spotlight for not being able to formulate a proper response. Aside from the malfunctioning bureaucracy, the low compliance among citizens toward public health advice complicates the impact of COVID-19 in Indonesia. One factor that contributes to the attitude of society is the spread of false information and conspiracy theories associated to the virus itself. How do we explain the propagation of conspiracy theories under the threat of COVID-19 in Indonesia? The article argues that the spread of conspiracy theories amidst the pandemic reflects the on-going contestation of political legitimacy between the state and society in Indonesia. To elaborate this point, the article elucidates the three critical junctures that buttressed the propagation of conspiracy theories. First, conspiracy theory was utilized as a foundation of authoritarian regime of Soeharto, and later became an institutionalized tool to maintain its power. Second, the entanglement between democratic ecosystem and proliferation of social media after Reformasi, has enabled society to appropriate conspiracy theories as a form of resistance and skepticism toward government. Third, the tension between state and society in regards to the authority manifested on the contention on COVID-19 management in Indonesia. The government have been trying to maintain the legitimacy by being secretive on COVID-19 information. At the same time, some elements of society responded to the secretive government with propagation conspiracy theories that also justify public disobedience toward health protocols. These combinations have further exacerbated the impact of COVID-19 in Indonesia.

*Keywords: conspiracy theory, COVID-19, Indonesia, social media*

---

DDC: 362.89

## **HOW PEOPLE IN THE REMOTE AREA REACT TO THE COVID-19 PANDEMIC IN THE EARLY PHASE**

**Mochammad Wahyu Ghani<sup>1</sup> and Marya Yenita Sitohang**

### **ABSTRACT**

This article aims to analyze the knowledge and reaction of the remote area population which is the Silat Hilir District, Kapuas Hulu, West Borneo, at the beginning of the COVID-19 pandemic in Indonesia. The knowledge about COVID-19 is still limited so that access to valid information and reliable sources becoming very important. We conducted a participant observation to collect the data. It shows that the population of Silat Hilir District has a poor understanding related to COVID-19. They also tend to react to the COVID-19 hoaxes. Based on the observations which are supported by secondary data, variables like topography, lack of access to electricity and internet, and low level of education make the population of Silat Hilir District unable to process the information they received. Therefore, the development of infrastructure in remote area must also consider the increase of community literacy skills, for example through the education aspect.

*Keywords: access to information, COVID-19 knowledge, Silat Hilir District*

---

DDC: 302.4

## **PUBLIC PERCEPTION OF PANDEMIC CORONA TRANSMISSION CLUSTER EX IJTIMA ULAMA IN GOWA**

**Ali Kusno<sup>1</sup> and Nurul Masfufah**

### **ABSTRACT**

This study aims to identify the growing public perception of the former participants of Ijtima Ulama in Gowa, which is considered as one of the corona pandemic distribution clusters in Indonesia. The research approach uses the critical discourse analysis of the Fairclough Model. That approach allows the use of language in discourse to be placed as a social practice; discourse or language use is generated in a specific discursive event; and the resulting discourse takes the form of a particular genre. The research data is in the form of discourse on Facebook users' responses to the news about the Gowa cluster corona pandemic. Data analysis techniques using an interactive model.

The results showed that after the Ijtima Ulama activities in Gowa, the former participants of the activity received a variety of negative stigma. Most of the citizens think that the ex-Gowa activity is one of the spreaders of the corona outbreak in Indonesia. Even though the ex-participants of Gowa activities have undergone a quarantine and treatment process, they still get unpleasant treatment from the surrounding community, it seems that the ex-Gowa activities and their families are ostracized even though the community actually withdraws. Blindly understanding of religion will be very dangerous for the lives of Muslims. More stringent handling of similar incidents so that people are more compliant with government policies.

*Keywords: Gowa cluster, corona pandemic, critical discourse*

---

DDC: 303.3

## **CRISIS COMMUNICATION OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19**

**Muhammad Saiful Aziz and Moddie Alvianto Wicaksono**

### **ABSTRACT**

The Ministry of Education and Culture has launched the National Literacy Movement in 2016, which has been implemented in schools, families, and communities. The National Literacy Movement proposes six basic literacies, namely: language, numeracy, science, digital, finance, and culture and citizenship. In this case, cultural and civic literacy receives less attention because it arguably contributes less competitive value in facing the 21st-century global competition. Besides, cultural and citizenship literacy is the foundation for the formulation of five basic characters encompassing religious, nationalist, independent, integrous, and cooperative. This article will examine what subjects which can increase student awareness, especially in junior high school in supporting cultural and civic literacy and what aspects which can be contributed from those subjects. This study uses a qualitative method strengthened by desk research. Results show that subjects that are considered to increase student awareness of five basic characters, including Social Studies, Arts and Culture, and Education for Pancasila and Citizenship. Social Studies encourages students to have social awareness and be able to live together in a pluralistic society. Art and Culture contributes as a foundation to preserve Indonesian's arts and culture in facing the era of modernity. The Education of Pancasila and Citizenship encourages students to understand and execute their rights and obligations as Indonesia's citizens.

*Keywords: cultural and citizenship literacy, five basic characters, subjects, students*

---

DDC: 305.5

## **THE RESURRECTION OF INDIGENOUS DOCTORS IN THE MEDICAL FIELDS: ENCOUNTERING THE PLAGUE, THE LEPROSY AND INFLUENZA OUTBREAKS IN THE NEDERLANDSCH INDIE IN THE EARLY 20TH CENTURY**

**Siti Hasanah**

### **ABSTRACT**

In order to break the epidemics chains, a strong synergy is needed between the central and local governments, between the doctors and the community, as well as among doctors themselves. In the colonial health bureaucracy, indigenous doctors always experienced discrimination. In addition, the relationship between the indigenous doctors and the European doctors was not harmonious. However, the occurrence of epidemics required them to continue to work together. Initially, European physicians were more dominant to become key figures in laboratory research and the search for solutions when an outbreak occurred. Then the trend changed since the early 19th century. The rise of indigenous doctors was inseparable from the STOVIA educational revolution and the emergence of Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige, an association of indigenous doctors in 1909. These two factors encouraged indigenous doctors to get more chances being involved in their researches to the extent it could influence the government policy. The main aspect which is discussed is the resurrection and synergy that was built between doctors, especially indigenous doctors in dealing with several outbreaks. Dr. Cipto Mangoenkoesoemo in eradicating the bubonic plague in Malang, dr. Abdul Rivai, who spoke out loudly in the Volksraad, encouraged the government to respond immediately when an influenza outbreak occurred, and JB Sitanala, who was a key figure in resolving the leprosy outbreak, until his achievements were heard in international health forums.

*Keywords: The resurrection of native doctors, colonial health, bubonic plague, influenza, and leprosy*

---

DDC: 303.48

**DYNAMIC INDIE JAKARTA MUSIC INDUSTRY AND THE SURROUNDING AREA  
IN THE FIRST WAVE COVID-19 PANDEMIC TIME**

**Puji Hastuti**

**ABSTRACT**

This paper intends to describe the dynamics of workers' lives in Jakarta's indie music industry and the surrounding areas, which experienced changes during the Covid-19 Pandemic. The indie music industry ecosystem, which previously relied heavily on physical and communal meeting spaces, adapted social restrictions due to the pandemic. This condition attracts the author's attention to observing the dynamics of the indie music industry work workers' lifesaving these limitations. In the period of stipulating social restriction policies to adapting new habits or known as new normal, the standard observations on indie music industry workers displayed on several digital media platforms. As a result, the authors found the movement of indie music industry workers in Jakarta and its surroundings in facing the Covid-19 pandemic covering the following aspects: 1) communal solidarity, 2) habitual adapt chronic exploration of digital collaborative space and 4) a period of contemplation and producing new works. The conclusion from these findings is that the Covid-19 pandemic has re-developed the spirit of communality, commonality at the same time. It also presents a gap for the absence of the state's role in ensuring decent music industry workers' welfare. Besides the strengthening of workers' communal ties, the pandemic's limitations have opened up other business opportunities for music industry workers. Finally, the Covid-19 can be a momentum for a new era of the indie music industry ecosystem, Jakarta and even other cities in Indonesia with advances in digital performance technology and the release of works both audio and video that can be worked on using simple recording media from home or home recording.

*Keywords: music workers industry, Jakarta indie music, Covid-19, adaptation, digital communal space*

---

DDC: 353.6

**THE BERI-BERI HOSPITAL DURING THE WAR IN ACEH AND THE EMERGENCE  
OF A COLONIAL MEDICAL POLICY 1873-1900S**

**Wahyu Suri Yani<sup>1</sup> and Agus Suwignyo**

**ABSTRACT**

During the war in Aceh (1873-1900s), a number of soldiers from the Dutch side suffered from beri-beri. The disease caused many casualties. Yet, it took the colonial medical force no less than twenty years to scientifically understand the disease and its cure. The aim of this article is to examine the policies that the colonial government made in the handling and mitigation of beri-beri during the war against the Aceh people. Using archives from Algemene Secretarie Atjeh Zaken, Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie and other primary sources, this article show the changing medical concepts in the colonial policy, inter alia by the founding of beri-beri specialized hospital in Sumatra Westcoast. It is argued that the attempts to quarantine beri-beri infected soldiers in the Aceh War created a basis of colonial medical policy on beri-beri for the larger context of the Netherlands Indies. Discourses about medical topography, which emphasized the importance of local elements in the treatment of beri-beri patients, were part of the long process of the invention of beri-beri drug, tiamin.

*Keywords: Aceh War, beri-beri, medical topography, conial medical policy, Sumatra Westcoast*

---

DDC: 353.9

**BOOK REVIEW**

**COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA  
DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA**

**Riqko Nur Ardi Windayanto**

Judul Buku: Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal. Penulis: Para Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada serta Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti (Eds) (2020). Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, xxii + 372 hlm.

## PAGEBLUG\* DAN PERILAKU IRASIONAL DI VORSTENLANDEN ABAD XIX

### EPIDEMIC AND THE IRRATIONAL ATTITUDE OF VORSTENLANDEN IN 19TH CENTURY

Heri Priyatmoko<sup>1</sup>, Hendra Kurniawan<sup>2</sup>

Prodi Sejarah Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma<sup>1</sup>,

Prodi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Sanata Dharma<sup>2</sup>

e-mail: <sup>1</sup>heripri\_puspari@yahoo.co.id, <sup>2</sup>hendrak@usd.ac.id

#### ABSTRACT

*Epidemic, in Javanese called pageblug, not only happened in this Covid-19 era, but also happened in the 19th century. But, the way to handle the epidemic at that time is considered as irrational. This article aims to discuss the events of the pageblug in Vorstenlanden or the royal domain in the nineteenth century using the perspective of local history. With historical method, it is known that pageblug is a miserable condition caused by an epidemic such as cholera which takes many lives and causes panic in the community. In the realm of irrational thought, pageblug is understood to be the work of Satan and Nyai Ratu Kidul. Whereas in logical thinking at the time, the plague was triggered by prolonged dry season changes, not the healthy behavior of the people. Residents respond to the pageblug with various irrational actions, such as bathing and drinking pool water which is used by the king to bathe. They also believe in cholera drug made from grass puzzles given by Sunan Lawu. With the knowledge of titen or empirical experience proving them natural elements can drive the pageblug, without having to go to a doctor who is very few in the nineteenth century.*

**Keywords:** Pageblug, Irrational Behavior, Vorstenlanden.

#### ABSTRAK

Wabah penyakit atau dalam bahasa Jawa disebut *pageblug* tidak hanya terjadi pada masa pandemi Covid-19 ini. Pada abad XIX pernah terjadi *pageblug*. Akan tetapi, penanganannya pada saat itu banyak yang menganggapnya sebagai “perilaku irasional.” Artikel ini bertujuan untuk mengkaji peristiwa *pageblug* di Vorstenlanden atau wilayah kekuasaan kerajaan pada abad XIX dengan memakai perspektif sejarah lokal. Dengan metode sejarah, diketahui bahwa *pageblug* adalah kondisi nestapa yang disebabkan oleh wabah penyakit seperti kolera yang memakan banyak korban jiwa dan menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat. Dalam alam pemikiran irasional, *pageblug* dipahami sebagai ulah setan dan Nyai Ratu Kidul. Sementara itu, dalam pemikiran logis kala itu, wabah dipicu oleh perubahan musim kemarau yang berkepanjangan yang pada saat itu perkara perilaku sehat masyarakat belum mengemuka. Penduduk menyikapi *pageblug* dengan aneka tindakan irasional, misalnya mandi dan minum air kolam yang dipakai mandi oleh raja. Mereka juga mempercayai obat kolera berbahan rumput teki yang diberikan oleh Sunan Lawu. Dengan ilmu *titen* atau pengalaman empiris tersebut, mereka membuktikan bahwa unsur alam itu dapat menghalau *pageblug*, tanpa harus pergi ke dokter yang jumlahnya terbatas pada abad XIX.

**Kata kunci:** Pageblug, Perilaku Irasional, Vorstenlanden.

#### PENDAHULUAN

Dalam fenomena *pageblug* Covid-19 atau korona, imbauan untuk memasak sayur lodeh mengemuka. Kendati belum ada konfirmasi dari pihak Keraton Yogyakarta perihal titah dari Sri Sultan Hamengku Buwono X untuk memasak lodeh,

<sup>\*)</sup>Pageblug: Javanese term referring to epidemic

masyarakat yang diasuh oleh kebudayaan Jawa rela berpeluh di *pawon mangsak* (memasak) lodeh. Makanan tradisional itu menjadi buah bibir sejak beredar kabar bahwa sayur ini diyakini bisa mengusir *memala* atau pandemi virus korona yang mengguncang mikrokosmos.<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Heri Priyatmoko, “Lodeh dan Tolak Bala”, Detik.com, 11 April 2020.

Kebudayaan Jawa memang kaya akan simbol dan makna (Budiono Herusatoto, 2000: 75). Dengan penafsiran canggih (*gotak-gatuk*), aneka bahan lodeh disimbolkan sebagai sarana penolak bala. Sejumlah harapan mulia terbungkus dalam setiap bahan itu.

Pada masyarakat yang umumnya tengah dilanda persoalan pelik menyangkut nyawa dan mengalami kepanikan, sering muncul mitos tertentu. Dalam posisi tertekan, tidak nyaman, maupun pasrah, tidak jarang *gugon tuhon* (cerita irasional) dan pemikiran irasional manusia mengemuka untuk memaknai persoalan yang menghadang. Hal itu dapat diambil melalui kasus terbaru, yakni pageblug corona di Yogyakarta. Pageblug itu ditandai dengan adanya anggota masyarakat di sekitar Kali Code yang mengaku melihat lintang kemukus. Pada periode kolonial, *pageblug* di kawasan Temanggung dimaknai sebagai akibat murkanya penunggu laut (Restu Gunawan, 2005: 976).

Aspek-aspek irasional yang menyertai perjalanan sejarah *pageblug*, dan *gugon tuhon* yang hidup dalam masyarakat Jawa tatkala menyikapi munculnya pandemi adalah fenomena nyata, baik pada masa lampau maupun masa kini. Jika mampu mengungkap fakta yang dibungkus mitos atau *gugon tuhon*, bukan tidak mungkin pengetahuan lokal makin kaya dan memunculkan pengobatan alternatif. Lebih jauh lagi, hal itu dapat menjadi materi pelajaran sekolah yang berbasis kearifan budaya di Indonesia.

Tulisan ini menyoroti perilaku irasional dan *gugon tuhon* di *Vorstenlanden* (wilayah kekuasaan kerajaan) pada abad XIX tatkala terjadi pageblug atau wabah penyakit. Dipilihnya aspek spasial *Vorstenlanden* karena daerah ini merupakan pusat pemerintahan kerajaan tradisional dan pembesar kolonial Belanda seperti residen mengontrol kekuasaan politik. Banyak pula peristiwa penting di *Vorstenlanden* menjadi sorotan media massa dan merasuk ke memori kolektif. Sementara itu, aspek temporal dipilih pada abad XIX berdasar pertimbangan selama kurun waktu itu sarana kesehatan belum memadai dan jumlah dokter bersama tenaga medis lainnya juga terbatas (Jaelani, 2017: 89; Dina Dwi Kurniarini dkk., 2015: 3). Biarpun ada dokter dan tenaga medis,

pada saat itu mereka hanya melayani kelompok militer Eropa dan elit bangsawan yang berstatus sosial lebih tinggi. Pada abad XIX, *gugon tuhon* dan perilaku irasional begitu subur. Berbeda jika dibandingkan dengan permulaan abad XX yang disebut “abad pencerahan”, yang ditandai oleh eksistensi priayi modern berpendidikan Barat, yang bertugas mencerdaskan masyarakat serta mendekonstruksi alam pemikiran irasional.

Berdasar hal itu, tulisan ini membahas tiga hal, yaitu 1) faktor yang menyebabkan terjadinya pageblug di *Vorstenlanden* abad XIX; 2) tindakan masyarakat merespon penyakit yang mewabah; 3) pemaknaan *gugon tuhon* dalam fenomena pageblug abad XIX.

Terdapat beberapa studi yang beririsan dengan tema ini. Martina Safitri (2019) dalam artikel “*Dukun dan Meredupnya Pesona Pengobatan Jawa: Aspek-aspek Pengobatan Jawa Abad XIX-XX*” menjelaskan bahwa dukun yang mengobati penderita pes adalah perempuan paruh baya berjalan bungkuk, memakan sirih, merapal mantra dengan dupa, dan ada *sajen* sebagai perlengkapan ritualnya. Temuan tersebut membuktikan bahwa penanganan pandemi tidak lepas dari dukun dan pemikiran irasional. Linus Suryadi (1993) dalam buku *Fenomena Kosmogoni Jawa* menerangkan kekayaan budaya masyarakat Jawa berupa tradisi dan mitos. Manusia Jawa sukar mengabaikan dimensi spritual Jawa, meski sering dituding klenik dalam menjalankan praktik budaya.

James Danandjaja (1997) dalam pustaka *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain* mengungkapkan produk pemikiran irasional di Jawa seperti mitos atau folklor. Folklor merupakan sebagian kebudayaan suatu kolektif, yang tersebar dan diwariskan turun-temurun, di antara kolektif apa saja, secara tradisional dalam versi yang berbeda, baik dalam bentuk lisan maupun contoh yang disertai gerak isyarat atau alat pengingat. Suyami (2001) dalam buku *Serat Dewi Sri* menguraikan aneka cerita irasional Dewi Sri yang tersebar di beberapa tempat di Jawa yang bertemali dengan kehidupan petani. Ternyata mitos Dewi Sri tidak hanya dimiliki oleh masyarakat *Vorstenlanden*, namun di Sunda juga dijumpai kisah serupa dengan nama *pepunden* yang berbeda. Biasanya ada pesan arif yang ter-

sirat dalam folklor yang hidup berabad lamanya itu.

Konsep pertama yang dipakai, yaitu “perilaku irasional”. Menurut sosiolog Selo Soemardjan (1996), demi menghindari salah paham, perlu dikemukakan bahwa istilah irasionalisme dan rasionalisme sama sekali tidak mengandung penilaian buruk dan baik, ataupun salah dan benar. Istilah itu hanya dimaksudkan untuk menunjukkan secara objektif sampai berapa jauh manusia menggunakan daya pikir dan logikanya dibandingkan dengan perasaan atau daya percayanya dalam proses membentuk persepsi mengenai lingkungan sosial, lingkungan alam, dan lingkungan spiritualnya. Makin besar kecenderungan manusia menggunakan perasaan dan daya percayanya, makin tinggi kadar irasionalismenya. Sebaliknya, kian kuat manusia memakai logikanya, kian tinggi kadar rasionalismenya.

Konsep berikutnya ialah “*gugon tuhon*” atau *bijgeloof* (Belanda) atau *superstition* (Inggris). Menurut R.S. Subalidinata (1968), “*gugon tuhon*” merupakan simbol masyarakat Jawa yang dikemas dalam suatu aturan dan larangan bertujuan menjaga dan menjunjung etika moralis. Ada beberapa jenis *gugon tuhon* yang hidup, contohnya *tuhon pitutur sinandi* berupa ungkapan yang disamakan. Bila sudah dikatakan tidak baik atau *ora ilok*, maka orang takut melanggar. Tujuannya untuk ajaran (*kawruh*) agar tidak melakukan tindakan menyimpang dari larangan itu.

Tulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah. (1) Langkah pertama yang dilakukan ialah heuristik atau pencarian sumber. Data sezaman yang pakai surat kabar *Bromartani* yang banyak memberitakan peristiwa *pageblug* dan kejadian unik lain di *Vorstenlanden* abad XIX. Selain itu, tulisan ini juga memanfaatkan naskah lama seperti *Serat Jatna Hiswara* dan *Babad Langenharjo* yang dikarang pujangga istana Kasunanan. (2) Langkah kedua ialah kritik sumber atau verifikasi guna mencermati keaslian sumber serta melihat kredibilitas sumber. (3) Langkah ketiga ialah interpretasi, yakni menganalisis fakta-fakta sejarah. Langkah terakhir adalah (4) historiografi, yakni upaya menuliskan hasil riset dengan memperhatikan aspek kronologis dan logika historis (Kuntowijoyo, 1995: 99).

## A. MUSABAB PAGEBLUG

Dalam sejarah tanah Jawa, penyakit menular tidak bisa dipandang sembarangan. Masyarakat seringkali dibuat kelimpungan oleh wabah penyakit karena pada saat itu jarang ada obatnya dan daya ekonomi lemah untuk mengakses pelayanan kesehatan. Bahkan, akibat tidak tertanganinya si penderita, akhirnya menimbulkan *pageblug* dan berujung kematian. Merujuk hasil studi Boomgaard (1987: 50), angka kematian di Jawa selama 1820-1880 tidak hanya disebabkan oleh perang Jawa, kelaparan, serta kegagalan panen, tetapi juga dipicu oleh *pageblug* dengan diawali merebaknya suatu penyakit.

**Tabel 1.** Angka Kematian yang Menimpa Masyarakat Jawa

| Tahun     | Jumlah Kematian | Penyebab Utama  |
|-----------|-----------------|---|
| 1825-1890 | 125.000         | Kolera  |
| 1825-1890 | 200.000         | Perang Jawa   |
| 1834-1835 | 140.000         | Cacar, kolera, migrasi, gagal panen akibat sistem tanam paksa |
| 1846-1851 | 600.000         | Demam, tipus, gagal panen, kelaparan, kolera, cacar           |
| 1864-1865 | 125.000         | Kolera, malaria   |
| 1874-1875 | 175.000         | Kolera, malaria   |
| 1880      | 100.000         | Malaria, gagal panen  |

Sumber: Peter Boomgaard, 1987, “Morbidity and Mortality in Java, 1820-1880: Changing Pattern of Disease and Death” dalam Norman G. Owen (ed) *Death and Disease in Southeast Asia: Explorations in Social, Medical, and Demographic History*. Singapore: Oxford University Press.

Tabel 1 menunjukkan penyakit kolera menempati urutan pertama, disusul malaria, cacar, dan tipus. Dari tahun ke tahun, kolera acap menjadi momok bagi masyarakat Jawa, hingga menyumbang angka kematian ratusan ribu jiwa. Menurut Carey (2012: 580), mula-mula penyakit kolera Asia dibawa oleh pelaut dari Pinang dan Melaka yang berniaga di Semarang. Pada pengujung 1819 wabah itu dengan cepat merebak di sepanjang pantai utara Jawa. Laiknya penyebaran virus korona sekarang yang terjadi lintas negara, pada saat itu orang asing melalui jalur pelabuhan tanpa disadari turut serta menyebarkan kolera. Pada Juni 1821, kolera sudah menyerang daerah se-

latan, seperti Pacitan. Wabah ini menelan banyak korban penduduk yang sebelumnya sudah lemah. Dalam tulisan itu digambarkan bahwa saban hari petani harus diangkat dari perkebunan lada dan kopi lantaran nyawanya melayang akibat kehabisan tenaga atau demam. Kolera menghantam masyarakat Jawa yang tidak memiliki kekebalan alami terhadap penyakit tersebut. Kawasan Surakarta tidak luput dari amukan kolera. Korban berjatuh, bahkan hanya beberapa jam sakit dan sebagian malah langsung tutup usia di tempat seolah-olah terkena pendarahan otak.

Pandemi kolera dan perkara kematian menyisakan cerita memilukan bagi salah satu keluarga priayi di Surakarta. Ibaratnya, sudah jatuh tertimpa tangga. Dia menjadi korban penipuan oleh seorang dukun. Dibanding mantri maupun dokter, orang Jawa umumnya dekat dengan dukun dalam penanganan penyakit (Safitri, 2019: 477--480). *Bromartani* edisi 16 Juni 1869 menurunkan berita bahwa priayi di Solo bernama Ngabehi Suradinata terpukul lantaran anak-anaknya meninggal dunia akibat terserang penyakit kolera pada Mei 1869. Kehilangan buah hati kesayangan lebih dari satu, jelas membuatnya lingsung serta tertekan jiwanya. Dia merasa gagal menyelamatkan para putranya dari amukan kolera. Saking cinta berat terhadap anak-anak, dalam kondisi stres Suradinata mencari dukun ampuh yang sanggup menghidupkan puteranya yang telah mati dan dikubur itu. Bertemulah dia dengan sang dukun, kemudian berdialog mengutarakan maksudnya. "Orang pintar" ini bersedia mengembalikan nyawa anak jikalau permintaannya dituruti, yaitu memberikan uang sebesar 1000 rupiah. Uang tersebut sebagai penebus nyawa buah hatinya. Pada saat itu, uang 1000 rupiah tentu sangat besar nilainya.

Dalam pikiran kalut, Suradinata terkena bujuk rayu dan bersedia memberikan uang ke dukun tadi. Di hadapan calon korban, dukun menjelaskan bahwa puteranya yang dikebumikan di Desa Ngenden (Banaran, Grogol) digali. Mayat bocah lantas hendak "digarap" dan genap 40 hari akan hidup kembali. Kabar tersebut ternyata tersiar ke publik dari mulut ke mulut. Belum genap 40 hari dukun terbukti mampu menghidupkan mayat. Akhirnya, banyak orang tua membawa anaknya ke kediaman dukun ini.

Jurnalis menyatakan, apabila kehebatan dukun ini terbukti, maka semakin banyak warga yang bakal memohon bantuan menghidupkan anak-anak yang mati akibat penyakit.

Realitas yang sungguh getir ini dimaklumi karena Solo dan sekitarnya detik itu diguncang pageblug yang berujung pada kematian orang-orang yang dicintai. Maka dari itu, dalam kepanikan pelarian ke dukun untuk mengembalikan nyawa korban dipandang jalan terakhir yang mesti dicoba, sekalipun masuk kategori tindakan irasional dan mustahil. Paranormal jelas melakukan penipuan karena tidak ada manusia yang mampu menghidupkan jasad orang yang sudah tidak bernyawa.

Kematian akibat amukan penyakit menular terus menghantui masyarakat sepanjang abad XIX, bahkan sampai awal abad XX. Kondisi menyedihkan ini lantas mendorong mantri guru Mangoensisastra berduet dengan Kadarlamet menulis buku *Panoentoen Moelang Ngelmoe Kawarasan* (1938) sebagai acuan para siswa di sekolah memahami aneka penyakit, termasuk praktik hidup sehat. Dalam pustaka itu, mereka dipahamkan mengenai kolera yang mudah menular, yang juga memicu ledakan pandemi. Berikut ini kutipan penjelasannya:

*"Lelara kolerah ikoe lelara kang gampang banget panoeare, lan gampang banget ndadekake pagebloeg. Kang ndjalari lelara kolerah ikoe widji lelara kolerah kang tangkar-toemangkare rikat banget. Ing dalem sadjam wis bisa dadi ewon. Loemeboene ing badaning manoesa kaja toemoelare lelara typhus, jaikoe metoe ing tjangkem, katoet ing pepanganan oetawa omben-omben. Wong kang katjandak ing lara ikoe sakawit badane krasa ora kapenak, kerep beboewang sarta moetah-moetah; wongedadi koeroe, tjahjane poetjet, koelite dadi semoe biroe, sesoekere tjoewer kaja tadjin. Ing sesoeker lan oetah-oetahane maoe akeh widjine lelara kang katoet motoe. Sing akeh-akeh wong sing nandang lara ikoe pada tiwas. Oepama Wong kang nandang lara kolerah ikoe bisa mari, ing sadjroning badane sok isih akeh widjine lelara, kang oega bisa katoet ing sesoeker nalika wong iki beboewang. Wong mangkono ikoe mbebajani banget marang lijan. Rekadja moerih adja nganti katjandak ing lelara ikoe pada bae karo pandjaga toemrap panoelaring lelara typhus kang kaseboet ing ngarep."*

Keterangan berbahasa Jawa di atas mengungkapkan betapa penyakit kolera mudah sekali menular dan gampang menimbulkan pageblug. Penyebab kolera ialah bakteri atau bibit penyakit yang berkembang biak cepat sekali. Dalam waktu satu jam, jumlah penderitanya menjadi ribuan. Bakteri masuk ke tubuh manusia seperti penularan penyakit tipus, yaitu keluar dari mulut, terbawa makanan maupun minuman. Orang yang terkena kolera dipastikan tubuhnya tidak enak, sering berak dan muntah-muntah. Ciri penderita kolera ialah badannya kurus, wajahnya memucat, kulitnya berwarna agak kebiruan, serta tinjanya cair seperti air beras. Pada tinja dan isi perut yang dimuntahkan itu banyak sekali benih kolera yang terbawa keluar. Mayoritas pengidap kolera berakhir pada kematian. Seumpama penderita kolera bisa sembuh, namun di badannya sangat mungkin masih banyak bibit penyakit, yang bisa terbawa kotoran sewaktu buang air besar. Penderita kolera membahayakan orang lain yang sehat, sebab berpotensi tertular. Maka, Mangoensisastra bersama sahabatnya menegaskan kepada pembaca jangan sampai terkena kolera.

Bukan hanya perilaku bersih manusia dan lingkungan jorok, faktor cuaca, serta kondisi alam sedari lama dituding sebagai biang keladi pengundang penyakit yang mengintai manusia. Redaktur *Bromartani* edisi 21 September 1865 membagikan informasi pokok perihal pertalian antara cuaca dengan potensi kemunculan kolera. Dari wilayah perkotaan Surakarta dikabarkan ke khalayak bahwa saat hari memasuki malam, masyarakat setempat merasakan hawa di luar dingin sekali. Sementara tatkala siang hari, cuaca terasa panas menyengat. Mereka tidak meragukan keadaan tersebut memicu timbulnya aneka penyakit. Adapun jenis penyakit yang acap datang ialah meriang, berak darah (*wawratan rah*), serta kolera. Keterangan yang patut digarisbawahi bahwa kolera menerjang hanya dalam tempo singkat. Kehadirannya diawali dengan awetnya hawa dingin dan panas dan sebaliknya panas dan dingin.

Kabar dari sumber sezaman ini tidak saja dimaknai sekadar asupan bacaan untuk kaum melek literasi seperti golongan bangsawan dan komunitas Eropa, tetapi juga alarm peringatan

bagi penduduk kota untuk bersiap menyambut datangnya penyakit yang bisa memakan korban nyawa sewaktu-waktu. Informasi penting yang dikemukakan jurnalis di atas rupanya selaras dengan keterangan pembaca yang terpacak pada koran yang sama dalam edisi lain. Hampir 3 dekade lebih, aspek kausalitas kondisi alam dengan timbulnya penyakit tetap menjadi topik obrolan, dan unsur itu makin sulit terbantahkan pada abad XIX.

*Bromartani* edisi 23 Juni 1891 mewadahi curahan kegelisahan seorang pelanggan bahwa di daerah yang ditinggalinya sudah agak lama tidak turun rintik hujan. Musim kemarau melambat bergeser ke musim penghujan seperti yang dirindukan masyarakat. Tampaknya alam tengah memasuki masa transisi yang oleh orang Jawa disebut *mangsa bediding*. Hal tersebut ditandai cuaca kala siang hari begitu menyengat, lalu malamnya terasa dingin menulung. Berkaca dari kondisi ini dan pengalaman yang sudah-sudah, kolera mudah menerjang penduduk. Hanya saja, pelanggan yang menuliskan keprihatinannya itu *emoh* menciptakan kekhawatiran berlebihan dalam diri para pembaca. Karena itu, tulisan tersebut segera diimbui keterangan bahwa “... *boten patos agegirisi, jalaran titiyang ingkang sami katarajang sasakit wau, kathah ingkang waluya awis ingkang tiwas.*” Dikatakannya, mereka yang terkena kolera banyak yang sembuh, jarang meninggal dunia. Padahal, kenyataan sejarah berkata lain: ratusan orang di kota kerajaan maupun daerah yang menjadi korban kolera sampai meninggal dunia.

Selain kematian yang tersaji pada tabel 1, fakta itu terekam dalam *Bromartani* edisi 7 Januari 1869. Diberitakan bahwa pada permulaan tahun 1869 amukan kolera yang semula melanda daerah pusat pemerintahan kerajaan Surakarta mulai mereda. Akan tetapi, giliran masyarakat di kawasan pedesaan sekitar kerajaan diterjang kolera tanpa ampun. Disebutkan, di Desa Sengon (Prambanan, Klaten) banyak lelaki yang meninggal dunia akibat tubuhnya tidak kuasa melawan wabah mematikan itu. Hanya tinggal seorang pemuda yang berhasil kembali ke desa membawa obat berupa delima putih guna menyembuhkan penderita kolera. “...*jampi dalima pethak punika*



*sampun kajampeken dhateng tiyang sakit kolera kathahipun 11 iji, ingkang gesang 10 pejah satunggil,”* tulis jurnalis. Dipaparkan bahwa sebanyak 11 orang mengikuti proses pengobatan. Hasilnya adalah 10 orang sembuh dan 1 orang tidak terselamatkan jiwanya.

Secarik fakta sejarah ini dapat membuka penafsiran bahwa obat kolera yang dikonsumsi para penderita saat itu tidak diproduksi secara massal oleh lembaga farmasi atau laboratorium. Penduduk satu desa juga tidak ditangani langsung oleh dokter maupun mantri meski kondisinya terbilang sudah level *pageblug*. Mereka mengandalkan kemampuan dirinya sendiri untuk mandiri serta bergerak berburu ramuan penyembuh. Delima putih juga tidak dibeli di “kamar jampi” alias apotek, melainkan di pasar ataupun memetik di *pategalan* yang berada di luar kampung. Bahan tersebut dapat pula dikatakan langka lantaran warga harus keluar desa dan meninggalkan para korban guna memperoleh delima putih.

Menjelang akhir tahun 1881, mencuat kembali kekhawatiran publik atas musim panas yang berkepanjangan. Hati mereka dicemaskan oleh dampak buruk atas kondisi alam yang tidak bersahabat itu, seperti *larang pangan* dan rumah mudah dilalap api. Berkaca dari pengalaman puluhan tahun sebelumnya, dalam benak mereka terbayang, yaitu “*ingkang mupakat sumelang bilih jiwaniipun katrajang sawan ingkang tembung wlandi kwastanan kolera*”. Artinya, mereka takut dirinya terkena suatu penyakit yang dinamai kolera oleh orang Belanda. Kecemasan terhadap efek buruk tersebut seringkali diluapkan dan tuturkan masyarakat dalam perkumpulan sosial. Kendati begitu, dirasa yang masih aman adalah terhindar dari *larang pangan* lantaran persediaan beras masih melimpah dan ekonomi masyarakat cukup stabil atau tidak dikhawatirkan memasuki masa krisis. Dihimbau pula supaya menjauhi gaya hidup boros, belanja barang dengan harga secukupnya saja. Sebagai contoh, memakai busana jarik berharga murah (*Bromartani*, 15 Desember 1881).

Eksplanasi sejumlah fakta dari masa lalu itu ialah selain korela mengincar nyawa penduduk sebagaikses dari musim panas yang kelewat lama, *pageblug* yang terjadi sangat lumrah

diikuti fenomena *larang pangan* atau *paceklik*. Gambaran menakutkan ini bisa dimengerti lantaran musim kemarau berkepanjangan menyebabkan kekeringan dan penduduk mengalami gagal panen. Di samping itu, petani tidak bisa memproduksi bahan makanan gara-gara dilanda *pageblug*. Dengan begitu, bencana kelaparan dan *pageblug* berpeluang datang bersamaan, sehingga menyebabkan situasi semakin kacau dan banyak korban berjatuhan.

## **B. GUGON TUHON DAN PERILAKU IRASIONAL**

Tatkala pandemi virus korona menghantam Indonesia dan ramai diperbincangkan pada awal Maret 2020, masyarakat Yogyakarta yang tinggal di sekitar Kali Code pada bulan April mengaku melihat komet atau lintang kemukus. Timbul penafsiran bahwa ekor api yang *cemlorot* (melesat) di langit merupakan pertanda bakal terjadi hal buruk atau *pageblug*. Mereka percaya *lintang kemukus* menampakkan diri mengisyaratkan datangnya wabah Covid-19 menyebabkan *pageblug* menimpa rakyat Indonesia dan dunia internasional. Media massa dan media *daring* pun ramai memberitakan fenomena komet di langit Yogyakarta. Kasus unik ini membuka ingatan kolektif masyarakat Jawa yang berkarib dengan *gugon tuhon* perihal *lintang kemukus*.

Abad XIX, masyarakat Surakarta juga digemparkan oleh kemunculan *lintang kemukus* yang dimaknai sebagai pertanda akan terjadi sesuatu yang buruk. Kehadiran bintang ini menyita perhatian publik, tanpa kecuali juru warta. Pasalnya, sebelumnya penduduk kota turut merasakan kegembiraan atas perayaan petinggi istana Jawa. Akan tetapi, tidak berselang lama, mereka dikejutkan oleh penampakan *lintang kemukus*. Terbukti, sesudah warga menyaksikan lintang itu, dua jam berikutnya bencana banjir datang menghantam kota dan diikuti penyakit.

Pewarta mengabarkan urutan peristiwanya. Pada 16 Juni 1882 di Pura Mangkunegaran digelar *pesamuan agung* untuk merayakan Gusti Mangkunegara V naik tahta. Tata upacara tidak berubah, seperti tahun-tahun sebelumnya. Tiga hari kemudian, 19 Juni 1882, penduduk Surakarta dikagetkan oleh arus banjir yang datang secara

mendadak dari luapan sungai. Perkampungan di sekitar Batangan dan Limolasan hingga ke timur terendam air Bengawan Solo mulai jam 09.00, dan perlahan surut jam 10.00. Warga setempat kelabakan karena tanpa persiapan dan tidak menyangka banjir menggenangi permukiman secepat itu (*Bromartani*, 22 Juni 1882). Kota Solo memang daerah langganan banjir, hampir setiap tahun bisa dipastikan kedatangan “tamu” tidak diundang itu. Selain wilayahnya cekung, kota Solo juga dikelilingi beberapa anak sungai atau *kali*. Sebagai contoh, *kali Pepe*, *kali Jenes*, *kali Bathangan*, *kali Larangan*, *kali Premulung*, dan *kali Wingko*. Untuk *kali Anyar* yang berada di bagian utara kota, baru dibangun dekade kedua abad XX (*Priyatmoko*, 2017: 60--65).

Digambarkan pula begitu menyedihkan kehidupan para korban banjir detik itu. Mereka hanya menggantungkan uluran tangan dari Kanjeng Pangeran Arya Surya Atmaja, seorang aristokrat yang dikenal dermawan. Dia tanpa pamrih, bersedia menyambangi korban banjir dengan naik perahu seraya membagikan nasi kepada warga yang tubuhnya terendam air Bengawan. Mereka mengucapkan puji syukur kepada Allah atas pemberian bantuan ini. Pada satu pihak, komunitas Tionghoa yang bermukim di Ketandan, Coyudan, dan Tambak Segaran tampak riang. Pasaunya, luapan air sungai dan hujan yang melebat itu bersamaan dengan perayaan Imlek yang identik dengan hujan dan berkah.

Selepas banjir surut, sebagian penghuni kota berkumpul dan berbincang mengenai peristiwa bencana yang datang tiba-tiba itu. Dalam forum informal itu, menguat *gugon tuhon* bahwa terdapat kejadian pada pukul 7.00 WIB di langit sebelah barat terlihat *lintang kemukus*. “...wanci jam pitu ing dirgantara sisih kilen katingal wonten lintang kumukus para tiyang ingkang sami angiling paseban pasetan andher wonten satengahing alun-alun aningali lintang kumukus wahu,” tulis jurnalis *Bromartani*. Masyarakat berjubel di Paseban hingga tengah alun-alun utara guna menjawab rasa penasaran wujud *lintang kemukus*. Mereka saling berbisik, ada yang menengarai *lintang* tersebut bertemali dengan *pageblug*. Guna menolak *pageblug*, warga diimbau membuat *jenang baro-baro*. Sesaji tersebut disertai pula nasi

pulen berlauk ayam betina berwarna putih polos untuk dipersembahkan kepada penjaga bumi.

Seketika itu, imbauan yang digulirkan dalam kerumunan ditanggapi ketus oleh pihak yang tidak percaya *gugon tuhon*. Dalam pemahaman yang lebih rasional, sesaji diadakan hanya untuk menyembah berhala. Tanpa basa-basi, pihak yang tidak percaya *gugon tuhon* menyatakan bahwa para pengimbau sebetulnya orang yang ingin mengenyangkan perut atau menggemukakan diri melalui tetangga yang diminta mengolah sesaji komplit. Alurnya setelah disediakan sesaji, biasanya digelar upacara selamat atau tolak bala. Para warga berkumpul mendoakan sesaji istimewa tersebut, lalu disantap bersama. Jika imbauan tidak logis ini terdengar di telinga pemuka agama, hal itu bakal dinilai sekadar akal-akalan. Mendengar kritik itu, tidak berapa lama orang-orang yang berkumpul tadi membubarkan diri (*Bromartani*, 22 Juni 1882).

Perlu dianalisis mengenai kepercayaan masyarakat Jawa terhadap *lintang kemukus*. Menurut Endraswara dalam artikel “Memahami Metafisika *Lintang Kemukus*” (*Kompas*, 27 April 2020) dijelaskan bahwa *lintang kemukus* hidup lama dalam alam pikiran metafisis Jawa. Kakek moyang selepas menyaksikan kemunculan *lintang kemukus* menjelang pagi, lekas *mewanti-wanti* supaya bersikap waspada, barangkali malapetaka bakal datang. Salah satu kearifan lokal manusia Jawa dalam mencegah *memala* (bencana) ialah isyarat munculnya *lintang kemukus*. Dalam jagad astronomi, *lintang* ini disebut komet. Secara etimologi, kata *komet* berasal dari bahasa Latin *cometa* atau *cometes*, yang berarti ‘berambut panjang.’

Ditelisik dari segi bahasa, *lintang kemukus* berasal dari bahasa Jawa, yakni *kukus*, yang berarti ‘asap.’ Bila terdapat orang yang mati, digelar praktik budaya seperti dupa dibakar sehingga mengeluarkan aroma yang khas dari asap itu. Makna lain *kukus* adalah tanda-tanda, bakal kembali ke tanah, yaitu mati. *Ngelmu titen* juga menjadi sarana manusia Jawa membaca fenomena yang terjadi di sekitarnya. Ilmu tersebut berangkat dari pengalaman empiris yang berkali ulang. Pembacaan atas *lintang kemukus* sebagai petunjuk hadirnya zaman susah (*pageblug*) di-

dasarkan atas pengalaman fenomenologis yang telah terbukti itu.

Pada abad XIX, pujangga istana Kasunanan, Rng. Ranggawarsita juga pernah menyuratkan terminologi “*lintang kemukus*” dalam jangka Jaya Baya yang futuristik. Berikut ini bunyinya: “*Sadurunge ana tetenger lintang kemukus, saka arah kidul wetan, lawase pitung wengi, parak esuk bener ilange, bethara Surya jumedhul bebarengan zaman sengsara am-mungkur prihatine, iku tandhane Bathara Indra tumurun mbebanu titah*”. Terjemahan bebasnya: *sebelumnya muncul isyarat gaib berwujud lintang kemukus dari arah tenggara, selama tujuh malam, hilang pagi hari tatkala sang surya (mentari) datang, maka kesengsaraan manusia bakal berakhir saat Batara Indra hadir membantu.*

Keterangan itu menegaskan bahwa kehadiran *pageblug* sangat erat dengan *gugon tuhon lintang kemukus*. Hal itu tidak hanya hidup dalam tradisi lisan, bahkan koran sezaman pun menceritakan kejadian itu. Di samping melihat pertanda *lintang kemukus*, masyarakat tempo dulu percaya *gugon tuhon* bahwa datangnya wabah penyakit berkaitan dengan setan dan *lampor*. Hantu yang berwujud obor dan suara bergemuruh itu diyakini sebagai petunjuk pembawa (datangnya) penyakit.

Koran *Bromartani* yang bermarkas di Surakarta menurunkan kabar bahwa di Ambarawa saat itu digegerkan *pageblug* kolera. Bisa dibayangkan betapa mencekamnya suasana kota kecil tersebut karena terdapat ratusan orang yang meninggal dunia akibat tidak mampu melewati *pageblug*. Kemudian, siang hari hawanya begitu panas. Guna membendung laju penyakit kian mewabah, wedana setempat menitahkan masyarakat yang berdiam di kota untuk rajin menyirami jalan besar dan jalan kampung setiap pagi dan sore. Selain itu, halaman dan lantai dalam rumah juga dibasahi dengan air supaya dingin. Dihimbau pula sampah yang berserakan di jalan maupun pekarangan segera dibakar atau ditimbun tanah agar bersih, tidak mengundang bibit penyakit.

Mulai hari Kamis, langit di atas Ambarawa mendung. Rinai hujan yang ditunggu-tunggu masyarakat datang juga. Hampir bisa dipastikan *saban* sore langit mendung, lalu tidak lama kemudian rintik hujan jatuh. *Kahanan* yang

sejuk tersebut setidaknya melatari berkurangnya penyakit. Penduduk juga girang mendapati kondisi seperti ini, lantas bersyukur kepada Tuhan agar diberi kesehatan. Penulis berpandangan lain bahwa datangnya penyakit bukan dari hawa panas, juga salah mengamini *gugon tuhon* yang menyebut penyakit merupakan hasil ulah setan. Menurutnya, *lelembut* juga ciptaan Tuhan, tidak benar jika dikatakan *lelembut* dapat membunuh manusia. Pada saat itu juga berkembang mitos bahwa orang yang tidak kuat agamanya serta tidak percaya Tuhan, waktu meninggal dibawa setan.

Selain itu, ada *gugon tuhon* perihal *lampor*. “*Kala ing dinten salasa pon tanggal kaping 18 wulan Ojtober 1881 punika ing kitha bahrwa wanijam stengah sanga, kadhatengan lampor, o katingal an saking sajawining kitha kados obor pinten-pinten ewu pating clorot tuwin suwante-nipun gumrebeg kados suwaraning karetakang langkung kathah,*” tulis jurnalis. Dipaparkan bahwa pada Selasa Pon, 18 Oktober 1881 pukul 08.30 di dalam kota kedatangan *lampor*. Dari luar kota, *lampor* terlihat seperti obor yang berjumlah ribuan. Nyala apinya *cemlorot* dan suaranya gemuruh. Mendapati hal itu, warga segera ke luar rumah lantaran panik. Orang tua dan para remaja menangis, azan, dan zikir. Ada juga yang memukuli pagar hingga menimbulkan kegaduhan. Di Pecinan, warga turut membunyikan mercon begitu ramai sampai pukul 22.00. Menurut warga setempat, *lampor* yang membawa obor itu adalah arak-arakan pengantin Nyai Rara Kidul (sering disebut pula Ratu Kidul). Penulis yang bernama Amongwisastra dari Ketandan ini berpikir bahwa aneka *gugon tuhon* itu tidak masuk akal sebab selama hidupnya ia belum pernah bertemu setan (*Bromartani*, 10 November 1881).

Sebulan sebelumnya, di kalangan masyarakat *Vorstenlanden* sudah meributkan relasi antara *gugon tuhon* dengan penyakit yang mewabah. Silang pendapat mengenai kasus *gugon tuhon* sampai menyita perhatian barisan juru warta. Jurnalis *Bromartani* dalam edisi 20 Oktober 1881 menginformasikan masyarakat Jawa kala itu banyak yang salah kaprah memahami kemunculan sakit kolera. Hidup suatu pemikiran aneh bahwa kolera merupakan ulah setan sebagai petunjuk atau pertanda akan terjadi *pageblug*.

Karena itulah, orang Jawa yang tidak hati-hati atau mengabaikan petunjuk itu bakal mengalami penderitaan atau bernasib sengsara. Juru warta koran berbahasa Jawa itu berpendapat, orang yang berpengetahuan supaya memahami kenyataan ini secara arif bahwa mereka yang menyakini kolera dibawa oleh setan itu belum pernah mencecap pengetahuan bangsa Belanda (rasional).

Terlepas dari itu, didapati suatu realitas di tengah masyarakat yang memicu emosi, yaitu orang Jawa berseloroh perihal petunjuk atau pertanda itu, lebih baik berpasrah kepada Gusti Allah. Bila sudah takdirnya manusia meninggal, pastinya akan mati. Pemikiran semacam itu ditentang sang jurnalis lantaran Tuhan belum memutuskan kepastian (manusia mati) ataupun takdir karena usahanya belum tuntas. Karena itu, manusia perlu berupaya lebih keras dan tidak gampang putus asa, terutama mencari cara agar orang luput dari serangan penyakit ataupun saat mengobatinya. Disinggung pula perilaku aneh (irasional) orang Jawa semasa *pageblug* yang tidak mau tidur di ranjang. Mereka bersikeras memilih tidur di atas tanah tanpa beralas tikar. Dalam benaknya, tumbuh harapan bahwa setan yang membawa penyakit kolera tidak bakal menyerang tubuh manusia, melainkan menyasar binatang yang turut tidur di tanah. Pemikiran atau perilaku yang terbilang aneh ini tidak menjauhkan dirinya dari kolera, tetapi justru mengundang penyakit itu.

Kritik pedas di atas tidak datang tiba-tiba. Tampaknya kristalisasi sikap media hendak mengkritisi perilaku irasional sekaligus cara pandang masyarakat terhadap wabah penyakit. Sebagaimana berita dalam *Bromartani* edisi 13 Oktober 1881, masyarakat Surakarta terasa miris mendengar kabar perihal *pageblug* kolera yang disikapi dengan aneka tindakan, baik rasional maupun irasional. Bagi yang tidak percaya *gugon tuhon* atau perilaku yang tidak masuk akal, tentunya memilih berhati-hati melakukan tindakan untuk menjauhkan diri dari penyakit kolera. Mereka keluar dari *gugon tuhon* kendati tindakan atau pemikiran irasional itu seperti petunjuk dari ahlinya yang berfaedah besar.

Bukti historis perilaku irasional masyarakat dapat ditengok dalam pemberitaan *Bromartani*

edisi 27 Oktober 1881. Contoh nyata dari tindakan tidak logis itu adalah malam hari orang ramai-ramai tidur di tanah tanpa alas agar tidak terkena penyakit yang dibawa oleh setan. Dalam angannya, *lelembut* tidak akan melihat manusia yang tidur di tanah tersebut. Belum hilang keheranannya dengan *gugon tuhon* tidur di tanah, dijumpainya beberapa orang yang tinggal di kampung Jagalan bertingkah aneh. Jagalan merupakan daerah di sisi timur Pasar Gedhe, yang sering digunakan untuk tempat menyembelih (*njagal*) sapi dan babi. Manakala bertandang ke rumah sahabatnya di Jagalan, jurnalis melewati gang kecil yang berada di dekat jembatan. Terlihat laki-laki maupun perempuan mencoreti wajahnya dengan arang dan kapur sirih seraya membawa pisau berukuran panjang. Bagi yang perempuan, mereka berdandan seperti setan perempuan.

Tampilan manusia aneh itu jelas mengejutkan orang yang memergokinya. Tiba-tiba pewarta ini teringat *gugon tuhon* bahwa apa yang dilihatnya (seperti) buaya, bukan manusia, barangkali utusan Ratu Kidul yang bersalin rupa menjadi setan. Setelah didekati dan diseksamai, ternyata bukan setan ataupun buaya, melainkan manusia. Tanpa berpikir panjang, juru warta menilai orang itu gila. Di jalan besar, dia diberi tahu sahabatnya tentang beredarnya mitos bahwa hari ini Ratu Kidul bersama prajurit dan diikuti para *lelembut* bertandang ke Isana Kasunanan. Dengan mencorengi wajah, ratu *lelembut* yang bertahta di Pantai Selatan tersebut tidak mengganggu dirinya, tidak mengambil nyawanya, menjauhkannya dari penyakit, dan tidak mencekik lehernya dengan tali. Mendengar penjelasan dari kawannya itu, sang juru warta tertawa terbahak-bahak karena dia tidak bisa memahami aksi gila itu dengan nalar sehat walaupun pada saat itu menguat mitos relasi harmonis antara raja keturunan Mataram Islam dengan Ratu Kidul.

*Vorstenlanden* dikenal sebagai pusatnya kegiatan islamisasi dengan bukti keberadaan kerajaan dinasti Mataram Islam, yaitu Keraton Kasunanan, Kasultanan, Mangkunegaran, dan Paku Alaman. Selain masjid *gedhe* sebagai infrastruktur penting menyebarluaskan agama Islam, Keraton Kasunanan Surakarta dan Keraton Kasultanan Yogyakarta juga memiliki *abdi dalem*

alim ulama yang bercokol di kampung Kauman. Kehidupan sosial keagamaan sangat dinamis. Dengan kenyataan itu, menarik mencermati sikap kritis terhadap suburnya *gugon tuhon* yang coba dibenturkan dengan ajaran Islam.

Sebagai contoh, dalam *Bromartani* edisi 16 Nopember 1882, muncul kritik pedas terhadap cara berpikir manusia Jawa yang terpengaruh kuat terhadap *gugon tuhon*, sekalipun agama yang dianutnya adalah Islam. Dipersoalkan agama yang dipeluknya itu berasal dari tanah Arab, sedangkan orang Arab tidak mengajarkan *gugon tuhon*. Tampaknya orang Jawa melestarikan *gugon tuhon* yang berasal dari pemahaman tanah Jawa adalah tempat para dewa. Mereka bisa mengadakan yang tiada. Penulis berpendapat bahwa bangsa besar tidak bercirikan percaya *gugon tuhon*. Hanya mereka yang hidup sebagai bangsa kecil yang merawat *gugon tuhon*, terlebih lagi orang yang dekat kawasan hutan dan pegunungan, yang “jauh dari ratu dekat batu.” “...*tiyang pangalasan pagunungan ingkang tebih ratu celak watu,*” ujarnya.

*Gugon tuhon* yang baru saja mengemuka di tengah masyarakat Surakarta, yaitu lurah Sudikrama di Desa Majan, Kartasura terkena penyakit kolera. Sewaktu mengerang kesakitan, si lurah dibekali pedang oleh saudaranya. Para kerabatnya berpikir ganjil bahwa yang sakit ini sedang bertarung melawan setan supaya segera sehat. Tidak berapa lama, muncul tuan G.A Breton menolong lurah. Diberinya obat untuk diminum, yang istilah Belanda disebut anti-kolorine. Penulis setengah menggugat, mengapa manusia Jawa tidak terpikir apabila kolera bagian dari ulah setan, justru bisa diatasi dengan obat anti-kolorine. Padahal, orang Jawa dapat berkisah jikalau setan bisa berkuasa, namun sampai kalah melawan anti-kolorine.

Saat itu, pengobatan kolera atau mengusir *pageblug* tidak hanya mengandalkan pusaka, tetapi juga memanfaatkan unsur alam yang ditemalikan dengan kemampuan tokoh atau makhluk hidup yang dibungkus dalam *gugon tuhon*. Masyarakat Jawa lebih percaya dan hatinya merasa mantap dengan jamu yang berasal dari bahan lokal ketimbang obat yang dibeli di warung (Priyatmoko, 2011: 15). Hal itu bisa dibuktikan dengan adanya ratusan jamu berikut bahannya yang terekam dalam *Serat Centhini*, yang disusun

oleh pujangga istana Kasunanan tahun 1814-1823 (Priyatmoko dkk, 2019: 10).

Contoh yang menarik adalah obat berbahan sukut teki (*Cyperus rotundus*), yang berjejalin dengan folklor tokoh Sunan Lawu yang menunggu Gunung Lawu, timur Keraton Kasunanan Surakarta. Tahun 1869, diberitakan perihal jamu kolera ala Jawa yang begitu sederhana. Obat kolera khas Jawa yang sudah diterangkan tuan Korper itu mencuri perhatian masyarakat. Barangkali jamu kolera yang dihasilkan dari pengetahuan Jawa ini dapat pula dipakai mengobati penderita kolera.

Dijelaskan bahwa obat penyembuh kolera ini berbahan selebar rumput teki dengan pohon bersama akarnya. Tumbuhan tersebut mudah didapatkan di banyak tempat tanpa harus mengeluarkan ongkos. Bahan itu dipipis, selanjutnya diperas airnya dan dicampuri garam selama seminggu. Air dari rumput teki diminum saban malam sebelum tidur, cukup seteguk saja. Kegiatan ini dijalankan selama penderita kolera belum sembuh benar.

Kian menarik terlacaknya tradisi lisan tentang jamu rumput teki itu diakui berasal dari *wangsit* Sunan Lawu. Alkisah, seorang petani berumah di dekat gunung Lawu. Tatkala *pageblug* kolera mengoyak penghuni desa sekitar Gunung Lawu, dirinya mengaku bersemuka dengan Sunan Lawu. Terjadilah percakapan hangat; petani diberi petunjuk meracik jamu berbahan rumput teki apabila ada orang terserang kolera. Tokoh legenda penjaga gunung sisi timur Kota Solo itu menamainya jamu *suket* teki. Banyak bukti jamu rumput teki mampu mengatasi kolera yang mewabah. Tidak sedikit yang sembuh berkat ramuan itu. Apalagi, beredar cerita seorang teman Belanda terkena kolera akhirnya sembuh selepas meneguk jamu tersebut. Oleh karena itu, berita mengenai penderita kolera mati meski telah minum ramuan ini, perlu diperiksa dokter terkait takaran dan kemampuan membuat jamu.

Selain *suket* teki, kala itu dijumpai jamu kolera khas Jawa lainnya. Ramuan ini menjadi simpanan pokok untuk setiap rumah, terutama mereka yang rumahnya jauh dari pusat kerajaan. Pembaca dipandu meracik obat, yaitu mengambil sebotol arak berkualitas, dimasukkan *rajangan*

*laos* lembut dicampur bawang lembut besar dua jemari. Lalu, diberi garam. Ramuan dibuat sebanyak mungkin untuk persediaan. Penderita kolera dianjurkan meminum ramuan sebanyak satu *sloki* (gelas *bitter*), dan diulang setiap satu jam sampai merasa sehat (*Bromartani*, 7 Januari 1869).

Selain tanaman rumput, unsur alam lainnya yang menjadi penyembuh adalah air. Hanya saja, air ini juga tidak lepas disangkutkan dengan tokoh ternama kerajaan dan hewan keramat keraton. *Bromartani* edisi 8 Desember 1881 memuat pengalaman menarik seorang pembaca dalam memaknai tirta umbul yang dipahami mampu menyembuhkan penyakit. Suatu ketika berjumpa dengan sahabatnya di Semarang yang pernah merasakan kesegaran air di Umbul Mungup (Boyolali). Dua orang ini berdialog mengenai khasiat serta manfaat mandi di kolam itu. Diceritakan pula bahwa pada detik itu ada 200 orang yang berniat menyiramkan air umbul ke raganya masing-masing. Terlihat orang berjubel di situ. Meski sudah datang pagi hari, belum tentu bisa langsung mandi. Mereka memadati umbul dan rela antri bukan tanpa alasan. Sebelumnya beredar kabar dari mulut ke mulut bahwa orang-orang yang mandi di Umbul Mungup serta meminum airnya, kebetulan selamat dari bahaya kolera.

Menurutnya, kabar itu bukan isapan jempol. Dirinya membuktikan dengan mata kepala sendiri beberapa warga di kampungnya terkena kolera, bahkan menelan korban nyawa. Anehnya, ada penghuni 3 rumah selamat dari *pageblug* kolera lantaran mereka mampir ke Umbul Mungup untuk mandi sebelum melanjutkan perjalanan ke Surakarta. Orang-orang yang luput dari amukan penyakit tersebut tidak lupa membawa pulang air umbul diwadahi botol kopi. Sesampainya di rumah, *tirta* yang dianggap mujarab itu dibagikan kepada anggota keluarga. Tanpa di-nyana, kondisi mereka sehat, alih-alih sakit perut akibat air yang dipakai mandi ratusan orang itu.

Berbekal pengalaman empiris inilah, sahabat penulis tersebut tergerak dari Semarang menuju Boyolali untuk ikut mandi di umbul. Sesampainya di umbul, dirinya bercakap-cakap dengan penduduk setempat demi menjawab rasa penasaran mengapa air umbul diakui mampu

mengusir penyakit. Warga sekitar Umbul Mungup menceritakan bahwa sebulan silam, Sinuwun Paku Buwana IX bertandang ke umbul dan melakukan ritual mandi. Dalam *Serat Jatno Hiswara*, raja keraton Kasunanan ini memang terkenal gemar *lelaku* (olah spiritual Jawa). Beberapa hari kemudian, ada orang mendatangi *umbul* dengan menahan rasa sakit pada perutnya. Dia lalu berhenti sejenak di *umbul* untuk buang air besar. Dirinya juga meminum air umbul karena kebetulan rumahnya jauh. Tanpa diduga, tidak berapa lama terjadi perubahan pada dirinya. Rasa sakit yang menyerang perutnya mendadak hilang. Setelah dirasa sembuh, dia sanggup meneruskan perjalanan sampai ke rumah.

Beredar cerita versi lain, yakni sewaktu para penderita kolera tengah mandi di Umbul Mungup, mereka memergoki Kanjeng Kyai Slamet (kerbau) berada di bibir kolam. Binatang yang keramatkan oleh keraton itu diyakini memiliki kesaktian penolak penyakit. Bila orang tidak mempercayai *gugon tuhon*, nyatanya banyak orang yang sembuh dari sakit kolera. Sampai kesaksian itu dituliskan dan dimuat *Bromartani*, Umbul Mungup masih dijubeli orang-orang yang hendak mandi dan merasakan khasiat airnya.

Kasus serupa membuat heboh penghuni *Vorstenlanden* tahun 1892, yaitu air menjadi “sakti” usai dipakai mandi Raja Paku Buwana IX sehingga berkhasiat. *Bromartani* edisi 24 September 1892 memuat kabar dari tepian Boyolali bahwa Paku Buwana IX mandi di Umbul Pengging. Selama penguasa istana Kasunanan membasuh raga dengan *tirta umbul*, terlihat beberapa orang berada di bawah saluran pembuangan air. Mereka membawa botol maupun *kendi* untuk mewedahi air bekas mandi raja. Setelah selesai, air dibawanya pulang.

Dalam alam pikir masyarakat Jawa tempo itu, aktivitas *Sinuwun* mandi di Pengging dimaknai sebagai meditasi dan membawa berkah. Tidak ayal, banyak perempuan berdatangan *ngalab berkah* pada siang malam. Di kolam tua bekas kerajaan Pengging yang berjaya pada era akhir Majapahit itu, mereka mengambil air diniatkan untuk mengobati orang sakit. Selepas berhasil mengambil air, para perempuan pulang ke rumah. Oleh-oleh yang berupa air *umbul* tadi jadi

rebutan, dibagikan kepada saudara-saudaranya di rumah. Jurnalis menyudahi tulisan seraya merasakan kegetiran bahwa sangat memprihatinkan masyarakat kecil mencari sarana penyembuhan kepada Tuhan. Dengan laku semacam itu, apa yang mereka harapkan semoga terkabul.

Kasus lainnya terjadi pada air dari sumur bur Langenharjo milik raja Keraton Kasunanan. Air yang keluar dari sumur itu diyakini bisa mengobati penderita sakit kulit yang dipenuhi lubang (*krowok*) dan *mata* (*Bromartani*, 14 Februari 1891). Menurut keterangan *Babad Langenharjo*, kawasan pesanggrahan Langenharjo dibangun oleh Paku Buwana IX untuk ruang hiburan keluarga istana. Kabar dari *Bromartani* ini merupakan angin segar bagi masyarakat yang berniat mengobati penyakit kulit, namun belum juga menemukan obat yang cocok dan mujarab. Terlebih lagi, pada saat itu, baik dokter maupun mantri masih jarang. Meskipun mereka tinggal di pusat kerajaan dan perkotaan kolonial, hanya lapisan sosial tertentu yang bisa mengakses pelayanan tenaga medis modern (Muhsin, 2012: 187--190). Hingga pertengahan abad XX, kolam pemandian Langenharjo masih terawat berikut *gugon tuhon* yang menyertainya. Kolam tersebut juga dijadikan objek wisata oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

### C. PENUTUP

Sebagian masyarakat Jawa pada abad XIX menyadari dalam lingkungan spiritual terdapat kekuatan-kekuatan gaib yang tidak diketahui wujud, asal, dan tempatnya. Apabila marah, makhluk halus bisa menyebabkan datangnya penyakit, yang bermuara pada *pageblug*. Kepercayaan irasional ini bersanding dengan kecerdasan masyarakat Jawa yang mampu membaca fenomena alam dengan *ilmu titen*. Pengalaman empiris tentang perubahan musim kemarau panjang menuju musim penghujan yang tidak mulus ditengarai bakal mengundang penyakit menular seperti kolera. Berbekal *ilmu titen* inilah mereka kemudian *eling lan waspada* terhadap bahaya *pageblug*.

Mitos atau *gugon tuhon* mengenai *lintang kemukus* sebagai isyarat akan munculnya marabahaya tidak perlu disikapi dengan nyinyir. Dengan

alam pemikiran irasional, leluhur Jawa mewariskan pengetahuan yang masuk dalam memori kolektif bahwa *pageblug* senantiasa disertai unsur *lintang kemukus*. Hal ini juga berangkat dari *ilmu titen* yang menjadi metode masyarakat lokal Jawa membaca *kahaman* 'situasi' untuk mengambil tindakan menyikapi hal-hal buruk yang diprediksi bakal terjadi.

Orang-orang Jawa di *Vorstenlanden* yang tidak berdaya menggapai pelayanan kesehatan modern dan mengonsumsi obat farmasi, yang sangat berbeda dengan jamu, tidak patah semangat berupaya menyembuhkan penyakit dan menghalau *pageblug*. Didasari pekatnya *gugon tuhon* pada periode itu, mereka berperilaku irasional, seperti mandi dan meminum air *umbul*. Praktik budaya ini tidak lepas dari bayang-bayang cerita tokoh ampuh, misalnya Paku Buwana IX. Raja ini dalam mata orang Jawa dianggap sebagai pengayom, selain memberi keteladanan gemar laku prihatin sebagai cara memohon terhadap Gusti Allah agar diberi keselamatan.

Begitu pula tokoh legenda Sunan Lawu yang diikutkan dalam riwayat jamu berbahan suket teki oleh masyarakat petani. Jauhnya dari peran dokter dan pusat kerajaan, tidak membuat warga pasrah berburu jamu sederhana. Agar penduduk di lereng gunung Lawu percaya serta bersedia meminum, diciptakan *gugon tuhon* tentang pepunden gunung. Bisa ditegaskan di sini, rumput teki memiliki faedah mengobati penyakit. Tambahan cerita Sunan Lawu berguna menebalkan keyakinan masyarakat agar mempercayai khasiat jamu itu. Dengan demikian, menganalisis peristiwa *pageblug* dan penyikapan masyarakat lokal terhadap wabah penyakit abad XIX sukar terjawab jika tidak memakai cara pandang manusia Jawa atau sejarah lokal agar tidak melulu (dan tunduk) menggunakan kaca mata Barat.

### PUSTAKA ACUAN

Boomgaard, Peter. (1987). "Morbidity and Mortality in Java, 1820-1880: Changing Pattern of Disease and Death" dalam Norman G. Owen (ed) *Death and Disease in Southeast Asia: Explorations in Social, Medical, and Demographic History*. Singapore: Oxford University Press.

- Carey, Peter. (2012). *Kuasa Ramalan: Pangeran Diponegoro dan Akhir Tatanan Lama di Jawa, 1785-1855*. Jakarta: KPG dan KITLV.
- Danandjaja, J. (1997). *Folklor Indonesia Ilmu Gosip, Dongeng, dan Lain-lain*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Endraswara, S. (2020, April 27). "Memahami Metafisika Lintang Kemukus", *Kompas* hlm 16.
- Gunawan, R. (2005). "Wabah Pes Di Jawa 1915-1925", dalam *Sejarah dan Dialog dan Peradaban: Persembahan 70 Tahun Prof. Dr. Taufik Abdulah*, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Herusatoto, Budiono. (2000). *Simbolisme dalam Budaya Jawa*. Yogyakarta: Hanindita Graha Widia.
- Jaelani, Gani A. (2017). "Islam dan Persoalan Higiene di Hindia Belanda". *Jurnal Sejarah*. Vol 1 (1), hlm 82-104.
- Kuntowijoyo. (1995). *Pengantar Ilmu Sejarah*. Yogyakarta: Benteng Budaya.
- Kurniarini, Dina Dwi dkk. (2015) "Pelayanan dan Sarana Kesehatan di Jawa Abad XX," jurnal *MOZAIK* Vol 7, Januari, hlm. 1-15.
- Mangoensisastra dan Kadarlamet (1938). *Panoentoen Moelang Ngelmoe Kawarasan*. Batavia: Noordhoff-Kolff.
- Muhsin, Z. Mumuh. (2012). "Bibliografi Sejarah Kesehatan Pada Masa Pemerintahan Hindia Belanda," Jurnal *Paramita*, hlm 186-197.
- Priyatmoko, H. (2020 11 April). Lodeh dan Tolak Bala. Detik.com <https://news.detik.com/kolom/d-4973337/lodeh-dan-tolak-bala>
- \_\_\_\_\_. (2017). *Keplek Ilat: Sejarah Kuliner Solo*. Jakarta: Direktorat Sejarah.
- \_\_\_\_\_. (2011). "Orang Sakit Tidak Perlu Ke Dokter: Kajian Serat Primbon Jampi Jawi". Prosiding Seminar Nasional Naskah Nusantara 2011. *Pengobatan Tradisional dalam Naskah Nusantara*. Jakarta: Perpustakaan Nasional Indonesia.
- Priyatmoko, Heri dkk. (2019). "Memorial Heritige of Indonesia Traditional Medicine: Study on Serat Centhini". Hirmawan Wijanarka (Ed), *Rethinking Environmental Issues in Literature, Language, Culture and Education* 50-65. Yogyakarta, Indonesia: Sastra Inggris, Universitas Sanata Dharma.
- Safitry, Martina. (2019). "Dukun dan Meredupnya Pesona Pengobatan Jawa: Aspek-aspek Pengobatan Jawa Abad XIX-XX", dalam FX Domini BB Hera (Editor) *Urip Iki Urub*. Jakarta: Kompas.
- Soemardjan, Selo. 1996. "Jamu Suatu Tinjauan Dari Sudut Sosiologi", dalam Azwar Agoes dan T. Jacob, *Antropologi Kesehatan Indonesia Jilid I*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran.
- Suryadi, Linus AG. (1993), *Regol Megal Megol: Fenomena Kosmogoni Jawa*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Subalidinata, R.S. (1968). *Sarining Kasusastran Djawa*. Yogyakarta: P.T Jaker.
- Suyami. (2001). *Serat Cariyos Dewi Sri: Dalam Perbandingan*. Yogyakarta: Kepel.

#### Sumber Sezaman

*Babad Langenharja*

*Serat Jatna Hiswara*

Bromartani, 21 September 1865

Bromartani, 7 Januari 1869

Bromartani, 16 Juni 1869

Bromartani, 13 Oktober 1881

Bromartani, 27 Oktober 1881

Bromartani, 10 November 1881

Bromartani, 8 Desember 1881

Bromartani, 15 Desember 1881

Bromartani, 22 Juni 1882

Bromartani, 16 Nopember 1882

Bromartani, 23 Juni 1891

Bromartani, 14 Februari 1891

Bromartani, 24 September 1892



## COVID-19: THE TRACE OF INDONESIA'S ISLAMIC STATE ON SOCIAL MEDIA NETWORK

### COVID-19: MELACAK JEJAK ISLAMIC STATE DI INDONESIA DALAM JARINGAN MEDIA SOSIAL

**Prakoso Permono<sup>1</sup>, Amanah Nurish<sup>2</sup>, & Abdul Muta'ali<sup>3</sup>**

*Terrorism Studies Program, School of Strategic and Global Studies*

*Universitas Indonesia<sup>1,2,3</sup>*

*E-mail: prakoso.putra@ui.ac.id<sup>1</sup>; amanah11@ui.ac.id<sup>2</sup>; moetaalingua@gmail.com<sup>3</sup>*

#### ABSTRAK

*Para pendukung ISIS di Indonesia menunjukkan keaktifan di media sosial khususnya pada masa pandemi Covid-19. Artikel ini berusaha mengeksplorasi dan menganalisis narasi Islamic State di jejaring media sosial didasari pendekatan etnografi digital yang dilaksanakan pada Maret hingga Juli 2020 menyusul merebaknya pandemi Covid-19. Etnografi yang dilakukan berfokus pada empat grup atau kanal pendukung ISIS berbahasa Indonesia di Telegram. Penelitian ini menunjukkan bahwa ISIS dan jaringannya di Indonesia sebagai aktor rasional tengah berusaha memanfaatkan berbagai kesempatan serta kerentanan masyarakat yang muncul menyusul pandemi Covid-19 untuk kepentingan memperkuat radikalisasi dan usaha untuk mendapatkan dukungan akar rumput dengan menjangkau komunitas Islam yang lebih luas. Penelitian ini juga menemukan bahwa jaringan ISIS di Indonesia pada masa pandemi Covid-19 mengeluarkan narasi-narasi anti-pemerintah maupun anti-etnis Tionghoa yang lebih mutakhir dan personal. Kesimpulan dari penelitian ini ialah bahwa di balik narasi yang disebar oleh jaringan ISIS di Indonesia terdapat sebuah ancaman tersembunyi bagi masyarakat Indonesia.*

**Kata kunci:** Covid-19; Etnografi Digital; Islamic State; Indonesia; Media Sosial

#### ABSTRACT

ISIS affiliates in Indonesia have been involved actively in social media particularly during the Covid-19 pandemic. This article is trying to explore and analyze Islamic State affiliates daily narrative in their social media network based on digital ethnography conducted between March to July 2020 following the Covid-19 outbreak. The ethnography focuses on four ISIS affiliate's Telegram channel and group. We found that ISIS affiliates in Indonesia as a rational actor have been capitalizing on opportunities brought by Covid-19 and vulnerabilities in Indonesia's society to strengthen radicalization and grassroots support from broader Muslim communities. This research also finds more advanced and personalized anti-government and anti-Chinese rhetoric being emphasized by Islamic State affiliates in Indonesia during the pandemic and concludes that behind Indonesian ISIS narratives during the Covid-19 pandemic emerges hidden imminent threats to the society.

**Keywords:** Covid-19; Digital Ethnography; Islamic State; Indonesia; Social Media

#### INTRODUCTION

In the first term of the Coronavirus outbreak in Indonesia, some national mass media portray Islamic State as an impotent threat in the region. This assumption is attributed to ISIS's magazine al-Naba in early March 2020 with an article entitled "Sharia Directives to Deal with Epidemics" that urges the reader to "flee from the one afflicted with leprosy as you flee from a lion" (Al-Tamimi,

2020). Some of Indonesia's online media in the first place take that narrative alone as a sign of ISIS refraining from their violent manner. Online media with nationwide readers like TribunNews and SindoNews even using exaggerated clickbait titles like "It Turns Out ISIS Also Fear Corona" and "Known for Their Fierce, But Turn Out They Fear Corona" (Berlianto, 2020).

While on the contrary there are reports and commentaries from scholars across Indonesia and abroad that stated the opposite. Ackerman and Peterson wrote that terrorists despite their ideological background, by their nature as asymmetric adversaries, will try to exploit the pandemic in many ways to achieve their goal (Ackerman & Peterson, 2020:59-60). A report by the Institute for Policy Analysis of Conflict (IPAC) on Covid-19 and ISIS in Indonesia report that there is no single narrative among ISIS affiliates in Indonesia, some believe that the prophet teaches to protect themselves from the pandemic while some believe that Covid-19 is God's army sent to help the mujahedeen to conduct jihad (IPAC, 2020).

Along with the IPAC report, Arianti and Taufiqurrohmah also emphasize ISIS affiliates groups such as Jama'ah Ansharut Daulah (JAD), Jama'ah Ansharut Khilafah (JAK), and Mujahidin Indonesia Timur (MIT) will maximize their action either for recruitment – radicalization or planning attacks (Arianti & Taufiqurrohmah, 2020:13-17). Whereas for Mujahidin Indonesia Timur's (MIT) guerillas based around Poso, Covid-19 is considered as leverage for their hit and run tactic. MIT's leader Ali Kalora in a video stated that Covid-19 will weaken the authority and he urges all mujahedeen to conduct jihad wherever they are. Moreover, Ong and Azman in their article also indicating that there is a possibility for ISIS affiliates using Covid-19 as a weapon by spreading the virus targeting authorities (Ong & Azman, 2020:18-20).

Besides, there are also empirical indications of increasing activity particularly from ISIS affiliate group Jama'ah Ansarut Daulah (JAD) and Mujahidin Indonesia Timur (MIT) during the pandemic. Based on data obtained from Detachment 88, 228 terrorists suspect were arrested from March to the end of 2020 across Indonesia, the majority of the detainees are strongly suspected JAD and several other Jama'ah Islamiyah (JI) members. Furthermore, since March there were three attacks either from JAD or MIT members, two attacks targeting police officers, and the

other one targeting a civilian cooperating with the police.

Nevertheless, these reports and articles only focus on terrorism as a physical form of attack, partially neglecting the fact that in the case of Indonesia terrorist depends greatly in radicalization process that in some case literally attacking heart and mind of the people. ISIS and other jihadists are well known to utilize the digital space for their cause, from propaganda, recruitment, online training, planning for logistic support, regrouping, attack planning, to funding with misuse of charity and even fraud (Golose, 2015:32-38). For specific instance, the first generation of jihadists in Indonesia went through face to face radicalization in a very clandestine small group, however, since the rapid development of the internet the term online radicalization has become more familiar. For ISIS affiliates in Indonesia, it is a common practice to sworn allegiance to al-Baghdadi or later to Abu Ibrahim al-Quraishi through social media. Therefore, a variety of ISIS online activities become more significant to analyze than before during the pandemic.

This research aims to explore and analyze ISIS affiliate's narratives in Indonesia during the Covid-19 pandemic. This is an important question to answer not only for academia but also for the policymaker, particularly in Indonesia. As Sun Tzu wrote "know thy self and know thy enemy", meaning it is an important factor to firstly understand our strong and vulnerabilities while maintaining vigilance from all threats by understanding the enemy, take precautions and attack the enemy before the battle has even started (Yuen, 2014). To understand ISIS and its affiliates we use the rational choice theory in this research and also compare it with the finding of this research to test whether the rational choice theory is applicable to analyze group's and individual's rationality levels. This research also will confront some media coverage with the actual and theoretical fact with this research's findings to show errors made by media coverage on ISIS threat during the beginning of the Covid-19 outbreak.

## METHOD

### Digital Ethnography Inside ISIS Network

Doing ethnography is almost impossible due to Covid-19 restriction in many parts of the world, hence, in the meantime, digital ethnography seems to become more promising. Digital ethnography starts with the argument that the phenomenon in digital space is related to the real-life phenomenon (Horst & Miller, 2013:13). In this particular research, joining the conversation in ISIS social media networks should be considered no less ethnography than fieldwork. In fact, digital ethnography is the safest way to do ethnography with a terrorist group or affiliate that will not likely happen with other approaches. This approach also enables us to reach deeper into the Indonesian ISIS social media network. All data and findings below are based on data collection from the beginning of the first Covid-19 positive case in Indonesia on March 2, 2020, until mid-July 2020 by joining groups and channels of ISIS affiliates in Telegram.

This research focuses on four Indonesian-speaking Telegram groups and channels that shown clear affiliations to ISIS by their identities, group profile with ISIS's logo, sticker being used, chats among members, and its content such as JAD's leader Aman Abdurrahman writings and audio recordings, Bahrun Naim's books, and articles from various ISIS official sources like al-Naba. Some of these indications are also linked to a Telegram group "*Just Terror Taktik*" which was mentioned in several court verdicts against Indonesian ISIS members. Three of these groups are using ISIS-related names such as "*daulah*" or state, "*kekhilafahan*" or caliphate, and "*akhir zaman*" or the end of the world related to ISIS claims as the God's doomsday force. By going deeper this research found another group operating clandestinely using the name "supermarket", a word without any relation at all with ISIS. Each group serves a different purpose and has a different number of members, the first group has 55 members mainly serves for discussion, the second has 56 members for publication repository, the third and fourth have 281 and 126 members serve as active sharing and one-way communication

group. All the publication in these group or channel are in Bahasa or has subtitles, almost all publication is clearly made by Indonesian while others identified from various common ISIS sources like Dabiq, al-Naba, Ammaq, etc.

The existence of these kinds of groups and channels is indeed a serious and fundamental problem in the effort to counter violent extremism. Although Telegram has its own policy and active surveillance program "*ISIS Watch*" established in November 2019 that actively deleting accounts, channels, and groups based on build-in reports from other users (Griezis, 2020). Adapting to this campaign, ISIS affiliates across the world in Telegram uses more clandestine measure such as uses usernames with no relation to ISIS such as "supermarket", "*info loker*" translated to job vacancy info, or "*taaruf*". Particularly in Indonesia, based on our interview with a former high ranking official of the National Counter-Terrorism Agency (BNPT), there are two reasons why the authority let some of the jihadist group or channel to exist, (1) for intelligence gathering purposes and (2) the ability of jihadist to re-emerges with a new group and channel make it hard to control. The second reason is the reality in Indonesia's jihadist social media network, and therefore it needs urgent attention particularly during the Covid-19 pandemic when people massively emigrated to the digital space.

## RESULT AND DISCUSSION

### Rationalizing ISIS's Narratives

As mentioned before by Ackerman and Peterson (2020) that a terrorist group like ISIS is an asymmetrical adversary in nature. Everything considered as a threat for us is an opportunity for them, and during the pandemic, the main hypothesis is that groups like ISIS and its affiliates will take the advantages brought by the pandemic for their cause. This hypothesis is also based on the rational choice theory, according to Crenshaw, this theory explains that the decision making process within terrorist groups including their strategy is based on a strategic and rational calculation, calculating whether a strategy is more advantageous to achieve their goals is an example of a strategic and rational calculation

(Schmid, 2011). The findings of this research in some part will support this theory, while in other part bring the debate of its reliability in the case of Indonesia.

It is important to firstly understand the form of the Islamic State global network. As mentioned by Zelinsky and Shubik (2020) that terrorist group spread and emerges in three kinds of form, a hierarchy structure with some sort of central authority and strategy, venture capital in which resources provided by the central authority but each group has its autonomy, a franchise where there are a central authority and command but the operational depends on each group, and a brand where there is no central command and each group operates also with their own resource. In this kind of categorization, in the case of Indonesia, ISIS comes in the form of a brand where the legitimization of the *daulah*, the leadership of the caliph, the use of its logo, and mainly the ideology, hence, ISIS encourage autonomy to its affiliates in Indonesia and also to depends on their own resource. Yet, we argue that this metaphor of business enterprise by Zelinsky and Shubik should consider another form of an international corporation, where the branch work for their own profit while at the same time support the corporate and vice versa. This kind of relations exists in Indonesia.

Data from our digital research found that during the pandemic there are plenty of Indonesian ISIS narratives consistent with ISIS's global narrative. For instance, the rhetoric against closing mosques, canceling the Hajj, and particularly calls to action and capitalize the pandemic for their cause can be found in both global and local narratives. Gambhir (2015) explains this as ISIS's far abroad strategy, to shift the attention from the Middle East to other parts of the world caused by its affiliate's attack in their own country. This is also why ISIS uses the strategy of *hijrah* to encourage people to join the *daulah* in Syria dan Iraq, but at the same time use the strategy of *bay'ah* to encourage the growth of its far abroad affiliates and to launch attacks in their own country (Gunaratna, 2016). As the impact of losing its territories in the Middle East, ISIS now eagerly try to regain its former territory and rebuild its

relevance among the people, the pandemic is the right time to execute this plan, this explains the same narratives to launch attacks in ISIS global narratives and the narratives circulated in Indonesia. The rational choice theory is fit into this kind of scenario.

Nevertheless, the same theory is challenged by the unique cases we found during our ethnographic works in the digital field site. During the pandemic, we are not able to conclude any single narrative on the pandemic in Indonesian ISIS affiliates social media network. Some group members mentioned the pandemic as western nations and even Chinese conspiracy, while some others consider the virus as *thaun* or merely a pandemic. A former jihadist in our interview mentioned that jihadist in social media tends to have dispute opinion on many issues, and many jihadists are spreading their own opinion based on their own initiatives. This finding challenges the rational choice theory to rationalize acts of individuals within the group, Although the group has its own rationality and strategic assessment to propagating call for actions, individual within the group have their own assessment in the very fundamental issue of the pandemic itself. In this scenario, the rational choice theory will not be able to generalize the action of individual members of the group.

### **Inside ISIS Social Media Network**

ISIS affiliates in Indonesia are well aware that their activities in social media networks are subjected to surveillance by the authority. Therefore, all the groups or channels are operating clandestinely or semi-clandestine. All members are prohibited to show their photo, real name, and mention where they are come from, members continuously remind each other and newly joining members about this policy. They are also sharing infographic entitled "Internet Security" that serves as a guideline for the new member, this guideline direct member not to share personal information and reminds that the authority might try to infiltrate the group and pretending as mujahedeen, and on daily basis, they removed member suspected as *jasus* or spy.

This research believes that the group members were not knowing each other and found the group or channel by searching for a specific keyword. By using specific keywords like *daulah* (state) or *kekhalafahan* (caliphate) made this group accessible to the broader Muslim community in Indonesia, particularly supporters of Islamic organizations advocating to establish a worldwide caliphate with a non-violent approach such as Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). In general ISIS affiliates in this Telegram groups interested to access specific publications such as the newest updates from the central caliphate and ISIS's affiliates leader in Indonesia, *nasyid* or song, sermon recording, infographic, magazine, circular, and question and answer related to jihad or Islamic teaching. Some newly joining members are introducing themselves as newly *hijrah* person, referring to migration from darkness to enlighten, who want to understand the pure teaching of Islam.

The most interesting group is the first group that serves for open discussion. While the channels only have silent readers, in the first group members are actively communicating and responding to each other. Regardless of this research believe that the members do not know each other, but the discussions showed there is senior and junior member relation proofed by one or two people that answer questions from the member. Although ISIS and its affiliates JAD work in more decentralized networks compared to Al-Qaeda with Jama'ah Islamiyah (JI) in Indonesia, JAD still has its leadership and specific religious authority. This is typical to ISIS or Al-Qaeda affiliates group to have senior member serves as the authority, and disobedient and subordination through the rank is regarded as a serious offense.

Altogether we divide the narratives into six main topics. Starting with a discussion on the Covid-19 outbreak, jihad and terror attack, how to become an ISIS member, anti-government sentiment, and lastly anti-Chinese sentiment. This research has the very reason to believe that ISIS narratives in social media amid the pandemic and its effect on society should not be taken lightly, considering the match between the narrative and existing vulnerabilities in the society. This

research believes that Indonesian ISIS members and affiliates are spreading narratives below with a strategically rational calculation. In line with rational choice theory, that terrorist organization using terror as an instrument and tactic to achieve their goals based on a rational calculation (Schmid, 2011, pp. 221-222).

### **Indonesian ISIS on the Covid-19 Outbreak**

ISIS central in mid-March published an article in their online caliphate magazine al-Naba urging its follower all over the world to continue jihad wherever they are. The article mentioned clearly that all mujahedeen should take this pandemic as an opportunity to plan and execute an attack that will make the enemy lost its capabilities to retaliate nor reducing any fatalities attack and show no mercy (Al-Tamimi, 2020). Although this magazine is entirely published in Arabic, it still reaches Indonesia in the translated version and is scattered through Indonesia's ISIS social media network. Despite that clear call to jihad, ISIS affiliates in Indonesia ultimately remain in dispute when understanding Covid-19.

The main narrative in ISIS's social media network shown a clear message that Covid-19 is God's will to help the mujahedeen. While very minority believe Covid-19 as a conspiracy made by the infidel. But basically, it does not matter whether ISIS believing in either of those two narratives, because eventually there are only two outcomes of those narratives, to launch an attack according to call for jihad or doing *i'dad*, referring to preparation to jihad including maintaining the spirit of jihad among member and rallying support to boost recruit. Both narratives in ISIS daily conversation are considered as the right thing to be done, however, they are repeatedly affirming that jihad is still the highest virtue in Islam.

Even though they are repeatedly stating that Covid-19 is a soldier sent by God to help the mujahedeen, still, on the contrary, ISIS members are frequently discussing how to end the pandemic and use it as fuel for their propaganda. For instance, besides claiming Covid-19 as reinforcement from God, ISIS also claims that Covid-19

is punishment for mankind's sins by submitting to human-made law and violating God's law at the same time. In the discussion, they argue that the only way to stop God's punishment is to establish a worldwide caliphate and turn back to Islamic teaching rather than only depend on scientific research for the Covid-19 vaccine. The contradiction in both claims shown that there is a loophole in ISIS propaganda if confronted by simple logic and critical thinking skill. But again, the idea to establish a worldwide caliphate has many supportive bases from non-violent Muslim communities that believe establishing a caliphate is part of Islamic teaching including 14,5% of Indonesian in favor to support changing Indonesia to become a caliphate (Ali, 2018:22).

Like their counterpart in the Middle East, ISIS in Indonesia also regularly doing situation assessments to maximize every opportunity for their cause. ISIS through al-Naba magazine demonstrates their ability to assess the situation properly by mentioning vulnerabilities brought by the Covid-19 pandemic to countries in general especially economic impact following the Covid-19 pandemic. ISIS Indonesia strategy handbook (2019:7&13) and some training modules we successfully access from their social media network peculiarly stated that deep assessment including gathering information to plan strategy is essential to every ISIS operation. And by using the enemy's vulnerabilities could maximize the advantage for the attacker. This handbook indicates that ISIS affiliates in Indonesia must be well aware of Covid-19 and its impact on their attack target or radicalization target, particularly for high-level ISIS strategist.

### **Indonesian ISIS on Terror Attack and Weaponing Covid-19**

During the Covid-19 pandemic, ISIS networks are consistently spreading the call for jihad and martyrdom. Martyrdom is considered among ISIS members in Indonesia as the highest virtue for every Muslim, and the narrative is continuously being encouraged through chat, video, or magazine. Some members even anonymously stated in the discussion that other ISIS members will take good care of the martyr's family, supporting

each other in terms of financial and moral support in the jihadist community is a common practice called *amniyah* and it works to reassured loyalty from other group members. Indonesian ISIS leader and death row inmate Aman Abdurrahman in his video sermon accessible on YouTube never begin his sermon directly urging for jihad, but starts with an ideological basis called "*tawhid*" or the concept of monotheism in Islam, and most importantly, refusal to submit to other than God or idolater (*thaghut*). This is how ISIS approach its member through hearth and mind.

Jihad is certainly a daily narrative for ISIS in Indonesia. Whether by discussing the virtue of martyrdom or encouraging each other to take action with the example of an ISIS attack in Indonesia or abroad. We found that Indonesian ISIS member discusses an infographic that shown 49 ISIS successful operations abroad within a week in mid-April 2020 with the same period of time of around 10 terrorist arrest operations across Indonesia mainly in Java between April 11 to July 10. While several reports, in general, stated that the healthcare facility could become a vulnerable target (Mahadevan, 2020:1-5). But we believe that in the context of Indonesia, ISIS will not likely target healthcare facilities since it was not found in their narratives. The discussion in social media also only calling all *anshor daulah* or helper of the caliphate to target police and its anti-terror special force, army, *jasus* or spy, and all anti-caliphate in general by killing or kidnapping. By mentioning the anti-caliphate, ISIS affiliates are referring to the moderate Islamic community specifically the largest moderate Islamic organization Nahdlatul Ulama (NU). ISIS identified NU as one of their biggest ideological enemies in Indonesia.

Besides the usual modus operandi, several reports stated that ISIS could be inspired to use Covid-19 as a weapon (Ackerman and Peterson, 2020:20). We cannot find any conclusive evidence except just an indication that ISIS could see the opportunity to use Covid-19 as a weapon. The main indication is ISIS in Indonesia is well-known for using suicide attack either with a bomb or even with merely a knife. In the 2018 Surabaya bombing, even an ISIS affiliate family consisting of a couple and their four children

with the youngest only 9 years old conducted a suicide bombing in three different churches, these attacks were highly praised in the Indonesian ISIS magazine *al-Fatihin* (2018:7). ISIS in Indonesia also well-known to try using a simple homemade chemical bomb for 6 attack plans since 2011 (Sanjaya, 2020). We also found 107 extremely detailed training modules regarding explosive craft and using all material available to cause an enormous bomb impact from traditional plant-based bomb to chemical material like sarin and ammonium nitrate. ISIS is clearly legitimizing any strategy even involving children in a suicide mission.

According to their discussion, we know that ISIS believes a hadith that stated death by Covid-19 is equal to martyrdom by suicide bombing. But on the other hand, they also discuss a video that shows a woman spitting on foreign currency claimed as an Iranian Shi'a strategy to spread the virus. The member unanimously condemns the video. We suspect that this video means to be anti-Shi'a propaganda which has been one of ISIS's ideological platforms. Taking these empirical findings into account we conclude that for precaution, we believe that Indonesian ISIS members can deliberately use Covid-19 as a weapon by spreading the virus. Hence, the possibility is quite low, taking into account the process of the Covid-19 test and the involvement of health institutions and the government in the test process. Using the virus is also will not have any assured and direct, and lethal impact on the target. Therefore, using the virus as a weapon is not a strategic choice.

In the current context, following the pandemic, digital activities become more vulnerable to cyber-attack by different groups with different backgrounds. While in the context of Indonesia we have not found any data to support the likelihood of an advanced cyber-attack by ISIS during the pandemic, although in a 335 pages training book written by Indonesian ISIS leader Bahrin Naim dedicating one chapter to the use of technology. The chapter contains detailed instructions on how to use technology particularly digital space, from securing online communication, hacking and carding, using virtual currency, to web scams. Still, to date, Indonesian ISIS only

detected using those advanced technologies for raising funding besides other common jihadist activity in digital space.

### **Indonesian ISIS on How to Become Member**

Member of ISIS social media network is increasing during the pandemic. Mainly ISIS affiliates in these Telegram groups are interested to access general publications. While newly joining members mainly discuss questions and answers related to jihad or Islamic teaching. In every introduction of a new member, all members will welcome them with a hospitable welcome and kind words. Member calls each other brother to foster brotherhood and trust, in this particular case joining the group is more feels like joining a fraternity than a terrorist supporter group.

After the new member following the discussion for some time, some senior members will share criteria to become *anshor daulah* in an infographic. Prospective ISIS supporter is supposed to meet the criteria and worthy joining the rank, among the criteria are following the leader of the caliphate, defend the faith, spreading messages of the caliphate from official channel, and keep the secrecy of the network. The prospective member also must not disobey their leader and contradict any narrative from the official source. After accepting these criteria senior members will send a sworn of allegiance text to ISIS leader Abu Ibrahim al-Quraishi in Arabic and Bahasa, by reciting the oath of allegiance new members considered themselves officially as *anshor daulah* submitted to ISIS leadership.

The radicalization steps online are using the same pattern as offline radicalization in Indonesia. The first step is to synchronizing ideological perspectives and recruit's views on issues happening around. The first step is crucial to disengage prospective member from any barrier to further change their perspective completely and to make the recruit feels welcomed and appreciated in the group. The next step after continuous radicalization through discussion and indoctrination is the oath of allegiance, whereas the final step is when the recruit ready to take any action. Mainly the target for recruitment in Indonesia is youngsters

around 20-37 years old (Mapparessa, 2019:107-112). Now, the online oath of allegiance and radicalization make the process even shorter.

We have great concern about the growing radicalization among Indonesian youngsters. Research has shown that 7,7% of Indonesia's Muslim population equal to around 11 million people are willing to join violent extremism action toward different groups (Wahid Foundation, 2017). Setara Institute (2020) analyze high school student perspective toward violent extremism and recorded 35,7% are inactive intolerance, 2,5% actively intolerance, and 0,3% shown they are favorable to act of terror. More distressing data come from Wahid Foundation's research on Indonesia's Islamic study group in high school that showed 68% are willing to join the jihad in the future and 6% specifically stated their support for ISIS (Huda, 2017:13). The only thing needed is access to the group that facilitates this extremist view into action and life pressure.

The pandemic also caused concern among youngster that lost their job. Injustice feelings can spread to the broader public easily, as research has shown that fear levels are high among low-paid Indonesian that are affected the most by the pandemic. Until June 2020 around 3 million Indonesian majorities worked in the informal sector lost their job, in the more general population the trends shown salary reduction is common among low and middle-class Indonesian (Soderborg & Muhtadi, 2020). Youngsters at their young age tend to take personal significance as an important aspect of their life, struggling for a job, feeling alienated, and certain economic demands from family members could lead to personal significance issues that serve as a basic factor to join violent extremism group (Kruglanski et.al., 2014). Feeling injustice, anger, legitimizing terror, and access to the violent extremist group is a perfect situation to climb up Moghaddam's staircase to terrorism (Moghaddam, 2005). Becoming part of a bigger cause, welcoming group, and a place facilitating their frustration and anger in the ISIS social media network could instantly serve as an escape.

## **Indonesian ISIS on Anti-government Rhetoric**

Propagating anti-system and anti-government is common for ISIS and other jihadist groups in Indonesia. For instance, calling democracy and the whole system in Indonesia and the world is against the teaching of Islam is nothing new. But during the pandemic, we find that ISIS has been using more specific issues adapting to the pandemic, and therefore could easily reach a broader Muslim community in Indonesia. At the peak of the Covid-19 outbreak, ISIS's social media network discusses government policy closing worship places, banning prayer in congregation, and canceling Hajj as one of the five pillars of Islam is portrayed as anti-Islam policy. These are considered very distressing for many Muslim communities in Indonesia.

By reaching to more personal and relevant issues during this pandemic, ISIS is reaching and attracting more general audiences. These issues used by ISIS are also highlighted by the general Muslim community and even drown public protest. For closing mosques, a poll by news agency Kumparan (2020) on May 12 shows that 39,21% public opposed the policy. In the case of the Hajj pilgrimage 221.000 pilgrims already waited years for their embarkation (Bona, 2020). ISIS in Indonesia has been referring to ISIS spokesman Abu Hamzah al-Quraishi's official release translated to Bahasa stating that closing mosque and canceling Hajj when at the same time tolerates other secular activity during the pandemic is a solid proof of neglecting Islam. The exact same narrative can be found in the Muslim community's daily conversation.

Besides closing mosques and canceling Hajj, a bill was proposed in the house of representatives regarding guidelines for national ideology and the 5 basic values of Pancasila. This proposal excludes a resolution that serves as a legal basis to ban communism in Indonesia. almost all Muslim communities including the moderate community strongly opposed to this proposal, the concern and issue of resurrecting Communism in Indonesia and old wounds between the Muslim community and the Communist party during the attempted coup emerge not only in strong oral



opposition but also in a rally in the capital city. A former Indonesian jihadist leader stated the public protest responding to the proposal is a momentum to be exploited by ISIS to spread its narrative to the general Muslim population that the government is pro-Communist and therefore against the Muslim community in general. ISIS in Indonesia once again has shown its capability to adapt to current issues.

Even though these anti-government narratives are not deliberately stating any direct violence, eventually neglecting the narrative could become a blowback to the government considering radicalization as a dynamic process that can escalate in a certain condition. Following the pandemic, a survey by Indikator (2020) shown that between May and July 2020 public trust in national government performance decline by 5% and 11% for the Ministry of Health in particular. Besides that, in democratic predominantly Muslim country Indonesia, political Islam, religious populism, and mobilization of Islamic right-wing groups for a political purpose have been around since the reformation back in 1998 (Hadiz, 2010). Also the rapid growth of puritan Muslim communities and conservative turn among general Muslim society following local and global political climate at the time (van Bruinessen, 2013). It makes the authority more permissive as these narratives are considered merely extreme views without any actual action.

### **Indonesian ISIS on Anti-Chinese Sentiment**

During the pandemic, anti-Chinese sentiment emerges again in ISIS social media network discussion. For instance, one group disseminate a video where many lookalikes Chinese were coming out from the airport's gate claimed as Jakarta's International Airport seems to look like Beijing Airport. This anti-Chinese sentiment rooted in the society back around the reformation, in 1998 there were huge riots in the capital city targeting the Chinese and their property. This sentiment was not started as a religious conflict but then escalate after Jakarta's general election in 2017 after the incumbent Chinese and Christian Governor accused of blasphemy and insulting

Quran verse before the election (Setijadi, 2017). This anti-Chinese and eventually become anti-Christian / non-Islam sentiment continuously become part of Indonesia's politics among the elite to gain certain group support especially Islamic conservatives who claim themselves as *pribumi* (native). However, we consider this narrative a minor compared to the anti-government narrative, but the potential of this narrative could bring sympathy to the extremist group should not be taken lightly.

Anti-Chinese sentiment also escalates in Islamic communities following Uyghur and Chinese government re-education camp policy. We can easily see sermons and videos condemning atrocities by the Chinese government portraying Chinese Communist versus Islam in all Indonesian Muslim social media platforms responding to developing issues in China. Besides Palestine, Rohingya, and Kashmir, Uyghur is massively discussed and drawn public protest by Muslims in Indonesia, and the doctrine of *ummah* or commonly narrowed the meaning to worldwide bonding based on Islamic faith become one of the natural fuels for this issue. Besides the issue of Chinese Uyghur, there is also Chinese sentiment based on economic depravity and political populist rhetoric against Chinese foreign worker and investment in Indonesia, this has continuously become a mainstream accusation toward the government and its policy that portrayed as pro-Chinese.

As a matter of fact, anti-Chinese rhetoric among Indonesian ISIS is nothing new, but the current pandemic situation caused by a virus that originated from China, flown of Chinese workers to Indonesia, and anti-Chinese-Communist sentiment following a bill proposal mentioned before make the rhetoric become more relevance to capitalize than before. Reports have also shown that some Indonesian ISIS members taking the initiative planning attack on the Chinese community di Indonesia. In 2019 terrorist perpetrators arrested by the police after stabbing Minister Wiranto known had discussed planning an attack targeting Indonesian Chinese target with his small group while the actual attack never takes place (IPAC, 2020). In well-documented court verdicts from 2012 to 2019 there were several failed

plans from Indonesian ISIS members to attack a Chinese temple in North Sumatra, rob Indonesian Chinese small business and store, and bombing Chinatown in Jakarta. All these plans are related to similar rhetoric toward what happened to Uyghur people, anti-Chinese, Communist, and the government portrayed as pro-Chinese.

### **Challenging Media Coverage**

With all of these findings above some media have proven failed to identify the nature of Indonesian Islamic State affiliates, their ideological basis, and the main goals of the groups. Failed to identify both, media then made fundamental misinformation to the public that ISIS will likely de-escalate their violent activities during the pandemic. While in fact ISIS clearly stated that its main goal is to establish a worldwide caliphate, meaning that every form of government in the world is its opponent. ISIS is also stating clearly that the instrument of the group is violent jihad, glorifying suicide attacks as a martyr, and urging its member to take opportunities brought by the pandemic for their cause.

Jihadist groups and ISIS affiliates in Indonesia also made it clear their goals and push factor to become a member of the group. There are 6 main mindsets background of jihadist in Indonesia, to establish an Islamic State, desire to fight against injustice and un-Islamic system, the claimed of truth legitimacy and closed-minded group, jihad and war is considered the only way, jihad and this way of life will bring them to heaven and rewarded by God, and the quest for personal live significance in individual context (Sarwono, 2012).

All this combination made common members who often act as executors believe in a very fatalistic ideology with life in a mortal world is no longer important because the immortal heaven promise is more appealing (Azra et al. 2017). Their slogan is “either live in glory, or become a martyr”, and the same slogan is also used by many non-violent Islamic groups in Indonesia. Because of that, there is no such thing as the absence of threats worldwide in this warfare against fatalist ideology that continues to grow stronger and deeper in the consciousness of some

community. In the case of the Islamic State, they might have lost their territory, leaders might be killed, funding might be cut from the source, but ideology is a much more complex issue to tackle.

Another important aspect of ISIS’s main narrative and goal is daulah or caliphate. The fact that ISIS is the only terrorist group that succeeds to form a caliphate makes the concept of the caliphate a very important part of ISIS propaganda and the main attraction for recruits. Indonesian ISIS continuously using the slogan “Daulatul Islam baqiyah” translated to “Eternal Islamic State” in their online chat and other publication. The spirit to establish a worldwide caliphate is still playing a major role inside Indonesian ISIS member minds, they have sworn allegiance to the new caliph and anything that prevent their cause to become reality will be considered enemy and killing is the only way. This cycle will not stop following the pandemic and we find no evidence that the threat will decrease, this cycle is an unending spirit of terrorism.

### **CONCLUSION**

There are three main intentions behind ISIS narratives in Indonesia. Firstly, to attract existing ISIS affiliates around Indonesia to take part by launching terror attacks across Indonesia and causing unrest in the society during the pandemic, either using usual tactics or other potential tactics like weaponing Covid-19. Secondly to radicalize broader populations and delegitimize government policy during Covid-19 and eventually blaming the whole system to intensify radicalization to its affiliates and attract recruit and sympathizer, and thirdly they are using the momentum of Covid-19, anti-Communist, and anti-Chinese sentiment as tools to reach broader Muslim population and potentially causing political uncertainty and even ignite horizontal conflict. All three show Indonesian ISIS’s ability to cope and adapt to the current development.

ISIS strategy is sophisticatedly designed by capitalizing on vulnerabilities during the Covid-19 pandemic. Before the pandemic, Indonesia’s society already had many vulnerabilities that developing constantly during the pandemic due to many reasons from economic depravity, hidden

ethnic-religious sentiment, growth of puritan and conservative groups, migration to digital space, and political momentum like the communist revival issue and framed anti-Islam policy during the pandemic. ISIS repeatedly using these issues in their narrative and daily conversation in social media observed in this research. The threat in digital space does not perish, it has been shifting and adapting to the broader target audience and capitalizing on developing issues within the society. From a more ideological based narrative to more policy and personalized narratives such as closing mosques, Communist revival, and Hajj pilgrimage cancelation that can reach out to broader Muslim populations.

Although several threats are not directly advocating violent action, continuous radicalization to broader Muslim populations and pre-radicalized populations of young people clearly make these narratives an investment for future violent extremism threat to Indonesia. The authority needs to be aware of this development, ISIS will not only likely conduct a physical attack during the pandemic but also attacking the heart and mind of broader Muslim communities. Unless the vulnerability can be diminished, or the narrative can be stopped which is not likely to happen in democratic Indonesia then this should be considered as a hidden threat that requires an immediate response.

Lastly, it is also clear that some media had been false covers ISIS and its threat by neglecting the fact that they are talking about an “unending spirit of terrorism”. There is no such thing as an absence of threats like mentioned by some of Indonesia’s media in warfare against the total destruction of the world system and civilization ideology oriented, with members who value death over life, and an asymmetric adversary like ISIS. This research concludes that the overall assessment of Indonesian ISIS threats is not likely to decrease solely because of the Covid-19 pandemic.

## REFERENCES

Ackerman, G., & Peterson, H. (2020). Terrorism and COVID-19: Actual and Potential Impacts. *Perspectives on Terrorism*, 14(3). pp. 64-65.

- Al Fatihin. (2018). 3 Serangan Istislahi Guncang Indonesia, *Al Fatihin* 10, p. 7.
- Ali, H., Nugroho, H., Ragawi, P., Huda, N., Lestari, K.W. (2018). Catatan Akhir Tahun 2018: Moving Forward, Alvara, p.22. Retrieved August 20, 2020 from <http://alvarastrategic.com/wpcontent/uploads/2018/12/Catatan-Akhir-Tahun-Alvara-2018.pdf>
- Al-Tamimi, Aymenn Jawad. (2020). Islamic State Advice on Coronavirus Pandemic, March 12, retrieved June 16, 2020 from <http://www.aymennjawad.org/2020/03/islamic-state-advice-on-coronavirus-pandemic>
- Al-Tamimi, Aymenn Jawad. (2020). Islamic State Editorial on the Coronavirus Pandemic, March 19, retrieved June 16, 2020 from <http://www.aymennjawad.org/2020/03/islamic-state-editorial-on-the-coronavirus>
- Arianti, V., & Taufiqurrohman, M. (2020). Security Implications of COVID-19 for Indonesia. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 12(3), 13-17. doi:10.2307/26915445.
- Azra, A. et.al. (2017). *Reformulasi ajaran Islam: jihad, khilafah, dan terorisme*. Maarif Institute for Culture and Humanity. Maarif Institute.
- Berlianto. (2020). Terkenal Sadis, ISIS Ternyata Takut Terlular Virus Corona, March 15, retrieved July 13, 2020 from <https://international.sindonews.com/berita/1556983/41/terkenal-sadis-isis-ternyata-takut-terlular-virus-corona>.
- Bona, M. F. (2020). 221.000 Calon Jemaah Haji Indonesia Gagal Berangkat, *Berita Satu*, June 2, retrieved August 19, 2020 from <https://www.beritasatu.com/megapolitan/640109-221000-calon-jemaah-haji-indonesia-gagal-berangkat>
- Gambhir, H. (2015). *ISIS's global strategy: A wargame*. Institute for the Study of War.
- Golose, P. R. (2015). *Invasi terorisme ke cyber-space*. Yayasan Pengembangan Kajian Ilmu Kepolisian. pp. 32-38.
- Griezis, M. (2020). Telegram’s anti-IS Campaign: Effectiveness, Perspectives, and Policy Suggestion. *Global Network on Extremism & Technology*. Retrieved January 11, 2021 from <https://gnet-research.org/2020/07/30/telegrams-anti-is-campaign-effectiveness-perspectives-and-policy-suggestions/>
- Gunaratna, R. (2016). The Islamic State’s eastward expansion. *The Washington Quarterly*, 39(1), 49-67. <https://doi.org/10.1080/0163660X.2016.1170479>.
- Hadiz, V. R. (2010). Political Islam in post-authoritarian Indonesia. *Centre for Research on Inequality*,

- Human Security and Ethnicity (CRISE), University of Oxford, Working Paper, 74.*
- Hanifiyah Media. (2019). Strategi Perang Gerilya Sebelum Meraih Tamkin, Hanifiyah Media. pp. 7&13.
- Horst, Heather A. and Daniel Miller (Ed.). (2013). *Digital Anthropology*. A&C Black. p.13.
- Huda, N. M. (2017). Intoleransi Kaum Muda di Tengah Kebangkitan Kelas Menengah Muslim di Perkotaan, WAHID Foundation, p.13. Retrieved August 20, 2020 from <http://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Intoleransi-Kaum-Muda-di-Tengah-Kebangkitan-Kelas-Menengah-Muslim-di-Perkotaan>
- Indikator. (2020). Perubahan Opini Publik terhadap Covid-19: Dari Dimensi Kesehatan ke Ekonomi? retrieved August 18, 2020 from [https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2020/07/Rilis\\_Surnas\\_INDIKATOR\\_21Juli\\_2020.pdf](https://indikator.co.id/wp-content/uploads/2020/07/Rilis_Surnas_INDIKATOR_21Juli_2020.pdf)
- IPAC. (2020). IPAC Short Briefing No.1: Covid-19 and ISIS in Indonesia, Intitute for Policy Analyses of Conflict, April 2, retrieved from <http://www.understandingconflict.org/en/conflict/read/89/IPAC-Short-Briefing-No1-COVID-19-AND-ISIS-IN-INDONESIA>
- Kruglanski, A. W., Gelfand, M. J., Bélanger, J. J., Sheveland, A., Hetiarachchi, M., & Gunaratna, R. (2014). The psychology of radicalization and deradicalization: How significance quest impacts violent extremism. *Political Psychology*. doi:10.1111/pops.12163
- Kumparan. (2020). Polling: Rumah Ibadah Tetap Buka di Tengah Pandemi Corona, Anda Setuju?, Kumparan, May 12, retrieved June 15, 2020 from <https://kumparan.com/kumparannews/polling-rumah-ibadah-tetap-buka-di-tengah-pandemi-corona-anda-setuju-1tOo1gqkg9r>
- Mahadevan, Prem. (2020). Cybercrime Threats during the COVID-19 Pandemic, *Global Initiative Against Transnational Organized Crime*, pp. 1-5.
- Maparessa, Achmad Alfus. (2019). Jalur Psikologis Teroris Mengungkap Misteri Pelaku Bom Bunih Diri di Indonesia, Pustaka HAKAKATUNA. pp. 107-112.
- Moghaddam, F. M. (2005). The staircase to terrorism: A psychological exploration. *American psychologist*, 60(2).
- Ong, K., & Azman, N. A. (2020). Distinguishing Between the Extreme Farright and Islamic State's (IS) Calls to Exploit COVID-19. *Counter Terrorist Trends and Analyses*, 12 (3). pp. 18-20. doi:10.2307/26915446
- Sanjaya, Yohanes Genius Putu. (2020). Strategi Pencegahan Serangan Teror di Indonesia: Studi Kasus Penggunaan Weapon Mass Destruction (WMD), Tesis Sekolah Kajian Strategik dan Global UI, (2020).
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2012). *Terorisme di Indonesia: Dalam Tinjauan Psikologi* Pustaka Alvabet.
- Schmid, A. P. (Ed.). (2011). *The Routledge handbook of terrorism research*. Taylor & Francis. Pp. 221-222
- Setijadi, C. (2017). Chinese Indonesians in the Eyes of the Pribumi Public. ISEAS Yusof Ishak Institute, Perspective 73.
- SETARA Institute. (2016). Siaran Pers tentang Laporan Survei Toleransi SMA Negeri Jakarta & Bandung Raya, SETARA Institute. Retrieved from <http://setara-institute.org/siaran-pers-tentang-laporan-survei-toleransi-siswa-sma-negeri-jakarta-bandung-raya/>
- Soderborg, S., & Muhtadi, B. (2020). Policy, Partisanship, and Pay: Diverging COVID-19 Responses in Indonesia. *Available at SSRN 3636486*.
- TribunNews. (2020). Segarang-garangnya ISIS, Ternyata Takut Virus Corona, March 17, retrieved from <https://www.tribunnews.com/internasional/2020/03/17/segarang-garangnya-isis-ternyata-takut-virus-corona>
- Van Bruinessen, Martin (ed.). (2013). *Contemporary Developments in Indonesian Islam Explaining the 'Conservative Turn'*, Institute of Southeast Asian Studies.
- WAHID Foundation. (2017). Hasil Survei Nasional 2016 Wahid Foundation–LSI, WAHID Foundation, retrieved from <https://wahidfoundation.org/index.php/publication/detail/Hasil-Survei-Nasional-2016-Wahid-Foundation-LSI>
- Yuen, Derek MC. (2014). *Deciphering Sun Tzu: How to Read the Art of War*. Oxford University Press.
- Zelinsky, A., & Shubik, M. (2009). Research note: Terrorist groups as business firms: A new typological framework. *Terrorism and Political Violence*, 21(2), 327-336.

## CONSPIRACY THEORIES AND MODERN DISJUNCTURE AMIDST THE SPREAD OF COVID-19 IN INDONESIA

### TEORI KONSPIRASI DAN KETERPUTUSAN MODERN DI TENGAH PERSEBARAN COVID-19 DI INDONESIA

**Ibnu Nadzir**

*Research Center for Society and Culture, Indonesian Institute of Sciences (PMB-LIPI)*

*[Ibnu.nadzir@gmail.com](mailto:Ibnu.nadzir@gmail.com)*

#### ABSTRAK

*Di tengah penyebaran wabah COVID-19 di Indonesia, pemerintah banyak mendapatkan kritik karena ketidakmampuan dalam merumuskan strategi penanganan yang tepat. Selain dari tidak berfungsinya birokrasi, tingkat kepatuhan yang rendah dari warga negara Indonesia terhadap protokol kesehatan, menambah kerumitan dampak COVID-19. Salah satu faktor yang berpengaruh dalam perilaku tersebut adalah tersebarnya informasi palsu dan teori-teori konspirasi yang berkaitan dengan virus tersebut. Bagaimana kita bisa menjelaskan luasnya persebaran teori konspirasi di tengah ancaman virus COVID-19 di Indonesia? Artikel ini mengajukan argumen bahwa persebaran teori konspirasi di tengah pandemi merefleksikan kontestasi yang tengah berlangsung terhadap legitimasi politik di antara negara dan masyarakat. Untuk menjelaskan argumen tersebut, artikel ini akan memaparkan tiga momen kritis yang menjadi landasan dari persebaran teori konspirasi di Indonesia. Pertama, teori konspirasi digunakan sebagai pondasi dari rezim otoritarian Soeharto, dan kemudian melekat dalam institusi sebagai instrumen penting untuk mempertahankan kekuasaan. Kedua, pertautan antara ekosistem demokratis dan penggunaan media sosial memungkinkan masyarakat untuk merebut teori konspirasi sebagai alat perlawanan dan skeptisisme terhadap pemerintah. Ketiga, ketegangan negara dan masyarakat terkait otoritas kebenaran tersebut menguat dalam konflik terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Pemerintah mencoba mempertahankan legitimasinya melalui ketidakterbukaan terhadap informasi tentang COVID-19. Sebaliknya, sebagian kelompok masyarakat merespon ketidakterbukaan tersebut dengan melakukan penyebaran teori konspirasi yang menjustifikasi ketidakpatuhan pada protokol kesehatan. Kontestasi ini memperburuk dampak dari penyebaran COVID-19 di Indonesia*

**Kata Kunci:** teori konspirasi, COVID-19, Indonesia, media sosial

#### ABSTRACT

Amidst the global outbreak of COVID-19 in Indonesia, the government has been under the spotlight for not being able to formulate a proper response. Aside from the malfunctioning bureaucracy, the low compliance among citizens toward public health advice complicates the impact of COVID-19 in Indonesia. One factor that contributes to the attitude of society is the spread of false information and conspiracy theories associated to the virus itself. How do we explain the propagation of conspiracy theories under the threat of COVID-19 in Indonesia? The article argues that the spread of conspiracy theories amidst the pandemic reflects the on-going contestation of political legitimacy between the state and society in Indonesia. To elaborate this point, the article elucidates the three critical junctures that buttressed the propagation of conspiracy theories. First, conspiracy theory was utilized as a foundation of authoritarian regime of Soeharto, and later became an institutionalized tool to maintain its power. Second, the entanglement between democratic ecosystem and proliferation of social media after Reformasi, has enabled society to appropriate conspiracy theories as a form of resistance and skepticism toward government. Third, the tension between state and society in regards to the authority manifested on the contention on COVID-19 management in Indonesia. The government have been trying to maintain the legitimacy by being secretive on COVID-19 information. At the same time, some elements of society responded to the secretive government with propagation conspiracy theories that also justify public disobedience toward health protocols. These combinations have further exacerbated the impact of COVID-19 in Indonesia.

**Keywords:** conspiracy theory, COVID-19, Indonesia, social media

“Good morning, should there be anyone who would like to challenge me to go to hospital to interact with COVID patients, or challenge me to inject myself with covid virus, I will accept that challenge. With conditions: should I survive, all doctor in Indonesia, all Indonesian media/celebrities/SJW/musician/influencer/celebgram that have been pushing the idea of lockdown SHOULD VOLUNTARILY ASKED TO BE IMPRISONED since they have been propagating wrong solution and have caused harm for the whole Indonesian society.”

((@jrxsid, 28 April 2020)

## INTRODUCTION

The excerpt above is taken from the Instagram posting of Ari Astina, better known as Jerinx, a well-known drummer of Superman Is Death, a punk band based in Bali. The content was just one of many social media rants Jerinx actively propagated since Indonesian government applied partial lockdown to mitigate the impact of COVID-19. Jerinx believes that the order to lockdown, as well as the mainstream narrative about the danger of COVID-19 is part of global conspiracy. The threat of COVID-19 according to Jerinx is a public lie manufactured by global elites such as Bill Gates that are looking to make profit out of the fear of many states and society.

As silly as it sounds, the influence of figures such as Jerinx should not be underestimated. On *Instagram* alone, Jerinx has almost one million followers. Granted, the number of followers does not necessarily mean that they agree with all the points presented by the drummer. Jerinx’s number of followers also does not automatically translated to actual influence outside of social media platform. Nevertheless, on social media platform such as *Instagram*, Jerinx could talk about almost anything without any gatekeepers as implemented in mainstream media.

Jerinx is not the only social media persona that entertain conspiracy theories in Indonesia. There are many other figures that, like Jerinx, utilized social media platforms to propagate conspiracy theory as well. At the same time, based on their interactions with followers on social media, many also seem to approve the skepticism and distrust toward government regarding

the actual threat of COVID-19. The dissonance on COVID-19 is publicly demonstrated on social media as well as public space, in contrasts to the day-to-day COVID-19 death toll presentation by government’s spokesperson in television.

Reports from many areas also shown that the obedience toward COVID-19 health protocols is patchy at best. In Jakarta, city with the highest number of patients, around 60% of its citizen decided to stay at home during the early implementation of partial lockdown. But, after couple of months many chose to conduct normal activities and directly correlated to the increase of patients (Umasugi, 2020). The situation is even worse in Surabaya which recently becomes the new hotbed for COVID-19. In public areas, more than 80% of Surabaya residents do not use face mask and also neglect the social distancing protocols (Frd, 2020). At the same time, the official cases of COVID-19 in Indonesia went beyond 100,000 cases at the time of the writing of this article.

Indonesian government tend to attributes the failure to prevent the spread of COVID-19 to the disobedience from citizen to follow the health protocols. Similar notion could also be found on various digital platforms, where Indonesian internet users would blame and mock other citizen, either for their ignorance, lack of education or even religious fanaticism. The existence of social media figures who propagated conspiracy theories in this regard, further strengthens the frame of thinking that posits citizen’s ignorance as the main reason behind the spread of COVID-19.

The propagation of conspiracy theories in the past few years, has been very salient within Indonesian public sphere. Alongside the misinformation or hoax, conspiracy theories which also have its distinct characteristics, are easily found to be shared on social media or social messenger. Prior to the pandemic, MAFINDO (social collective who focuses in debunking misinformation) had found the health issues to be one of the most popular false information in Indonesia (Wiyanti, 2020). Anti-vaccine group for instance, they have been propagating conspiracy that frames vaccines as an evil plot from secret elite group either for commercial or political interest. Nonetheless,

these theories are usually located on the fringe spectrum of society and could not gain significant traction into mainstream discourse. The case is rather different with COVID-19 conspiracies, the theories become very significant; it affects various kind of policies.

Some scholars have conducted the study on how the pandemic increased emotional burden in society (Abdullah, 2020; Megatsari et al., 2020). The study aims to analyze variables associated with the community psychosocial burden (anxiety level). Other scholars discussed the limitations of online learning as implemented by Ministry of Education (Rasmitadila et al., 2020). Another crucial issue is the discrepancy between government policies and its reception in society. Lazuardi (2020) demonstrated the problem with governmental program through the specific case of Yogyakarta. In term of gap between facts and false information, In term of gap between facts and false information, Nasir et al. (2020) also found there are many misinformation about COVID-19 in society. Notwithstanding the valuable contributions of these articles, the discussion on conspiracy theories is still nascent.

As comparison, the topic of conspiracy theories and its link to the spread of COVID-19 has been discussed in many regions. The survey in UK has demonstrated how belief on conspiracy theories links to people's disobedience for health protocols (Allington et al., 2020). In USA, it is found that social media influencers plays a big role in the propagation of conspiracy theories to wide audiences (Gruzd & Mai, 2020). On the other hand, based on the case in Pakistan, Inayat Ali (2020) argues the importance of anthropological work to comprehend the spread of conspiracy theories with social and political contexts. It is under the similar point of view, that this article would seek to understand contemporary prominence of conspiracy theories and its link to Indonesian social and political contexts.

The salience of conspiracy theories amidst the pandemic, thus raised questions to be explored in this article. Does the salience of conspiracy theories emerged as a distinct phenomenon triggered by the unprecedented crisis? Or, is it an existing socio-political feature in Indonesia that

later to be amplified by the pandemic? Rather than putting the blame on conspiracy theories, as the reason behind public disobedience against COVID-19, the article examines the political and social disjuncture that enables the proliferation of conspiracy theories in contemporary Indonesia.

The article argues that conspiracy theories are deeply entrenched within Indonesian socio-political fabric. Throughout history, the production and propagation of conspiracy theories, reflects the never ending tension between state and society on the claim of authority in regards of public information. To elucidate this argument, I will be looking into three specific political junctures that shapes the development of conspiracy theories in Indonesia. The first juncture is the establishment of New Order as the authoritarian regime. I would argue that from the start, conspiracy theories has become one of the most important tools of the regime to initiate -and later maintain- its power. The regime was started by Manichean narrative, which portrays Soeharto and the armed forces as a hero, that rescued Indonesia from the evil forces of Indonesian communist. The same narrative was brought up from times to times that it becomes the conspiracy theory that entangles to Indonesian politics and remain to be one of the most influential tropes until these days.

The second juncture is *Reformasi* that brought democratic system in Indonesia as well as many different social and political turmoil. As has been discussed by many scholars (e.g. Hefner, 2000; Sidel, 2006), the absence of repressive regime has opened up competition between many social and political forces. Democratization has made Indonesian citizens to be disillusioned with the authority of government, including their role to be the source of reliable truth and information. The skepticism for instance, was reflected from the high demand of transparency during the early stages of *Reformasi*. At the same time, the freedom to produce and propagate information also bred various conspiracy theories within society. These theories were not just only targeted towards government but also to element of societies perceived to be rivals based on primordial identities. In this context, the growth of social-media usage has amplified various horizontal cleavages, since

conspiracy theories are now having a much larger outreach than ever.

The third juncture is the pandemic of COVID-19 in Indonesia. The spread of virus in Indonesia has exposed various problems long attached to Indonesian politics. Within such disruption, various conspiracy theories are propagated through the now matured social media ecosystems. The inability of government to provide transparent data and reliable response has triggered the conspiracy theories to come at the fore of public sphere online and offline. Moreover, the inconsistent implementation of what often proposed as ‘scientific facts’ of the virus has erode the trust to government and also public health officials. The long contentious relationship between state and society regarding the claim of authority is now expressed to public debates regarding the true nature of COVID-19. These contested authorities have been detrimental to any efforts to mitigate the impact of the virus in Indonesia.

## **REASONING AND FEATURES OF CONSPIRACY THEORIES**

The spread and belief of information that contradicts the existing facts, have been intriguing many scholars for quite some time. On these issues, there are several conceptual frameworks that despite some overlapping features, have specific traits that separate one category from the others. One term that is commonly used by scholars is misinformation. Kuklinski et al. (2000) define the condition of misinformed as “people hold inaccurate factual belief’s, and do so confidently.” Based on their understanding, a group of people that does not have any knowledge regarding particular issue, then could not be categorized as misinformed, rather they are uninformed. The conceptualization is important, because people who holds strong belief on inaccurate information, are most likely will shape their behavior according to their belief. As demonstrated by the case of COVID-19, misinformation could potentially lead people to conduct dangerous behavior. For instance, supposed to be a group of citizens believe that COVID-19 is not a real threat, these people might endanger themselves

and other people as well, since they would not want to comply to health protocols.

The second concept that also intersects with these issue is rumors. The concept is rather different from misinformation, since rumors still hold possibilities to be later proven as truth (Jerit & Zhao, 2020, p. 79). Rumors then is often to be associated with information that might have some partial truths, but the whole picture is remain ambiguous for most society. One illustration that is relevant in Indonesia, is rumors regarding corruption. It is common to in society to find the talks and hearsay regarding the wealth of public officials, particularly those that openly flaunt their wealth in public. People would secretly questioned the sources of their wealth, particularly since they know that the officials salary could not be the source of it. Yet, aside from high profile corruption cases, most of the times it is hard to confirm those public suspicions. The suspicion thus manifested on rumors that spread around within society. It is a phenomenon which was at the time of ‘New Order’ would be categorized as ‘open secret’ among society (Pemberton, 1999, as cited in Butt, 2005, p. 418). Nonetheless, it still has much relevance after democratization, particularly since many of those suspicions are later justified by public arrest of the alleged corruptors. Nonetheless, it still has much relevance after democratization, particularly since many of those suspicions are later justified by public arrest of the alleged corruptors.

In comparison to misinformation, there are shared distinct specificities between rumors and conspiracy theories. Both concepts refer to social phenomenon where the concept of truth is elusive and ambiguous in nature. Conspiracy theories most of the times have a sensational narrative, yet just like rumor, it has some element of truths that enable conspiracy theories to resonate its audience. One instance is the Pizzagate conspiracy that was emerged in US during presidential election in 2014. The theory suggests that political elites from Democrat party, covered up a pedophiles circle ring, and hides their activity on the secret underground chamber located behind one pizza restaurant. The conspiracy theory was propagated by many right wing online platforms. Strongly believing the theory, one man armed



himself with heavy guns and raided the pizza restaurant, only to find that there is not any hidden chambers nor pedophile activities in that establishment (Hsu, 2017).

While many dismissed the theory as ridiculous, later criminal cases might give the conspiracy some credibility. One case is the arrest of Harvey Weinstein, film mogul, that used his power to sexually assaulted several women. The other is Jeffrey Epstein, an oligarch that was caught for pedophile activities that was also linked to other powerful figures such as Prince Andrew from UK. While these cases do not directly link to Pizzagate conspiracy, the narratives that powerful rich figures utilized power to sustain their practices of sexual abuse is the same. Anxiety toward objective reality thus becomes the important reference for conspiracy theory.

Despite the similarities with rumors, conspiracy theories is still quite distinct than ordinary rumor. Oliver & Wood (2014) suggests three distinct features that separates conspiracy theories from common opinion: *First*, the believer of conspiracy theories explained the extraordinary social and political event as the work of 'unseen, intentional, and malevolent forces.' *Second*, conspiracy theories are commonly framed within the Manichean frameworks that perceive the world to be a struggle between good and evil. *Third*, mainstream explanation are often dismissed by conspiracy theories as cover-up to hide the truth regarding the evil elites from general public.

What kind of social and political situations that facilitates the proliferation of conspiracy theories? The existence of conspiracy theory itself has been developing for quite some time in many regions in the world, therefore there were plenty offered explanations to understand the phenomena. One important explanation posits that belief toward conspiracy theories is highly associated with two predisposed psychological predispositions (Oliver & Wood, 2014, p. 954): *First*, is tendency to comprehend the explanation of extraordinary events as the work of the unseen forces (Shermer, 2002). *Second*, is the interest to Manichean narratives that perceive extraordinary event as a struggle between good and evil. These traits are quite consistent among

those who believes conspiracy theories irrespective their political inclinations.

Other research focuses on how conspiracy theories are associated with motivated reasoning. Other research focuses on how conspiracy theories are associated with motivated reasoning. The proposition of this finding is that conspiracy theory are the outcome of reasoning processes that functioned to strengthened beliefs or attitudes when someone is confronted with information that contradicts personal belief (Miller et al., 2016). In consequence, someone with strong predisposition toward religious or political point of view thus are more prone to bias toward conspiracy theories that solidify their personal belief. The tendency to believe the conspiracy theories is further exacerbated, should the politician aligned with the political belief publicly endorsed the theories. The consequence of this action will further reinforce the belief toward the conspiracy theory.

While the discussion on individual reasoning is important to understand the appeal of conspiracy theories, this article take a different path. It will focus on larger social, cultural and political structures that enable the development of conspiracy theories. One important research that touch the subjects, also happened to be conducted in Indonesian region thus has much relevance to the topic raised in this article. Butt (2005) conducted research on conspiracy theories related to AIDS prevention campaign in Papua. During her fieldwork, she found many conspiracy theories among her informants that perceive the spread of AIDS in Papua region as part of an organized Indonesian plan to depopulate the natives Papuan. While it is easy to dismiss such a theory as irrational thoughts from uneducated people, Butt decided to went into another direction and examine how such theory reflects the complex contentious relationship between the natives Papua to Indonesia as a nation state.

The way Indonesian public officials and state apparatuses perform injustice and inconsistent policies for Papuans, has foster conspiracy theories among the natives. In this context, there are substantial gaps from the way AIDS prevention framework are designed in global standards, to

how Indonesian health officials impose moral superiority within it, and how it is perceived among the Papuan natives. The study thus found how conspiracy theories serve to fill the gap within modern framework imposed toward the Papuans.

The question on modernity is also relevant to the research conducted in Himalayan region by Mathur (2015). On this region, he observes the unusual occurrences involving behaviors of several species animal. The first case is the aggression of leopard in Himalaya that has been claiming many human victims for years. While considered to be more rare incidents, similar hostility between beast and human is also relevant to the species of black bear. Around the same period, the musk deer, whose organs are valued highly in Chinese traditional medicine black market, is getting much more rare in several last decades. The Indian public officials explained these cases as a result of climate change impact on this region. However, the local natives suggest other form of explanations where the state are widely believed to be the culprit or at least involved on these cases changing animal behaviors.

The attacks from leopard is said to be the consequence of deliberate actions from the plain residents with blessing from the state, to endanger the lives of locals in highlands. Alongside the theory, there are many eyewitnesses' accounts that claimed they had seen a number of vans that released the leopard on high terrain. Likewise, while government representatives believed that the decreasing population of musk deer as a direct results of climate change, the residents points their finger toward black market trade that involves public officials. Regardless, the portion of truth behind every theories, one thing that is apparent is the gap between official explanations and the counter information perceived by local residents.

Parallel to the study of AIDS in Papua, public officials are ready to resort to modern idioms either on health information or climate change to mask the inconsistencies of public policies that is apparent for locals on daily basis. At the same time, local residents are witnessing how these information within modern frameworks never actually deliver the promises to improve

their lives. In this regard, the conspiracy theories enabled the locals to make sense the disjuncture they experienced on daily basis.

Another aspect that is also important from these two research is the way they demonstrate the unequal relationship between state apparatus and local natives. The scientific information is not only irrelevant for locals but also functioned as an important tool to maintain its power toward the natives people. The domination of the state profoundly present from the injustice and discriminative policies conducted by public officials that utilize modern and scientific terms. For natives in Papua or highland Himalaya, the theories thus essential to contest the state authority among which by providing counter narratives against the official explanation.

The framework utilized on these research, I would argue is also relevant to comprehend the contemporary spread of conspiracy theories in Indonesia. Granted, the state is much larger than local communities which were previously discussed before. Nonetheless, as we would examine through the article, the contentious relationship between state and society in regards authority to define the truth, is also deeply entrenched within Indonesian socio-political fabric. In fact, as we will be discuss in the next section, the state played a big role in utilize conspiracy theories to maintain its power.

## **CONSPIRATORIAL BEDROCK OF AUTHORITARIAN STATE**

The authoritarian regime of New Order, under the leadership of Soeharto, had utilized the conspiratorial framework since the beginning of their ruling. Among scholars of Indonesian politics, the event on early morning 1<sup>st</sup> September is widely considered to be the one of the most critical juncture in Indonesian political history. In the early morning, a number of mid-level armed forces decided to kidnap a number of generals from their residence to be taken and interrogated in the air force airport. Afterwards, the group that named themselves G-30-S (*Gerakan 30 September*) took over RRI (Radio Republik Indonesia), and broadcasted the reasoning behind their actions. They stated that the actions

are necessary since the generals -who were their superiors in armed forces- had planned a coup d'état against President Sukarno (Roosa, 2008, p. 4). Later on, statement from one of the actors also mentioned how these movement suspicioned that the generals had collaborated with United States of America to topple the power of Sukarno (Roosa, 2008, p. 206). Under the tension of Cold War, the US government had major concern to the development of communism in Indonesia under the leadership of Sukarno. Moreover, internationally Indonesia was also politically close with communist power like USSR and China.

The kidnap and killing of several general was met by resistance with other faction within armed forces. Several military units under the leadership of Soeharto, a young general at that time, quickly blamed PKI (Indonesian Communist Party), as the culprit behind the kidnap and killing of these generals (Roosa, 2020, p.60). In doing so, the army made a rapid action to reclaim strategic broadcast facilities of RRI. They broadcasted the propaganda regarding the role of PKI under the leadership of Aidit, as the one who planned the coup d'état. Under this narrative, the military was justified to do any means considered necessary to quell the existential threat of communism in Indonesia. As noted by many scholars, these series of events thus became the pretext of mass murders toward anyone accused to be associated with communism (Roosa, 2008). For at least the next two years, under the pressure from military (Leksana, 2020; Melvin, 2018), it is estimated that the killing has taken casualties ranging from 500.000 to 1.000.000 people (Cribb, 2001; Melvin, 2018). Another tens of thousands were jailed without any proper trial, and had to suffered the stigma for being associated with communist even after their imprisonment. The mass murder also paved the way for Soeharto to took over presidential seat in Indonesia from Sukarno.

From the very beginning of these events, both military factions employed conspiratorial framework to justify their political actions. The G30S movement justified their actions with the narrative that they were trying to prevent coup d'état planned by the kidnapped generals. Soeharto and his army created other counter-con-

spiracy narrative to justify their actions in killing those who were accused as communist. In such Manichean framework, Indonesian communists were portrayed not just as political rivals but as the source of evil and immorality. Indonesian military also then published false reports that stated PKI had tortured the kidnapped generals. Later on, Anderson (1987) published a counter document based on the forensic reports that dismissed such portrayals. The military also smeared Gerwani, woman organization affiliated with PKI, by circulating rumors on how the woman activists conducted sexual orgy around the corpse of the generals (Wieringa, 2002). On the other hand, Suharto and the armed forces under his command were portrayed as the savior of this nation (Kingsbury, 2003). The binary opposition between the good and evil thus became the bedrock of authoritarian regime of New Order.

Alongside the regime consolidation, the conspiracy regarding communist became well entwined with Indonesian politics. The conspiratorial framework that portrays PKI as the source of an evil threat, was also maintained through series of cultural products (Herlambang, 2011). The regime commissioned an official film regarding the chronology on the night of 30<sup>th</sup> September. Official military version of the events is used for the main reference. In the film, PKI affiliated characters are depicted as immoral figures. Moreover, the film was mandatory to be watched by all students in Indonesia. The memory of the sadistic torture on generals, therefore is ingrained to many Indonesian students, irrespective the accuracy of such account.

In everyday public discourse, the term communist then transformed beyond the real political rivals, into the elusive bogeyman that could be utilized as label for any societal elements deemed to be dissident toward government. Labor movements for instance, practically absent since the rise of New Order, found it hard to mobilize since any protest aimed against their employers would be easily portrayed as PKI (Hadiz, 2002). The consequence of this accusation could be dire, from intimidation, torture, even killings by state apparatus. A case on point is Marsinah, a labor activist that organized a workers strike for the

raise of wage demand. The factory refused to fulfill the demand; they utilized state security apparatuses instead to quell the protest. The protest was portrayed to be similar with the practices conducted by PKI in the past, hence Marsinah was taken and interrogated. Later on, she was found to be dead, and forensic analysis concluded that the reason of her death is torture (Avonius, 2008).

The label of communists was also attributed to student movements. Since 1978, the regime applied draconian control to depoliticize university students through the regulations of NKK/BKK (Sastramidjaja, 2016, 165). Therefore, when student movements started to be active again around the 80's, the military utilized various means to discredit the legitimacy of their mobilization. Among the most important tool of New Order, is to associate student movements as the political heir of communist in Indonesia. The security apparatuses applied the label of communist to almost any student movements that demonstrate dissent against the regime (Sastramidjaja, 2016, p. 252-256). The student movement were portrayed as a threat to the national security. In consequence, the security apparatuses felt justified to employ violent acts since these students posed an existential threat to their source of power. Among the outcome of such logic, is the torture and alleged killings to number of Indonesian activist students during the dawn of New Order.

While PKI was the main conspiratorial narratives manufactured by government, there were other form of conspiratorial theories that were used by state apparatus. One of the most important scapegoat were groups affiliated to political Islam. Despite the small numbers and largely unorganized during the height of the authoritarian regime, groups affiliated to political Islam often described as a threat against national security. In 1982, New Order issued an order that every organization must use Pancasila as the sole basis of organization. Many Islamic organizations protested the decision since they believe that the regulation is contradictory to Islamic belief (Ichwan, 2004). Some of the hardline groups were then portrayed as a threat of the nation that conspired to topple the legitimate government.

In response, government used its military apparatuses to conduct violent measures against these perceived threat.

One example of such instant was Talang Sari tragedy. It refers to the killings conducted against a number of villagers in Lampung that were framed as subversive movement. The military used heavy artilleries and weaponries to conduct a massacre towards hundreds of villagers that were almost defenseless. In the morning after the massacre, the survivors (mostly women) were rounded, the armies pulled their headscarves and yelled, "these are the wives of PKI (Kontras, 2006)." While the statement sounds contradictory to the initial narrative—a group that was accused to be radical Islam but at the same time being communist—the action fits the earlier framework where PKI functions as an abstract reference of evil.

Despite such atrocities, there were not many criticism aimed toward the killings. One of the reason behind the silence was how military controlled the narratives through official report that was also referred by mainstream media (Akmaliah, 2016). Most of these reports framed the villagers as a dissident group that threatened the security and stability of Indonesia. The violence was overlooked since it was considered as a necessary action to protect the security and stability of Indonesia.

In the final days of New Order, the demand for Soeharto to step down from this office was really strong. The push for him to resign came not just from activists and students but even from Suharto's closest confidantes (Amir, 2013, p. 152). Numerous ministers had resigned from their positions. Mass rallies to push reform were performed on many large cities all over Indonesia. Meanwhile, the inflation went to the level that was unprecedented under the leadership of Suharto. In desperation, security apparatuses propagated conspiracy theories to help keeping Suharto and its regime stay in power. One salient theory described PKI as the one that influenced students to protest and demand the reform.

Another theory was concocted by a group of intellectuals that is affiliated with Prabowo Subianto (Hefner, 2000, p. 202). They put the

blame of crisis in Indonesia to external forces that scheme to topple Soeharto from his presidency. The theory suggests that the leadership of Indonesia under Suharto has threatened global order, particularly Jewish oligarchs. It was said that they are threatened since Indonesia is the largest Muslim majority countries in the world. Therefore, Jewish conspiracy creates a plan to initiate economic crisis as a pretext for demand of reform. The theory also posits that from within the country, the conspiracy was supported by Chinese ethnic group that never has loyalty to Indonesia in the first place. The propagation of such theory was culminated in ethnic pogrom against Chinese minority in Indonesia. Nonetheless, these theories could not prevent the reform pushed by many activists all around Indonesia. Yet, despite the resignation of Suharto political reform in Indonesia, various form of conspiracy theories still lingers.

## FRAGMENTATION OF TRUTHS IN DEMOCRATIC INDONESIA

One important change happened alongside the democratization, was the void of centralized power that the defines New Order as a regime. Indonesian reform has made the existing social and cultural forces in society to compete with one another in reclaiming the public authority (Barker & van Klinken, 2009). What was once a hierarchical political arrangement thus changed into fragmented source of authority now located both in state apparatuses and also society. It is now a political landscape where the boundaries between those two is much more blurry than before (Gupta, 1995). One of the dire outcome of these rapid changes was the ethnic and religious conflicts all around Indonesia.

Conspiracy theories were salient feature in many primordial conflicts that happened during the initial years of *Reformasi*. While during the authoritarian regime the state holds dominant control of conspiratorial narrative, the manufacture of these frameworks is now also located within society. Should we follow the proposition of van Klinken & Barker (2009), it is much harder to differentiate these two entities in post-Reformasi Indonesia. A case in point is Moluccan conflict,

where the society was split into two main faction based on their religious affiliations. The conflict was initially started from minor dispute between a group of youths from different villages. The conflict was then escalated into larger incidents where mosque and church were burned (Qurtuby, 2016, p. 23). It did not long before the previously minor disputes turned into an all-out war between every Moslem and Christian in Maluku.

The features of conspiratorial narratives were already present from beginning. One of the first large scale clash was started from the false rumors attacks from Muslim rioters to one of the church (Qurtuby, 2016, p.23). Each group imagined themselves as the representation of good against their evil relatives who has different religion. Moreover, the conflict in Maluku was imagined as the intentional cabal from groups outside of Maluku to reduce the influence of religious rivals in the region. The Moslem faction believes that the Ambonese Christian, with support from Jewish and Christian organizations planned to eradicate the existence of Islam in Maluku (Qurtuby, 2016, p. 56). Christian faction also felt similar animosity against their religious enemies. As a part of religious minorities in Indonesia, there was a strong imagination that the conflict could eventually Islamize the whole Maluku should the Muslim won against them (Qurtuby, 2016, p.77). The perception felt even more justified with the participation of Jihadist from outside the region in Maluku conflict.

It is not the place of this article to examine the truth-value of these perceptions, rather these narratives demonstrate how conspiratorial features were prominent in Maluku conflict. Rumors, suspicion, and animosity against the enemies of religious or ethnic groups were found in many other primordial conflicts as well. Police officials claimed that military conspired to make them looked incompetent in conflict; some Islamic figures believes that the conflict was planned by Christian, Jews and Communist; while rumors among Christian side suggests that Muslim factions intentionally provoke them to create the communal conflicts (Mcrae, 2008). These myriad of rumors heightened the tension felt by those who are impacted during Poso conflict (Aragon, 2001).

Conspiracy theories were not only found in large scale ethnic or religious conflict. The narratives are also present as a crucial tool among vigilante groups to produce moral panic usually against minority groups. Religious minority group such as Shia followers, have been experiencing more persecutions and discriminations after the fall of the authoritarian regime. The prejudices against Shia community has been dominant among conservative Islam in Indonesia even during the time of New Order. However, unlike large scale religious conflicts, the animosity is not always expressed openly in public. Yet, from time to time the sentiment would burst that in some incidents would lead to violence. Within one decade since the democratization of Indonesia, there are multiple local or national incidents where Shia community faced public persecutions.

In early years of *Reformasi*, IJABI (Ikatan Jemaah Ahlul Bait Indonesia) was established officially as one of the earliest organization that openly embrace the identity as Shia organization. In the same year, a group of people attacked Shia pesantren located in Batang, Central Java (Hasim, 2012). Similar form of attacks happened several times throughout the years in all over Indonesia, including the Sampang incident (Formichi, 2015). The Sampang incident still left many families being displaced from their village without any certainties regarding their future (VOA Indonesia, 2018).

To justify these attacks, the perpetrators have portrayed Shia community as the ‘threatening other’ (Ichwan, 2016). On many websites identified as Islamic, it is easy to find contents that frame Shi’a community as evil secretive group that plans to eventually control Indonesia. *Muslim.or.id* for instance, published a translation from the document claimed to be a leaked secrets of Shi’a’ that reveal their ultimate plot to have revolution against the legitimate leaders of Indonesia (Addariny, 2009). Around six years after published article, member of ANNAS (*Aliansi Nasional Anti Syiah Indonesia*) claimed to have testimony from ex-member of Shi’a that exposed the plots of this minority groups to have Indonesian revolution in 2020 (Muttaqin, 2015). Aside from these revolutionary agenda, Shi’a

community is also framed to be sympathetic, if not fully collaborative with Jewish international agenda (Eramuslim, 2020). This association further cemented the idea that Shi’a community is threatening Islamic community in general, aside from Jewish that is also commonly framed as the source of problems for Muslim.

One of the key that enables the dispersion of conspiratorial narratives in democratic Indonesia, is the development of digital platforms. During Maluku conflict, Bräuchler (2003) observed how Internet platform was crucial for both Islamic and Christian camps in antagonizing their perceived enemies. Website and mailing list became the crucial medium to portray narratives that positioned themselves to be threatened by powerful evil. The utilization of this platform, served to amplify and escalate the conspiratorial framework in Maluku, that the conflict is more than just regional disputes. Rather, it is a representation of a holy battle between Islam and Christian that involves the interest of global communities. In consequence, both religious factions in Maluku gained support from international networks and further escalated the conflict.

Since then, the use of Internet in Indonesia have been growing steadily. Recent research suggests that Indonesia has around 171 million internet users (APJII, 2019). From the same survey, almost a quarter of them consider social media as the main reason they use Internet. There are also around 130 million users of Facebook and 62 million users on Instagram (Hootsuite & Wearesocial, 2019). These findings are important since social media is the evolution of Internet platform where its users are also encouraged by algorithm to actively interact and produce content. Therefore, almost anyone with digital platforms has their own potentials to concoct their own version of conspiracy theories, and able to propagate it freely on the same platforms.

In 2017, as observed by Lim (2017), social media is instrumental in the mobilization of identity politics particularly aimed against Ahok, the incumbent Governor. The candidate who happened to hold double minority status (Chinese and Christian), was accused to have conducted blasphemy against Islam. Ahok’s speech that

mentioned Quranic verses, was circulated through multiple digital platforms such as Facebook, Instagram, and also WhatsApp Messenger. The mobilization then is also manifested through Aksi 212, arguably the largest mass mobilization has ever seen in Indonesia since Reformasi in 1998.

One of the reason why the incident could grow to this scale derives from the framing itself. The public anger was addressed not limited to the figure of Ahok and his action, rather of what he represents in Indonesian politics. Ahok's speech was framed not as single solitary incident, rather represents the larger plan among Chinese and Christian communities to control Indonesia not just in economy but political realm as well. In some version, the narratives of conspiracy even included the participation of communist from China (Ichwan, 2016). These kind of conspiratorial narratives were produced and dispersed through digital media platforms that further strengthened the sentiments that were already shared in offline interactions.

Many of the tropes in popular conspiracy theories, such as the threat of other religion, economic dominance of Chinese, or secret plan of minority religious group could be traced even long before New Order regime. Previous scholar (e.g. Formichi, 2015; Mujiburrahman, 2006; Sidel, 2006) have suggest that these issues were prominent from quite a long time. Nonetheless, as discussed before, democratization in Indonesia has shaped conspiracy theories, particularly in term of the determinant authorities and mode of dispersion. The state currently is not the single dominant actor that produce and utilize conspiracy theories in maintaining its power. Elements of society also hold certain amount of authority in the making and propagation of conspiratorial narratives. Digital media platforms further amplify this dispersion of the truth holder in public arena. However, we should not be under the illusion that such relationship is equal. As the article will demonstrates in the case of COVID-19, the state still has the most powerful tools to maintain its grip as the authority to determine the truth-value of information.

## COVID-19 AND CONTESTED RATIONALITIES

In the beginning of this article, I have raised the case of Jerinx, a punk musician that has been very active in the propagation of conspiracy theories about COVID-19. During the time of writing of this article, he is charged with criminal offense. Jerinx is not charged with the allegations of conspiracy theories propagation per se, rather because he accused IDI (Indonesian Doctor Association) as the henchman of WHO. Since the beginning of the pandemic, Jerinx is the second public figure that had to be involved with security apparatuses because of their social media contents. Previously, Anji, a well-known pop singer, was also charged with misinformation due to his Youtube interview with figure who claimed to found the cure for COVID-19. These events reflect that, while the claim of truth as discussed in this paper has always been a contested subject in Indonesian political arena, the precarity of pandemic situation has bring it to a new level.

Following the proposition of Butt (2005), based on the work of other scholars (Fenster, 2008; Keeley, 1999), to comprehend such contestations, it is important to examine the disjunctures from the way state rationalize this issue with how it is perceived from the eye of society. In this regard, I propose there at least three aspect to policies links to COVID-19 that would demonstrate the problem with state rationalizations during pandemic. *First*, debates on data transparency; *Second*, the distribution and priorities of economic program; *Third*, the pursuit of medical treatment for COVID-19 patients.

As I have addressed elsewhere (Nadzir, 2020a), since very early, Indonesian government has not been able to provide reliable and transparent data despite its importance during pandemic. Early on in February, Harvard epidemiologist warned Indonesian government that COVID-19 was most likely already existed in Indonesia. Instead of using the information to anticipate the possibilities of pandemic, Ministry of Health, Terawan considered the scientific advice as an insult to Indonesia (Azis, 2020). In other occasion, the minister also suggested for Indonesian

people not to worry the virus, since the patients will be healed by itself (CNN, 2020b). In line with his minister, President Joko Widodo also pushed the agenda to boost tourism (Putri, 2020).

The way Indonesian government downplayed the importance of data was also demonstrated even after Indonesia has the first positive case of COVID-19. Government was reluctant to be transparent regarding the status of COVID-19 in Indonesia. President Jokowi himself admitted that his administration chose not to reveal all information to prevent panic among public (Ihsanuddin, 2020). Moreover, the absence reliable data is also felt by a number of local leaders that decided to air their criticism in mass media (Mursid & Amrullah, 2020). Lately, President Jokowi retracted his position and demanded his officials to be more transparent in presenting COVID-19 data to public (Mashabi, 2020). However, the statement does not seem to be translated in actual changes related to data transparency of COVID-19 in Indonesia. Indonesian epidemiologist for instance, has criticized the COVID-19 data since it does not fit the standard needed to actually reduce the spread of pandemic (Damarjati, 2020).

Despite many criticisms, Jokowi and his administrative are still trying to create the impression that the mitigating the impact of pandemic is the most important priorities. The first measure was the implementation of PSBB (*Pembatasan Sosial Berskala Besar*/Large Scale Social Restriction). The policy was the outcome of demands from many public health experts to implement lockdown following many countries that already implemented the measure. In realities, PSBB appeared to be a reluctant form of lockdown where people could not move from one region to another, yet still able to move within each respective region. The decision was taken since it was considered to meet the ideal balance between preventing the spread of COVID-19 and minimize the impact to Indonesian economy (Prasetia, 2020). One caveat of this policy, was the dependence of the implementation of PSBB on the capacity of regional leaders. Some leaders such as Mayor of Tegal, Governor of Papua, and Governor of West Papua decided to implement regional quarantine even earlier than the instruc-

tion of PSBB (C. A. Putri, 2020). On the other hand, other regions needed to wait for the permit of PSBB to be issued by Minister of Health in order to apply restriction in their area (Basith, 2020). These inconsistencies were happened when the number of COVID-19 patients have been growing unstopably.

Aside from impact on public health, Indonesian government also realized that COVID-19 is detrimental for the economy. In fact, as shown from PSBB policy, the economic consideration arguably is the more influential than public health judgement, albeit the official statement will not acknowledge this stance. In response toward the threat of economic recession, government prepared a number of economic stimulus targeted to dampen the impact of pandemic. A large portion of the stimulus were prepared to support medical supplies and incentive for medical workers in battling against the spread of COVID-19 (Pryanka, 2020). For the poorest in society, government distributes social safety net that includes staple food packages and cash for couple of months (Ufl, 2020). The stimulus also included economic relief for small and medium business that could help them to survive the crisis (Harmawan, 2020). The government also addressed the need of the unemployed, by launching pre-employment program, which was previously also part of Jokowi's political promise in 2019.

It is yet to be known whether the stimulus provides significant impact in mitigating the impact of pandemic both on public health and economic aspect. However, there were many criticism in regards to the implementation of COVID-19 stimulus package. Plenty of reports demonstrated how the distribution of social safety net were troubled. Almost half of respondents from SMRC survey, felt that the distribution of COVID-19 safety net was not well-targeted (Saputri, 2020).

Similar problems is also apparent in the allocation of funds toward pre-employment program. About 5.6 trillion is allocated for online training program that supposed to provide the participants with competencies to apply for job. In actualities, the program was questioned since many skills provided may not as relevant to labor market as



portrayed by government (CNN, 2020a; Hidayat, 2020). Moreover, the allocation of funds was also criticized for its potentials of conflict of interest since the Belva Syah Devara, the founder of Ruangguru (one of the appointed platform of pre-employment program), was also part of the Jokowi's special staffers (Nadzir, 2020b). Along the way, the parties involved in the program tried to address the criticism. Belva resigned from his position as special staffers, while Ruangguru also promises to donate the income derived from pre-employment program (Mukaromah, 2020). Nonetheless, these problems with fund allocations and social safety net are antithetical to the portrayal of government on their commitment to tackle the issue of COVID-19.

Another aspect that also show gaps in scientific rationalization presented by government, is the health protocols itself, in particular regarding the treatment of COVID-19. As I have mentioned earlier, the initial position of government on the threat of COVID-19 is minimum at best. The virus was described as an ordinary self-limiting disease that does not need specific treatment, aside from maintaining our own immunity. Only after Indonesia had a number of COVID-19 cases, the government changed their stance and present themselves as the authority on health protocols and measures. In one reactive response, the government bought millions of avigan and chloroquine; the medicines were imported from China despite have not yet proven to be effective for COVID-19 treatment (Syambudi, 2020).

In search of the treatment and mitigation, the government also show many other actions that negates their authority on COVID-19. Minister of Agriculture for instance, has pushed the introduction of health necklace based from eucalyptus that was promoted to be effective to prevent the infection of COVID-19. Later on, the minister reserves his endorsement since it was heavily criticized; for the necklace might misinform people to conduct risky behavior (Rahman, 2020). The tendency to neglect science is also apparent on the search of treatment for COVID-19 patients. The collaboration of Unair (Airlangga University), Indonesian Armed Forces, and BIN (Indonesian State Intelligence) has been promoted

to have found the cure for infected COVID-19 patients. Contradicting to their scientific claim, the parties involved have not been opened with the research process involved with their findings (Prabowo, 2020). These problematic events further destabilized the claim of government as the authority on scientific rationale.

Amidst the precarity of social and economic condition during pandemic, the government has failed to establish themselves as scientific authority. Alongside the spread of COVID-19 that have not shown the sign of weakening, government apparatuses from local to national level repetitively shown the contradictions between their claim on scientific rationale and their actions. Scientific rationale on health information in this regard, could not be perceived to be held as the truth. Rather it serves only as partial explanations for the largely unintelligible phenomenon such as COVID-19 pandemic. It is within this context that conspiracy theories such as the one endorsed by Jerinx, are received by society to provide more explanations since it might help the believers to comprehend the complex situation.

As illustration, let us look one theory propagated by Jerinx on COVID-19. He insisted that the fear of COVID-19 is conspiracy of global elites such as WHO and Bill Gates (Kumparan, 2020). Jerinx believes the so-called global elites gained economic benefit from the restriction imposed as part of health protocols. Among the evidence that he found was the obligation of rapid test for pregnant woman who would want to give birth in hospitals. Of course there are no evidence that could support the conspiracy to link WHO evil plan with deceased pregnant woman in Indonesia. Nevertheless, the injustice framework against the poor in dealing with health services is hardly new in Indonesia. Even in ordinary circumstances, it is common for Indonesian citizen to rely on personal relationships and informal network in order to access necessary health services (Berenschot et al., 2018). During pandemic, the uncertainties faced by the poor is even more dire for the absence of personal network. Moreover, the poor class is often represented as the black sheep for the disobedience to health protocols. This is a perception that is not only produced by

government but also reinforced by middle class (Sambodho, 2020).

Setting aside the sensational aspect of conspiracy theories, the criticism towards government thus has legitimate aspect within society. Jerinx and many social media influencers are therefore meaningful for their audiences since not only they provides explanation for the largely unintelligible phenomenon, but they also exposes problems within scientific rationalization that is strongly pushed by the government. Social media in this regard, amplify their authority since they could practically speaking about anything to large scale audiences.

While social media influencers has further contest the authority of government as the source of information, it does not translated into as the blurry lines between state and society. On contrary, as also found in similar research While social media influencers has further contest the authority of government as the source of information, it does not translated into as the blurry lines between state and society. On contrary, as also found in similar research (Butt, 2005; Mathur, 2015), the distinctions between both entity is getting much more clear than it was during the time of early Reformasi. The distinction is apparent on the way government categorize and labels as false information.

When pandemic was at its early phase in March in Indonesia, the government already strictly imposed its regulation against what was categorized as hoax, which on practical level often used interchangeably with other terms such as disinformation, fake news, including conspiracy theory. Official from Ministry of Communication and Information Technology even stated that the hoax regarding COVID-19 is much more threatening than the virus itself (Hermawan, 2020). In the implementation, the categorization of hoax is often applied arbitrarily. In May 2020, police had arrested more than 100 suspects related to hoax propagation about COVID-19 (Putra, 2020). None of them are part of high rank public officials, despite many of them repetitively endanger public by the undermining tone toward COVID-19.

Some criticism towards the way government handle the virus were also simply dismissed as hoax. It was experienced among which by Ahmad Arif, Kompas journalist, who has been very critical toward COVID-19 handling in Indonesia (Rudiana, 2020). The arbitrary tendency was also demonstrated when Anji, famous pop singer, was criminalized since his social media channel endorsed herbal medicine for COVID-19 treatment. At the same time, there is not any legal consequences for Minister of Agriculture that promoted his herbal necklace that arguably posed greater danger to society since it came from public officials. The contradictions of treatment to the categorization of false information establish the clear boundaries between state and society. As much as part of society tries to contest the authority of information, even with the use of social media, they are still threatened by the coercive tools monopolized by the state.

## CONCLUSION

The article is initiated by questions that seek to understand the social and political structures which enable propagation of conspiracy theories in Indonesia during COVID-19 pandemic. Conspiracy theories as discussed in this article have been intricated as important feature within the fabric of modern politics in Indonesia. Soeharto utilized conspiracy theories to pave his place in leading the authoritarian regime of New Order. Within such frameworks, the label communist has turned beyond political enemies into abstract entities that represent evil in general. The tropes of communist thus applied to almost anything that was considered to be threatening the stability and security of Indonesia. The label thus applied to labor movement, student movement, even religious movement. The institutionalization of communist as an evil entity has left the term persisted even until today on any political debates related to conspiracy in Indonesia.

In *Reformasi*, the state is not the only actor that could produce and propagate conspiracy theories. Conspiracy theories were prominent during the ethnic and religious conflict. Similar conspiratorial narratives are also salient in discriminative actions against religious minority

in Indonesia. The complexities of conspiracy propagation are exacerbated by the development of social media that provides the medium of people to freely spread information regardless the truth value.

These backdrops serves as the complication during the COVID-19 pandemic. Conspiracy theories questioned the legitimacy of government as the authority in information. Despite its sensational claims, it fills the incoherence demonstrated by the government on the handling of the pandemic. At the same time, the way government arbitrarily applies the category of hoax establish the fine line between state and society. The line is presented on how public officials are exempted from the consequences of law despite propagating false information that might also endanger public. These contestation of the truth value of information, exacerbated the risk of COVID-19 in Indonesia. It is harder for public to gained credible information related to COVID-19 since either government or society has participated in relativizing the truth value of information.

## REFERENCES

- Abdullah, I. (2020). COVID-19: Threat and Fear in Indonesia. *Psychological Trauma: Theory, Research, Practice, and Policy*, 12(5), 488–490. <https://doi.org/10.1037/tri0000878>
- Addariny, M. (2009). Dokumen Rahasia Agama Syi'ah Imamiyah. Muslim.or.Id. accessed from <https://muslim.or.id/656-dokumen-rahasia-agama-syiah-imamiyah.html> on 22 July 2020
- Akmaliah, W. (2016). Indonesian Muslim killings: Revisiting the forgotten Talang Sari tragedy (1989) and its impact in post authoritarian regime. *Indonesian Journal of Islam and Muslim Societies*, 6(1), 1–34. <https://doi.org/10.18326/ijims.v6i1.1-34>
- Ali, I. (2020). Impacts of rumors and conspiracy theories surrounding COVID-19 on preparedness programs. *Disaster Medicine and Public Health Preparedness*, 1–6. <https://doi.org/10.1017/dmp.2020.325>
- Allington, D., Duffy, B., Wessely, S., Dhavan, N., & Rubin, J. (2020). Health-protective behaviour, social media usage, and conspiracy belief during the COVID-19 public health emergency. *Psychological Medicine*. <https://doi.org/10.1017/S003329172000224X>
- Amir, S. (2013). *The Technological State in Indonesia: The co-constitution of high technology and authoritarian politics*. Routledge.
- Anderson, B. (1987). How Did Generals Die? *Indonesia*, 43, 109–134.
- APJII. (2019). *Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Survei (2018)*.
- Aragon, L. V. (2001). Communal Violence in Poso, Central Sulawesi: Where People Eat Fish and Fish Eat People. *Indonesia*, 72, 45–79.
- Avonius, L. (2008). From Marsinah to Munir: Grounding Human Rights in Indonesia. In L. Avonius & D. Kingsbury (Eds.), *Human Rights in Asia: A Reassessment of the Asian Values Debate* (pp. 99–119).
- Azis, A. (2020). Respons Terawan soal Penelitian Harvard University Terkait Corona. Tirto. accessed from <https://tirto.id/respons-terawan-soal-penelitian-harvard-university-terkait-corona-eyiV> on 24 August 2020
- Barker, J., & van Klinken, G. (2009). Reflections on the State in Indonesia. In G. van Klinken & J. Barker (Eds.), *State of Authority: The State in Society in Indonesia* (pp. 17–46). Cornell Southeast Asia Program.
- Basith, A. (2020). Ini alasan pemerintah belum setuju penerapan PSBB di sejumlah daerah. Kontan. accessed from <https://nasional.kontan.co.id/news/ini-alasan-pemerintah-belum-setujui-penerapan-psbb-disejumlah-daerah> on 25 August 2020
- Berenschot, W., Hanani, R., & Sambodho, P. (2018). Brokers and citizenship: access to health care in Indonesia. *Citizenship Studies*, 22(2), 129–144. <https://doi.org/10.1080/13621025.2018.1445493>
- Bräuchler, B. (2003). *Cyberidentities at War : Religion , Identity , and the Internet in the Moluccan Conflict* Author ( s ): Birgit Bräuchler Published by : Southeast Asia Program Publications at Cornell University Stable URL : <http://www.jstor.org/stable/3351310> REFERENCES Li. *Indonesia*, 75(75), 123–151.
- Butt, L. (2005). “Lipstick girls” and “fallen women”: AIDS and conspiratorial thinking in Papua, Indonesia. *Cultural Anthropology*, 20(3), 412–442. <https://doi.org/10.1525/can.2005.20.3.412>
- CNN. (2020a). Beda Rasa Pelatihan Kartu Prakerja vs Konten Gratis Youtube. CNN Indonesia. accessed from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200427075350-532-497495/beda-rasa-pelatihan-kartu-prakerja-vs-konten-gratis-youtube> on 24 August 2020

- CNN. (2020b). Menkes: Virus Corona Penyakit yang Bisa Sembuh Sendiri. CNN Indonesia. accessed from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200302162005-20-479814/menkes-virus-corona-penyakit-yang-bisa-sem-buh-sendiri> on 25 August 2020
- Cribb, R. (2001). How Many Deaths? Problems in the Statistics of Massacre in Indonesia (1965-1966) and East Timor (1975-1980). In I. Wessel & G. Wimhofer (Eds.), *Violence In Indonesia* (pp. 82–98). Abera.
- Damarjati, D. (2020). Epidemiolog UI Dorong Transparansi Data Corona hingga Klasterisasi. Detik. accessed from <https://news.detik.com/berita/d-4977675/epidemiolog-ui-dorong-transparansi-data-corona-hingga-klasterisasi/2> on 24 August 2020
- Eramuslim. (2020). Hubungan Gelap Syiah dan Zionis Israel. Era Muslim. accessed from [https://www.erauslim.com/konsultasi/konspirasi/syiah-vs-yahudi.htm#.XxfZf\\_gzbOQ](https://www.erauslim.com/konsultasi/konspirasi/syiah-vs-yahudi.htm#.XxfZf_gzbOQ) on 25 August 2020
- Fenster, M. (2008). *Conspiracy Theories: Secrecy and Power in American Culture*. University of Minnesota Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Formichi, C. (2015). Violence, Sectarianism, and the Politics of Religion: Articulations of Anti-Shi'a Discourses in Indonesia. *Indonesia*, 98, 1–27.
- Frd. (2020). Khofifah Laporkan Jokowi, Kepatuhan Warga Surabaya Rendah. CNN Indonesia. accessed from <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200625150314-20-517447/khofifah-lapor-jokowi-kepatuhan-warga-surabaya-nya-rendah> on 24 August 2020
- Gruzd, A., & Mai, P. (2020). Going viral: How a single tweet spawned a COVID-19 conspiracy theory on Twitter. *Big Data and Society*, 7(2), 1–9. <https://doi.org/10.1177/2053951720938405>
- Gupta, A. (1995). Blurred Boundaries: The Discourse of Corruption, the Culture of Politics, and the Imagined State. *American Ethnologist*, 22(2), 375–402.
- Hadiz, V. R. (2002). The Indonesian Labour Movement: Resurgent or Constrained? *Southeast Asian Affairs*, 130–142.
- Harmawan, B. N. (2020). Stimulus UMKM di Tengah Badai Corona. Detik. accessed from <https://news.detik.com/kolom/d-4974884/stimulus-umkm-di-tengah-badai-corona> on 25 August 2020
- Hasim, M. (2012). Syiah: Sejarah Timbul dan Perkembangannya di Indonesia. *Analisa*, 19(02), 147–158.
- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Herlambang, W. (2011). *Cultural Violence: Its practice and Challenge in Indonesia*. VDM Verlag Dr. Muller.
- Hermawan, B. (2020). Kemenkominfo: Hoaks Lebih Berbahaya dari Virus Corona. Republika. accessed from <https://republika.co.id/berita/q6t6lr354/kemenkominfo-emhoaksem-lebih-berbahaya-dari-virus-corona> on 25 August 2020
- Hidayat, R. (2020). *Problem Pelatihan Kartu Prakerja: Dimonopoli dan Tidak Relevan*. Tirta. [https://www.erauslim.com/konsultasi/konspirasi/syiah-vs-yahudi.htm#.XxfZf\\_gzbOQ](https://www.erauslim.com/konsultasi/konspirasi/syiah-vs-yahudi.htm#.XxfZf_gzbOQ)
- Hootsuite, & Wearesocial. (2019). *DIGITAL 2019: INDONESIA*.
- Hsu, S. S. (2017). 'Pizzagate' gunman says he was foolish, reckless, mistaken — and sorry. The Washington Post. [https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/pizzagate-shooter-apologizes-in-handwritten-letter-for-his-mistakes-ahead-of-sentencing/2017/06/13/f35126b6-5086-11e7-be25-3a519335381c\\_story.html](https://www.washingtonpost.com/local/public-safety/pizzagate-shooter-apologizes-in-handwritten-letter-for-his-mistakes-ahead-of-sentencing/2017/06/13/f35126b6-5086-11e7-be25-3a519335381c_story.html)
- Ichwan, M. N. (2016). MUI, Gerakan Islamis, dan Umat Mengambang. *Maarif*, Vol. 11(2), 87–104.
- Ichwan, M. N. (2004). *Secularism, Islam and Pancasila: Political Debates on the Basis of the State*. 1–43.
- Ihsanuddin. (2020). Jokowi Akui Pemerintah Rahasiakan Sejumlah Informasi Soal Corona. Kompas. accessed from <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/13/16163481/jokowi-akui-pemerintah-rahasiakan-sejumlah-informasi-soal-corona?page=all> on 25 August 2020
- Jerit, J., & Zhao, Y. (2020). Political Misinformation. *Annual Review of Political Science*, 23(1), 77–94. <https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-050718-032814>
- Keeley, B. L. (1999). Of Conspiracy Theories. *Journal of Philosophy, Inc.*, 96(3), 109–126.
- Kingsbury, D. (2003). Power politics and the Indonesian military. In *Power Politics and the Indonesian Military*. Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780203987582>
- Kontras. (2006). *Kertas Posisi Kontras Kasus Talangsari 1989: Sebuah Kisah Tragis Yang Dilupakan*.
- Kuklinski, J. H., Quirk, P. J., Jerit, J., Schwieder, D., & Rich, R. F. (2000). Misinformation and the Currency of Democratic Citizenship. *The Journal of Politics*, 62(3), 790–816.
- Kumparan. (2020). Siapa Elite Global yang Dimaksud Jerinx SID dalam Konspirasi Corona? Kumparan. accessed from <https://kumparan.com/kumparansains/>

- siapa-elite-global-yang-dimaksud-jerinx-sid-dalam-teori-konspirasi-corona-1tQ2ySwqbgv/full on 25 August 2020
- Lazuardi, E. (2020). Pandemic and Local Measures: Witnessing Pandemic in Yogyakarta, Indonesia a City with no Lockdown. *City and Society*, 32(2). <https://doi.org/10.1111/ciso.12309>
- Leksana, G. (2020). Collaboration in Mass Violence: The Case of the Indonesian Anti-Leftist Mass Killings in 1965–66 in East Java. *Journal of Genocide Research*, 1–23. <https://doi.org/10.1080/14623528.2020.1778612>
- Lim, M. (2017). Freedom to hate: social media, algorithmic enclaves, and the rise of tribal nationalism in Indonesia. *Critical Asian Studies*, 49(3), 1–17. <https://doi.org/10.1080/14672715.2017.1341188>
- Mashabi, S. (2020). Presiden Instruksikan Pusat dan Daerah Transparan soal Data COVID-19. Kompas. accessed from <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/27/21355201/presiden-instruksikan-pusat-dan-daerah-transparan-soal-data-covid-19> on 24 August 2020
- Mathur, N. (2015). “It’s a conspiracy theory and climate change”: Of beastly encounters and cervine dissappearances in Himalayah India. *HAU: Journal of Ethnographic Theory*, 5(1), 87–111.
- Mcrae, D. G. (2008). *The Escalation and Decline of Violent Conflict in Poso, Central Sulawesi, 1998-2007*. Australian National University.
- Megatsari, H., Laksono, A. D., Ibad, M., Herwanto, Y. T., Sarweni, K. P., Geno, R. A. P., & Nugraheni, E. (2020). The community psychosocial burden during the COVID-19 pandemic in Indonesia. *Heliyon*, 6(10), e05136. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2020.e05136>
- Melvin, J. (2018). *The Army and The Indonesian Genocide: Mechanics of Mass Murder*. Routledge. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Miller, J. M., Saunders, K. L., & Farhart, C. E. (2016). Conspiracy Endorsement as Motivated Reasoning: The Moderating Roles of Political Knowledge and Trust. *American Journal of Political Science*, 60(4), 824–844. <https://doi.org/10.1111/ajps.12234>
- Mujiburrahman. (2006). *Feeling Threatened: Muslim-Christian Relations in Indonesia's New Order*. Amsterdam University Press.
- Mukaromah, V. F. (2020). Ruangguru Sumbangkan Pendapatan dari Program Prakerja untuk Penanganan Corona. Kompas. accessed from <https://www.kompas.com/tren/read/2020/08/04/152300365/ruangguru-sumbangkan-pendapatan-dari-program-prakerja-untuk-penanganan?page=all> on 25 August 2020
- Mursid, F., & Amrullah, A. (2020). Saat Anies dan Ridwan Kamil Satu Suara Soal Data Corona. Republika. accessed from <https://nasional.republika.co.id/berita/q87rca377/saat-anies-dan-ridwan-kamil-satu-suara-soal-data-corona> on 24 August 2020
- Muttaqin, A. Z. (2015). Tahun 2020 Syiah berencana melakukan kudeta di Indonesia. Arrahmah. accessed from <https://www.annahmah.com/2015/02/06/tahun-2020-syiah-berencana-melakukan-kudeta-di-indonesia/> on 25 August 2020
- Nadzir, I. (2020a). Data Transparency and Misinformation of COVID-19 in Indonesia. Pusat Penelitian Politik LIPI. accessed from <http://www.politik.lipi.go.id/kolom/kolom-2/politik-nasional/1365-data-transparency-and-misinformation-of-covid-19-in-indonesia> on 25 August 2020
- Nadzir, I. (2020b). The false promise of “millennials” and the digital economy. Indonesia at Melbourne. accessed from <https://indonesiaat-melbourne.unimelb.edu.au/the-false-promise-of-millennials-and-the-digital-economy/> on 25 August 2020
- Nasir, N. M., Baequni, B., & Nurmansyah, M. I. (2020). Misinformation Related To Covid-19 in Indonesia. *Jurnal Administrasi Kesehatan Indonesia*, 8(2), 51. <https://doi.org/10.20473/jaki.v8i2.2020.51-59>
- Oliver, J. E., & Wood, T. J. (2014). Conspiracy theories and the paranoid style(s) of mass opinion. *American Journal of Political Science*, 58(4), 952–966. <https://doi.org/10.1111/ajps.12084>
- Prabowo, D. (2020). Menyoal Klaim Obat Covid-19 Unair, dari Keterbukaan Informasi hingga Dampak Psikologis Masyarakat. Kompas. accessed from <https://nasional.kompas.com/read/2020/08/19/11545621/menyoal-klaim-obat-covid-19-unair-dari-keterbukaan-informasi-hingga-dampak?page=all> on 24 August 2020
- Prasetia, A. (2020). Jokowi Jelaskan Rinci Beda Lockdown PSBB, Ada Faktor Aktivitas Ekonomi. Detik. accessed from <https://news.detik.com/berita/d-4961057/jokowi-jelaskan-rinci-beda-lockdown-psbb-ada-faktor-aktivitas-ekonomi> on 25 August 2020
- Pryanka, A. (2020). Stimulus Ekonomi Ketiga Fokus ke Penanganan Kesehatan’. Republika. accessed from <https://www.republika.co.id/berita/q7dzv0370/stimulus-ekonomi-ketiga-fokus-ke-penanganan-kesehatan> on 25 August 2020

- Putra, N. P. (2020). Polisi Tetapkan 107 Tersangka Terkait Kasus Hoaks Corona. *Liputan 6*. accessed from <https://www.liputan6.com/news/read/4259573/polisi-sudah-tetapkan-107-tersangka-kasus-hoaks-terkait-corona> on 25 August 2020
- Putri, C. A. (2020). Tegal Hingga Papua, Daerah yang Terapkan Local Lockdown di RI. *CNBC Indonesia*. accessed from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200330104913-4-148387/tegal-hingga-papua-daerah-yang-terapkan-local-lockdown-di-ri> on 24 August 2020
- Putri, R. D. (2020). Dana Rp 72 Miliar buat Influencer, Pemerintah Gagap Tangani COVID-19. *Tirto*. accessed from <https://tirto.id/dana-rp72-miliar-buat-influencer-pemerintah-gagap-tangani-covid-19-eBrD> on 25 August 2020
- Qurtuby, S. Al. (2016). *Religious Violence and Conciliation in Indonesia: Christians and Muslims in the Moluccas*. Routledge.
- Rahman, H. (2020). Kalung Anti-Corona dan Bahaya “Over” Klaim. *Detik*. accessed from <https://news.detik.com/kolom/d-5092707/kalung-anti-corona-dan-bahaya-over-klaim> on 25 August 2020
- Rasmitadila, Aliyyah, R. R., Rachmadtullah, R., Samsudin, A., Syaodih, E., Nurtanto, M., & Tambunan, A. R. S. (2020). The perceptions of primary school teachers of online learning during the covid-19 pandemic period: A case study in Indonesia. *Journal of Ethnic and Cultural Studies*, 7(2), 90–109. <https://doi.org/10.29333/ejecs/388>
- Roosa, J. (2008). *Dalih Pembunuhan Masal*. Institut Sejarah Sosial Indonesia. <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/cbdv.200490137/abstract>
- Roosa, J. (2020). *Buried Histories: The Anticommunist Massacres of 1965-1966 in Indonesia*. The University of Wisconsin Press. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Rudiana, P. A. (2020). Media Bisa Cegah Bahaya Pandemi Bila Abaikan Berita Sensasional. *Nuusdo*. accessed from <http://nuusdo.com/media-bisa-cegah-bahaya-pandemi-bila-abaikan-berita-sensasional/> on 25 August 2020
- Sambodho, P. (2020). Class and privilege: being a good citizen during a pandemic. *New Mandala*. accessed from <https://www.newmandala.org/class-and-privilege-being-a-good-citizen-during-a-pandemic/> on 25 August 2020
- Saputri, M. (2020). Survei SMRC: 49% Warga Nilai Bansos COVID-19 Tak Tepat Sasaran. *Tirto*. accessed from <https://tirto.id/survei-smrc-49-warga-nilai-bansos-covid-19-tak-tepat-sasaran-fr3n> on 25 August 2020
- Sastramidjaja, Y. M. (2016). Playing Politics: Power, Memory, and Agency in the Making of the Indonesia Student Movement. In *Amsterdam Institute for Social Science Research*. University of Amsterdam.
- Shermer, M. (2002). *Why do people believe weird things?: Pseudoscience, Superstition, and Other Confusions of Our Time*. Henry Holt and Company. <https://doi.org/10.1111/j.1740-9713.2005.00134.x>
- Sidel, J. T. (2006). *Riots Pogroms Jihad: Religious Violence in Indonesia*. Cornell University Press.
- Syambudi, I. (2020). Klorokuin dan Avigan Sebagai Obat: Belum Ada Bukti Klinis. *Tirto*. accessed from <https://tirto.id/klorokuin-dan-avigan-sebagai-obat-corona-belum-ada-bukti-klinis-eGUx> on 25 August 2020
- Ufl. (2020). Rincian Bansos Jokowi untuk Orang Miskin di Tengah Corona. *CNN Indonesia*. accessed from <https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200504110332-532-499736/rincian-bansos-jokowi-untuk-orang-miskin-di-tengah-corona> on 25 August 2030
- Umasugi, R. A. (2020). Kepatuhan Warga di Rumah Menurun dan Keputusan Pemprov DKI Perpanjang PSBB. *Kompas*. accessed from <https://megapolitan.kompas.com/read/2020/05/20/13362341/kepatuhan-warga-berada-di-rumah-menurun-dan-keputusan-pemprov-dki?page=all> on 25 August 2020
- van Klinken, G., & Barker, J. (2009). Introduction: State in Society in Indonesia. In van K. Gerry & J. Barker (Eds.), *State of Authority: The State in Society in Indonesia* (pp. 1–16). Cornell Southeast Asia Program.
- VOA Indonesia. (2018). Pemerintah Dituntut Tegakkan Hukum dan HAM dengan Pulangkan Pengungsi Syiah Sampang. *Voa Indonesia*. accessed from <https://www.voaindonesia.com/a/pemerintah-dituntut-tegakkan-hukum-dan-ham-dengan-pulangkan-pengungsi-syiah-sampang/4274072.html> on 25 August 2020
- Wieringa, S. (2002). *Sexual Politics in Indonesia*. Institute of Social Studies.
- Wiyanti, W. (2020). 5 Hoax Kesehatan Yang Paling Bikin Heboh Sepanjang 2019. *Detik*. accessed from <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4834102/5-hoax-kesehatan-yang-paling-bikin-heboh-sepanjang-2019> on 24 August 2020

## REAKSI PENDUDUK DI WILAYAH MINIM AKSES PADA FASE AWAL PANDEMI COVID-19

### *HOW PEOPLE IN THE REMOTE AREA REACT TO THE COVID-19 PANDEMIC IN THE EARLY PHASE*

Mochammad Wahyu Ghani<sup>1</sup> dan Marya Yenita Sitohang<sup>2</sup>

*Pusat Penelitian Kependudukan LIPI<sup>1,2</sup>*

*e-mail: wayghani@gmail.com<sup>1</sup>, maryayenita19@gmail.com<sup>2</sup>*

#### ABSTRACT

*This article aims to analyze the knowledge and reaction of the remote area population which is the Silat Hilir District, Kapuas Hulu, West Borneo, at the beginning of the COVID-19 pandemic in Indonesia. The knowledge about COVID-19 is still limited so that access to valid information and reliable sources becoming very important. We conducted a participant observation to collect the data. It shows that the population of Silat Hilir District has a poor understanding related to COVID-19. They also tend to react to the COVID-19 hoaxes. Based on the observations which are supported by secondary data, variables like topography, lack of access to electricity and internet, and low level of education make the population of Silat Hilir District unable to process the information they received. Therefore, the development of infrastructure in remote area must also consider the increase of community literacy skills, for example through the education aspect.*

**Keywords:** *access to information, COVID-19 knowledge, Silat Hilir District*

#### ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan reaksi penduduk di wilayah minim akses yaitu Kecamatan Silat Hilir, Kabupaten Kapuas Hulu, Kalimantan Barat, pada awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Pengetahuan tentang COVID-19 yang cenderung terbatas membuat akses terhadap informasi yang benar dari sumber terpercaya menjadi sangat penting. Hasil observasi partisipan yang dilakukan menunjukkan bahwa penduduk Kecamatan Silat Hilir memiliki kemampuan literasi informasi yang masih minim terkait COVID-19. Salah satunya ditunjukkan dengan perilaku reaktif dalam menanggapi *hoax* terkait pencegahan COVID-19. Berdasarkan hasil observasi yang didukung oleh data sekunder, variabel seperti topografi wilayah, minimnya akses listrik dan internet, serta rendahnya tingkat pendidikan membuat penduduk Kecamatan Silat Hilir tidak berdaya mengolah informasi terkait COVID-19 di fase awal pandemi. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur yang dilakukan di daerah minim akses, khususnya di Kecamatan Silat Hilir harus juga disertai dengan peningkatan kemampuan literasi sumberdaya manusia, salah satunya melalui aspek pendidikan.

**Kata kunci:** *akses informasi, pengetahuan COVID-19, Kecamatan Silat Hilir*

#### PENDAHULUAN

COVID-19 atau *coronavirus disease* merupakan penyakit baru yang pertama kali muncul di Wuhan, China pada akhir tahun 2019 memiliki tingkat penyebaran yang cukup cepat karena rata-rata seseorang yang terinfeksi dapat menularkan pada 2 sampai 3 orang lain (Susilo et al., 2020; Park et al., 2020). Beberapa bulan setelah munculnya penyakit COVID-19, pada 12 Maret 2020, Badan Kesehatan Dunia (WHO)

kemudian menetapkan wabah penyakit tersebut sebagai suatu pandemi karena laju penyebaran virus yang menyebabkannya cukup cepat (WHO, 2020). Sementara di Indonesia, kasus pertama COVID-19 terkonfirmasi di provinsi DKI Jakarta pada awal Maret 2020 lalu. Hal ini menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat setempat, salah satunya adalah *panic buying* (Ihsanuddin, 2020; Makdori, 2020).

Reaksi ini muncul sebagai respon psikologis masyarakat terhadap informasi terkait kasus pertama COVID-19 di Indonesia yang menandakan adanya suatu ancaman (Norberg & Rucker, 2020). Tingkat keparahan penyakit COVID-19 dan penularan virus penyebab COVID-19 melalui orang ke orang membuat COVID-19 dianggap sebagai ancaman yang menakutkan masyarakat, sehingga mereka berupaya untuk terhindar dari COVID-19 (Rothan & Byrareddy, 2020). Rasa cemas akan adanya bahaya (Norberg & Rucker, 2020) serta insting untuk mempersiapkan diri dalam menghadapi ancaman (Kirk & Rifkin, 2020) membuat fenomena *panic buying* ini terjadi. Di beberapa negara, perilaku *panic buying* mendapatkan kecaman karena menimbulkan kelangkaan barang tertentu, misalnya tisu toilet (Martin, 2020; Kirk & Rifkin, 2020).

Namun di sisi lain, hal ini menunjukkan bahwa masyarakat telah terpapar pengetahuan terkait pencegahan COVID-19, yaitu dengan meminimalisasi aktivitas di luar rumah dan menghindari kerumunan, termasuk untuk membeli kebutuhan pokok. Pengetahuan dan pemahaman merupakan modal bagi masyarakat untuk dapat melindungi diri dari wabah penyakit dan memutus rantai penularan virus penyebab penyakit (Forster, 2012). Paparan pengetahuan tentang COVID-19 yang didapatkan masyarakat tidak terlepas dari perkembangan teknologi informasi di era digital saat ini (Setiawan, 2017). Era digital yang melibatkan jaringan internet di dalamnya, memudahkan masyarakat dalam memperoleh suatu informasi untuk meningkatkan pengetahuan masyarakat, apalagi di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini (Iswara, 2020).

Dampak positif dari perkembangan teknologi tersebut harus disertai dengan adanya akses berupa keberadaan infrastruktur jaringan internet serta kemampuan masyarakat untuk mencerna informasi yang diterimanya. Sayangnya, Indonesia sebagai negara berkembang dengan karakter geografis yang terdiri dari banyak pula mengalami tantangan kesenjangan digital yang belum selesai diatasi (Kemkominfo, 2018; Iswara, 2020). Banyak daerah di Indonesia, khususnya yang bersifat perdesaan belum ditunjang dengan akses terhadap informasi yang sama baiknya dengan daerah perkotaan (Hadi, 2018).

Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo), telah melakukan beberapa upaya untuk melengkapi jaringan telekomunikasi di seluruh pelosok Indonesia (Kemkominfo, 2013; Widowati, 2019). Namun demikian, berdasarkan data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, penetrasi internet di wilayah selain pulau Jawa dan Sumatera masih cukup rendah. Masing-masing pulau, yaitu pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan Papua, hanya berkontribusi dibawah 10% terhadap keseluruhan pengguna internet di Indonesia. Berbeda jauh dengan pulau Jawa yang menyumbang lebih dari sebagian (55,7%) pengguna internet dan pulau Sumatera yang menyumbang hampir seperempatnya (21,6%) untuk keseluruhan pengguna internet di Indonesia (APJII, 2018).

Selain penetrasi internet, data komprehensif terkait pembangunan teknologi, informasi dan komunikasi di Indonesia tersedia dalam bentuk indeks yang disingkat menjadi IP-TIK (Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi, dan Komunikasi). Menurut Badan Pusat Statistika, indeks yang terbagi dalam 3 subindeks ini bertujuan untuk memantau perkembangan suatu negara menuju masyarakat informasi. Akses infrastruktur, penggunaan, dan keahlian merupakan subindeks yang diukur melalui 11 indikator. Berdasar indeks tersebut, Kecamatan Silat Hilir sebagai bagian dari provinsi Kalimantan Barat memiliki nilai IP-TIK 4,35 yang dikategorikan rendah serta merupakan provinsi peringkat 6 dengan nilai terburuk secara nasional (BPS, 2018). Hal ini cukup ironis mengingat pulau Kalimantan dianggap cukup berkembang setelah Jawa-Bali dan Sumatera (Hodge dkk, 2014). Provinsi Kalimantan Barat yang masuk dalam kategori Indonesia bagian barat seharusnya tidak memiliki ketimpangan akses informasi yang terlalu jauh dengan Indonesia bagian barat lainnya. Namun sebaliknya, ketimpangan itu sangat terasa terutama di wilayah Kecamatan Silat Hilir sebagai bagian dari Provinsi Kalimantan Barat dan oleh karena itu, wilayah ini menjadi lokus penelitian.

Dibanding sebelumnya, akses masyarakat pada informasi yang saat ini banyak tersebar secara digital menjadi sangat penting apalagi dalam konteks pandemi COVID-19 (Iswara, 2020).



Pandemi COVID-19 yang telah ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keppres No. 12 tahun 2020 ini membutuhkan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat untuk menanggulangnya. Pencegahan penularan COVID-19 di kalangan masyarakat merupakan intervensi non-medis yang penting dilakukan karena penemuan vaksin yang saat ini masih dikembangkan (Kwok et al., 2020) serta menopang kapasitas sistem pelayanan kesehatan (Röst et al., 2020).

Partisipasi dari masyarakat di awal masa pandemi ini diwujudkan dalam sebuah perilaku yang berlandaskan pada pengetahuan yang benar serta adanya persepsi risiko masyarakat terhadap COVID-19. Sayangnya, paparan terhadap informasi yang benar terkait COVID-19 menjadi tantangan tersendiri di era digital saat ini karena banyaknya sumber informasi (Kwok et al., 2020) membuat masyarakat rentan terhadap informasi *hoaks*. Bahkan Kemkominfo sendiri telah melaporkan banyaknya informasi *hoaks* di awal masa pandemi COVID-19 ini (Kemkominfo, 2020).

Masyarakat Silat Hilir merupakan bagian dari masyarakat yang tidak memiliki akses informasi dan kesehatan yang cukup baik. Mereka menunjukkan gejala sosial yang sangat berbeda dengan masyarakat perkotaan yang bisa dikatakan cukup baik untuk mengakses dan memahami apa itu COVID-19. Perilaku mereka di awal masa-masa pandemi telah menunjukkan bahwa sulitnya mendapatkan informasi, kesalahan informasi, hingga terkena paparan informasi *hoaks* menjadi realitas yang tidak dapat dihindarkan oleh masyarakat minim akses di Kecamatan Silat Hilir. Untuk itu peneliti tertarik untuk bisa menguraikan reaksi masyarakat Silat Hilir ke dalam bentuk tulisan yang bisa digunakan sebagai pedoman komunitas ilmiah dalam melihat reaksi sosial yang ditimbulkan COVID-19 di daerah minim akses.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran menyeluruh dan kompleks dari suatu realitas yang dibentuk secara sosial (Walidin dkk, 2015). Selanjutnya jenis metode kualitatif yang digunakan adalah studi kasus yang merupakan suatu teknik, prosedur, atau sarana untuk mengumpulkan bukti atau

data dengan teknik penelitian seperti wawancara, observasi partisipan, dan analisis dokumen (Van-Wynsberghe & Khan, 2007). Data-data primer dalam tulisan ini didapatkan melalui hasil observasi partisipan dan wawancara di Kecamatan Silat Hilir pada masa-masa awal pandemi COVID-19, yaitu tanggal 5 Maret hingga 28 Maret 2020.

Observasi partisipan memberi pemahaman intuitif tentang apa yang terjadi dalam suatu budaya dan memungkinkan untuk berbicara dengan penuh keyakinan tentang makna data, pengamatan partisipan membantu memahami arti pengamatan itu sendiri (Bernard, 2006: 355). Selain itu, sebagai bagian dari observasi partisipan, wawancara tidak terstruktur dan bersifat informal dilakukan terhadap 10 orang masyarakat yang tersebar di beberapa desa Kecamatan Silat Hilir. Wawancara dilakukan dengan percakapan informal agar masyarakat dapat mengekspresikan pendapat tentang pandemi COVID-19 secara leluasa (Bernard, 2006 : 210-213).

Penggunaan wawancara tidak terstruktur dalam mengumpulkan data dari masyarakat di awal masa pandemi COVID-19 sudah cukup tepat. Mengingat wabah penyakit ini masih tergolong sangat baru dan belum banyak pengetahuan yang dimiliki terkait COVID-19. Selain itu, observasi partisipan yang dilakukan peneliti memungkinkan peneliti untuk mengalami secara langsung pengalaman mengakses internet dan informasi di daerah Kecamatan Silat Hilir. Selanjutnya, data sekunder dari lembaga lain misalnya BPS juga digunakan untuk melengkapi analisis yang dilakukan terhadap data primer penelitian.

Kombinasi antara era digital dan pandemi COVID-19 memberikan tantangan tersendiri khususnya bagi penduduk di wilayah minim akses misalnya Kecamatan Silat Hilir baik untuk mengakses informasi maupun memilah informasi yang diterima terkait COVID-19 di awal masa pandemi terjadi. Masyarakat minim akses seperti di Kecamatan Silat Hilir umumnya merupakan daerah perdesaan yang memiliki masalah mendasar lain seperti sumberdaya kesehatan (Erwin et al., 2020; Liu et al., 2020), rendahnya pendidikan dan minimnya penghasilan (Sadeka et al., 2020). Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pengetahuan dan reaksi penduduk Keca-

matan Silat Hilir pada awal terjadinya pandemi COVID-19 di Indonesia. Tulisan ini mencakup beberapa aspek pembahasan yaitu ; karakteristik social demografi, kondisi infrastruktur umum dan pelayanan Kesehatan, serta pengetahuan dan reaksi penduduk mengenai COVID-19.

## PEMBAHASAN

### Karakteristik Sosial Demografi

Penduduk Kecamatan Silat Hilir berjumlah 19.833 jiwa dan tersebar dalam 13 desa, yakni Desa Bongkong, Nanga Nuar, Setunggul, Sungai Sena, Miau Merah, Pangeran, Baru, Perigi, Penai, Seberu, Sentabai, Rumbih, dan Bukit Penai. Roda ekonomi Kecamatan Silat Hilir sebagian besar ditopang dari penduduknya yang bergerak di bidang pertanian dan perkebunan, khususnya perkebunan sawit (BPS, 2019). Di Kecamatan Silat Hilir, kelompok etnis utama masyarakatnya adalah Jawa dan Dayak Sebaruk. Dayak Sebaruk adalah sub-kelompok dari komunitas Iban yang awalnya bermigrasi dari Kabupaten Sintang. Kecamatan ini secara resmi diakui pada tahun 1975 dengan 30 kepala rumah tangga yang kemudian orang-orang bermukim di desa awal Miau Merah (Hasudungan, 2018: 80). Selain etnis Jawa dan Dayak Sebaruk, temuan observasi langsung peneliti menunjukkan bahwa etnis Melayu juga merupakan salah satu etnis dominan di Kecamatan Silat Hilir.

Karakteristik sosial demografi yang dimiliki oleh penduduk Kecamatan Silat Hilir ini identik dengan karakter penduduk asli pada umumnya, yaitu memiliki jenis pekerjaan yang homogen dengan penghasilan di bawah rata-rata, sehingga kondisi ekonomi berada di bawah garis kemiskinan. Selain itu, tingkat pendidikan rendah juga membuat kelompok masyarakat ini rentan secara ekonomi (Sadeka dkk, 2020). Dari segi pendidikan, 1 dari 4 penduduk Kecamatan Silat Hilir tidak tamat sekolah serta 44% penduduk hanya menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Dasar (BPS, 2019).

Kondisi ekonomi yang belum sampai di tahap sejahtera membuat keluarga-keluarga di Kecamatan Silat Hilir memiliki akses yang cukup sulit pada pendidikan. Tingkat kesejahteraan

keluarga berkaitan dengan kemampuan orang tua memenuhi pendidikan anaknya (McInerney, 2013)(McInerney, 2020). Keterbatasan penghasilan membuat orang tua memiliki pertimbangan tersendiri bila ingin mengeluarkan biaya untuk pendidikan yang tidak hanya berupa SPP, tetapi biaya lainnya seperti uang buku, seragam sekolah, transportasi, dan akomodasi lainnya. Biaya pendidikan ini bersaing dengan kebutuhan pokok lainnya seperti sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya.

<sup>1</sup>“Waktu itu berhenti sekolah karena jarak sekolahnya jauh juga dari rumah. Sekolah cuma ada di simpang silat (pusat Kecamatan Silat Hilir). Lebih baik bantu orang tua saja di kebun.....”

(Wawancara dengan seorang anak 17 tahun, Desa Seberu, Kecamatan Silat Hilir)

Selain dari faktor penghasilan yang diperoleh dan kondisi ekonomi keluarga, kuantitas infrastruktur dan letak geografis gedung sekolah juga mempengaruhi keputusan anak atau remaja untuk tetap bersekolah. Kecamatan Silat Hilir memiliki 33 Sekolah Dasar, 6 sekolah setingkat SMP dan 2 sekolah setingkat SMA/SMK (BPS, 2019). Permasalahan pendidikan menjadi rumit ketika seorang anak ingin melanjutkan tingkat pendidikan di jenjang SMP apalagi SMA. Sekolah SMA hanya ada 1 di Desa Perigi dan 1 lagi sekolah tingkat SMK di Desa Miau Merah. Secara akses jarak perjalanan, hanya kedua desa tersebut dari 13 desa yang memiliki kemudahan jarak, transport dan kondisi jalan untuk bisa bersekolah di tingkat SD hingga SMA.

Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat Kecamatan Silat Hilir merupakan masalah fundamental yang perlu diberikan perhatian lebih. Salah satu dampak yang dihasilkan dari rendahnya tingkat pendidikan seorang individu adalah pada perilaku kesehatan. Orang-orang dengan tingkat pendidikan yang rendah cenderung memiliki pengetahuan dan perilaku kesehatan yang rendah, baik untuk mengetahui kondisi kesehatannya, dampak buruk dari perilaku merokok, serta melakukan upaya pencegahan penyakit atau masalah kesehatan (Higgins dkk, 2008). Selanjutnya, tingkat pendidikan individu menjadi

<sup>1</sup> Wawancara Anak Desa Seberu, Kecamatan Silat Hilir. 7 Maret 2020.

pondasi bagi tercapainya masyarakat yang berpengetahuan. Hal ini dikarenakan pengetahuan akan memengaruhi proses penyebarluasan informasi serta penggunaan informasi oleh masyarakat tersebut (Vali, 2013). Bila dikaitkan dengan fenomena pandemi COVID-19, tingkat pendidikan yang rendah dan kurangnya minat membaca dapat menjadi penyebab tidak efektifnya upaya penyebarluasan informasi kesehatan (Hadisiwi & Suminar, 2017) atau terjebaknya masyarakat dalam informasi-informasi palsu yang beredar di masa awal pandemi COVID-19.

## KONDISI INFRASTRUKTUR UMUM DAN PELAYANAN KESEHATAN

Luas wilayah Kecamatan Silat Hilir, yaitu sebesar 1.177,10 km<sup>2</sup> masih didominasi oleh jalanan berkontur tanah dengan kondisi yang rusak berat<sup>33</sup>. Topografi wilayah Kecamatan Silat Hilir yaitu daratan yang dikelilingi kebun sawit dan hutan, dibelah oleh Sungai Kapuas serta tidak ada jembatan untuk menyeberangi Sungai Kapuas yang membelah wilayah Kecamatan Silat Hilir membatasi pergerakan untuk keluar dan masuk ke berbagai wilayah desa di Kecamatan Silat Hilir<sup>44</sup>.

Selain ketidaksempurnaan kondisi infrastruktur jalur transportasi di Kecamatan Silat Hilir, infrastruktur terkait teknologi informasi di daerah ini juga masih terbatas dan belum menyeluruh. Hingga saat ini, desa-desa seperti Desa Perigi, Desa Pangeran, Desa Baru dan Desa Setunggul hanya mendapatkan pasokan listrik di malam hari. Berdasar laporan Badan Pusat Statistik, Desa Seberu, Desa Sentabai, Desa Rumbih, dan Desa Bukit Penai masih menjadi daerah yang sangat terisolasi dari segi akses sinyal seluler (BPS Silat Hilir : 74, 2019). Keterbatasan ini menyebabkan akses terhadap informasi, baik akses dari media daring maupun sosialisasi secara langsung dari petugas kesehatan, yang dimiliki masyarakat Kecamatan Silat Hilir tidak sama antar desa. Karena akses tersebut hanya bisa diperoleh di

desa-desa tertentu yang memiliki akses secara jaringan internet maupun jalur transportasi.

Kecamatan Silat Hilir memiliki fasilitas dan tenaga kesehatan yang sudah memenuhi kriteria standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan untuk daerah terpencil melalui Peraturan Menteri Kesehatan No 90 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil. Terdapat 1 puskesmas, 8 puskesmas pembantu (pustu) dan 7 pondok bersalin desa (polindes) yang tersebar di wilayah Kecamatan Silat Hilir, baik yang masih terakses secara transportasi, maupun yang sulit dijangkau. Tenaga kesehatan Kecamatan Silat Hilir berjumlah 43 yang terdiri dari perawat dan bidan dengan tambahan satu dokter umum (BPS Silat Hilir, 2019). Berdasar hasil observasi langsung peneliti, tidak semua fasilitas kesehatan tersebut menjalankan kegiatan dan program kesehatan secara aktif. Pustu dan polindes yang beroperasi aktif hanya yang terletak dekat dengan jalanan beraspal. Hal ini menunjukkan pentingnya kondisi infrastruktur sebagai pendukung akses masyarakat maupun tenaga kesehatan itu sendiri pada fasilitas kesehatan yang ada.

Selain dari akses transportasi pada infrastruktur fasilitas kesehatan, kesulitan lain yang dihadapi tenaga kesehatan di wilayah minim akses pada masa awal masuknya pandemi COVID-19 di Indonesia adalah upaya untuk mengikuti perkembangan informasi COVID-19. Di saat masyarakat perkotaan telah memiliki gambaran jelas terkait pandemi COVID-19, dari mana virus penyebabnya berasal, seberapa parah penyakit yang disebabkan, serta cara pencegahan penularannya, di wilayah minim akses lain misalnya Wakatobi, petugas kesehatan bahkan belum mendapatkan informasi yang komprehensif (Sitohang dan Hadiyanto, 2020). Kondisi infrastruktur yang baik, yaitu listrik dan sinyal internet tidak hanya berdampak pada masyarakat Kecamatan Silat Hilir, tetapi juga tenaga kesehatan yang bertugas. Alih-alih mampu mengedukasi masyarakat dan menjadi sumber informasi terpercaya terkait pandemi COVID-19, ternyata tenaga kesehatan juga sama bingungnya dengan masyarakat.

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). "*Kecamatan Silat Hilir Dalam Angka 2019*". BPS Kabupaten Kapuas Hulu.

<sup>3</sup> Observasi partisipan langsung peneliti di Kecamatan Silat Hilir. 5-28 Maret 2020

<sup>4</sup> Observasi partisipan langsung peneliti di Kecamatan Silat Hilir. 5-28 Maret 2020

## PENGETAHUAN DAN REAKSI PENDUDUK TERHADAP COVID-19

Rendahnya tingkat pendidikan, terbatasnya akses pada informasi dan pelayanan kesehatan membuat masyarakat di Kecamatan Silat Hilir tidak siap menghadapi pandemi COVID-19 yang mulai masuk ke Indonesia. Di masa awal masuknya wabah COVID-19, masyarakat di Kecamatan Silat Hilir cenderung memiliki pengetahuan yang terbatas. Menurut mereka, COVID-19 hanya sebatas virus yang akan membuat seseorang langsung mati saat itu juga apabila terkena. Masyarakat di Kecamatan Silat Hilir belum memiliki pengetahuan terkait penularan virus penyebab COVID-19 dan gejala yang ditimbulkan apabila seseorang tertular dan menderita penyakit COVID-19.

*5“...Virus Corona?? Iya tau,, itu virus yang asalnya dari Jakarta, kalau kita kena langsung mati katanya.” (Wawancara dengan salah satu masyarakat, Desa Bongkong, Kec. Silat Hilir)*

Dari hasil wawancara di atas, penduduk terlihat kurang memiliki pemahaman tentang virus *corona* dan asal muasal wabah COVID-19. Padahal dalam konteks bencana, yang dalam hal ini berupa bencana kesehatan, adanya pengetahuan dan partisipasi masyarakat dalam penanggulangan bencana menjadi bagian dari tahap kesiapsiagaan awal. Tahapan ini sangat krusial dalam meminimalisasi dampak yang diakibatkan oleh bencana (Sadeka, 2020). Pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki selanjutnya menjadi dasar bagi masyarakat tersebut untuk berpartisipasi menanggulangi bencana kesehatan COVID-19, yaitu dengan berkontribusi dalam pemutusan rantai penularan virus.

Pengetahuan dan pemahaman ini juga secara langsung membentuk persepsi masyarakat terhadap suatu penyakit, salah satunya adalah persepsi risiko. Persepsi risiko sangat penting bagi kesehatan manusia karena memiliki potensi untuk memotivasi dan membentuk perilaku yang berhubungan dengan kesehatan, persepsi risiko sangat berkaitan dengan mengurangi atau mempercepat pengambilan keputusan tindakan perlindungan kesehatan (Anthonj dkk, 2018). Sayangnya, perkembangan teknologi dan in-

<sup>5</sup> Wawancara warga desa Bongkong, Kecamatan Silat Hilir. 10 Maret 2020.

formasi yang saat ini terjadi belum menyentuh masyarakat di wilayah minim akses sehingga persepsi risiko mereka terhadap pandemi COVID-19 belum cukup terbangun untuk melakukan tindakan-tindakan pencegahan.

Di masa awal terjadinya pandemi COVID-19, masyarakat di Kecamatan Silat Hilir tidak mengetahui secara pasti proses penularan virus penyebab penyakit tersebut pada manusia. Sebagai gambaran, pendatang seperti peneliti yang berasal dari Jakarta tidak dicurigai sedikit pun untuk bisa membawa virus COVID-19. Padahal beberapa penduduk Kecamatan Silat Hilir memiliki pemahaman bahwa virus penyebab COVID-19 berasal dari Jakarta karena kasus pertama yang ditemukan di daerah tersebut.

*6“..... menularnya (Virus COVID-19) tidak tahu seperti apa. Tapi kalau ada yang sakit lebih baik jangan didekati. Kalau abang ini kan sehat-sehat saja tidak (terlihat) batuk atau pusing. Kami ini ibaratnya ada tamu dari luar tetap menerima saja, tidak perlu dijauhi. Asal tamu itu baik dan tujuannya jelas kami pasti terbuka saja.”*

(Wawancara dengan salah satu masyarakat, Desa Seberu, Kec. Silat Hilir.)

Di saat wilayah perkotaan dan daerah lainnya mulai menerapkan anjuran jaga jarak, mencuci tangan dengan rajin, bekerja dan sekolah dari rumah, serta mengurangi kegiatan yang menimbulkan kerumunan, masyarakat Kecamatan Silat Hilir masih belum mengetahui pentingnya melakukan hal-hal tersebut sebagai tindakan pencegahan. Proses penularan virus penyebab COVID-19 yang dicurigai terjadi dari orang ke orang, menjadikan pembatasan sosial dan mengurangi interaksi dengan orang lain adalah metode lama yang harus diterapkan dalam mengantisipasi penyebaran virus (Wilder & Freedman, 2020). Perbedaan perilaku antara masyarakat di wilayah yang terpapar informasi dengan masyarakat di wilayah minim akses ini merupakan dampak dari kesenjangan digital yang terjadi di wilayah-wilayah Indonesia.

Informasi mengenai COVID-19 yang telah menyebar di seluruh dunia menjadi terbatas di wilayah Kecamatan Silat Hilir dan sangat

<sup>6</sup> Wawancara warga desa Seberu, Kecamatan Silat Hilir. 15 Maret 2020.

eksklusif hanya untuk beberapa pihak. Kesenjangan digital berkontribusi dalam perampasan interaksi sosial. Informasi yang saat ini lebih banyak dikeluarkan secara digital memiliki konsekuensi pada faktor-faktor penentu kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan jejaring sosial, yang dampaknya berkontribusi sebagai imbalan untuk mempertahankan akses terbatas dan penggunaan teknologi, sebuah fenomena yang disebut sebagai “*digital vicious cycle*” atau lingkaran setan digital. (Baum et al, 2014 ; dalam Beanuyer et al, 2020). Ketidaksetaraan akses informasi digital menempatkan orang-orang yang kurang beruntung secara sosial dan ekonomi terhadap risiko yang lebih besar untuk tertular virus penyebab COVID-19 dan berbagai konsekuensi sosial-ekonomi dari pandemi COVID-19.

Selain mendapatkan informasi, masyarakat juga harus mampu mencerna dan melakukan validasi terhadap informasi yang didapatkan sehingga dapat digunakan dengan baik pula. Pada masyarakat yang memiliki akses informasi digital dengan baik, perkembangan teknologi informasi yang menyajikan berbagai sumber informasi dapat memunculkan inisiatif-inisiatif di tingkat masyarakat untuk menanggulangi pandemi COVID-19 di masa-masa awal munculnya wabah tersebut (Sitohang dkk, 2020). Namun di lain pihak, berbagai sumber informasi tersebut dapat membuat pembentukan persepsi risiko seseorang terhadap pandemi COVID19 menjadi tidak pasti (Kwok dkk, 2020).

Oleh karena itu, untuk bisa menggunakan teknologi secara efektif dan efisien terdapat empat faktor proksimal yang harus dimiliki masyarakat dunia saat ini (Hargittai, 2003 ; dalam Beanuyer et al, 2020), yakni; 1) sarana teknis (kualitas peralatan yang dapat diakses seseorang, baik dalam hal perangkat keras dan perangkat lunak serta daya dan keandalan koneksi Internet), 2) otonomi penggunaan (lokasi di mana teknologi diakses, dan kebebasan yang dirasakan untuk menggunakannya sesuai yang diinginkan), 3) jaringan dukungan sosial (bantuan dari pengguna lainnya), dan 4) pengalaman (dimensi waktu memungkinkan orang cukup terbiasa dengan teknologi untuk mempertahankan manfaat dari penggunaannya).

Tanpa empat faktor tersebut, masyarakat akan sangat rentan untuk bereaksi dan menanggapi informasi-informasi palsu yang beredar terkait wabah COVID-19. Salah satunya adalah informasi palsu dari sebuah pesan *whatsapp* yang didapatkan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Silat Hilir yang memiliki akses terhadap internet.

*“Bismillah Info dibaca. Percaya ga percaya Tadi Siang ada yang dengar Guntur pas panas-panasnya? Ini kejadian nyata dari keluarga kami dari Popay yang langsung nelpon dari pinoh. Ceritanya melahirkan anak tadi siang, saat lahir belum dipotong tali pusar bayi itu langsung ngomong : “untuk terhindar dari virus corona rebuslah telur.” Setelah itu Guntur kuat dan anak bayi itu langsung menangis. MERIND-ING.”* (Pesan *whatsapp* yang didapatkan sebagian penduduk Desa Perigi, 18 Maret 2020)

Pesan ini kemudian diteruskan dari mulut ke mulut karena terbatasnya pengguna internet di Kecamatan Silat Hilir. Berdasarkan data APJII, dari 64,8% masyarakat Indonesia yang menggunakan internet, hanya 2,1% yang berasal dari Provinsi Kalimantan Barat<sup>7</sup>. Minimnya akses internet di Provinsi Kalimantan Barat dan khususnya Kecamatan Silat Hilir, telah menyebabkan pesan *whatsapp* tersebut langsung menyebar luas tanpa bisa diverifikasi oleh penduduk yang tidak memiliki internet. Rendahnya status pendidikan sebagian besar penduduk Kecamatan Silat Hilir menunjukkan kurangnya kemampuan kognitif dan pengalaman dalam berinteraksi dengan teknologi informasi. Padahal, berbagai keterampilan teknis dan kognitif masyarakat diperlukan agar memahami informasi digital dalam berbagai format (ALA Digital Literacy Task force, 2013).

Di lain pihak, masyarakat secara umum mengalami peningkatan literasi digital karena banyaknya informasi palsu yang beredar di awal masa pandemi COVID-19 (Kustiningsih dan Nurhadi, 2020). Kemampuan literasi digital sangat penting untuk bisa mencegah tersebarnya dan diterimanya informasi palsu di kalangan masyarakat. Kemampuan literasi digital bisa didapatkan dengan kesadaran, sikap dan kemampuan

<sup>7</sup> Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2018). “*Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia*”.

individu untuk secara tepat menggunakan alat dan fasilitas digital untuk bisa mengidentifikasi, mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, menganalisis, dan mensintesis sumber daya digital. Yang nantinya dapat membangun pengetahuan baru dalam konteks situasi kehidupan tertentu, untuk memungkinkan tindakan sosial yang konstruktif (Rahmah, 2015). Tanpa literasi digital yang didapatkan melalui kemudahan mendapatkan akses internet dan pendidikan yang mumpuni, informasi palsu seperti ini akan dengan cepat mempengaruhi penduduk minim akses seperti Kecamatan Silat Hilir.

Hal ini selanjutnya menimbulkan akumulasi tingkat kepercayaan yang dapat dibenarkan secara umum sesuai dengan teori psikologi ‘*The Illusory Truth Effect*’. Teori ini menyebutkan bahwa pengulangan suatu informasi akan membuat sebuah informasi yang awalnya tidak rasional menjadi rasional. Telur rebus mungkin saja memiliki kandungan gizi yang baik bagi tubuh, namun mempercayai bahwa informasi yang keluar dari mulut seorang bayi yang baru lahir untuk mencegah terkena virus *corona* tentulah bukan pemikiran yang rasional. Penduduk Kecamatan Silat Hilir percaya bahwa dengan memakan telur rebus akan membuat mereka kebal dari wabah tersebut.

Dalam konteks yang sedikit berbeda, fenomena *panic buying* juga terjadi di kalangan masyarakat yang tinggal di wilayah minim akses. Banyak masyarakat di Kecamatan Silat Hilir yang langsung mencari telur dan merebusnya untuk dimakan sehingga menyebabkan kelangkaan telur di Kecamatan Silat Hilir selama beberapa hari. Hal demikian sama seperti kelangkaan tisu toilet yang juga terjadi di awal masa pandemi COVID-19 di beberapa negara maju (Kirk dkk, 2020). Bedanya, fenomena ini terjadi karena kurangnya kemampuan literasi digital untuk memeriksa kebenaran dari informasi-informasi yang didapatkan. Sedangkan *panic buying* pada masyarakat di wilayah perkotaan atau negara maju terjadi sebagai reaksi awal masyarakat yang mencoba untuk mengembalikan kontrol atas diri

mereka (yang dianjurkan untuk tetap di rumah dan menghindari kerumunan) dan menambah rasa aman. Kegiatan penimbunan kebutuhan-kebutuhan pokok sering terjadi di saat terjadinya bencana sebagai bagian dari insting manusia (Kirk dkk, 2020).

Informasi yang akurat sangat diperlukan oleh masyarakat terlebih pada era digital saat ini. Hal ini dikarenakan informasi mampu untuk membentuk pemahaman, sikap, dan tindakan masyarakat. Apabila informasi yang diperoleh tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, maka sangat mungkin tindakan yang dilakukan masyarakat juga menjadi kurang tepat (Supriyati, 2020). Di era digital saat ini, sumber informasi terkait pandemi COVID-19 dapat berasal dari berbagai macam sumber mulai dari yang bisa dipercaya seperti tenaga kesehatan hingga sumber yang belum terverifikasi kredibilitasnya. Uniknya, penelitian di Hongkong menunjukkan bahwa informasi yang paling dipercaya masyarakat adalah yang berasal dari dokter dan siaran radio, namun dua hal tersebut bukan sumber utama masyarakat sering mendapat informasi (Kwok dkk, 2020).

Penilaian suatu informasi dilakukan dengan memeriksa kebenaran dari informasi yang didapatkan. Namun pengecekan fakta bukanlah sesuatu yang efisien di wilayah minim akses seperti Kecamatan Silat Hilir mengingat keterbatasan akses informasi. Mendapatkan suatu pengetahuan (dalam hal ini COVID-19) membutuhkan waktu dan usaha, sedangkan penilaian terhadap informasi yang didapat jarang dilakukan, sehingga setiap informasi yang didapat cenderung dianggap akurat oleh masyarakat (Unkelbach, 2007 dalam Brashier et al, 2020). Tanpa latar belakang pengetahuan yang kuat serta akses informasi yang cepat, pemeriksaan kebenaran mengenai informasi palsu terkait manfaat telur rebus akan dilewatkan begitu saja oleh penduduk Kecamatan Silat Hilir.

Reaksi penduduk Kecamatan Silat Hilir terhadap ‘hoaks telur rebus’ menunjukkan ketidakberdayaan masyarakat menghadapi paparan informasi yang tidak utuh dari akses informasi yang terbatas. Hal ini membuktikan kembali teori komunikasi jarum hipodermik (*bullet theory*).

<sup>8</sup> Hasher, Lynn; Goldstein, David; Toppino, Thomas (1977). “Frequency and the conference of referential validity”. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*. 16 (1): 107–112. doi:10.1016/S0022-5371(77)80012-1

Dalam teori tersebut, produser informasi menggunakan ‘moncong’ seperti tembakan untuk mengirimkan gagasan pada masyarakat secara langsung tanpa menyebabkan efek responsif dari target informasi (Zhu, 2004; Zhao et al 2018). Media daring dalam hal ini pesan *what-sapp*, memiliki kekuatan untuk mempengaruhi penduduk Kecamatan Silat Hilir. *Bullet Theory* memungkinkan penyedia informasi selalu dianggap lebih pintar dari penerima informasi yang dalam hal ini penduduk Kecamatan Silat Hilir karena mereka dapat dikelabui dengan apa saja yang disajikan oleh media daring dan pemilik produser informasi.

Upaya untuk menanggulangi adanya disinformasi ini telah dilakukan oleh Kemkominfo melalui klarifikasi bahwa berita yang beredar mengenai telur rebus yang dapat menangkal corona merupakan *hoaks* atau berita palsu<sup>9</sup>. Bupati Kabupaten Kapuas Hulu Abang Muhammad Nasir juga memastikan, Pemda saat ini terus berupaya memberikan sosialisasi, himbauan, dan penyemprotan melalui Tim Gugus Tugas, serta memastikan akan menindak tegas siapa saja yang berusaha menyebarkan hoaks virus corona di wilayahnya<sup>10</sup>. Namun demikian, mengingat kondisi-kondisi khusus yang dimiliki penduduk Kecamatan Silat Hilir, yaitu infrastruktur listrik dan internet yang kurang memadai serta literasi informasi yang masih rendah, pendekatan lain perlu dilakukan. Salah satunya adalah melalui tokoh masyarakat yang dalam suatu penelitian terbukti berperan aktif mengedukasi masyarakat terkait upaya pencegahan COVID-19 (Rosidin, 2020). Di daerah perdesaan dengan keterbatasan infrastruktur dan kondisi sosial ekonomi yang rendah, peran tokoh masyarakat sangat penting dalam memperkuat kapabilitas dan potensi masyarakat sehingga mereka dapat berpartisipasi aktif dalam perilaku kesehatan yang baik dan benar. (Holden dkk, 2015).

<sup>9</sup> Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). *Isu Hoaks Corona Virus*. Laporan Isu Hoaks 9 April 2020 Pkl. 18.00 WIB.

<sup>10</sup> Hakim, Sahirul. (2020). <https://pontianak.tribunnews.com/2020/03/25/bupati-ingatkan-kembali-masyarakat-tak-sebarkan-informasi-hoax-terkait-virus-corona>

## PENUTUP

Di fase awal pandemi COVID-19, masalah kesenjangan akses informasi digital menjadi semakin penting untuk diselesaikan. Informasi terkait pandemi COVID-19 yang masih terus mengalami perkembangan dan terkesan berubah-ubah membuat masyarakat perlu mengakses informasi yang benar dari sumber terpercaya secepat mungkin. Hal ini agar masyarakat memiliki pengetahuan dan pemahaman yang komprehensif terkait COVID-19. Walau bagaimanapun, persepsi risiko masyarakat terhadap pandemi COVID-19 akan terbentuk dari pengetahuan dan pemahaman dari informasi yang tepat. Persepsi risiko ini akan menggerakkan masyarakat untuk berkontribusi dalam melakukan pencegahan dan meminimalisir dampak dari bencana kesehatan yang sedang terjadi. Seperti halnya dalam menghadapi bencana pada umumnya, pengetahuan dan partisipasi dari masyarakat menjadi krusial karena merupakan bagian dari kesiapsiagaan awal dalam menghadapi bencana.

Namun, masyarakat di Kecamatan Silat Hilir yang tinggal di wilayah minim akses dengan kondisi sosial ekonomi yang rentan serta kurang mendapat dukungan informasi dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat cenderung kurang memiliki pengetahuan terkait pandemi COVID-19 dan persepsi risiko terhadap virus penyebab COVID-19. Selain itu, masyarakat Kecamatan Silat Hilir juga rentan terhadap informasi yang salah terkait COVID-19 dan cenderung bereaksi pada informasi palsu dengan menyebarkan dan mengaplikasikan anjuran dari informasi tersebut tanpa melakukan pemeriksaan kebenaran terlebih dahulu.

Tingkat pendidikan yang rendah, permasalahan kurangnya infrastruktur pendukung baik listrik maupun sinyal internet, dan jalur transportasi yang masih sulit untuk diakses, membuat penduduk kurang terpapar informasi terkait COVID-19 dan belum mampu memilah dengan baik informasi yang diterimanya. Pembangunan infrastruktur dan peningkatan akses informasi yang telah dilakukan dan akan dilanjutkan lagi perlu juga diikuti dengan peningkatan kapasitas masyarakatnya dalam mencari dan memanfaatkan informasi. Salah satu cara meningkatkan kemam-

puan literasi masyarakat di wilayah minim akses adalah melalui aspek pendidikan. Pendidikan akan memberikan peluang yang lebih besar bagi masyarakat di wilayah minim akses untuk mendapatkan penghidupan dan kondisi ekonomi yang lebih baik serta meningkatkan pengetahuan perilaku kesehatan mereka.

Selain itu, dalam konteks menghadapi suatu bencana kesehatan, kebutuhan masyarakat wilayah minim akses yang dalam hal ini adalah masyarakat yang tinggal di Kecamatan Silat Hilir perlu untuk dipenuhi karena pengetahuan tersebut menjadi dasar bagi mereka untuk turut berpartisipasi menanggulangi pandemi COVID-19. Peran aktif pemerintah daerah dalam menggerakkan tokoh masyarakat untuk menginformasikan gejala, cara penularan virus serta tindakan pencegahan COVID-19 di tingkat individu dan masyarakat perlu untuk selalu ditingkatkan agar dapat meminimalisir dampak pandemi COVID-19 pada kalangan masyarakat yang tinggal di wilayah minim akses.

## PUSTAKA ACUAN

- Anthonj, C., Dieckrüger, B., Borgemeister, C., & Kistemann, T. (2018). *Health risk perceptions and local knowledge of water-related infectious disease exposure among Kenyan wetland communities*. International Journal of Hygiene and Environmental Health. doi:10.1016/j.ijheh.2018.08.003.
- ALA task force releases digital Literacy recommendations. (2013). *“Digital Literacy, Libraries & Public Policy”*. Report of the office for information technology policies. The American Library Association’s (ALA).
- Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII). (2018). *“Laporan Survei Penetrasi & Profil Perilaku Pengguna Internet Indonesia Tahun 2018”*.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2019). *“Kecamatan Silat Hilir Dalam Angka 2019”*. BPS Kabupaten Kapuas Hulu.
- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Indeks Pembangunan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (ICT Development Index) 2018*. Katalog Badan Pusat Statistik
- Bernard, R. (2006). *Research Methods In Anthropology Fourth Edition Qualitative and Quantitative Approaches*. Altamira Press: A division of Rowman & Littlefield Publishers. Oxford, UK.
- Beaunoyer, E., Dupéré, S., & Guitton, M. J. (2020). *COVID-19 and digital inequalities: Reciprocal impacts and mitigation strategies*. *Computers in Human Behavior*, 106424. doi:10.1016/j.chb.2020.106424
- Brashier, N. M., Eliseev, E. D., & Marsh, E. J. (2020). *An initial accuracy focus prevents illusory truth*. *Cognition*, 194, 104054. doi:10.1016/j.cognition.2019.104054.
- Erwin, C., Aultman, J., Harter, T., Illes, J., & Kogan, R. C. J. (2020). Rural and Remote Communities: Unique Ethical Issues in the COVID-19 Pandemic. *American Journal of Bioethics*, 0(0), 1–4. <https://doi.org/10.1080/15265161.2020.1764139>
- Forster, W. P. (2012). *Risk, modernity and the H5N1 virus in action in Indonesia A multi-sited study of the threats of avian and human pandemic influenza*. University of Sussex.
- Hadi, A. (2018). Bridging Indonesia’s Digital Divide: Rural-Urban Linkages? *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 22(1), 17. <https://doi.org/10.22146/jsp.31835>
- Hakim, S. (2020). Bupati Ingatkan Kembali Masyarakat Tak Sebarkan Informasi Hoax Terkait Virus Corona. Diakses dari <https://pontianak.tribunnews.com/2020/03/25/bupati-ingatkan-kembali-masyarakat-tak-sebarkan-informasi-hoax-terkait-virus-corona-pada-11-november-2020>
- Hadisiwi, S. (2016). *“Literasi Kesehatan Masyarakat Dalam Menopang Pembangunan Kesehatan di Indonesia”*. Prosiding Seminar Nasional Komunikasi.
- Hasher, L., Goldstein, D., & Toppino, T. (1977). *“Frequency and the conferece of referential validity”*. *Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior*. 16 (1): 107–112. doi: 10.1016/S0022-5371(77)80012-1
- Hasudungan, A. (2018). *Political Ecology of Palm Oil Development in The Kapuas Hulu District of West Kalimantan*. Thesis of Doctor. Sydney. School of Geosciences ; Faculty Of Science; The University Of Sydney.
- Higgins, C., Lavin, T., & Metcalfe, O. (2008). Health Impacts of Education a review. In *Institute of Public Health in Ireland*.
- Hodge, A., Firth, S., Marthias, T., Jimenez-Soto, E., & Pan, Chen-Wei. (2014). Location Matters: Trends in Inequalities in Child Mortality in Indonesia. Evidence from Repeated Cross-Sectional Surveys. *PLoS ONE*, 9(7), e103597–. doi:10.1371/journal.pone.0103597



- Holden, K., Akintobi, T., Hopkins, J., Belton, A., McGregor, B., Blanks, S., & Wrenn, G. (2015). Community Engaged Leadership to Advance Health Equity and Build Healthier Communities. *Social Sciences*, 5(1), 2. doi: 10.3390/socsci5010002
- Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-diindonesia?page=all> pada 26 Mei 2020
- Iswara, M. A. (2020). Disconnected: Digital divide may jeopardize human rights. Diakses dari <https://www.thejakartapost.com/news/2020/05/18/disconnected-digital-dividemay-jeopardize-human-rights.html> pada 15 Juni 2020
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2013). Kemkominfo Sedang Persiapkan Infrastruktur Internet Cepat di Indonesia. Diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/detail/1424/kemkominfo-sedang-persiapkaninfrastruktur-internet-cepat-di-indonesia/0/berita\\_satker](https://www.kominfo.go.id/content/detail/1424/kemkominfo-sedang-persiapkaninfrastruktur-internet-cepat-di-indonesia/0/berita_satker) pada 30 Agustus 2020
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2018). Siapkan SDM untuk Atasi Tantangan Pembangunan Infrastruktur Internet. Diakses dari [https://kominfo.go.id/content/detail/14405/siaran-pers-no-222hmkominfo092018-tentang-siapkan-sdm-untuk-atasi-tantanganpembangunan-infrastruktur-internet/0/siaran\\_pers](https://kominfo.go.id/content/detail/14405/siaran-pers-no-222hmkominfo092018-tentang-siapkan-sdm-untuk-atasi-tantanganpembangunan-infrastruktur-internet/0/siaran_pers) pada 30 Agustus 2020
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2020). Isu Hoaks Corona Virus. Laporan Isu Hoaks 9 April 2020 Pkl. 18.00 WIB. Diakses dari [https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan\\_isu\\_hoaks](https://www.kominfo.go.id/content/all/laporan_isu_hoaks) pada 23 Juli 2020
- Keppres No. 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional, (2020). Diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/135718/keppres-no-12-tahun-2020> pada 20 Agustus 2020.
- Kirk, C. P., & Rifkin, L. S. (2020). I'll trade you diamonds for toilet paper: Consumer reacting, coping and adapting behaviors in the COVID-19 pandemic. *Journal of Business Research*, 117(May), 124–131. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2020.05.028>
- Kustiningsih, W., & Nurhadi. (2020). Penguatan Modal Sosial dalam Mitigasi COVID-19. In W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 179–193). Gadjah Mada University Press. <http://repositorio.unan.edu.ni/2986/1/5624.pdf>
- Kwok, K. O., Li, K. K., Chan, H. H. H., Yi, Y. Y., Tang, A., Wei, W. I., & Wong, S. Y. S. (2020). Community Responses during Early Phase of COVID-19 Epidemic, Hong Kong. *Emerging Infectious Diseases*, 26(7), 1575–1579. <https://doi.org/10.3201/eid2607.200500>
- Liu, X., Zhang, D., Sun, T., Li, X., Zhang, H., Province, J., Province, J., & Zhang, H. (2020). Containing COVID-19 in rural and remote areas: experiences from China. *International Society of Travel Medicine*.
- Makdori, Y. (2020). Ketua Pusat Krisis UI Jelaskan Alasan Terjadinya Panic Buying di Tengah Wabah Corona. Diakses dari website:<https://www.liputan6.com/news/read/4208660/ketua-pusat-krisisui-jelaskan-alasan-terjadinya-panic-buyingdi-tengah-wabah-corona> pada 26 Mei 2020
- Martin, S. (2020). PM tells Australians to “stop hoarding” as he announces sweeping measures to slow spread of coronavirus. Diakses dari <https://www.theguardian.com/australia-news/2020/mar/18/pm-tells-australians-to-stop-hoarding-ashe-announces-sweeping-measures-to-slowspread-of-coronavirus> pada 26 Mei 2020
- McInerney, L. (2013). Why welfare and education are inextricably linked. Diakses dari <https://www.theguardian.com/education/2013/apr/15/welfare-reforms-affect-children-education> pada 1 September 2020
- Norberg, M., & Rucker, D. (2020). Ada alasan psikologis di balik “panic buying”. Ada cara psikologis juga untuk menghindari perilaku itu. Diakses dari <https://theconversation.com/ada-alasanpsikologis-di-balik-panic-buying-ada-carapsikologis-juga-untuk-menghindari-perilakuitu-135437> pada 26 Mei 2020.
- Park, M., Cook, A. R., Lim, J. T., Sun, Y., & Dickens, B. L. (2020). A Systematic Review of COVID-19 Epidemiology Based on Current Evidence. *Journal of Clinical Medicine*, 9(4), 967. <https://doi.org/10.3390/jcm9040967>
- Rahmah, A. (2015). *Digital Literacy Learning System for Indonesian Citizen*. *Procedia Computer Science*, 72, 94–101. doi:10.1016/j.procs.2015.12.109
- Röst, G., Bartha, F. A., Bogya, N., Boldog, P., Dénes, A., Tamás, F., Horváth, K. J., Juhász, A., Nagy, C., Tekeli, T., Vizi, Z., & Oroszi, B. (2020). Early phase of the COVID-19 outbreak in Hungary and post-lockdown scenarios. *MedRxiv*, 2005, 2020.06.02.20119313. <https://doi.org/10.1101/2020.06.02.20119313>
- Rosidin, Udin., Rahayuwati, Laili., Herawati, Erna. (2020). Perilaku dan Peran Tokoh Masyarakat

- dalam Pencegahan dan Penanggulangan Pandemi Covid -19 di Desa Jayaraga, Kabupaten Garut. *Indonesian Journal of Anthropology*, Volume 5 (1). DOI : 10.24198/umbara.v5i1.28187.
- Rothan, H. A., & Byrareddy, S. N. (2020). The epidemiology and pathogenesis of coronavirus (Covid-19) outbreak. *Journal of Autoimmunity*, 109(January), 1–4.
- Sadeka, S., Mohamad, M. S., & Sarkar, M. S. K. (2020). Disaster experiences and preparedness of the Orang Asli Families in Tasik Chini of Malaysia: A conceptual framework towards building disaster resilient community. *Progress in Disaster Science*, 6, 100070. <https://doi.org/10.1016/j.pdisas.2020.100070>
- Setiawan, W. (2017). Era Digital dan Tantangannya. Seminar Nasional Pendidikan 2017, 1–9.
- Sitohang, M. Y., & Hadiyanto. (2020). *Menghadapi normal baru, Puskesmas sebenarnya bisa lebih perkasa memberdayakan masyarakat*. The Conversation. <https://theconversation.com/menghadapi-normal-baru-puskesmas-sebenarnya-bisa-lebih-perkasa-memberdayakan-masyarakat-140709>
- Sitohang, M. Y., & Hadiyanto. (2020). Menghadapi normal baru, Puskesmas sebenarnya bisa lebih perkasa memberdayakan masyarakat. Diakses dari <https://theconversation.com/menghadapi-normal-baru-puskesmas-sebenarnya-bisa-lebih-perkasa-memberdayakanmasyarakat-140709> pada 26 Mei 2020.
- Susilo, A., Rumende, C. M., Pitoyo, C. W., Santoso, W. D., Yulianti, M., Sinto, R., ... Cipto, R. (2020). Coronavirus Disease 2019 : Tinjauan Literatur Terkini. *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, 7(1), 45–67.
- Supriyati. (2020). Gerak Relawan COVID-19 Tanggung Jawab Sosial Individu dan Masyarakat. Dalam W. Mas'udi & P. S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 194–213). Gadjah Mada University Press.
- Tong, Zhao, J. B. (2018). *Analysis of the concept of Audience in the Digital Age*. London School of Economics and Political Science, London 70527, UK. advances in Social Science, Education and Humanities Research (ASSEHR), volume 300. International Workshop on Education Reform and Social Sciences (ERSS 2018)
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif dan Grounded Theory* (Masbur (ed.)). FTK Ar-Raniry Press.
- Wilder-Smith, A., & Freedman, D. O. (2020), 'Isolation, quarantine, social distancing and community containment: pivotal role for old-style public health measures in the novel coronavirus (2019-nCoV) outbreak', *Journal of travel medicine*, 27(2), taaa020. <https://doi.org/10.1093/jtm/taaa020>
- WHO. (2020). WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19 - 11 March 2020. Diakses dari <https://www.who.int/dg/speeches/detail/whodirector-general-s-opening-remarks-at-themedia-briefing-on-covid-19---11-march-2020> pada 26 Mei 2020
- Widowati, H. (2019). *Infrastruktur Langit, Menghubungkan Nusantara dengan Palapa Ring*. Berita Katadata. <https://katadata.co.id/berita/2019/03/18/infrastruktur-langit-menghubungkan-nusantara-dengan-palapa-ring>
- Vali, I. (2013). The Role of Education in the Knowledge-based Society. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 76, 388–392. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2013.04.133>
- VanWynsberghe, Rob; Khan, Samia. (2007). "Redefining Case Study". *International Journal of Qualitative Methods* 2007.
- Zhang, Zizun., Gonzalez, Mila., Morse, Stephen., Venkatasubramanian., Venkat. (2017). "Knowledge Management Framework for Emerging Infectious Diseases Preparedness and Response: Design and Development of Public Health Document Ontology". *JMIR Res Protoc* 2017;6(10):e196. doi: 10.2196/resprot.7904.

## PERSEPSI PUBLIK TERHADAP PENULARAN PANDEMI KORONA KLASTER EKS IJTIMA ULAMA DI GOWA

### *PUBLIC PERCEPTION OF PANDEMIC CORONA TRANSMISSION CLUSTER EX IJTIMA ULAMA IN GOWA*

Ali Kusno<sup>1</sup>, Nurul Masfufah<sup>2</sup>

Kantor Bahasa Provinsi Kalimantan Timur<sup>1,2</sup>

<sup>1</sup> [alikusnolambung@gmail.com](mailto:alikusnolambung@gmail.com), <sup>2</sup> [masfufahnurul@yahoo.com](mailto:masfufahnurul@yahoo.com)

#### ABSTRACT

*This study aims to identify the growing public perception of the former participants of Ijtima Ulama in Gowa, which is considered as one of the corona pandemic distribution clusters in Indonesia. The research approach uses the critical discourse analysis of the Fairclough Model. That approach allows the use of language in discourse to be placed as a social practice; discourse or language use is generated in a specific discursive event; and the resulting discourse takes the form of a particular genre. The research data is in the form of discourse on Facebook users' responses to the news about the Gowa cluster corona pandemic. Data analysis techniques using an interactive model. The results showed that after the Ijtima Ulama activities in Gowa, the former participants of the activity received a variety of negative stigma. Most of the citizens think that the ex-Gowa activity is one of the spreaders of the corona outbreak in Indonesia. Even though the ex-participants of Gowa activities have undergone a quarantine and treatment process, they still get unpleasant treatment from the surrounding community, it seems that the ex-Gowa activities and their families are ostracized even though the community actually withdraws. Blindly understanding of religion will be very dangerous for the lives of Muslims. More stringent handling of similar incidents so that people are more compliant with government policies.*

**Keywords:** *Gowa cluster, corona pandemic, critical discourse*

#### ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi persepsi publik yang berkembang terhadap eks peserta Ijtima Ulama di Gowa yang dianggap sebagai salah satu klaster persebaran pandemi corona di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis wacana kritis model Fairclough. Penggunaan bahasa dalam wacana dengan menggunakan pendekatan ini ditempatkan sebagai praktik sosial. Wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu. Selain itu, wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu. Data penelitian berupa wacana tanggapan para pengguna *Facebook* terhadap pemberitaan tentang pandemi korona kluster Gowa. Teknik analisis data menggunakan model interaktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa setelah kegiatan Ijtima Ulama di Gowa, para eks peserta kegiatan tersebut mendapat beragam stigma negatif. Sebagian besar warganet beranggapan bahwa eks peserta kegiatan di Gowa sebagai salah satu penyebar wabah corona di Indonesia. Meskipun eks peserta kegiatan Gowa sudah menjalani proses karantina dan pengobatan, tetap mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari masyarakat sekitar. Terkesan eks kegiatan Gowa dan keluarga dikucilkan meskipun sebenarnya masyarakat lebih menaruh diri. Berdasarkan hal itu, dapat dinyatakan bahwa pemahaman agama yang terkesan membabi buta akan sangat berbahaya bagi kehidupan umat Islam. Penanganan lebih tegas terhadap kejadian serupa agar masyarakat lebih patuh terhadap kebijakan pemerintah.

**Kata kunci:** *kluster Gowa, pandemi korona, wacana kritis*

#### PENDAHULUAN

Bahasa hadir di tengah-tengah masyarakat untuk menjalankan dua fungsi. Pertama, fungsi transaksional yang merupakan fungsi untuk mengungkapkan isi. Kedua, fungsi interaksional

yang merupakan fungsi untuk mengungkapkan hubungan-hubungan sosial dan sikap-sikap pribadi (Brown dan Yule, 1996:1). Berdasarkan dua fungsi tersebut dapat dipahami bahwa bahasa, selain mengungkapkan isi, berperan juga untuk

mengungkapkan hubungan sosial penuturnya dan ekspresi sikap pribadi. Dalam mengungkapkan atau mengekspresikan situasi emosional yang dirasakan, manusia dapat menggunakan dengan berbagai cara, salah satunya melalui komentar di akun *Facebook*. Pada saat ini unggahan tentang *Covid-19* atau virus corona dengan berbagai macam komentar para netizen sedang marak di *Facebook*. Virus korona memang tengah menyebar dan menginfeksi lebih dari satu juta orang di seluruh dunia. Pada awal Desember 2019 kemunculan virus korona mulai terdeteksi pertama kali di negara Cina. Pada saat itu sejumlah pasien berdatangan dengan gejala penyakit yang tidak dikenal ke rumah sakit di Wuhan.

Kemudian, Dr. Li Wenliang menyebarluaskan berita tentang virus misterius tersebut di media sosial. Sejumlah pasien pertama diketahui memiliki akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Berdasarkan pemberitaan CNN, sebenarnya virus korona sudah ada sejak lama. Hanya saja, virus tersebut biasa ditemukan pada hewan, seperti kucing, anjing, babi, sapi, kalkun, ayam, tikus, kelinci, dan kelelawar.

Virus korona pada hewan hanya dapat menyebar antara binatang yang satu dan binatang yang lain. Bahkan, sebagian hanya bertahan pada inang aslinya saja dan tidak dapat menyebar. Seperti diungkapkan Kepala Divisi Penyakit Menular Anak-anak di Rumah Sakit Anak Pittsburgh University Center Medical, Dr. John Williams, biasanya virus dari satu hewan tidak menular ke spesies hewan lain atau ke manusia. Lebih lanjut diungkapkan, biasanya jika virus berpindah dari hewan ke manusia, itu seperti jalan buntu. Orang itu sakit, tetapi tidak menyebar lebih lanjut (Yasmin, 2020).

Dalam perkembangannya, wabah virus korona terus menghantui sejumlah negara di dunia, termasuk di Indonesia. Masyarakat Indonesia berkeyakinan bahwa virus korona tidak akan menyebar ke Indonesia karena faktor iklim tropis. Sebagian masyarakat juga berpandangan bahwa virus yang merebak di Wuhan sebagai akibat kegembiraan masyarakat di sana memakan hewan buas. Selain itu, juga berkembang pemahaman bahwa virus tersebut sebagai ‘tentara langit’ yang menghukum Cina yang dianggap menindas etnis

Muslim Uighur di sana. Masyarakat Indonesia pun terkesan masih tenang-tenang saja.

Jika sebelumnya Indonesia menjadi salah satu negara yang belum terinfeksi, Indonesia akhirnya mengonfirmasi kasus pertamanya. Ketenangan masyarakat Indonesia buyar. Masyarakat pun menjadi gusar. Indonesia menjadi salah satu negara positif virus korona (*Covid-19*). Kasus pertama yang terjadi di Indonesia menimpa dua warga Depok, Jawa Barat. Kabar buruk tersebut diumumkan langsung Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 2 Maret 2020 (Ihsanuddin, 2020). Menurut Jokowi, Ibu dan anak, tertular warga negara Jepang. Dua WNI itu merupakan seorang ibu (64 tahun) dan putrinya (31 tahun). Keduanya diduga tertular virus korona karena melakukan kontak langsung dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia.

Pada awalnya, pasien yang terinfeksi virus korona hanya ada dua orang. Masyarakat diharapkan untuk berhati-hati dan waspada menjaga kesehatan. Meskipun sudah ada bukti virus korona mulai masuk ke Indonesia, masih banyak warga Indonesia yang mempertanyakan bagaimana virus korona dapat masuk ke Indonesia. Sebagian besar masyarakat masih meragukan fakta tersebut.

Menteri Kesehatan RI, Terawan Agus Pu-tranto menjelaskan kronologi masuknya virus korona ke Indonesia. Menurut keterangan yang disampaikan, dari kedua pasien yang ditemukan tersebut, salah satunya merupakan guru dansa. Pasien berusia 31 tahun ini melakukan kontak fisik dengan WNA Jepang, yang bermukim di Malaysia sejak 14 Februari 2020 lalu. Riwayat kontak orang Jepang tersebut di Indonesia ditelusuri. Ternyata orang yang terkena virus korona berhubungan dengan dua orang, ibu 64 tahun dan putrinya 31 tahun (Nuaini, 2020).

Dalam perkembangannya, virus korona makin menyebar di 282 kota dan kabupaten di Indonesia. Jumlah ini bertambah dibandingkan sehari sebelumnya yang masih merambah 280 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Menurut Juru Bicara Pemerintah, Achmad Yurianto, saat *video conference* di Graha BNPB ada 34 provinsi terdampak dan 282 kabupaten dan kota terdam-

pak (26/4/2020). Hingga hari ini sampai pukul 12.00 WIB, setidaknya ada 46 laboratorium yang sudah melaksanakan pemeriksaan spesimen. Ada lebih dari 72 ribu lebih spesimen yang diperiksa dengan menggunakan *real time Polymerase Chain Reaction (PCR)* dari 56 ribu orang yang diduga mengidap COVID-19 (Astutik, 2020).

Dalam perkembangannya, salah satu klaster persebaran wabah korona adalah klaster Gowa. Klaster Gowa merupakan gelaran pertemuan umat Muslim dunia atau Ijtima se-Asia pada 19–22 Maret 2020 di Makassar. Gelaran tersebut tetap dilaksanakan meskipun pandemi korona tengah menyebar di Indonesia. Menurut panitia pelaksana, Mustari Burhanuddin, pertemuan itu tetap digelar karena peserta sudah berdatangan ke Desa Pakkatto, Kecamatan Bontomarannu, Kabupaten Gowa. Mustari menyebutkan jumlah peserta yang telah datang, sebanyak 411 orang dari 9 negara. Jumlah peserta tersebut dengan rincian berasal dari Pakistan sebanyak 58 orang, India 35 orang, Malaysia 83 orang, Thailand 176 orang, Brunei 1 orang, Timor Leste 24 orang, Arab Saudi 8 orang, Bangladesh 24 orang, dan Filipina 2 orang. Keseluruhan peserta tersebut berada di Tenda Foreign Ijtima Dunia Zona Asia 2020, Kompleks Pesantren Darul Ulum, Desa Niranuang, Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.

Selain peserta yang warga negara asing, Mustari menyampaikan bahwa warga negara Indonesia yang juga telah hadir sebanyak 8.283 orang dari 29 provinsi di Indonesia. Sementara itu, Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, Inspektur Jenderal Mas Guntur Laupe mengeluarkan surat telegram tentang kegiatan yang melibatkan ribuan orang. Dalam surat tersebut, Kapolda Sulawesi Selatan menyerahkan kepada Kepala Kepolisian Resor Gowa Ajun Komisaris Besar Boy Samola agar berkoordinasi dengan panitia pelaksana Ijtima Jamaah Tabligh se-Asia dan Pemerintah Kabupaten Gowa untuk tidak memberikan rekomendasi sementara waktu dengan pertimbangan untuk mencegah penyebaran virus korona.

Meskipun Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah, telah membatalkan acara tersebut H-1 sebelum acara itu digelar pada 19–22 Maret 2020, demi mencegah penyebaran virus, nyatanya

ribuan Jamaah dari daerah dan negara tetangga tetap berdatangan ke Pakkatto, Gowa. Bahkan, Nurdin mengungkapkan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan Bupati Gowa dan Kapolda Sulawesi Selatan untuk meminta acara pengumpulan jamaah itu ditunda karena kekhawatiran penyebaran virus korona. Namun, kenyataannya panitia lokal tidak menggubris dan tetap nekat menggelar acara tersebut. Panitia lokal pada kenyataannya tetap melaksanakan acaranya karena ribuan peserta dari sejumlah daerah di Indonesia dan ratusan peserta dari luar negeri terlanjur hadir melalui pelabuhan dan bandara (Hariyadi, 2020). Panitia tetap melaksanakan kegiatan tersebut. Bahkan, ada oknum yang mengikuti kegiatan tersebut menyatakan bahwa tidak takut dengan ancaman virus korona.

Setelah peserta kembali ke daerah masing-masing, kekhawatiran akan terjadi persebaran virus korona dalam pelaksanaan Ijtima Ulama di Gowa mulai terbukti. Dalam pertambahan data penderita virus korona, klaster Ijtima Ulama di Gowa menimbulkan banyak tambahan penderita korona di daerah-daerah. Bahkan, klaster Gowa di daerah-daerah terus menjadi ancaman pertambahan penderita korona di Indonesia

Hal itu memancing komentar miring sebagian besar masyarakat Indonesia. Dalam pemberitaan di media sosial seperti Facebook, apabila ada pemberitaan terkait klaster Gowa, pasti mendapat komentar beragam dari warganet. Tanggapan warganet berkaitan dengan maraknya penderita korona di daerah-daerah di Indonesia dalam pemberitaan di media sosial Facebook dalam tulisan ini dianalisis melalui analisis wacana kritis. Hal itu merupakan persepsi publik terhadap penularan wabah korona dari klaster Gowa. Tujuan analisis ini ialah untuk mengetahui persepsi publik sebagai bagian evaluasi wabah korona agar dapat menjadi pelajaran pada masa mendatang.

## **PENDEKATAN ANALISIS WACANA KRITIS MODEL FAIRCLOUGH**

Teks percakapan warga dalam kolom komentar akun Facebook pemberitaan tentang persebaran wabah korona klaster Gowa merupakan sebuah wacana. Wacana itu dalam tulisan ini dianalisis melalui analisis wacana kritis atau Critical

Discourse Analysis (CDA), yang dikembangkan oleh Norman Fairclough. Analisis wacana kritis model Fairclough menempatkan wacana atau penggunaan bahasa sebagai praktik sosial. Wacana atau penggunaan bahasa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu. Selain itu, wacana yang dihasilkan berbentuk sebuah genre tertentu (Ahmadi F., 2014: 255). Wacana atau penggunaan bahasa dalam akun Facebook pemberitaan tentang persebaran wabah korona klaster Gowa dihasilkan dalam sebuah peristiwa diskursif tertentu. Analisis wacana kritis model Fairclough ini dikenal dengan sebutan analisis tiga dimensi. Dimensi pertama disebut analisis tekstual (level mikro), yaitu analisis deskriptif terhadap dimensi teks. Dimensi kedua disebut analisis praktik wacana (level meso), yaitu analisis interpretatif terhadap pemroduksian, penyebaran, dan pengonsumsi wacana, termasuk intertekstualitas dan interdiskursivitas. Dimensi ketiga disebut analisis sosiokultural (level makro), yaitu analisis eksplanatif terhadap konteks sosiokultural yang melatarbelakangi kemunculan sebuah wacana (Fairclough dalam Ahmadi F., 2014: 255). Pendekatan analisis dengan tiga dimensi tersebut diharapkan dapat mengungkap pemaknaan sebuah wacana dalam kolom komentar akun Facebook dengan lebih menyeluruh dan mendalam.

Selanjutnya, penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif. Dengan metode penelitian kualitatif, prosedur penelitian diharapkan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dan lisan tentang sifat individu, keadaan, dan gejala dari kelompok tertentu yang dapat diamati (Moleong, 1994:6). Analisis kualitatif-deskriptif dalam penelitian ini disesuaikan dengan kerangka teori analisis wacana kritis model Fairclough (Ahmadi F., 2014:255). Objek penelitian ini adalah penggunaan bahasa dalam kolom komentar akun Facebook pemberitaan tentang persebaran wabah korona klaster Gowa. Data dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berupa dokumen dalam akun Facebook pemberitaan tentang persebaran wabah virus korona yang diakibatkan klaster Gowa. Untuk menjaga kerahasiaan penutur, penutur, dan tuturan, penulis ganti dengan inisial. Sumber data berupa dokumen percakapan dalam akun

Facebook pemberitaan tentang persebaran wabah korona klaster Gowa yang diunggah pada rentang waktu bulan Maret dan April 2020. Teknik analisa data dalam penelitian ini menggunakan model interaktif (Miles & Huberman, 1992:19-20), yang terdiri atas tiga komponen analisis, yakni reduksi data, sajian data, dandilanjutkan dengan penarikan simpulan atau verifikasi. Dalam pelaksanaannya, aktivitas ketiga komponen itu dilakukan dalam bentuk interaktif dengan proses pengumpulan data.

## **BERAGAM PERSEPSI PUBLIK DENGAN ADANYA KLASTER IJTIMA ULAMA GOWA**

Pandemi virus corona yang merebak dan menyebar ke hampir seluruh wilayah Indonesia membuat masyarakat bereaksi. Beragam pemberitaan tentang corona diunggah di akun media sosial Facebook portal berita. Hal itu menimbulkan banyak komentar warganet dalam menyikapi berbagai pemberitaan tentang corona. Salah satu pemberitaan pada awal pandemi corona terkait adanya persebaran dari klaster Gowa.

Klaster Gowa muncul sebagai akibat tetap dilaksanakannya kegiatan Ijtima Ulama (gelaran pertemuan umat muslim dunia) Ijtima se-Asia pada 19–22 Maret 2020 di Makassar. Hal itu memicu beragam tanggapan masyarakat yang diungkapkan dalam kolom komentar akun *Facebook* portal berita yang mengunggah berita terkait klaster Gowa. Beragam tanggapan tersebut dapat merepresentasikan persepsi masyarakat. Berbagai persepsi warganet yang timbul adalah sebagai berikut.

## **ANALISIS TEKSTUAL (ANALISIS MIKRO)**

### **Struktur Teks**

Struktur teks biasa dibagi menjadi tiga bagian, yaitu bagian pembuka, bagian isi, dan bagian penutup. Komentar warganet di kolom komentar *Facebook* terkait pemberitaan tentang persebaran wabah korona terlihat langsung berupa isi tanpa pembuka maupun penutup. Pada bagian isi, struktur tanggapan warganet dapat dikelompokkan berdasarkan substansi yang disampaikan untuk

lebih memudahkan pembahasan. Setelah kluster Gowa terbukti menjadi salah satu kluster yang menyebar di sebagian besar wilayah Indonesia, memunculkan beragam komentar warganet.

## **KESALAHAN KETIDAKTEGASAN PEMERINTAH**

Sebagian warganet menganggap merebaknya virus korona salah satunya dari kluster Ijtima Ulama Gowa sebagai akibat kelalaian pemerintah yang membuka akses transportasi. Berikut ini tanggapan warganet yang mengungkapkan hal itu.

*Dulu mereka diingatkan, tetap berangkat ke Gowa. Habis dari Gowa mereka dibiarkan saja kembali berbaur dg masyarakat. Sekarang mulai kelabakan mencari mereka ke mana saja. Beberapa hari ini berdatangan kapal bawa ribuan penumpang dari zona merah. Cuma di data alakadarnya dan tidak diisolasi. Kesalahan berulang. Kita tunggu saja beberapa waktu yg akan datang akan ada yg positif dari sekian penumpang, baru akan sibuk lagi mencari para penumpang itu pada kemanaan. Kalau dulu mereka yg dari Gowa datang diisolasi di satu tempat dan para pendatang lain juga diperlakukan sama. Mungkin angka positif di Kaltim tidak akan bertambah. Hari ini lalu lalang kendaraan di Samarinda mulai ramai. Tanda, warga mulai munyak sdh hampir tiga minggu bediam di rumah. E, yg bawa calon virus dibiarkan melenggang begitu saja. Pemda harusnya mau dengar aspirasi masyarakat. Karena suksesnya Pemda mencegah persebaran ini penyakit ya atas peran serta masyarakat.*

Berdasarkan tanggapan warganet tersebut dapat dipahami bahwa para peserta Ijtima Ulama Gowa sebenarnya sudah diingatkan untuk membatalkan kegiatan. Hanya saja para peserta tetap berangkat untuk mengikuti Ijtima Ulama di Gowa. Setelah kegiatan Ijtima Ulama Gowa para peserta dibiarkan berbaur dengan masyarakat. Akibatnya pemerintah mulai kesulitan untuk mendeteksi peserta karena sudah kembali ke daerah masing-masing. Penanganan yang dilakukan pemerintah daerah dengan mendata para peserta yang terkesan ala kadarnya, tanpa diisolasi terlebih dahulu hanya akan menyulitkan pemerintah.

Kalau saja kluster kluster Ijtima Ulama Gowa diisolasi di satu tempat dan pendatang lain

diperlakukan sama kemungkinan akan mampu meredam laju korona. Setelah dua minggu masyarakat diminta untuk berdiam diri di rumah, rupanya masyarakat sudah merasa bosan. Masyarakat pun mulai kembali beraktivitas bekerja seperti biasa. Selain itu, masyarakat terpaksa karena keterbatasan biaya hidup. Pemerintah ada baiknya menerima masukan dari masyarakat karena masyarakat yang mendukung dan berperan untuk menekan pandemi corona.

Memang dalam penanganan masalah pandemi seperti ini peran aktif masyarakat di daerah-daerah sangat diperlukan. Oleh karena itu, upaya pemerintah untuk mau mendengarkan dan memperhatikan masukan dari masyarakat sangat diperlukan. Sikap tak acuh masyarakat dengan imbauan-imbauan yang diberikan, bisa disebabkan kekecewaan masyarakat merasa telah diabaikan oleh pemerintah.

## **MASYARAKAT MENYALAHKAN EKS PESERTA KEGIATAN IJTIMA ULAMA GOWA**

Sebagian besar komentar warganet berisi hujatan terhadap eks peserta kegiatan Ijtima Ulama Gowa. Beragam tanggapan negatif yang ditujukan warganet kepada warga ekskluster Ijtima Ulama Gowa, seperti berikut ini.

Kluster Gowa ini turut berpartisipasi nyumbang angka positif kovid 19 di Indonesia. Sungguh prestasi yg mengagumkan. Dpt pahala gak nih?

makanya ibadah harus berdasarkan Ilmu, jangan berdasarkan logika, uda ada hadisnya, kalau dalam masa seperti ini, ulama udah melarang berjamaah, ya sudah ikutin aja, mereka itu pemimpin umat yang bisa dipertanggung jawabkan dunia dan akhirat

Berdasarkan tanggapan tersebut dapat dipahami bahwa bahwa kluster Ijtima Ulama Gowa dianggap turut berpartisipasi menyumbang angka positif corona di Indonesia. Warganet memberikan sindiran bahwa hal itu sebagai sebuah prestasi yang mengagumkan. Oleh karena itu, warganet tersebut mreneungkan ibadah harus berdasarkan ilmu dan jangan berdasarkan logika. Dalam ketentuan agama sudah jelas tuntunannya terakit ibadah dalam situasi seperti pandemi corona.

Masyarakat pun menganggap eks kegiatan Gowa pada akhirnya menyusahkan pemerintah, seperti dalam unggahan berikut ini.

Nah kalau sdh terjadi dan tidak mau mengikuti aturan siapa yg akan disalahkan pasti Pemerintah jg yg di Salahkan. Sekarang kita balik pakai Otak jgn Dengkul Keinginan siapa yg mau Mendatangkan Penyakit bukan Menjauhkan Penyakit. Jadi kalau sdh terjadi lebih baik pada di karantina dari pada Menyebarkan pada orang Lain yg tidak Dtg ke Gowa. Ingat Perbuatan sendiri harus berani menanggung Resiko sendiri jgn MENYUSAHKAN PEMERINTAH dan Orang lain dgn cara Menularkan.

Akhirnya pada nyusahin juga kaaan? Pada bandel sih, dibilangin diem dirumah ajeee. Mereka yg pd ikut ijtima tuh gak takut virus kan? Cuma takut sama Tuhan aja. Harusnya gak usah dibawa ke RS laaah.

Warganet menyalahkan eks Ijtima Ulama Gowa karena tidak mengikuti aturan dan justru menyalahkan pemerintah. Warganet menyarankan sebaiknya eks kegiatan Ijtima Ulama Gowa sebaiknya dikarantina daripada menyebarkan ke orang lain. Keberanian peserta eks kegiatan Ijtima Ulama Gowa menantang peringatan pemerintah harus mendapat konsekuensi menanggung akibatnya.

Warganet menuduh peserta Ijtima ulama di Gowa sebagai orang yang merasa suci dan agamis. Berikut ini tanggapan warganet pada kolom komentar media sosial *Facebook* berita daring yang mengungkapkan hal itu.

Sok agamis, sok merasa suci, sok paling bener. Tapi ternyata cuma nyusahin orang lain, jadi parasit

Akibat dr kesombongan diri berdalil agama. yg pd akhirnya membuat sesama umatnya menderita akibat kesombongannya.

Berdasarkan komentar tersebut dapat dipahami bahwa warganet menyudutkan peserta eks kegiatan Ijtima Ulama Gowa sok suci dan sok paling benar. Pada kenyataannya justru menyusahkan orang lain dan terkesan menjadi parasit. Akibat kesombongan diri dengan dalih-dalih agama terbukti menyusahkan umat. Sebagian besar jamaah tetap berangkat untuk mengikuti kegiatan Ijtima Ulama di Gowa dengan beragam

alasan pembenaran. Hal itulah yang menimbulkan beragam tanggapan warganet, seperti dalam komentar berikut.

Sudah terbukti dimana2, tapi masih saja orang mencoba dengan alasan agama. Manusia dibekali akal/logika untuk berpikir oleh tuhan, sesekali dipakai apalagi dalam situasi seperti sekarang ini (detik.com)

Berdasarkan data tersebut dapat diungkapkan bahwa sudah terbukti di banyak daerah di dalam maupun di luar negeri keberadaan virus corona, tetapi masih saja ada orang yang mengambil risiko tetap menggelar kegiatan besar dengan alasan agama. Manusia dibekali akal dan logika untuk berpikir oleh Tuhan, sesekali pakai apalagi dalam situasi pandemi corona yang kian mewabah.

Eks kegiatan Ijtima Ulama Gowa sebagai pihak yang akhirnya dianggap menyusahkan masyarakat sekitar, seperti dala unggahan berikut.

Kukira kebal (Selasar)

Berdasarkan data tersebut diungkapkan bahwa warganet menyindir para eks Ijtima Ulama di Gowa sudah kebal dengan virus korona. Pada kenyataannya, para eks kegiatan tersebut banyak yang positif korona. Berikut ini tanggapan warganet yang menganggap kluster Gowa sebagai pihak yang akhirnya menyusahkan masyarakat sekitar.

Akhirnya pada nyusahin juga kaaan? Pada bandel sih, dibilangin diem di rumah ajeee... Mereka yg pd ikut ijtima tuh gak takut virus kan? Cuma takut sama Tuhan aja..... Harusnya gak usah dibawa ke RS laaah.

Berdasarkan data tersebut mengungkapkan bahwa warganet memastikan eks kegiatan Gowa pada akhirnya menyusahkan masyarakat dan pemerintah. Hal itu sebagai akibat tidak mematuhi imbauan pemerintah untuk menghindari kegiatan dengan massa yang banyak. Warganet menggunakan bahasa sindiran dengan mengingatkan eks kegiatan Ijtima Ulama Gowa dengan ucapan bahwa tidak takut virus dan hanya takut Tuhan. dengan begitu, seharusnya mereka tidak perlu dibawa ke rumah sakit.

Sebagian warganet menganggap peserta Ijtima Ulama sebagai orang-orang yang mabuk agama. Peserta itu dianggap memahami agama tanpa



menggunakan ilmu, seperti tanggapan warganet berikut ini.

Orang-orang yang beragama tapi ga berilmu kayak gini nih, keliatan bodohnya. Alasannya lebih takut Tuhan dibanding koronalah terus ada juga yang ngomong hidup mati di tangan Tuhanlah, hidup emang di tangan Tuhan, tapi cara kita bertahan hidup kita yang nentuin.

Warganet beranggapan bahwa peserta Ijtima Ulama di Gowa sebagai orang-orang yang beragama, tetapi tidak berilmu. Sebagian peserta beralaskan lebih takut Tuhan dibandingkan corona. Selain itu, ada juga pihak yang selalu menyatakan bahwa hidup mati di tangan Tuhan. Warganet beranggapan bahwa memang hidup mati di tangan Tuhan, tetapi untuk cara bertahan hidup, umat manusia yang menentukan.

Sebagian warganet menganggap kegiatan Ijtima Ulama di Gowa sebagai bentuk ibadah yang merugikan banyak orang, seperti yang diungkapkan warganet berikut ini.

Ibadah yg merugikan orang banyak. Dan sepertinya banyak yg kecewa Saya sebagai orang muslim malu Krn kelakuan mereka

Warganet beranggapan bahwa kegiatan Ijtima Ulama tersebut sebagai ibadah yang merugikan orang banyak. Hal itu mengakibatkan kekecewaan bagi umat Islam. Selain dianggap menyusahkan pemerintah, warganet yang menganggap kluster Ijtima Ulama Gowa sebagai pihak yang akhirnya menyusahkan masyarakat di lingkungan tempat tinggal eks kegiatan Ijtima Ulama Gowa, seperti diungkapkan warganet berikut ini.

Karena mereka nafsu tidak bisa di kendalikan berilmu tapi tak di amalkan larangan pemerintah di abaikan, artinya mereka menyakini bahwa mati itu Tuhan yang menentukan. Bila ada ucapan itu mereka keluaran berarti mereka pasrah. Bukankah takdir harus di lawan takdir artinya sudah tahu berkumpul dilarang pemerintah kenapa masih di lawan harusnya di hindari. Tapi semua sudah terjadi barangkali kita bisa mengambil pelajaran dari mereka jangan mengikuti hawa nafsu utamakan kepentingan orang banyak bukan diri sendiri.

Warganet beranggapan karena nafsu (memikirkan kepentingan sendiri) tidak bisa dikendalikan, berilmu, tetapi tidak diamalkan, dan larangan pemerintah diabaikan, artinya peserta

Ijtima Ulama menyakini bahwa mati itu Tuhan yang menentukan. Masyarakat bisa mengambil pelajaran dari eks kegiatan Gowa jangan mengikuti hawa nafsu mengutamakan kepentingan orang banyak, bukan diri sendiri.

Para peserta Ijtima Ulama di Gowa dipersepsikan sebagai orang beriman yang belum tentu bijak. Kengototan peserta tersebut digambarkan sebagai orang beriman yang belum tentu bijak, seperti diungkapkan warganet berikut ini.

Ternyata orang yg katanya paling beriman blum tentu orangnya bijak. Malaysia dan India juga lumpuh dan lockdown gara-gara kelompok ini. (Kompas)

Warganet tersebut mengungkapkan bahwa orang yang beriman belum tentu bijak. Malaysia dan India lumpuh dan *lockdown* gara-gara kelompok ini. Kegiatan ini selain peserta dari daerah di Indonesia, juga diikuti dari luar negeri, seperti Malaysia dan India. Sebelum pelaksanaan Ijtima Ulama di Gowa, kasus persebaran corona dalam acara keagamaan juga merebak di Malaysia, seperti diungkapkan warganet berikut ini.

Bukankah sdh ada contohnya di Malaysia, masuk gedung tabligh akbar yg kena virus cuma satu, dua org sj tp ketika keluar hampir seluruh org yg berada dlm gedung kena virus semua kalau mau bunuh diri sendiri aja jgn ngajak org lain.

Seperti diungkapkan warganet tersebut kalau kejadian serupa sebelumnya pernah terjadi di Malaysia. Seperti diberitakan, di Malaysia sebelum kegiatan tabligh di Gowa juga dilakukan kegiatan serupa di Malaysia dengan peserta masuk gedung tabligh akbar. Pada awalnya yang terkena virus hanya satu, dua orang, tetapi ketika keluar hampir seluruh orang yang berada dalam gedung terkena virus. Warganet menggunakan pernyataan sarkasme dengan mengingatkan kalau hendak bunuh diri hendaknya tidak mengajak-ajak orang.

Susahnya menasihati peserta Ijtima Ulama Warganet menganggap masyarakat eks kegiatan Ijtima Ulama Gowa sebagai orang yang bebal sulit untuk dinasihati, seperti yang diungkapkan dalam kolom komentar berikut ini.

Aku pikir mereka manusia2 yg kebal korona kok malah nulari org bnyk dan jelas merepotkan tenaga medis. Coba di biarkan aja gk usa di obati

toh percuma ngobati manusia2 macam mereka. BEBAL...!!!

Emang kelompok ini bandel, sama juga di tempat saya, udah dilarang sholat di mesjid, tp tetap jg sholat jg di mesjid, padahal himbauan larangan itu terpampang besar di depan mesjid

Sesuai komentar tersebut warganet menyindir para peserta Ijtima Ulama Gowa sebagai orang yang kebal korona. Sayangnya justru eks kegiatan Gowa menularkan ke masyarakat sekitar dan jelas-jelas merepotkan tenaga medis. Warganet begitu geram sampai mengusulkan agar para penderita eks Ijtima Ulama Gowa dibiarkan saja. Warganet menganggap pasien positif eks klaster Gowa dibiarkan saja tidak perlu diobati percuma mengobati karena bebal. Memang kelompok ini bandel, sudah dilarang sholat di mesjid, namun tetap salat di masjid padahal imbauan larangan itu terpampang besar di depan masjid.

Hal senada juga disampaikan warganet lain.

Selamat deh.. kan klo dah kaya gini seneng kan? Terusin aja keyakinan “mati di tangan Tuhan” Sekarang karna dirimu yg ndablek.. anak istrimu bisa mati karna ulahmu.. anak istri harus menanggung derita.. trus nyusahin orang2 juga.. para medis.. Karna manusia tolo sok suci seperti kalian lah banyak orang menderit.. dri 1 keluarga bisa membahayakan 1 kampung.. dan terus meluas.. kalian sama aja pembunuh

*Biarkan saja, klu manusia ngenyel ttap diobati maka akan timbul manusia”ngenyel lainnya yg lebih berbahaya.*

Warganet menggunakan ironi dengan mengucapkan selamat karena sudah banyak yang positif corona semoga senang dan mempersilakan meneruskan sikap bebal karena sudah yakin dengan prinsip mati di tangan Tuhan. Akibat sikap para eks kegiatan Ijtima Ulama Gowa yang keras kepala mengakibatkan anak istri (keluarga) yang harus menanggung, bahkan bisa meninggal karena corona. Selain itu, eks peserta kegiatan Gowa juga dapat menyusahkan orang lain, khususnya masyarakat sekitar dan paramedis. Akibat pemahaman agama yang salah dan menganggap diri suci dapat membahayakan keluarga bahkan satu kampung dapat tertular dan meluas.

Sebagian warganet berang karena eks peserta kegiatan Gowa sama saja dengan seorang pembunuh. Dengan pernyataan sarkasme warganet

tersebut mengungkapkan agar eks peserta kegiatan Gowa yang dinilai keras kepala tidak perlu diobati agar tidak timbul manusia keras kepala yang lain. Warganet yang menganggap kluster Gowa sebagai pihak yang akhirnya menyusahkan masyarakat sekitar, seperti dalam pernyataan berikut.

Ya, kalau masih ada itikat baik yg ikut ijma’ segera lapor polisi atau lapor tim medis sendiri dan mau di karantina... gak usah nunggu di cari polisi,, itu kalau masih punya itikat baik, supaya keadaan cepat membaik... sebab meskipun polisi tidak tau keberadaan mereka saat ini berimanlah bahwa Allah Maha Tau,..di manapun anda” berada,.. dan jujurlah kepada Allah. (detik.com).

Peserta Ijtima diimbau dengan itikad baik untuk segera melaporkan diri ke polisi atau tim medis dan berkenan untuk dikarantina. Para peserta kegiatan Gowa tidak perlu sampai dicari pihak kepolisian agar cepat membaik. Kalaupun polisi tidak tahu, dimohon dengan kerelaan untuk jujur.

## **Ulama Harus Berhati-hati dalam Memberikan Fatwa**

Ulama bagi umat Islam menjadi panutan karena fatwa yang diberikan. Fatwa dapat bermasalah apabila dikeluarkan atas nama diri sendiri bukan atas nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Hal yang sama terjadi dalam konteks tetap terselenggaranya kegiatan Ijtima Ulama di Gowa karena adanya pernyataan-pernyataan yang diyakini sebagai fatwa dari sejumlah ulama. Hal itulah yang mendasari sebagian besar jamaah tetap berangkat mengikuti Ijtima Ulama di Gowa, seperti diungkapkan warganet berikut ini.

Dlm beragama mengikuti fatwa ulama boleh2 saja, ttpi jika yg di ikuti ulama yg ucapan fatwanya #masuk angin wajib tdk di ikuti? Krn beragama itu msti dgn nalar bukan ambisi sok bener apa lagi #ngeyel ditengah situasi wabah...

Dalam beragama mengikuti fatwa ulama boleh-boleh saja, tetapi jika yang diikuti ulama yang ucapan fatwa tidak dapat dipertanggungjawabkan sebaiknya tidak diikuti. Beragama itu harus dengan nalar berpikir dengan baik, bukan ambisi merasa paling benar dengan keras kepala, terlebih lagi dalam situasi pandemi corona.

Selain itu, kebebalaan eks peserta kegiatan Ijtima Ulama Gowa pada awal-awal pandemi korona karena diduga ada pihak-pihak yang mempropagandakan agar tidak perlu takut virus corona. Dalam salah satu kelompok masyarakat mendapat propaganda tidak perlu takut dengan korona, tetapi korona yang harus takut dengan umat Islam. Berikut ini tanggapan warganet terkait hal tersebut.

Realita aja, banyak penceramah agama yang jadi tukang bakar. Ga tahu ilmunya tapi koar-koar akibatnya korban akan terus berjatuh karena banyak sekali orang awam lebih percaya penceramah dibanding orang kesehatan. (Kompas)

Warganet tersebut mengungkapkan bahwa banyak penceramah agama diduga melakukan provokasi. Provokasi dilakukan karena tidak tahu dasar ilmunya, tetapi berkoar-koar tentang corona akibatnya banyak korban berjatuh karena banyak orang awam yang lebih mempercayai penceramah dibandingkan pihak kesehatan.

Selain tokoh agama, juga terdapat tokoh publik yang berbicara dengan mengesankan tidak perlu takut dengan korona, seperti diungkapkan warganet berikut ini.

Secara moral Gatot Nurmantyo harus turut bertanggungjawab, karena beliau mendukung orang2 berkumpul di saat itu walaupun sdh ada himbauan pemerintah.

Menurut warganet tersebut, secara moral, Gatot Nurmantyo harus turut bertanggung jawab karena mendukung orang-orang berkumpul di saat itu walaupun sudah ada imbauan pemerintah. Komentar warganet itu terkait pernyataan Gatot Nurmantyo yang menyampaikan seruan agar umat Islam tetap memakmurkan masjid di tengah pandemi corona. Gatot Nurmantyo menyampaikan dalam akun instagram @nurmantyo\_gatot (tim detik.com, 2020), menurut Gatot, '*mereka (pihak-pihak tertentu) beramai-ramai menggaungkan phobia dengan Masjid. Seakan-akan masjid sebagai sumber penularan kovid-19. Ajakan sy untuk tetap memakmurkan masjid semata ingin mencegah potensi berkembangnya stigma masjid sebagai pusat penyebaran covid-19, di tengah tidak adanya gaung ajakan serupa dari kalangan gereja, vihara, pura, klenteng dan tempat ibadah lainnya*'.

Selain itu, pernyataan Gatot juga dilandasi beragam fakta bahwa pemerintah belum melarang kegiatan masyarakat di mal, tempat hiburan dan sarana publik lainnya. Atas dasar hal itu, yang dalam pemahaman Gatot dan sebagian masyarakat Indonesia, berarti secara umum pemerintah masih dapat sepenuhnya mengendalikan penyebaran virus korona di tanah air. Selain itu, masih dalam pemahaman Gatot bahwa masjid yang pada umumnya orang datang untuk beribadah dalam kondisi bersih, membuka alas kaki dan berwudu, dalam kondisi normal dengan membasuh menggunakan air bersih pada bagian tubuh yang diwajibkan saja sudah diimbau untuk tidak dilakukan. Seharusnya, tempat-tempat yang jelas-jelas untuk masuk sama sekali tidak diatur kebersihannya selayaknya juga dilarang.

### **Membela Eks Ijtima Ulama**

Ada sebagian warganet yang membela eks peserta Ijtima Ulama di Gowa justru menyalahkan asal mula korona dari Wuhan, seperti dalam unggahan berikut ini.

*Setau aku covid 19 itu datang dari wuhan cina, merekalah punca sebenarnya.jamaah tablig juga tertular dari korona wuhan entah dari siapa.jd jangan menjadikan seolah mereka membawa musibah,sebelum mereka ijtima' covid 19 juda udah ada di Indonesia raya.*

Sebagian warganet membela eks kegiatan di Gowa bahwa penyebaran korona di Indonesia tidak hanya dari Gowa. Justru peserta tersebut tertular dari asal mula wabah korona, yakni dari Wuhan Cina. Jamaah tabligh juga tertular dari korona Wuhan entah dari siapa. Warganet tersebut mengingatkan bahwa jangan menjadikan eks kegiatan Gowa seolah membawa musibah. Bahkan sebelum kegiatan di Gowa, wabah korona sudah ada di Indonesia.

### **Bersikap Bijaksana dengan Tidak Menyalahkan Pihak Tertentu**

Sebagian besar warganet yang menghujat eks peserta Ijtima Ulama, Gowa, seperti dalam unggahan berikut ini.

*duuh cukup jg nyalain org2 tabliq terus nnti tmbah parah km tau maysia semua myalagn org jemaah*

sekrag pda mnta maaf tau jd jgn mylkn org lain ini salah msnusiA bkn berdoa cma sok bnar lht. us itl spen ada ka jemaah kok mmpus oake ndro2.

Warganet tersebut mengingatkan bahwa sudah cukup menyalahkan jamaah tabligh yang terus disalahkan. Menurut warganet tersebut, jamaah tabligh juga merupakan korban. Jadi, jangan diposisikan untuk terus dipersalahkan. Hal senada juga disampaikan warganet berikut ini.

*Udah gak usah saling menyalahkan, saat ini mereka udah sadar n faham klw Korona itu Bakteri n bukan tentara. Doa terbaik buat NKRI.*

Warganet tersebut mengungkapkan bahwa sudah tidak perlu lagi saling menyalahkan karena saat ini eks peserta Ijtima Ulama Gowa sudah sadar dan paham kalau korona itu bakteri dan bukan tentara.

Warganet lain juga memberikan sikap bijak dengan menyatakan bahwa pengalaman yang terjadi pada eks Ijtima Gowa menjadi pelajaran bagi umat Islam lain dalam beribadah, seperti diungkapkan warganet berikut ini.

*Menjadi pelajaran bagi semua masyarakat Indonesia, beribadah itu harus tapi marilah pergunakan nalar kita dan ikuti anjuran pemerintah Semoga yg kena kovid cepat sembuh.*

Warganet tersebut mengingatkan agar menjadi pelajaran bagi masyarakat Indonesia, bahwa beribadah itu harus, tetapi sebaiknya juga mempergunakan nalar dan berkenan mengikuti anjuran pemerintah.

Bagi umat Islam, sebaiknya beragama juga tetap mmempertimbangkan anjuran kesehatan yang disampaikan pemerintah, seperti diungkapkan warganet berikut ini.

Lho katanya virus gak kan menyerang org yg rajin ibadah. Meskipun kalian rajin ibadah tp klo hidupmu tdk mengikuti aturan kesehatan tetap aja bs tepar.jd gak usah takabur deh. Gak usah sok2an cm takut sm Tuhan Allah, gak takut sm ciptaan-Nya.itu jg sm aja melecehkn ciptaan Tuhan.

Selama ini berkembang pemikiran di sebagian kalangan kalau virus tidak akan menyerang orang yang rajin beribadah. Meskipun rajin ibadah, tetapi kalau hidup tidak mengikuti anjuran kesehatan pemerintah tetap saja akan terserang virus. Oleh karena itu, sebaiknya tidak

boleh sombong dan menyombongkan diri hanya takut aturan dan tidak takut corona. Hal itu sama saja takabur. Dalam perkembangan pemberitaan tentang wabah korona, memang ketika mulai merebak di Wuhan, berkembang wacana bahwa etnis uighur lebih terbebas dari corona. Dalam pemberitaan etnis Uighur adalah etnis minoritas di Cina yang tertindas. Ketika Cina, khususnya Wuhan merebak wabah korona, berkembang berita di antaranya, warga muslim terbebas dari corona.

#### 1. Penggunaan Gramatika Transitif

Analisis tekstual pada bagian tata bahasa menurut Fairclough (Ahmadi F., 2014: 257), ada tiga aspek yang bisa dianalisis, yakni ketransitifan, tema, dan modalitas. Aspek ketransitifan berkenaan dengan fungsi ideasional bahasa, aspek tema berkenaan dengan fungsi tekstual bahasa, sedangkan aspek modalitas berkenaan dengan fungsi interpersonal bahasa Eriyanto dalam (Ahmadi F., 2014: 257). Aspek ketransitifan dalam komentar penggunaan media sosial dalam kolom komentar media sosial berita daring tentang penularan korona klaster eks Ijtima Ulama di Gowa menunjukkan bahwa warganet menguatkan hal-hal negatif dan mengurangi hal positif terhadap eks peserta Ijtima Ulama di Gowa. Publik menyudutkan peserta Ijtima Ulama di Gowa sebagai salah satu biang persebaran wabah korona di Indonesia.

Tema keagamaan (Islam) berkenaan dengan fungsi tekstual bahasa dalam komentar warganet terkait pemberitaan persebaran corona klaster Gowa menggunakan tuturan yang memiliki dua motif, yakni sengaja menggunakan isu pandemi corona klaster Gowa untuk menyudutkan Jamaah Tabligh dan yang murni memberikan kritik terkait pandemi corona klaster Gowa. Selanjutnya, fungsi modalitas dalam kolom komentar warganet berupa tuturan-tuturan yang dapat memicu stereotip negatif terhadap Jamaah Tabligh pelaku Ijtima Ulama di Gowa dan kritikan bagi masyarakat untuk memperhatikan aturan pemerintah terkait pandemi corona.

#### 2. Penggunaan Kosakata

Komentar warganet dalam kolom komentar media sosial kanal berita daring (detik, Kompas, Selasar, dan lainnya) tentang persebaran pandemi

corona di Indonesia kluster Ijtima Ulama di Gowa masih menggunakan bahasa yang santun dan masih dalam batas kewajaran. Warganet lebih banyak menggunakan gaya bahasa ironi dan sarkasme. Kesan tersebut terlihat dalam penggunaan kata. Selain itu, penggunaan bahasanya lebih menggunakan bahasa sindiran.

### **DIMENSI PRAKTIK WACANA (LEVEL MESO)**

Analisis teks dilanjutkan pada analisis praktik wacana. Fairclough dalam Jorgensen dan Philips (Ahmadi F., 2014: 261) mengungkapkan bahwa analisis praktik kewacanaan ini dipusatkan pada bagaimana teks yang diproduksi dan dikonsumsi, termasuk di dalamnya menelisik proses yang dilalui suatu teks sebelum dicetak dan perubahan-perubahan yang dialami sebelum disebarluaskan. Analisis dalam tahap dimensi ini sangat bermanfaat untuk menggali latar belakang sebuah tuturan dan akibat tuturan tersebut.

Berbagai komentar negatif terhadap eks peserta kegiatan Gowa dalam kolom komentar media sosial kanal berita daring (Detik, Kompas, Selasar dan lainnya) tentang persebaran pandemi corona di Indonesia kluster Ijtima Ulama di Gowa dilatarbelakangi mulai merebaknya pandemi corona di Indonesia. Meskipun demikian, jamaah tabligh tetap melaksanakan kegiatan dalam bayang-bayang pandemi corona. Para peserta tetap berdatangan ke Gowa dan mengabaikan peringatan pemerintah dan masyarakat.

Dalam perkembangannya, ketika kembali ke daerah masing-masing, banyak eks peserta kegiatan tersebut terpapar corona dan menjadi kluster penyebaran di daerah asal masing-masing. Hampir di semua daerah yang ada eks peserta kegiatan Gowa terdapat pasien positif corona yang menyebarkan ke keluarga maupun lingkungan sosial.

Warganet menumpahkan kekesalan tersebut melalui berbagai kolom komentar di media sosial berita daring yang memuat berita tentang eks kegiatan Gowa. Banyaknya komentar negatif tersebut membentuk berbagai stigma negatif terhadap eks peserta kegiatan Gowa. Akibat beragam stigma negatif tersebut membuat sebagian masyarakat menjaga jarak dengan eks peserta

kegiatan Gowa dan keluarganya. Kekhawatiran masyarakat lebih disebabkan ketakutan akan tertular virus corona. Sementara itu, tanggapan masyarakat tersebut dianggap sebagai upaya pengucilan bagi eks peserta kegiatan Gowa dan keluarganya.

### **DIMENSI PRAKTIK SOSIAL BUDAYA (LEVEL MAKRO)**

Berdasarkan analisis wacana kritis (dimensi tekstual, dimensi praktik wacana, dan dimensi praktik sosial budaya), terhadap tanggapan warganet dalam kolom komentar media sosial kanal berita daring (Detik, Kompas, Selasar dan lainnya) tentang persebaran pandemi korona di Indonesia kluster Ijtima Ulama di Gowa telah dikelompokkan dan dianalisis ke dalam beragam persepsi.

Kegiatan keagamaan di Indonesia dilakukan dengan penuh kebebasan. Kegiatan beribadah maupun kegiatan keagamaan lainnya juga bebas dilaksanakan. Hanya saja untuk kegiatan yang mengumpulkan massa dalam jumlah banyak harus mendapatkan izin dari pihak kepolisian.

Ijtima Ulama Dunia 2020 atau Ijtima Ulama Zona Asia merupakan pertemuan keagamaan massal internasional Jamaah Tabligh yang direncanakan digelar pada 19—22 Maret 2020 di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Setelah mendapat penolakan masyarakat secara luas, kegiatan tersebut pun dibatalkan. Hanya saja masih ada sebagian peserta tetap berangkat dan berkumpul di lokasi kegiatan. Setelah kegiatan tersebut berakhir dan ekspeserta kembali ke daerah, di daerah-daerah terbukti banyak yang terjangkit wabah korona dan menjadi kluster persebaran di daerah masing-masing. Berbagai pandangan negatif melekat pada ekspeserta kegiatan Gowa.

Di daerah-daerah eks peserta kegiatan Gowa diwajibkan menjalani tes. Sebagai contoh, penanggung jawab Ijtima Ulama Gowa, Sulawesi Selatan, H Abdul Rahman memastikan seluruh jamaahnya telah menjalani tes covid-19 sehingga diharapkan tidak ada lagi persepsi yang keliru di tengah masyarakat. Selama ini banyak salah anggapan bahwa dikatakan jamaah tabligh tidak

taat aturan pemerintah. Menurut penuturan salah satu eks peserta kegiatan Gowa kalau semua taat secara sukarela telah dites apakah terpapar virus corona atau tidak (Winda, 2020).

Sebagian besar peserta kegiatan merupakan Jamaah Tabligh. Sebagian besar publik belum mengetahui, Jamaah Tabligh (bahasa Urdu: جمعیت تبلیغی, Jamaah Penyampai) merupakan gerakan dai global non-politik. Gerakan Jamaah Tabligh berfokus pada mengajak umat Islam untuk kembali mempraktikkan Islam seperti yang dipraktikkan selama masa hidup Nabi Muhammad Saw, khususnya dalam hal ibadah, pakaian, dan perilaku pribadi. Organisasi Jamaah Tabligh ini diperkirakan memiliki penganut antara 12 juta dan 150 juta (mayoritas tinggal di Asia Selatan dan tersebar antara 150 dan 200 negara). Gerakan ini pun disebut-disebut menjadi salah satu gerakan keagamaan paling berpengaruh dalam agama Islam abad ke-20.

Gerakan ini didirikan pada 1927 oleh Muhammad Ilyas al-Kandhlawi di Mewat India sesuai dengan ajaran dan praktik yang terjadi di Masjid Nabawi dan Ashabus Suffah Tabligh. Tujuan utama Jamaah Tabligh adalah reformasi spiritual Islam dengan menjangkau umat Islam di seluruh spektrum sosial dan ekonomi dan bekerja di tingkat akar rumput untuk sejalan dengan pemahaman kelompok tentang Islam.

Dalam kegiatannya, Jamaah Tabligh mengklaim untuk menghindari media elektronik dan mendukung komunikasi pribadi dalam berdakwah. Meskipun dalam pelaksanaannya tokoh-tokoh Tabligh terkemuka seperti Tariq Jameel ditampilkan di berbagai video media sosial dan sering muncul di televisi. Jamaah Tabligh menarik perhatian publik dan media ketika mengumumkan rencana untuk pembangunan masjid terbesar di Eropa yang terletak di London (“Jamaah Tabligh,” 2020).

Dalam kasus wabah corona, setelah merebaknya virus di Indonesia yang menurut publik ikut disebabkan eks Ijtima Ulama Gowa, di masyarakat berkembang stigma negatif terhadap Jamaah Tabligh. Salah seorang Jamaah Tabligh berinisial VG berharap tidak ada stigma negatif dari masyarakat sebab eks kegiatan Gowa di daerah sudah dinyatakan negatif kovid-19, secara

medis. Menurut keterangan salah satu jamaah, jangankan status negatif, masyarakat mendengar para peserta sudah diisolasi di Asrama Haji saja, keluarga peserta eks kegiatan Gowa pun sudah dikucilkan masyarakat.

Para peserta Ijtima Ulama Gowa berharap kepada media untuk menyampaikan harapan tersebut kepada masyarakat. Eks kegiatan Gowa telah menjalani perawatan dan dinyatakan negatif corona dan diharapkan dapat diterima kembali di masyarakat. Bahkan, sebagai bentuk komitmen untuk membantu pemerintah, eks kegiatan Gowa bersedia membantu pemerintah provinsi dan kabupaten kota sebagai relawan edukasi penyebaran dan pencegahan kovid-19 ke masyarakat. (“Hamzah Sidik Ajak Masyarakat Hilangkan Stigma Negatif JT Terkait Covid-19,” 2020).

Sebagian warganet menganggap merebaknya virus corona salah satunya dari klaster Ijtima Ulama Gowa sebagai akibat kelalaian pemerintah yang membuka akses transportasi. Pemerintah ada baiknya menerima masukan dari masyarakat karena masyarakatlah yang mendukung dan berperan untuk menekan pandemi corona. Sebagian besar komentar warganet berisi hujatan terhadap eks peserta kegiatan Ijtima Ulama Gowa. Ulama bagi umat Islam menjadi panutan karena fatwa yang diberikan. Fatwa dapat bermasalah apabila dikeluarkan atas nama diri sendiri bukan atas nama Majelis Ulama Indonesia (MUI). Selain itu, kebebalaan eks peserta kegiatan Ijtima Ulama Gowa pada awal-awal pandemi corona karena diduga ada pihak-pihak yang mempropagandakan agar tidak perlu takut virus korona.

Pola pemberian fatwa dan propaganda serupa juga pernah dilakukan HTI dalam menyebarkan paham-pahamnya melalui artikel-artikel Al-Islam yang disebar di masjid-masjid terutama setelah salat Jumat (Kusno et al., 2017). Berdasarkan hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa upaya pembentukan stereotip negatif tentang pemerintah berupa stereotipe ketidakmampuan pemerintah, sistem ekonomi liberal, keberpihakan pemerintah pada kapitalis, politik transaksional, dan keberpihakan pemerintah pada asing. Berbagai serangan propaganda terhadap kondisi dan kebijakan pemerintah dilakukan berulang-ulang sehingga membentuk stereotip negatif tentang pemerintah.

Dalam konteks ini, fatwa dan propaganda tentang corona sebagai sesuatu yang tidak perlu ditakuti umat Islam. Korona dianggap sebagai tentara Allah memerangi musuh Islam. Hal itu didasari pemikiran awal mula corona di Wuhan, Cina banyak tersebar pada orang-orang non-Muslim. Sedangkan etnis Uighur cenderung terbebas dari corona. Padahal pemikiran tersebut hanyalah opini yang berkembang tanpa disertai fakta. Terlebih lagi apabila ditarik lagi ke belakang, sebelum merebak virus corona, ramai tentang isu penindasan etnis Uighur di Cina.

Atas dasar pemikiran itulah, sebagian ulama memfatwakan dan mempropagandakan bahwa korona merupakan tentara Allah yang tidak akan mengenai umat Islam. Korona akan mengenai non-Muslim, seperti di Wuhan, karena umat Islam sudah terbiasa dengan kebersihan (wudu). Selanjutnya, pemahaman dikuatkan juga dengan pandangan bahwa hidup matinya umat di tangan Allah. Apakah terkena korona atau tidak, kalau memang sudah takdir Allah, kematian seseorang akan datang kalau sudah waktunya. Pemikiran seperti itulah yang membuat sebagian Jamaah Tabligh untuk tetap berangkat mengikuti kegiatan Ijtima Ulama di Gowa.

Pada sisi lain, terdapat sebagian warganet yang membela ekspeserta Ijtima Ulama di Gowa. Sebagian warganet menyalahkan asal mula korona dari Wuhan. Sebagian warganet membela ekskegiatan di Gowa bahwa persebaran korona di Indonesia tidak hanya dari Gowa. Justru peserta tersebut tertular dari asal mula wabah korona, yakni dari Wuhan Cina. Memang dalam konteks tertentu ada pihak-pihak yang tetap membela diri dengan segala macam dalihnya sebagai pembenaran atas tindakan yang dilakukan. Pihak-pihak tersebut akan selalu merasa paling benar dan lebih baik dari masyarakat lain. Hal itulah yang membuat pihak-pihak tersebut terasa sulit menerima pendapat orang lain. Warganet tersebut mengingatkan bahwa sudah cukup menyudutkan Jamaah Tabligh yang terus disalahkan. Warganet lain juga memberikan sikap bijak dengan menyatakan bahwa pengalaman yang terjadi pada eks Ijtima Gowa menjadi pelajaran bagi umat Islam lain dalam beribadah.

## PENUTUP

Berdasarkan analisis dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa setelah kegiatan Ijtima Ulama di Gowa, para eks peserta kegiatan tersebut mendapat beragam stigma negatif. Sebagian besar warganet beranggapan bahwa eks kegiatan Gowa sebagai salah satu klaster penyebar wabah corona di Indonesia. Meskipun eks peserta kegiatan Gowa sudah menjalani proses karantina dan pengobatan, tetap mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakkan dari masyarakat sekitar, terkesan ekskegiatan Gowa dan keluarga dikucilkan padahal sebenarnya masyarakat lebih karena menarik diri untuk berjaga-jaga agar tidak tertular.

Timbulnya permasalahan tersebut didasari permasalahan kesalahpahaman jamaah tentang virus corona. Ketidaktahuan tersebut tidak mendapat penjelasan yang sesuai, justru mendapat pertimbangan dari sebagian ulama yang terkesan menggampangkan pandemi corona. Ketidaktahuan jamaah tersebutlah yang dianggap sebagian warganet sebagai bentuk kebebalaan Jamaah Tabligh.

Pemahaman agama yang terkesan membabi buta akan sangat berbahaya bagi kehidupan umat Islam. Hal-hal seperti inilah yang umat Islam di Indonesia rentan dimanfaatkan karena cenderung mudah dimanipulasi dengan 'fatwa dan propaganda'. Penanganan lebih tegas terhadap kejadian serupa ke depannya agar masyarakat lebih patuh terhadap kebijakan pemerintah. Kajian analisis wacana kritis dalam penelitian ini terbukti mampu mengungkapkan tinjauan sebuah permasalahan secara lebih komprehensif untuk mencapai simpulan yang lebih efektif.

## PUSTAKA ACUAN

- Ahmadi F., Y. D. (2014). Analisis Wacana Kritis: Ideologi Hizbut Tahrir Indonesia Dalam Wacana Kenaikan Harga BBM 2013 di Buletin Al-Islam yang berjudul "Menaikkan Harga BBM: Nenaikkan Kemiskinan." *Metalingua: Jurnal Penelitian Bahasa*, 12 (2)(Analisis Wacana Kritis), 253--265.
- Astutik, Y. (2020). Makin Menyebar, Corona Sudah Menular ke 282 Kota di Indonesia. Dari <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200426190446-4-154545/makin-menyebar-corona-sudah-menular-ke-282-kota-di-indonesia>. Diunduh tanggal 29 April 2020.

- Hamzah Sidik Ajak Masyarakat Hilangkan Stigma Negatif JT Terkait COVID-19. (2020). Dari <https://read.id/hamzah-sidik-ajak-masyarakat-hilangkan-stigma-negatif-jt-terkait-covid-19/>. Diunduh 14 Mei 2020.
- Hariyadi, D. (2020). Pandemi Corona, Ribuan Orang Ikut Tabligh Akbar se-Asia di Gowa. Dari <https://nasional.tempo.co/read/1321285/pandemi-corona-ribuan-orang-ikut-tabligh-akbar-se-asia-di-gowa>. Diunduh 29 April 2020.
- Ihsanuddin. (2020). Fakta Lengkap Kasus Pertama Virus Corona di Indonesia. Dari <https://nasional.kompas.com/read/2020/03/03/06314981/fakta-lengkap-kasus-pertama-virus-corona-di-indonesia?page=all>
- Jamaah Tabligh. (2020). Retrieved from [https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah\\_Tabligh](https://id.wikipedia.org/wiki/Jamaah_Tabligh). Diunduh 8 November 2020.
- Kusno, Al., Bety, N., & Rahman, A. (2017). Analisis Wacana Kritis Pembentukan Stereotip Pemerintah oleh HTI. *Jurnal Bahasa Dan Sastra*, 45,. Dari <http://journal2.um.ac.id/index.php/jbs/article/view/1729/991>. Diunduh 9 November 2020.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. (T. R. (Penerjemah) Rohidi, Ed.) (I). Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Moleong, L.J. (1994). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (25th ed.). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nuaini, T. N. (2020). Cerita Lengkap Asal Mula Munculnya Virus Corona di Indonesia. Dari <https://www.merdeka.com/trending/cerita-lengkap-asal-mula-munculnya-virus-corona-di-indonesia.html>. Diunduh 3 April 2020.
- Tim detik.com. (2020). Gatot Jelaskan “Makmurkan Masjid saat Corona”: Saya Tetap Patuh Ulama. Dari <https://news.detik.com/berita/d-4946527/gatot-jelaskan-makmurkan-masjid-saat-corona-saya-tetap-patuh-ulama/3>. Diunduh 9 November 2020.
- Winda. (2020). Penanggungjawab Ijtima Ulama Gowa: Jamin semua Jemaah jalani tes Covid-19. Dari <https://kalsepos.com/2020/04/penanggungjawab-ijtima-ulama-gowa-jamin-semua-jemaah-jalani-tes-covid-19-0/>. Diunduh 5 Mei 2020.
- Yasmin, P. (2020). Asal Usul Virus Corona Berasal, dari Mana Sebenarnya? Dari <https://news.detik.com/berita/d-4966701/asal-usul-virus-corona-berasal-dari-mana-sebenarnya>. Diunduh 29 April 2020.



## KOMUNIKASI KRISIS PEMERINTAH INDONESIA DALAM PENANGANAN COVID-19

### CRISIS COMMUNICATION OF THE INDONESIAN GOVERNMENT IN HANDLING COVID-19

Muhammad Saiful Aziz<sup>1</sup>, Moddie Alvianto Wicaksono<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Gadjah Mada

<sup>2</sup>Departemen Ilmu Komunikasi, Universitas Pembangunan Negeri Veteran Yogyakarta

Email: <sup>1</sup>[muhammad.saiful.aziz@gmail.com](mailto:muhammad.saiful.aziz@gmail.com), <sup>2</sup>[moddie.wicaksono@gmail.com](mailto:moddie.wicaksono@gmail.com)

#### ABSTRACT

*Over the past five months, the world has been hit by the Covid-19 pandemic crisis. This pandemic has infected more than 200 countries including Indonesia. Globally, the impact is not only on the health crisis and economic crisis, but also the political crisis. This study aims to examine the crisis communication undertaken by the Government of Indonesia in dealing with Covid-19. This study uses case study research method and literature study data collection method. The research concludes that the rebuilding posture strategy containing apologia and compensation is the best choice for the Government of Indonesia. Then there are several steps that need to be done. First is quickness in delivering messages or informations to the public, second is consistency in every information or message that delivered to the public, third is the principle of openness, fourth shows sense of crisis from various government elements to the public and stakeholders, fifth is the need to strengthen internal communication from the elements government, the sixth is the need to strengthen the transmission of communication messages to the public.*

**Keywords:** Crisis Communication, Pandemic, Covid-19, Government of Indonesia

#### ABSTRAK

Dalam kurun waktu lima bulan terakhir, dunia sedang dihinggapi oleh krisis pandemi Covid-19. Pandemi ini menjangkit lebih dari 200 negara termasuk Indonesia. Secara global, imbasnya tidak hanya pada krisis kesehatan dan krisis ekonomi, melainkan juga krisis politik. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Artikel ini menggunakan metode penelitian studi kasus dan metode pengumpulan data studi literatur. Adapun artikel ini berkesimpulan strategi *rebuilding posture* yang berisikan langkah *apologia* dan *compensation* menjadi pilihan terbaik bagi Pemerintah Indonesia. Lalu terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan. Pertama adalah kecepatan dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat, kedua konsistensi dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat, ketiga prinsip keterbukaan, keempat menunjukkan *sense of crisis* dari berbagai elemen pemerintah kepada publik dan *stakeholder*, kelima perlunya memperkuat komunikasi internal dari unsur pemerintah, keenam perlunya memperkuat transmisi pesan komunikasi kepada publik.

**Kata kunci:** Komunikasi Krisis, Pandemi, Covid-19, Pemerintah Indonesia

#### PENDAHULUAN

Saat ini dunia tengah dilanda sebuah krisis yang cukup hebat. Krisis ini tidak hanya dialami oleh beberapa negara saja, namun hampir seluruh negara di dunia. Dari sekian banyak yang mengalami, Indonesia menjadi salah satu negara yang terdampak cukup serius terkait dengan krisis ini. Yang dimaksud dengan krisis adalah hadirnya

*Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* yang kini menjadi pandemi dunia. Tercatat per tanggal 26 Juli 2020, di dunia terdapat 16.212.895 kasus, 648.591 kematian, dan 213 negara terdampak. Sementara di Indonesia terdapat 98.778 kasus positif, 56.655 sembuh, dan 4.781 meninggal dunia (Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, 2020).

Hadirnya Covid-19, selain tentunya berdampak pada kesehatan masyarakat dunia, salah satu yang terdampak cukup besar adalah pada sektor ekonomi. *World Economic Forum* (WEF) memandang penyebaran virus corona (Covid-19) mulai menunjukkan dampak ekonomi terhadap dunia. Banyak negara yang memprediksikan ekonominya akan mengalami resesi. Dalam hal ini, pertumbuhan ekonomi sejumlah negara akan negatif. Bahkan, negara-negara berkembang mengalami kesulitan tiga kali lipat dibanding negara maju dalam menyelesaikan Covid-19 ini. *International Monetary Fund* (IMF) memproyeksikan bahwa 170 negara akan mengalami pertumbuhan pendapatan per kapita negatif tahun ini (Praditya, 2020).

Dalam konteks Indonesia, pandemi ini juga memberikan dampak yang cukup besar pada sektor ekonomi. Pandemi mampu membuat indeks bursa saham rontok, rupiah terperosok, dan pelaku di sektor riil mengalami kesulitan berusaha. Lembaga keuangan dunia, ekonom, dan otoritas pemerintah membuat sejumlah prediksi ekonomi bahwa Indonesia bisa masuk dalam skenario terburuk jika pandemi ini tidak ditangani dengan benar. Pada perdagangan 24 Maret 2020, indeks harga saham gabungan ditutup turun 1,3 % di level 3.937. Sepanjang pekan ini, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) telah menyentuh posisi terendahnya sepanjang delapan tahun terakhir. IHSG pernah jatuh di level 3.000 yakni pada 24 Juni 2012 di posisi 3.955,58. Tidak hanya merontokkan pasar modal, Covid-19 juga menjatuhkan nilai tukar rupiah. Tercatat pada 23 Maret 2020, harga jual dolar Amerika Serikat di lima bank besar menembus Rp17 ribu (Aria, 2020).

Selain memberikan dampak secara ekonomi, Covid-19 juga memberikan dampak berupa krisis politik. Di Kosovo, Covid-19 bahkan mampu meruntuhkan Perdana Menteri yakni Albin Kurti. Terdapat 82 dari 120 suara legislatif mendukung penuh mosi tidak percaya terhadap Perdana Menteri tersebut yang tidak ingin menetapkan status darurat terhadap pandemi Covid-19 (Kumparan, 2020). Maka Covid-19 benar-benar menjadi krisis yang cukup besar di berbagai sektor bagi berbagai dunia, tidak hanya Indonesia.

Namun sayangnya penanganan krisis di Indonesia tidak dapat dikatakan baik-baik saja. Terdapat banyak sekali blunder yang dilakukan oleh pemerintah dalam proses penanganannya. Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) bahkan merinci terdapat 37 pernyataan blunder yang dilontarkan oleh pemerintah selama pandemi (Mawardi, 2020). Beberapa di antaranya yakni tanggapan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto tentang corona tak masuk Indonesia karena perizinan yang berbelit-belit. Tambahkan lagi, candaan Wakil Presiden Ma'ruf Amin tentang susu kuda liar dapat menangkal virus corona. Pernyataan-pernyataan blunder tersebut tentu menjadi salah satu bagian dari serangkaian upaya komunikasi krisis yang harus dikaji secara keseluruhan baik dari fase *pre-crisis*, *crisis*, dan *post crisis*.

Adapun krisis sendiri menurut Fearn-Banks (2011) adalah kejadian besar dengan hasil negatif yang berpotensi memengaruhi organisasi, perusahaan, atau industri, serta publik, produk, layanan, atau nama baiknya. Krisis dapat mengancam keberadaan organisasi (Fearn-Banks, 2011). Selanjutnya, Coombs (2015) menyebutkan bahwa krisis adalah persepsi tentang peristiwa tidak terduga yang mengancam harapan penting para pemangku kepentingan terkait dengan masalah kesehatan, keselamatan, lingkungan, dan ekonomi, dan dapat secara serius memengaruhi kinerja organisasi serta menghasilkan hasil negatif. Definisi ini adalah sintesis berbagai perspektif tentang krisis. Dia mencoba untuk menangkap sifat-sifat umum yang digunakan penulis lain ketika menggambarkan krisis. Sedangkan komunikasi krisis adalah dialog antara organisasi dan publiknya sebelum, selama, dan setelah kejadian negatif. Dialog merinci strategi dan taktik yang dirancang untuk meminimalkan kerusakan pada citra organisasi (Fearn-Banks, 2011). Komunikasi krisis dapat didefinisikan secara luas sebagai pengumpulan, pemrosesan, dan penyebaran informasi yang diperlukan untuk mengatasi situasi krisis (Coombs, 2010).

Rangkaian panjang komunikasi krisis dilakukan dengan mencakup cara-cara organisasi mengelola krisis untuk membangun kembali kontrol atas faktor-faktor yang terlibat, untuk menyelesaikan masalah yang muncul, dan untuk mengembalikan reputasinya di mata para pemangku kepentingan dan publik. Peneliti komunikasi krisis mengeksplorasi cara organisasi merespons, menjelaskan, dan membenarkan peristiwa krisis, tindakan yang mereka ambil untuk menyelidiki penyebab krisis, cara mereka mengkomunikasikan tindakan ini kepada publik, dan cara mereka menggunakan media yang berbeda untuk memperbaiki kerusakan citra mereka (Marsen, 2019). Dari berbagai definisi yang ada, kita dapat menyimpulkan bahwa komunikasi krisis merupakan serangkaian strategi komunikasi yang digunakan oleh organisasi baik dalam fase *pre-crisis*, *crisis*, dan *post crisis* dengan tujuan untuk mengelola krisis yang mengancam reputasi dan kelangsungan hidup organisasi.

Dalam setiap krisis, tentunya dapat diklasifikasikan menjadi beberapa fase. Klasifikasi fase ini berguna untuk menentukan strategi serta pendekatan agar strategi krisis yang diterapkan dapat tepat sasaran. Coombs (2010) membagi krisis dalam tiga fase, yakni *pre-crisis*, *crisis*, dan *post crisis*. Pada fase *pre-crisis*, komunikasi krisis berkonsentrasi pada penempatan dan pengurangan risiko. Model antisipatif manajemen krisis dilakukan dalam fase ini (Olaniran & Williams dalam Coombs, 2010). Selain itu, pencegahan adalah prioritas utama untuk model antisipatif. Model ini menggunakan kewaspadaan selama fase *pre-crisis* untuk membantu pengambilan keputusan dan pencegahan krisis.

Selanjutnya adalah fase krisis, yakni aspek komunikasi krisis yang paling banyak diteliti. Alasannya adalah bagaimana dan apa yang dikomunikasikan oleh suatu organisasi selama suatu krisis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap hasil dari krisis, termasuk jumlah kerusakan reputasi yang ditanggung oleh organisasi. Lalu, *post crisis* yang mencakup periode waktu setelah krisis dianggap dapat diselesaikan. Fokus pada pengelolaan krisis telah berakhir, tetapi pengelolaan dampak krisis terus berlanjut. Mengingat bahwa mungkin sulit untuk menemukan dengan tepat ketika krisis berakhir, komunikasi *post-*

*crisis* sebagian besar merupakan perluasan dari komunikasi respons krisis yang disertai dengan pembelajaran dari krisis.

Adapun perkembangan penelitian terkait komunikasi krisis Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19 sangat sedikit sekali dapat ditemukan. Sejauh ini, peneliti menemukan satu penelitian yang berjudul "*The COVID-19 Impact Crisis Communication Model Using Gending Jawa Local Wisdom*". Dalam penelitian yang dilakukan oleh Lestari dan Sularso (2020) tersebut, terdapat temuan tentang model komunikasi krisis terhadap dampak Covid-19 dengan kearifan lokal Gending Jawa. Model komunikasi dalam pencegahan Covid-19 tersebut memberikan pesan positif bagi masyarakat Desa Ngandong Gantiwarno Jawa Tengah untuk tetap tinggal di rumah, menjaga kesehatan, dan meningkatkan kekebalan tubuh dalam menghindari Covid-19. Adapun temuan dalam penelitian sebelumnya tersebut, menjadi salah satu contoh dari komunikasi krisis yang dilakukan secara strategis dalam merespons krisis Covid-19 pada lingkup mikro. Namun berdasarkan penelitian sebelumnya yang ada, belum banyak dapat kita temukan penelitian yang mengungkap secara makro penanganan komunikasi krisis Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Maka berdasarkan hal tersebut, artikel ini dibuat untuk mengungkap realitas tersebut.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia dalam menangani Covid-19. Beberapa pertanyaan yang diajukan yakni: (1) Bagaimana komunikasi krisis yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia untuk menangani Covid-19, (2) Siapa saja *stakeholder* yang terdampak dalam pandemi Covid-19 di Indonesia? Untuk menjawab pertanyaan di atas, maka penulis membahasnya menjadi beberapa bagian, yakni tahapan krisis terkait Covid-19, mengidentifikasi *stakeholder*, dan problem komunikasi krisis Pemerintah Indonesia.

## PEMBAHASAN

### Tahapan Krisis terkait Covid-19

Sebagaimana disebutkan Coombs (2015) sebelumnya, sebuah krisis dapat kita klasifikasikan

menjadi beberapa fase. Fase pertama, yaitu fase *pre-crisis*. Bundy, Pfarrer, Short, dan Coombs (2016) menyebutkan dalam fase ini pengorganisasian untuk keandalan yang tinggi sering diperlakukan sebagai tugas kognitif dan perilaku. Hal tersebut penting karena organisasi dengan keandalan tinggi lebih mampu mencegah krisis. Adapun faktor-faktor lain dapat memengaruhi kemungkinan terjadinya krisis, termasuk budaya dan struktur organisasi. Faktor-faktor budaya dan struktural yang meningkatkan kemungkinan krisis juga membuatnya lebih sulit untuk diorganisasikan demi keandalan.

Dalam fase *pre-crisis*, seharusnya dilakukan dengan penempatan dan pengurangan risiko serta keandalan bagi organisasi dalam mempersiapkan krisis. Namun dalam fase ini, pemerintah justru tidak mampu memaksimalkan fase ini untuk mengurangi potensi risiko. Dalam hal pandemi Covid-19, fase ini seharusnya dapat dilakukan dengan meminimalisasi penularan virus ke Indonesia. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan meminimalisasi bahkan menutup akses masuk warga negara asing ke Indonesia, melakukan tes besar-besaran kepada warga negara, menyiapkan akses dan perlengkapan kesehatan, membatasi pergerakan masyarakat di luar rumah dengan menyiapkan beberapa kebijakan, dan menyiapkan strategi ekonomi. Namun fase *pre-crisis* ini tidak dilakukan dengan baik oleh Pemerintah Indonesia.

Dalam faktanya, pemerintah justru menyiapkan dana untuk memboyong turis masuk ke Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto bahkan menyatakan pada 25 Februari 2020 menyiapkan anggaran promosi sebesar Rp103 miliar, turisme Rp25 miliar, untuk *influencer* sebanyak Rp72 miliar, insentif bagi turis asing yang ingin berwisata ke Indonesia sebesar Rp298,5 miliar yang dialokasikan untuk maskapai penerbangan, dan Rp98,5 miliar diskon untuk agen perjalanan. Berbagai langkah lainnya juga disiapkan untuk menjaga sektor pariwisata tetap bergerak yaitu diskon harga bahan bakar pesawat senilai Rp265,5 miliar, dana alokasi khusus untuk 10 destinasi sebesar Rp147,7 miliar, serta menghapuskan pajak hotel dan restoran di 10 destinasi. Padahal di saat yang sama, sejak 27 Februari 2020

Australia telah mengaktifkan status “*Emergency Responce*” terhadap penyebaran virus corona. Selain memperpanjang larangan perjalanan ke Australia bagi siapa saja yang pernah ke China dalam 14 hari terakhir, Australia telah memasuki tahap *emergency* (Tempo, 2020).

Selanjutnya adalah fase *crisis*. Mikušová dan Horváthová (2019) menjelaskan terdapat beberapa prinsip umum dalam manajemen krisis yang meliputi identifikasi penyebab sebenarnya dari krisis; penunjukan tim krisis; sentralisasi kekuasaan jangka pendek dalam tim manajemen krisis; implementasi langkah-langkah pemulihan (pengurangan aset yang beredar dan tetap dengan tujuan mengembalikan profitabilitas); dan mendefinisikan serta menegakkan strategi pemulihan.

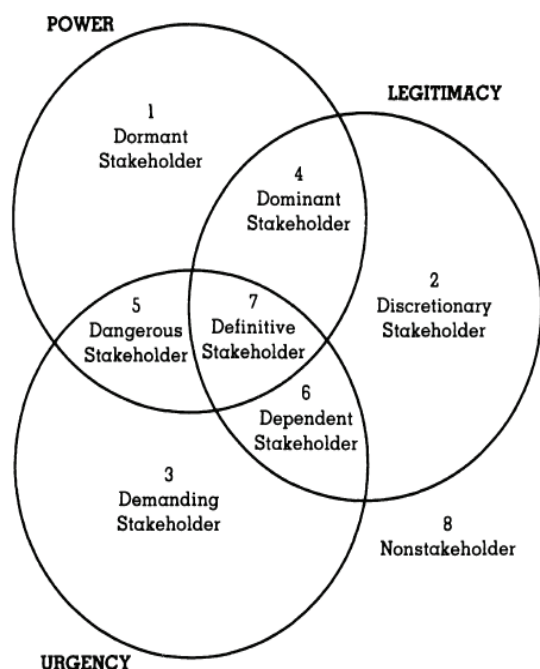
Dalam hal ini, sikap dan tindakan pemerintah Indonesia sudah cenderung lebih baik dibandingkan dengan siklus *pre-crisis*. Pemerintah telah lebih sigap membentuk berbagai kebijakan. Namun dalam praktiknya, masih terdapat beberapa hal dari tiga aspek tersebut yang belum cukup maksimal. Dalam menginstruksikan dan menyesuaikan informasi, pemerintah belum cukup baik dalam mengkonstruksi pesan yang seragam. Berbagai *stakeholder* yang ada di pemerintahan sering kali masih bertentangan dalam mengkonstruksi pesan. Dalam hal perbaikan reputasi pun cenderung belum maksimal. Pemerintah justru masih sering memunculkan blunder-blunder yang berakar dari kurang munculnya *sense of crisis* seperti *statement* Menteri Kesehatan Terawan yang menyatakan “*Dari 1,4 miliar penduduk sana, yang paling 2.000-an, 2.000 dari 1,4 miliar itu kan kayak apa karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah, enjoy aja, makan yang cukup.*” serta *statement* Terawan tentang Indonesia berutang pada Tuhan karena virus corona tidak masuk Indonesia (Mawardi, 2020). Berbagai hal tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Indonesia telah melakukan fase ini, namun masih banyak kekurangan.

Fase yang ketiga yakni *post crisis*. Sebagai upaya perbaikan yang paling sesuai yang mengarah pada efek pasca-krisis yang paling positif, strategi pembangunan kembali dianggap sangat efektif dalam memulihkan reputasi yang rusak setelah krisis (Hegner, Beldad, & Kraesgenberg,

2016). Dalam hal krisis Covid-19 di Indonesia, fase krisis baru sampai di fase krisis itu sendiri sehingga belum sampai pada *post crisis*.

### Mengidentifikasi *Stakeholder*

*Stakeholder* adalah kelompok atau individu apa pun yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi yang memunculkan kebutuhan akan proses dan teknik untuk meningkatkan kemampuan manajemen strategis organisasi (Freeman, 1984). Adapun dalam menganalisis *stakeholder*, unsur legitimasi adalah atribut yang paling diakui dan penting yang harus dimiliki oleh *stakeholder* agar diberikan status kekuasaan *stakeholder* yang melekat dalam legitimasi. Apabila *stakeholder* tidak memiliki kekuasaan, mereka masih akan dianggap sebagai *stakeholder* selama mereka memiliki legitimasi. Selanjutnya dalam *stakeholder*, kekuasaan tidak diperlukan dalam mengidentifikasi atau mengklasifikasikan seseorang sebagai pemangku kepentingan. Kekuasaan dapat diperoleh, tetapi selama ada legitimasi - itu tidak dapat sepenuhnya hilang (Benn, Abratt, & O’Leary, 2016).



Sumber: Mitchell, Aggle, & Wood (1997)

**Gambar 1.** *Stakeholder Salience Model*

Selanjutnya Mitchell, Agle, dan Wood (1997) menjelaskan tentang *Stakeholder Salience Model* dalam beberapa klasifikasi sebagaimana diilustrasikan dalam gambar 1 sebagai berikut:

1. *Latent stakeholder*: Pentingnya *stakeholder* akan rendah di mana hanya satu dari atribut *stakeholder* (kekuatan, legitimasi, dan urgensi) yang dirasakan oleh para manajer untuk hadir.
  - a. *Dormant stakeholder*: Atribut yang relevan dari *stakeholder* aktif adalah kekuatan. *Stakeholder* yang tidak aktif memiliki kekuatan untuk memaksakan kehendak mereka pada perusahaan, tetapi dengan tidak memiliki hubungan yang sah atau klaim yang mendesak, kekuatan mereka tetap tidak digunakan.
  - b. *Discretionary stakeholder*: Memiliki atribut legitimasi, tetapi mereka tidak memiliki kekuatan untuk mempengaruhi perusahaan dan tidak ada tuntutan mendesak.
  - c. *Demanding stakeholder*: Mereka yang memiliki tuntutan mendesak, tetapi tidak memiliki kekuatan atau legitimasi
2. *Expectant stakeholder*: Dalam menganalisis situasi di mana ada dua dari tiga atribut (kekuatan, legitimasi, dan urgensi).
  - a. *Dominant stakeholder*: Dalam situasi di mana para *stakeholder* kuat dan sah, pengaruh mereka di perusahaan terjamin karena dengan memiliki kekuatan dengan legitimasi, mereka dapat membentuk koalisi dominan di perusahaan.
  - b. *Dependent stakeholder*: Tidak memiliki kekuatan tetapi yang memiliki klaim sah yang mendesak sebagai “ketergantungan,” karena para *stakeholder* ini bergantung pada orang lain (*stakeholder* lain atau manajer perusahaan) untuk kekuatan yang diperlukan untuk melaksanakan keinginan mereka.
  - c. *Dangerous stakeholder*: Urgensi dan kekuatan mencirikan *stakeholder* yang tidak memiliki legitimasi, bahwa *stakeholder* akan menjadi pemaksa dan mungkin keras, membuat *stakeholder* berbahaya secara harfiah, bagi perusahaan.

3. *Definitive Stakeholder*: Pentingnya *stakeholder* akan tinggi di mana ketiga atribut *stakeholder* (kekuatan, legitimasi, dan urgensi) dirasakan oleh para manajer.

Dalam hal krisis pandemi Covid-19 di Indonesia, terdapat beberapa *stakeholder* yang terdampak baik diuntungkan maupun dirugikan. Beberapa *stakeholder* yang diuntungkan di antaranya adalah pelaku ekonomi yang bergerak di bidang medis dan kesehatan. Dengan merebaknya Covid-19 maka kebutuhan terkait alat kesehatan tentunya bertambah. Sebagai contoh, imbas dari munculnya Covid-19 maka kebutuhan Alat Pelindung Diri (APD) juga meningkat. Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta sebagai daerah paling rawan terhadap persebaran Covid-19 membutuhkan lebih dari 1.000 unit per hari. Angka tersebut baru kebutuhan di DKI Jakarta (Umah, 2020). Belum lagi kebutuhan masker yang dibutuhkan seluruh masyarakat maupun tenaga medis. Sejak Covid-19 menjadi pandemi di Indonesia, kebutuhan terhadap masker kain pun juga turut meningkat. Dalam hal ini, para pelaku ekonomi di bidang medis tersebut dapat diidentifikasi sebagai *expectant stakeholder* dengan kategori *dangerous stakeholder* karena memiliki kekuatan dan urgensi secara bersamaan.

Selanjutnya *stakeholder* yang diuntungkan dari adanya krisis ini adalah pelaku usaha di sektor penyedia layanan teknologi. Sejak adanya pandemi Covid-19 maka aktivitas masyarakat lebih banyak terjadi di rumah. Praktis berbagai aktivitas yang biasanya dilakukan di berbagai tempat, bergeser untuk dilakukan di rumah. Sebagai contoh adalah Zoom sebagai penyedia layanan pertemuan secara *online*. Menurut Financial Times dalam 3 bulan terakhir kekayaan pemilik Zoom bertambah USD4 miliar atau sekitar Rp66 Triliun (Supriyadi, 2020). Belum lagi apabila kita melihat penyedia jasa *streaming* seperti Netflix yang diuntungkan sebagaimana dilansir dari Comicbook bahwa pasar saham Netflix dikabarkan mengalami kenaikan 0,8 persen (Widiastuti, 2020). Dalam hal ini, para pengusaha di bidang teknologi tersebut dapat diidentifikasi sebagai *expectant stakeholder* dengan kategori *dangerous stakeholder* karena memiliki kekuatan dan urgensi secara bersamaan.

Adapun terkait dengan *stakeholder* yang dirugikan, banyak sekali *stakeholder* yang dirugikan sebagai dampak dari adanya krisis ini. Yang tentu saja dirugikan adalah berbagai jenis pelaku ekonomi. Berbagai jenis pelaku ekonomi di berbagai bidang seperti jasa sangat merasakan dampak dari pandemi ini. Kerugian tersebut sangat beralasan karena kini masyarakat mendapatkan imbauan untuk hanya di rumah sehingga pergerakan masyarakat terhadap sektor ekonomi juga turut serta menurun, utamanya jasa. Dampak dari pandemi ini juga cukup buruk mengingat banyaknya karyawan yang dirumahkan. Kementerian Ketenagakerjaan mencatat ada 1,4 juta lebih pekerja di seluruh Indonesia yang terkena dampak langsung wabah Covid-19 atau corona. Para pekerja umumnya dirumahkan oleh perusahaan, sebagian lagi harus mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK) (Rina, 2020). Dalam hal ini, para pekerja yang di PHK tersebut dapat diidentifikasi sebagai *latent stakeholder* dengan kategori *demanding stakeholder* karena hanya memiliki urgensi.

*Stakeholder* selanjutnya yang cukup dirugikan adalah petugas medis. Hingga 12 April 2020, tercatat telah terdapat 44 petugas medis yang meninggal dengan rincian 61 dokter dan 39 perawat (Pusparisa, 2020). Banyaknya petugas medis yang meninggal tersebut karena minimnya kecukupan APD untuk para petugas medis yang menangani pasien Covid-19 (Setyowati, 2020). Beban yang dirasakan petugas medis juga bertambah karena terjadinya lonjakan pasien Covid-19. Persoalan juga bertambah dengan beban yang dirasakan petugas medis dengan berbagai stigma negatif di lingkungan masyarakat serta jenazah tenaga medis yang meninggal dunia. Maka tenaga medis menjadi *stakeholder* yang dirugikan. Dalam hal ini, para petugas medis tersebut dapat diidentifikasi sebagai *definitive stakeholder* karena memiliki urgensi, kekuatan, dan legitimasi secara bersamaan.

### **Problem Komunikasi Krisis Pemerintah Indonesia**

Dalam menghadapi krisis pandemi Covid-19 ini, pemerintah telah melaksanakan beberapa strategi penanganan krisis. Namun, dalam praktiknya

sebagaimana disebutkan dalam fase krisis, masih terdapat berbagai kekurangan. Beberapa kekurangan tersebut adalah sebagai berikut:

#### 1. Terbentuknya ketidakpercayaan publik

*Distrust* muncul karena kerap kali terjadi *blunder* yang dilakukan oleh para pejabat negara terkait yang justru kontraproduktif terhadap kewajiban pemerintah untuk menangani wabah ini. Beberapa *statement* yang cukup kontraproduktif dan menjadi *distrust* masyarakat terhadap pemerintah adalah *statement* Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto yang justru terkesan menyepelkan virus Covid-19 ini sedari awal bahkan ketika virus ini belum mewabah di Indonesia. Beberapa *statement* yang cukup kontroversial adalah dari Menteri Kesehatan, “*Dari 1,4 miliar penduduk sana, yang paling 2.000-an, 2.000 dari 1,4 miliar itu kan kayak apa karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah, enjoy aja, makan yang cukup.*” Lalu, komentar Menteri Kesehatan tentang penelitian Harvard bahwa Covid-19 telah masuk ke Indonesia, “*Itu namanya menghina wong peralatan kita kemarin di fixed-kan dengan duta besar Amerika Serikat kita menggunakan kit dari Amerika.*”, dan berbagai pernyataan *blunder* lainnya (Mawardi, 2020). Pernyataan-pernyataan *blunder* tersebut pada akhirnya menciptakan *distrust* masyarakat yang cukup besar kepada Menteri Kesehatan sehingga hadirnya Menteri Kesehatan di ruang publik, justru malah berpotensi menambah adanya krisis tersebut. Selain itu juga Menteri Kesehatan kerap kali tidak menunjukkan *sense of crisis* sehingga sering memberikan *statement* yang tidak dapat menenangkan masyarakat.

Selanjutnya adalah *distrust* publik terhadap juru bicara. Setelah sering terjadinya *blunder* yang dilakukan oleh Menteri Kesehatan melalui berbagai *statement* yang disampaikan secara langsung, sebenarnya pemerintah telah berusaha mengatasi dengan menunjuk juru bicara yakni Achmad Yurianto yang menjabat Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit di Kementerian Kesehatan. Hadirnya Achmad Yurianto awalnya telah menciptakan *image* yang cukup positif terhadap pemerintah utamanya tentang komunikasi publik.

Namun, *distrust* tersebut terbentuk ketika Achmad Yurianto memunculkan *statement* yang menyangkut tentang status sosial masyarakat yakni “*Yang kaya melindungi yang miskin agar bisa hidup dengan wajar dan yang miskin melindungi yang kaya agar tidak menularkan penyakitnya, ini menjadi kerja sama yang penting.*” (Nurita & Sugiharto, 2020) *Statement* tersebut dengan seketika meruntuhkan kepercayaan yang muncul dari masyarakat terhadap juru bicara. *Statement* yang dibuat oleh juru bicara tersebut justru dipandang masyarakat sebagai justifikasi pemerintah terhadap masyarakat miskin sebagai pembawa penyakit. Adapun justifikasi dengan sentimen status sosial tersebut tidak selayaknya dilakukan.

Maka, yang terjadi adalah tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintah berkurang. Jika sudah berkurang, yang berbahaya adalah publik tidak lagi percaya dengan apa pun yang diucapkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, semestinya pemerintah membenahi tindakannya, dalam hal ini komunikasi krisis, sehingga berangsur-angsur kepercayaan publik terhadap pemerintah membaik. Jika bisa membaik, publik pun akan sadar bahwa pemerintah serius menangani persoalan pandemi. (Peng, Gong, & Peng, 2016).

Penanganan pandemi sebetulnya bisa lebih sigap andaikan pemerintah memantau lebih awal dan memastikan bahwa segalanya dapat diatasi. Namun, yang terjadi adalah pemerintah sepertinya mengabaikan faktor eksternal, dalam hal ini kasus virus corona yang sudah merebak di negara-negara lain (Amerika Serikat, Jerman, dan Italia), sehingga kepercayaan terhadap pemerintah luntur. Belum lagi ditambah faktor internal dari pemerintah yang sepertinya gagap dalam berkomunikasi. (Peng, Gong, & Peng, 2016).

Adapun penyebab peristiwa negatif, pemerintah dapat mengadopsi strategi penolakan, yaitu menyangkal relevansinya dengan pemerintah. Masyarakat umum mungkin berpikir bahwa penolakan pemerintah tidak bertanggung jawab. Strategi ini tidak akan memiliki efek yang jelas pada perbaikan kepercayaan pemerintah. Mungkin juga memiliki efek buruk. Strategi lain adalah meminta maaf, yaitu mengakui kesalahan, menyatakan penyesalan, dan mengambil tindakan

yang relevan. Masyarakat umum berpendapat bahwa ini adalah sikap positif dan bertanggung jawab. Strategi ini memiliki efek yang jelas pada perbaikan kepercayaan pemerintah. Ini menunjukkan bahwa penolakan dan permintaan maaf memiliki efek berbeda pada perbaikan kepercayaan pemerintah. Permintaan maaf memiliki efek yang lebih baik daripada penolakan (Peng, Gong, & Peng, 2016)

Selanjutnya jika masyarakat umum memiliki kepercayaan awal yang tinggi pada pemerintah, yaitu mereka memiliki antisipasi yang baik untuk pemerintah, dan berpikir bahwa itu dapat mewakili kepentingan publik, mereka cenderung mempercayai dan mendukung pemerintah. Ketika peristiwa negatif terjadi, jika pemerintah mengambil tindakan remediasi, publik dengan kepercayaan awal yang tinggi masih dapat terus percaya pada pemerintah, dan menerima tindakan remediasi. Oleh karena itu, tindakan seperti itu akan memiliki efek yang baik pada perbaikan kepercayaan. Tingkat kepercayaan awal yang tinggi menunjukkan efek perbaikan yang lebih baik (Peng, Gong, & Peng, 2016).

Oleh karena itu, selanjutnya ini menjadi pelajaran bahwa semestinya pemerintah perlu melihat faktor eksternal sehingga bisa mengambil sikap sekaligus strategi yang mumpuni dalam mengambil tindakan. Kemudian ketika pemerintah melakukan kekeliruan dalam pengambilan sikap terkait komunikasi krisis, maka pemerintah perlu secara jujur mengabarkan kepada publik bahwa ada yang keliru sehingga harus diperbaiki. Dengan demikian, masyarakat pun dapat mengembalikan kepercayaan yang selama ini luntur kepada pemerintah.

## 2. Inkonsistensi Pesan Komunikasi Publik

Problem komunikasi selanjutnya adalah kegagalan pemerintah dalam mengkonstruksi pesan komunikasi publik yang tentu saja berimbas cukup fatal. Beberapa kasus di antaranya adalah Fadjoel Rachman sebagai Juru Bicara Presiden menyatakan bahwa mudik boleh, tetapi berstatus orang dalam pemantauan. Presiden Joko Widodo menegaskan tidak ada larangan resmi bagi pemudik Lebaran Idul Fitri 2020 M/1441 H. Namun, pemudik wajib isolasi mandiri selama 14 hari dan berstatus orang dalam pemantauan

(ODP) sesuai protokol kesehatan (WHO) yang diawasi oleh pemerintah daerah masing-masing” (Detik.com, 2020). Beberapa waktu kemudian, pernyataan Juru Bicara Presiden tersebut diralat oleh Menteri Sekretaris Negara, Pratikno. Menteri Sekretaris Negara meralat pernyataan Juru Bicara Presiden yang menyebut pemerintah membolehkan masyarakat mudik dengan syarat. Menurut Pratikno, pernyataan Fadjoel kurang tepat. Pratikno menyatakan “*Yang benar adalah pemerintah mengajak dan berupaya keras agar masyarakat tidak perlu mudik,*” (Bayu & Agustiyanti, 2020).

Kontradiksi tersebut juga berlanjut dengan berbedanya pesan komunikasi publik yang disampaikan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dengan Juru Bicara Penanganan Covid-19, yakni Achmad Yurianto. Kontradiksi tersebut muncul karena pernyataan yang dibuat oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19 yang menyatakan bahwa kasus pasien meninggal di Cianjur, Jawa Barat bukan merupakan positif Covid-19. Namun, beberapa waktu kemudian, Gubernur Jawa Barat memberikan konferensi pers dengan menyatakan bahwa pasien meninggal di Cianjur Jawa Barat merupakan pasien positif Covid-19 (Tuasikal, 2020).

Kasus selanjutnya adalah kontradiksi yang terjadi di Kantor Staf Presiden (KSP). Kontradiksi tersebut dimulai dengan pernyataan Tenaga Ahli Utama KSP, Ali Mochtar Ngabalin yang menyatakan *statement* bahwa terdapat salah satu staf KSP yang positif Covid-19. Namun beberapa waktu kemudian, pernyataan tersebut dibantah oleh Plt Deputy IV (KSP) Bidang Komunikasi Politik dan Informasi, Juri Ardiantoro yang menyatakan bahwa seluruh staf KSP dalam kondisi sehat. Juri Ardiantoro menambahkan bahwa berdasarkan *rapid test* yang dilakukan, memang ada sejumlah pegawai yang dinyatakan positif terinfeksi corona. Namun, untuk mengonfirmasi ulang hasil *rapid test* itu, dilakukan tes lanjutan berupa tes PCR di salah satu laboratorium dan hasilnya menunjukkan semuanya negatif Covid-19 (Ihsanuddin & Meiliana, 2020).

Dalam menghadapi krisis Covid-19, pemerintah juga memunculkan pesan yang tidak konsisten. Pada 2 Maret 2020 pemerintah mengumumkan dua kasus pertama pasien positif



Covid-19, Menteri Kesehatan memberikan *statement* “yang pakai masker adalah yang sakit agar tidak menularkan, dan yang sehat melindungi diri dengan menjaga imunitas,” (Masluha, 2020). Namun pada 5 April 2020 pemerintah melalui konferensi pers yang dilakukan oleh Juru Bicara Penanganan Covid-19 menyatakan, “*Semua harus menggunakan masker. Masker bedah dan masker N95 hanya untuk petugas kesehatan. Gunakan masker kain, Ini menjadi penting karena kita tidak pernah tahu orang tanpa gejala didapatkan di luar,*” (Budiansyah, 2020). Dua *statement* yang diberikan ini jelas bertentangan. Hal tersebut menandakan bahwa pemerintah memberikan pesan yang berubah-ubah dan cenderung tidak konsisten.

Lalu inkonsistensi tersebut juga muncul pada *statement* Presiden yang memberikan kebijakan tukang ojek, sopir, taksi, serta nelayan yang sedang memiliki kredit motor atau mobil akan diberikan kebijakan pembayaran bunga atau angsuran diberikan kelonggaran selama 1 tahun (Mawardi, 2020). Pernyataan ini cukup bermasalah karena beberapa waktu kemudian, bank menolak untuk memberikan keringanan kredit. Beberapa waktu kemudian, justru muncul *statement* baru dari pemerintah bahwa keringanan tersebut hanya diperuntukkan bagi pasien yang positif. Kasus ini cukup bermasalah karena pesan yang diberikan oleh pemerintah tidak cukup konsisten dan berubah-ubah.

Inkonsistensi berlanjut dengan pemerintah yang tadinya menutup data tentang Covid-19, kini tiba-tiba menyatakan bahwa merasa perlu untuk membuka data. Presiden sebelumnya menyatakan transparansi data terkait virus corona mengandung akibat buruk karena bisa menimbulkan kepanikan warga. Namun kemudian pandangan Presiden terhadap transparansi data virus corona berubah. Melalui rapat terbatas pada 13 April 2020 bersama Gugus Tugas Penanganan Covid-19, Presiden meminta data informasi terkait virus Covid-19 terintegrasi dengan baik dan disampaikan ke publik secara transparan (Detik, 2020). Terkait keterbukaan data tersebut, maka jelas bahwa pemerintah melakukan inkonsistensi.

Beberapa kasus tersebut mengindikasikan bahwa terdapat problem ketidakmampuan peme-

rintah dalam melakukan sinergi dan koordinasi internal untuk melakukan komunikasi publik. Seharusnya, pesan komunikasi publik yang diberikan kepada masyarakat seragam agar tidak memunculkan kebingungan dan anggapan bahwa terdapat koordinasi yang buruk antarlevel pemerintahan.

Koordinasi yang buruk sering kali karena gagal memahami pesan. Dampaknya, terjadi inkonsistensi pesan dari satu pihak ke pihak yang lain. Akhirnya, keputusan yang dihasilkan tidak berbuah dengan baik di lapangan. Padahal, konsistensi diperlukan dalam mengetahui dan memahami pesan; seperti yang diungkapkan politisi Inggris, Peter Mandelson sebagai “*on message*” (Oliver, 2010).

### 3. Tidak Munculnya *Sense of Crisis*

Saat terjadi krisis, sudah seharusnya hal yang dilakukan adalah meredam krisis itu sendiri agar pemerintah dapat keluar dari fase krisis tersebut. Namun yang terjadi justru pemerintah kehilangan *sense of crisis*. Di tengah krisis yang terjadi, berbagai *stakeholder* memunculkan *statement* yang justru menunjukkan kesan bahwa pemerintah tengah tak serius dalam menangani krisis. Beberapa hal yang terjadi di antaranya adalah Wakil Presiden, Ma'ruf Amin yang memberikan *statement*, “*tiap subuh banyak kyai dan ulama yang selalu membaca doa qunut, saya juga begitu, baca qunut, Ya Allah jauhkan lah bala banawa dan wabah wabah penyakit maka coronanya menyingkir dari Indonesia mudah-mudahan terus dijaga*”. Selain itu Wakil Presiden juga sempat memunculkan *statement* bahwa susu kuda liar bisa menangkal virus corona. Selanjutnya di saat Covid-19 mulai mengancam penularannya terhadap masyarakat Indonesia, Menteri Kesehatan justru mengatakan “*dari 1,4 miliar penduduk sana, yang paling 2.000-an, 2.000 dari 1,4 miliar itu kan kayak apa karena itu pencegahannya jangan panik, jangan resah, enjoy aja, makan yang cukup*” (Mawardi, 2020).

Berbagai pernyataan tersebut tentunya menunjukkan bahwa pemerintah tidak memiliki dan menunjukkan *sense of crisis* terhadap masyarakat. Ketidakmampuan pemerintah untuk menunjukkan *sense of crisis* tersebut membuat

pemerintah terkesan tidak serius untuk menghadapi krisis Covid-19 dan tentunya membuat *distrust* yang tinggi dari masyarakat.

Pada akhirnya, masyarakat hanya dapat memperkirakan apakah pemerintah benar-benar peduli terhadap penanganan pandemi di seluruh wilayah Indonesia? Jika melihat kenyataan di lapangan, pemerintah terlalu mengeluarkan retorika yang tidak terlalu penting. Hal ini disebabkan karena mereka merasa orang yang berkuasa, sehingga mereka mengira apa yang diucapkannya akan memberikan pengaruh positif kepada publik. Padahal, mulai dari kepercayaan, nilai, hingga asumsi, pemerintah sudah abai dalam penanganan melalui komunikasi krisis. Dengan kata lain, mereka perlu memiliki *sense of crisis* untuk menghadapinya (Pergel & Psychogios, 2013).

#### 4. Lemahnya Komunikasi Internal

Dalam krisis ini, juga terdapat beberapa kasus yang mengindikasikan lemahnya kemampuan pemerintah dalam melakukan koordinasi internal. Ini dapat dilihat dari munculnya penolakan yang muncul terkait dengan jenazah tenaga medis yang meninggal akibat terjangkit Covid-19. Kasus yang muncul salah satunya yang terjadi di Ungaran Barat, Kabupaten Semarang dengan penolakan beberapa warga yang melibatkan Ketua Rukun Tetangga (RT) terhadap jenazah tenaga medis yang hendak dikuburkan di daerahnya. Kejadian tersebut membuat jenazah tenaga medis tersebut batal dimakamkan di tempat pemakaman yang telah direncanakan. Salah satu alasan penolakan disebabkan karena warga takut tertular virus yang ada pada jenazah (Detik, 2020). Kejadian ini menjadi kecaman masyarakat. Kejadian serupa juga muncul di Banyumas ketika warga menolak jenazah pasien positif Covid-19 hingga akhirnya makam kembali dibongkar (Rachmawati, 2020).

Namun, kejadian ini menunjukkan bahwa pemerintah utamanya Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang gagal untuk membangun komunikasi internal pemerintah hingga lapisan paling bawah yakni ketua RT. Padahal sejatinya ketua RT juga merupakan bagian dari pemerintah itu sendiri hingga pada akhirnya bagian dari pemerintah justru menjadi bagian dari penolakan yang ada. Selain itu kejadian ini mengindikasi-

kan bahwa tidak berjalannya fungsi sosialisasi pemerintah yang menjelaskan bahwa tidak memungkinkannya penularan melalui jenazah. Ini penting dilakukan supaya tidak menimbulkan adanya penolakan di masyarakat.

Berdasarkan kejadian di atas, mengutip pendapat Cutlip, Center, dan Broom (2016) bahwa komunikasi internal menjadi fungsi utama dari humas pemerintah. Meskipun komunikasi ini lazim dalam organisasi, ia mengandung arti penting tersendiri dalam pemerintahan karena dua alasan. Pertama, karena penyebaran pernyataan, pengumuman kebijakan atau tindakan organisasi kepada publik dilakukan dengan segera, maka pejabat di dalam organisasi harus tahu dan memahami isu yang ada. Kedua, rumor atau berita separuh benar dapat merugikan atau kontraproduktif bagi organisasi apa pun, namun rumor jelas merupakan bencana bagi pemerintah. Selain itu, berbagai struktur pemerintahan harus dapat bekerja sama satu sama lain karena penting untuk memberikan informasi terbaru tentang aktivitas antar sektor yang sangat penting bagi semua pihak.

#### Pemanfaatan Media Sosial dalam Krisis

Komunikasi krisis yang efektif adalah tentang menggunakan potensi media sosial untuk menciptakan dialog dan memilih pesan, sumber, dan waktu yang tepat; melakukan pekerjaan sebelum krisis dan mengembangkan pemahaman tentang logika media sosial, menggunakan pemantauan media sosial, dan terus memprioritaskan media tradisional dalam situasi krisis. Komunikasi krisis yang efektif adalah menggunakan media sosial sendiri selama krisis (Eriksson, 2018). Selanjutnya cara terbaik untuk mengelola krisis adalah dengan mencegahnya, sehingga begitu cepat di era ini di mana organisasi dapat diberdayakan ketika merangkul teknologi untuk menjangkau para *stakeholder*, namun dapat dibuat tidak diberdayakan ketika tidak cukup memanfaatkan alat yang tersedia untuk mereka (Pang, Hassan, & Chong, 2014).

Pentingnya media sosial sebagai alat penyelesaian krisis tidak dapat disangkal. Ini memiliki potensi untuk membuktikan pernyataan yang menghilangkan rumor tidak benar atau hanya

untuk menunjukkan fakta. Oleh karena itu, para praktisi didorong untuk mengetahui secara menyeluruh bagaimana media sosial bekerja dan cara terbaik untuk memanipulasinya untuk berkomunikasi dengan para *stakeholder* (Apuke & Tunca, 2018). Dalam hal ini, media sosial dapat menjadi alat pendengaran, tetapi juga tempat ketika organisasi dapat berpartisipasi dalam dialog dengan *stakeholder* yang terlibat dan pengambil risiko, dan memberikan saran sebelum menerapkannya dalam skala penuh. Melalui media sosial, keprihatinan dapat diambil dan ditangani (Rasmussen & Ihlen, 2017). Maka, melalui pemanfaatan media sosial, siapa pun, terutama pemerintah, dapat mendeteksi informasi baik berupa narasi maupun gambar, lalu diteruskan ke pihak-pihak yang berwenang untuk menentukan tindakan sebagai penanganan fase awal krisis. Media sosial menjadi sarana informasi untuk mengabarkan sekaligus menentukan tindakan baik dari pihak-pihak berwenang maupun publik (Maal & Wilson-North, 2019).

Dalam masa penanganan krisis Covid-19 ini, Pemerintah Indonesia juga turut serta memanfaatkan media sosial sebagai instrumen. Pemerintah Indonesia melalui Gugus Tugas Penanganan Covid-19 secara aktif memberikan berbagai informasi melalui berbagai media sosial Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) seperti Facebook, Twitter, Instagram, serta Youtube. Berbagai kanal tersebut turut serta dimanfaatkan oleh pemerintah dengan membuat berbagai konten yang mengedukasi masyarakat dalam bentuk konten gambar maupun video. Pemanfaatan media sosial ini tentunya sangat bermanfaat dalam situasi krisis yang sedang dialami oleh pemerintah ini karena dapat dimanfaatkan sebagai sarana publikasi informasi resmi agar publik dan *stakeholder* mendapatkan paparan informasi yang kredibel. Selain itu media sosial yang dimiliki bermanfaat untuk mengendalikan potensi krisis yang lebih besar utamanya berbagai rumor yang berpotensi beredar.

### **Strategi dan Taktik Manajemen Komunikasi Krisis**

Walaupun terdapat berbagai kekurangan dalam strategi manajemen komunikasi krisis yang

dilakukan pemerintah dan krisis sudah berlangsung, masih ada waktu bagi pemerintah dalam sisa waktu yang ada untuk memperbaiki berbagai sektor yang terkait agar krisis yang ada dapat tertangani dengan lebih baik.

Adapun dalam hal merumuskan strategi krisis bagi Pemerintah Indonesia, kita dapat menggunakan *Situational Crisis Communication Theory*. Dalam strategi ini, *rebuilding posture* menjadi pilihan terbaik dalam merespons krisis ini. Coombs (2015) menyebutkan bahwa *rebuilding posture* mencoba untuk meningkatkan reputasi organisasi. Kata-kata yang diucapkan dan tindakan yang diambil dirancang untuk memberi manfaat bagi *stakeholder* dan mengimbangi efek negatif dari krisis. *Posture* ini melibatkan langkah *compensation* dan *apologia*.

Pemerintah sudah seharusnya memberikan kompensasi dan juga menyampaikan tanggung jawab penuh terhadap penanganan krisis Covid-19 ini karena memang pemerintah dalam hal ini yang sudah seharusnya bertanggung jawab penuh atas krisis ini. Selanjutnya, hal ini juga beralasan karena pada awalnya pemerintah telah terkesan melakukan *denial* dan pada akhirnya membuat situasi justru memburuk dan mendapatkan kesan negatif dari publik. Maka kini sudah saatnya pemerintah menggunakan *rebuilding posture* untuk kemudian meredam berbagai gejolak pada publik dan mengendalikan krisis serta menghindari munculnya krisis baru dari penanganan krisis Covid-19 ini. Langkah yang telah dilakukan, yakni memberikan kompensasi dengan menyiapkan 405,1 triliun rupiah untuk menangani pandemi yang ditujukan kepada masyarakat. Lalu selanjutnya yakni *apologia*, sudah seharusnya pemerintah menunjukkan pesan pada publik bahwa pemerintah bertanggung jawab penuh dan akan semaksimal mungkin mengatasi krisis ini.

Selain strategi tersebut, terdapat beberapa langkah taktis yang masih dapat dilakukan pemerintah untuk menangani krisis ini. Suherman (2020) menjelaskan terdapat tiga hal utama yang dapat dilakukan pemerintah dalam kerja komunikasi krisis dalam menghadapi pandemi ini. Pertama adalah kecepatan dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat. Kecepatan dalam memberikan informasi akan

berdampak pada keterpenuhan informasi yang valid dan terpercaya bagi masyarakat dan *stakeholder* lainnya, seperti media massa. Kecepatan ini akan menunjukkan bahwa pemerintah mampu dan memegang kendali dalam situasi krisis. Kedua adalah dibutuhkan konsistensi dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat. Sesuatu yang tidak dapat dipungkiri bahwa penunjukan jubiir nasional dalam penyampaian informasi situasi krisis tidak akan mampu bekerja sendiri, terdapat jubiir-jubiir lainnya di tingkat daerah, namun harus dipastikan tidak boleh terjadi inkonsistensi data dan informasi di semua level. Ketiga adalah prinsip keterbukaan. Prinsip ini mewajibkan pihak pemerintah yang ditunjuk sebagai jubiir harus mau berbagi informasi secara terbuka (*full disclosure*) kepada *stakeholder*, terutama media massa terhadap apa yang mereka ketahui.

## PENUTUP

Berdasarkan temuan-temuan yang ada, maka banyak hal yang harus diperbaiki dalam komunikasi krisis yang telah dilakukan oleh Pemerintah Indonesia. Strategi *rebuilding posture* yang berisikan langkah *apologia* dan *compensation* (Coombs W. T., 2015) menjadi pilihan terbaik bagi Pemerintah Indonesia. Selain itu, ketiga tahap yang ada dalam komunikasi krisis sudah selayaknya menjadi perhatian bagi setiap krisis yang ada termasuk dalam hal ini *pre crisis* dan *post crisis* selain dari fase *crisis* itu sendiri. Selanjutnya beberapa langkah taktis juga sebaiknya dilakukan oleh pemerintah dalam penanganan krisis Covid-19 ini, yaitu kecepatan dalam menyampaikan pesan-pesan atau informasi kepada masyarakat, konsistensi dalam setiap informasi atau pesan yang disampaikan kepada masyarakat, dan prinsip keterbukaan (Suherman, 2020).

Selain langkah-langkah tersebut, terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk menyelesaikan problem komunikasi yang ada. Yang pertama adalah menunjukkan *sense of crisis* dari berbagai elemen dari pemerintah kepada publik dan *stakeholder*. Yang kedua adalah perlunya pemerintah untuk memperkuat komunikasi internal dari unsur pemerintah itu sendiri mulai dari pusat hingga tataran terkecil, yakni RT.

Yang ketiga adalah perlunya pemerintah untuk memperkuat transmisi pesan komunikasi kepada publik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Apuke, O. D., & Tunca, E. A. (2018). Social Media and Social Media and Crisis Management: A Review and Analysis of Existing Studies. *LAÛ Sosyol Bilimler Dergisi*, 199-215.
- Aria, P. (2020, Maret 26). *Ekonomi Indonesia dalam Skenario Terburuk Akibat Virus Corona*. Retrieved April 14, 2020, from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/telaah/2020/03/26/ekonomi-indonesia-dalam-skenario-terburuk-akibat-virus-corona>
- Bayu, D. J., & Agustiyanti. (2020, April 2). *Ralat Jubiir Presiden, Pratikno: Pemerintah Imbau Masyarakat Tak Mudik*. Retrieved April 15, 2020, from katadata.co.id: <https://katadata.co.id/berita/2020/04/02/ralat-jubiir-presiden-pratikno-pemerintah-imbau-masyarakat-tak-mudik>
- Benn, S., Abratt, R., & O'Leary, B. (2016). Defining and Identifying Stakeholders: Views from Management and Stakeholders. *South African Journal of Business Management*, 1-11. <https://doi.org/10.4102/sajbm.v47i2.55>.
- Budiansyah, A. (2020, April 5). *Catat, Wajib Pakai Masker Buat Semua Warga RI Mulai Hari Ini!* Retrieved April 13, 2020, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/lifestyle/20200405174659-33-149879/catat-wajib-pakai-masker-buat-semua-warga-ri-mulai-hari-ini>
- Bundy, J., Pfarrer, M. D., Short, C. E., & Coombs, W. T. (2016). Crises and Crisis Management: Integration, Interpretation, and Research Development. *Journal of Management*, 1-32. Doi: 10.1177/0149206316680030.
- Coombs, W. T. (2010). Parameters for Crisis. In W. T. Coombs, & S. J. Holladay, *The Handbook of Crisis Communication* (pp. 17-53). Chichester: Blackwell Publishing Ltd.
- Coombs, W. T. (2015). *On Going Crisis Communication: Planning, Managing, and Responding 4th Edition*. California: Sage Publications.
- Cutlip, S. M., Center, A. H., & Broom, G. M. (2016). *Effective Public Relations Edisi Kesembilan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Detik. (2020, April 13). *Data Corona di Mata Jokowi: Dulu Bisa Bikin Panik, Kini Perlu Dibuka ke Publik*. Retrieved April 15, 2020, from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4975126/>

- data-corona-di-mata-jokowi-dulu-bisa-bikin-panik-kini-perlu-dibuka-ke-publik/1
- Detik. (2020, April 11). *Kisah Pilu Penolakan Jenazah Perawat Corona di Semarang*. Retrieved April 15, 2020, from detik.com: <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-4973112/kisah-pilu-penolakan-jenazah-perawat-corona-di-semarang/1>
- Detik.com. (2020, April 2). *Istana: Mudik Boleh tapi Wajib Isolasi Mandiri dan Berstatus ODP*. Retrieved April 15, 2020, from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4962231/istana-mudik-boleh-tapi-wajib-isolasi-mandiri-dan-berstatus-odp>
- Eriksson, M. (2018). Lessons for Crisis Communication on Social Media: A Systematic Review of What Research Tells the Practice. *International Journal of Strategic Communication*, 526-551. Doi: 10.1080/1553118X.2018.1510405.
- Fearn-Banks, K. (2011). *Crisis Communications: A Casebook Approach*. New York: Routledge.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic Management: A Stakeholder Approach*. Massachusetts: Pitman Publishing.
- Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. (2020, April 12). *Data Sebaran*. Retrieved April 12, 2020, from Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19: <https://www.covid19.go.id/>
- Hegner, S. M., Beldad, A. D., & Kraesgenberg, A.-L. (2016). The Impact of Crisis Response Strategy, Crisis Type, and Corporate Social Responsibility on Post-crisis Consumer Trust and Purchase Intention. *Corporate Reputation Review*, 357-370. <https://doi.org/10.1057/s41299-016-0007-y>.
- Ihsanuddin, & Meiliana, D. (2020, April 3). *Dibantah, Pernyataan Ngabalın yang Sebut Ada Staf KSP Positif Covid-19*. Retrieved April 13, 2020, from kompas.com: <https://nasional.kompas.com/read/2020/04/03/18470851/dibantah-pernyataan-ngabalın-yang-sebut-ada-staf-ksp-positif-covid-19>
- Kumparan. (2020, Maret 26). *Pemerintahan Kosovo Tumbang karena Virus Corona*. Retrieved April 14, 2020, from kumparan.com: <https://kumparan.com/kumparannews/pemerintahan-kosovo-tumbang-karena-virus-corona-1t6GIyD2oCg>
- Lestari, P., & Sularso. (2020). The COVID-19 Impact Crisis Communication Model Using Gending Jawa Local Wisdom. *International Journal of Communication and Society*, 47-57. <https://doi.org/10.31763/ijcs.v2i1.150>.
- Maal, M., & Wilson-North, M. (2019). Social Media in Crisis Communication – The “Do’s” and “Don’ts”. *International Journal of Disaster Resilience in the Built Environment*, 1759-5908. Doi: 10.1108/IJDRBE-06-2014-0044.
- Marsen, S. (2019 ). Navigating Crisis: The Role of Communication in Organizational Crisis. *International Journal of Business Communication*, 1-13. Doi: 10.1177/2329488419882981.
- Masluha, S. (2020, Maret 2). *Menkes Terawan Tegaskan Masker Hanya Untuk Orang Sakit*. Retrieved April 13, 2020, from detikHealth: <https://health.detik.com/berita-detikhealth/d-4922354/menkes-terawan-tegaskan-masker-hanya-untuk-orang-sakit>
- Mawardi, I. (2020, April 6). *Ini Daftar 37 Pernyataan Blunder Pemerintah Soal Corona Versi LP3ES*. Retrieved April 15, 2020, from detik.com: <https://news.detik.com/berita/d-4967416/ini-daftar-37-pernyataan-blunder-pemerintah-soal-corona-versi-lp3es/1>
- Mikušová, M., & Horváthová, P. (2019). Prepared for A Crisis? Basic Elements of Crisis Management in An Organisation. *Economic Research-Ekonomska Istraživanja*, 1844-1868. <https://doi.org/10.1080/1331677X.2019.1640625>.
- Mitchell, R. K., Aggle, B. R., & Wood, D. J. (1997). Toward A Theory of Stakeholders Identification and Salience: Defining The Principle of Who and What Really Counts. *Academy of Management*, 853-886.
- Nurita, D., & Sugiharto, J. (2020, Maret 29). *Dirisak Netizen, Jubir Corona Jawab soal Si Kaya vs Si Miskin*. Retrieved April 15, 2020, from tempo.co: <https://nasional.tempo.co/read/1325218/dirisak-netizen-jubir-corona-jawab-soal-si-kaya-vs-si-miskin/full&view=ok>
- Oliver, S. (2010). *Public Relations Strategy Third Edition*. London: Kogan Page.
- Pang, A., Hassan, N. B., & Chong, A. C. (2014). Negotiating Crisis in The Social Media Environment: Evolution of Crises Online, Gaining Credibility Offline. *Corporate Communications: An International Journal*, 96-118. Doi: 10.1108/CCIJ-09-2012-0064.
- Peng, X., Gong, W., & Peng, M. (2016). Empirical Study on Trust Repair of Government in Public Crisis Event. *Open Journal of Business and Management*, 376-391. <http://dx.doi.org/10.4236/ojbm.2016.42040>.
- Pergel, R., & Psychogios, A. G. (2013). Making Sense of Crisis: Cognitive Barriers of Learning in Critical Situations. *Management Dynamics in the Knowledge Economy*, 179-205.

- Praditya, I. I. (2020, April 12). *Dampak Corona, Pertumbuhan Ekonomi 170 Negara Diprediksi Negatif*. Retrieved April 14, 2020, from liputan6.com: <https://www.liputan6.com/bisnis/read/4225298/dampak-corona-pertumbuhan-ekonomi-170-negara-diprediksi-negatif>
- Pusparisa, Y. (2020, Juli 15). *Jumlah Tenaga Kesehatan yang Meninggal karena Covid-19 Bertambah*. Retrieved Juli 27, 2020, from Data Books: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2020/07/15/jumlah-tenaga-kesehatan-yang-meninggal-karena-covid-19-bertambah>
- Rachmawati. (2020, April 3). *Duduk Perkara Penolakan Pemakaman Pasien Covid-19 di Banyumas, Bupati Minta Maaf dan Pimpin Pembongkaran Makam*. Retrieved April 13, 2020, from kompas.com: <https://regional.kompas.com/read/2020/04/03/06070011/duduk-perkara-penolakan-pemakaman-pasien-covid-19-di-banyumas-bupati-minta>
- Rasmussen, J., & Ihlen, Ø. (2017). Risk, Crisis, and Social Media: A Systematic Review of Seven Years' Research. *Nordicom Review*, 1-17. Doi:10.1515/nor-2017-0393.
- Rina, R. (2020, April 9). *Update! 1,4 Juta Pekerja Dirumahkan & PHK, Jakarta Terbanyak*. Retrieved April 15, 2020, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200409201441-4-151017/update-14-juta-pekerja-dirumahkan-phk-jakarta-terbanyak>
- Setyowati, D. (2020, April 12). *44 Dokter dan Perawat RI Meninggal Dunia Akibat Virus Corona*. Retrieved April 15, 2020, from KataData: <https://katadata.co.id/berita/2020/04/12/44-dokter-dan-perawat-ri-meninggal-dunia-akibat-virus-corona>
- Suherman, A. (2020). Menyoal Komunikasi Krisis Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19. In F. Junaedi, *Krisis Komunikasi dalam Pandemi Covid-19* (pp. 65-69). Yogyakarta: Buku Litera.
- Supriyadi, S. (2020, April 3). *Pencipta Aplikasi Zoom Raup Keuntungan Hingga Triliunan Di Tengah Wabah Corona*. Retrieved April 15, 2020, from airmagz.com: <https://www.airmagz.com/57204/pencipta-aplikasi-zoom-raup-keuntungan-hingga-triliunan-di-tengah-wabah-corona.html>
- Tempo. (2020, Februari 28). *Rp 72 Miliar Untuk Influencer': Cara Indonesia Merespon Virus Corona*. Retrieved 14 April, 2020, from tempo.co: <https://www.tempo.co/abc/5348/rp-72-miliar-untuk-influencer-cara-indonesia-merespon-virus-corona>
- Tuasikal, R. (2020, Maret 16). *Dulu Negatif, Pasien Cianjur yang Meninggal Ternyata Positif Corona*. Retrieved April 15, 2020, from voaindonesia.com: <https://www.voaindonesia.com/a/dulu-negatif-pasien-cianjur-yang-meninggal-ternyata-positif-corona/5329918.html>
- Umah, A. (2020, Maret 23). *Anies: Jakarta Butuh 1000 APD Sehari, Bisa Lebih ke depannya*. Retrieved April 15, 2020, from CNBC Indonesia: <https://www.cnbcindonesia.com/news/20200323121321-4-146918/anies-jakarta-butuh-1000-apd-sehari-bisa-lebih-ke-depannya>
- Widiastuti, D. A. (2020, Maret 1). *Netflix Alami Peningkatan Saham dari Penyebaran Corona*. Retrieved April 15, 2020, from tek.id: <https://www.tek.id/culture/netflix-alami-peningkatan-saham-dari-penyebaran-corona-b1ZJ39hco>

# KEBANGKITAN DOKTER PRIBUMI DALAM LAPANGAN KESEHATAN : MELAWAN WABAH PES, LEPROA, DAN INFLUENZA DI HINDIA BELANDA PADA AWAL ABAD XX

## THE RESURRECTION OF INDIGENOUS DOCTORS IN THE MEDICAL FIELDS : ENCOUNTERING THE PLAGUE, THE LEPROSY AND INFLUENZA OUTBREAKS IN THE NEDERLANDSCH INDIE IN THE EARLY 20<sup>TH</sup> CENTURY

Siti Hasanah<sup>1</sup>

Magister Sejarah Universitas Gadjah Mada

E-mail: sitihasanah@mail.ugm.ac.id

### ABSTRACT

*In order to break the epidemics chains, a strong synergy is needed between the central and local governments, between the doctors and the community, as well as among doctors themselves. In the colonial health bureaucracy, indigenous doctors always experienced discrimination. In addition, the relationship between the indigenous doctors and the European doctors was not harmonious. However, the occurrence of epidemics required them to continue to work together. Initially, European physicians were more dominant to become key figures in laboratory research and the search for solutions when an outbreak occurred. Then the trend changed since the early 19th century. The rise of indigenous doctors was inseparable from the STOVIA educational revolution and the emergence of Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige, an association of indigenous doctors in 1909. These two factors encouraged indigenous doctors to get more chances being involved in their researches to the extent it could influence the government policy. The main aspect which is discussed is the resurrection and synergy that was built between doctors, especially indigenous doctors in dealing with several outbreaks. Dr. Cipto Mangoenkoesoemo in eradicating the bubonic plague in Malang, dr. Abdul Rivai, who spoke out loudly in the Volksraad, encouraged the government to respond immediately when an influenza outbreak occurred, and JB Sitanala, who was a key figure in resolving the leprosy outbreak, until his achievements were heard in international health forums.*

**Keywords:** *The resurrection of native doctors, colonial health, bubonic plague, influenza, and leprosy*

### ABSTRAK

Dalam upaya memutus mata rantai wabah dibutuhkan sinergitas yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah, antara dokter dan masyarakat, maupun sesama dokter itu sendiri. Dalam tatanan birokrasi kesehatan kolonial, awalnya dokter pribumi selalu mengalami diskriminasi dan pada beberapa kasus hubungannya dengan dokter Eropa tidak harmonis. Namun terjadinya wabah-wabah mengharuskan mereka tetap bersinergi. Awalnya dokter Eropa lebih dominan untuk menjadi tokoh-tokoh kunci dalam penelitian laboratorium dan pencarian solusi ketika terjadi wabah. Lalu *trend*-nya berubah sejak awal abad ke-19. Kebangkitan dokter pribumi yang tidak terlepas dari revolusi pendidikan STOVIA dan kemunculan *Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige*, sebuah perkumpulan dokter pribumi pada tahun 1909. Dua faktor ini mendorong para dokter pribumi semakin melibatkan diri dalam kerja-kerja penelitian hingga tahap mempengaruhi kebijakan pemerintah. Aspek utama yang dibicarakan ialah kebangkitan dan sinergitas yang dibangun antara para dokter khususnya dokter pribumi dalam menangani beberapa wabah. Dr. Cipto Mangoenkoesoemo dalam pemberantasan wabah pes di Malang, dr. Abdul Rivai yang lantang bersuara di *Volksraad* mendorong pemerintah segera tanggap saat terjadi wabah influenza, dan JB Sitanala yang menjadi tokoh kunci penyelesaian wabah Lepra hingga prestasinya terdengar di forum-forum kesehatan internasional.

**Kata kunci:** *Kebangkitan dokter pribumi, kesehatan masa kolonial, Wabah pes, influenza, dan lepra*

## PENDAHULUAN

Fenomena COVID-19 di Indonesia yang sudah terjadi hampir 10 bulan telah menyita banyak perhatian dari semua pihak. Berbagai elemen pemerintah dan masyarakat saling bahu membahu berupaya agar pandemi segera berakhir. Dokter merupakan profesi utama tersorot menjadi garda terdepan dari penanganan COVID-19. Namun di Indonesia sendiri ketersediaan dokter dan fasilitas rumah sakit masih membutuhkan perhatian penuh dari pemerintah dan publik. Jumlah dokter yang terbatas masih banyak berguguran karena kelelahan dan ikut terpapar virus yang ditengarai berasal dari Wuhan, China. Problematika yang dihadapi Indonesia semakin kompleks, dari jumlah personil dokter yang tidak mencukupi, ketersediaan fasilitas yang tidak sesuai standart dan kelayakan di beberapa daerah, masalah ketergantungan yang tinggi dari industri dan teknologi kesehatan luar negeri hingga ketidaksiapan sistem kesehatan Indonesia dalam menghadapi pandemi. Sektor kesehatan menjadi yang sorotan utama yang ditangani oleh pemerintah dalam setahun ini. Alokasi dana pendidikan, politik dan ekonomi negara terlebih dahulu diprioritaskan pada penanganan COVID-19. Sementara dilapangan para dokter dan tenaga kesehatan terus berperang dengan musuh yang tidak terlihat, mereka juga terus didorong pemerintah untuk melakukan penelitian laboratorium guna secepatnya mendapatkan solusi dari wabah ini.

Jika kita kembali menengok perjalanan bangsa ini, fenomena melawan wabah bukan pertama kali Indonesia alami. Masa kolonial wabah dan pandemi juga dijumpai di beberapa periode perjalanan Hindia Belanda. Dan sepanjang itu pula dokter masih terus menjadi ujung tombak bagaimana pandemi akan tertangani. Suara dokter menjadi krusial untuk didengar dan dipertimbangkan oleh pemerintah kolonial saat mengambil kebijakan dalam sektor lainnya. Awalnya, saat berbagai wabah menyerang Hindia Belanda pada abad XVII-XIX, para dokter Eropa yang dominan menjadi tokoh-tokoh kunci dalam penyelidikan dan pencarian solusi atas kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah. Sementara itu dokter Djawa dan dokter pribumi lebih banyak terlibat dalam pelaksanaan di lapangan. Lalu hal ini menjadi berubah sejak awal abad XX. Para

dokter Djawa dan pribumi juga banyak ikut terlibat dalam penelitian dan menjadi tokoh kunci penanggulangan wabah. Kebangkitan dokter Djawa dan dokter pribumi tidak terlepas dari dua faktor. Pertama, perkembangan pendidikan yang mereka peroleh di STOVIA, NIAS dan kenaikan gelombang para lulusan yang melanjutkan studi dokternya di Belanda. Kedua, dampak dari kemunculan sebuah asosiasi dokter pribumi yaitu *Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige (VIG)* pada tahun 1909. Asosiasi ini selain menjadi wadah para dokter pribumi dalam menuntut kesetaraan gaji dan otoritas terhadap pemerintah kolonial, VIG juga banyak mendiskusikan permasalahan kesehatan yang sedang dihadapi masyarakat. Selain situasi politik sosial dan nasional pada awal abad XX, kedua faktor di atas turut mempengaruhi keberadaan dokter pribumi di lapangan kesehatan, menghapuskan inferioritas, serta menuntut ruang kesetaraan dalam otoritas kerja dan penelitian, hingga menjadikan dokter pribumi lebih aktif terlibat dalam penanganan wabah dan menjadi tokoh-tokoh kunci dalam lapangan kesehatan.

Beberapa peneliti dan sejarawan telah mencatat bagaimana bangsa kita dan pemerintah di masa lalu melawan dan mampu mengatasi pandemi yang berkepanjangan. Sebuah tesis karya Martina Safitry membahas tentang kontestasi antara dukun dan kemunculan elit baru, yaitu Mantri Pes yang membantu penduduk dalam penanggulangan wabah pes di Malang pada 1910-1942. Mantri pes dengan identitas wakil pemerintah kolonial dalam hal ini secara tidak langsung dianggap mengganggu dukun sebagai praktisi lokal dalam tradisi Jawa. Martina melihat kiprah keduanya dalam fenomena kemunculan wabah dalam kajiannya (Safitry, 2016). Berbeda dengan Martina yang membahas virus pes yang melanda Malang pada 1910, virus pandemi influenza yang meluas di Hindia Belanda pada 1918 secara serius diteliti oleh Priyanto Wibowo dan kawan-kawan dalam sebuah buku berjudul *Yang Terlupakan : Pandemi Influenza 1918 di Hindia Belanda*. Penelitiannya berusaha menjawab tentang sebab-sebab terjadinya influenza, dampak bagi masyarakat serta langkah-langkah apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menanggulangi wabah tersebut. Wabah influenza ini menyebar



masif melalui kegiatan perdagangan via transportasi perkapalan. Sikap abai terhadap peringatan dini yang dikirim oleh pejabat Belanda dari Hongkong dan Singapura tentang melandanya influenza tidak diperhatikan, sehingga ketidaksiapan pemerintah kolonial dalam merespon pandemi ini mengakibatkan semakin banyak korban yang berjatuhan. Baru dua tahun setelahnya, pada Oktober 1920 pemerintah baru mengeluarkan *Influenza Ordonnantie* ketika para pejabat sudah melaporkan situasi darurat. Selain itu benturan kepentingan antar instansi di pemerintahan untuk bersaing merebut unjuk peran siapa paling unggul dalam penanganan juga berkontribusi dalam melambatnya penanggulangan pandemi ini. Pandemi seolah menjadi sebuah ajang untuk unjuk diri, membentuk citra di opini massa bahkan digunakan sebagai ajang menyingkirkan lawan politiknya. (Priyanto Wibowo, dkk. 2009). Terkait dengan dampak demografis dari adanya suatu wabah influenza, Siddharth Chandra dalam esainya yang berjudul *Mortality from the influenza pandemic of 1918-19 in Indonesia* menuangkannya dalam metode baru analisis statistik. Dia melihat kematian yang tinggi di Indonesia mengingat Indonesia merupakan negara keempat terpadat di dunia. Misalnya dampak paling parah berasal dari sebagian besar Jawa Barat dan tengah yang mengalami “*flare up*” di akhir tahun 1919 yang hal ini tidak tercatat dalam laporan BGD dan KV (Siddhartha Chandra. 2013).

Belum lama ini juga terbit sebuah buku karya Ravando Lie yang membahas secara holistik pandemi flu Spanyol di Indonesia masa kolonial 1918-1919 guna melengkapi beberapa bahasan yang tidak terjamah oleh para peneliti wabah flu Spanyol sebelumnya. Ravando membahas secara runtut dari polemik antara dr. Abdul Rivai di Volksraad dalam menanggapi wabah, kemunculan pandemi influenza dari berbagai belahan di dunia, dua gelombang masuknya flu Spanyol di Hindia Belanda hingga berkembangnya hoaks, takhayul, dan obat-obatan saat terjadinya pandemi ini. Selain itu dampak secara demografis, kelaparan hingga kriminalitas juga disajikan Ravando dalam tulisannya (Ravando. 2020)

Dari berbagai penelitian tersebut, secara umum para penulis di atas lebih dominan membahas tentang wabah dalam konteks upaya

pemerintah dalam menangani pandemi yang sedang berlangsung. Namun narasi tentang kiprah dokter sebagai garda terdepan dalam penanganannya baik di lapangan maupun upayanya dalam penelitian di laboratorium belum secara holistik di bahas. Sehingga tulisan ini ingin menjawab kekosongan narasi kiprah para dokter dalam penanggulangan wabah selama masa kolonial. Historiografi tentang wabah memang sudah banyak, namun penulisannya masih didominasi oleh narasi sosial ekonomi dan politik dari terjadinya wabah ataupun terkait upaya-upaya pemerintah dalam penanggulangan wabah. Tanpa mengesampingkan begitu pentingnya hal tersebut, kiprah dokter dalam menanggulangi wabah di lapangan ataupun dalam penelitian perlu juga diperbesar porsi narasinya karena rekomendasi para dokter di lapangan dan di laboratorium penelitian menjadi sebuah pertimbangan besar pemerintah kolonial dalam mengambil kebijakan sosial, ekonomi, pendidikan, dan politik. Untuk menelusuri kerja-kerja dokter dalam lapangan penelitian saat wabah, penulis menyelidiki lebih lanjut dengan menelusuri publikasi mereka di beberapa jurnal medis kolonial. Meskipun tulisan ini terfokus pada kebangkitan dokter pribumi, namun tidak melepaskan sinergitas mereka dengan dokter-dokter Eropa.

## **PERKEMBANGAN PENDIDIKAN, KEBERADAAN VIG, SERTA KEBANGKITAN DOKTER PRIBUMI DALAM TATANAN BIROKRASI DAN LAPANGAN KESEHATAN KOLONIAL**

Setelah dekade pertama abad XX, tepatnya pada 1913, terjadi perbaikan besar-besaran dalam sistem pendidikan di STOVIA. Kurikulum mata pelajaran disempurnakan, kerja praktikum dan alat diperbanyak. Jumlah guru dan guru-guru spesialis ditambah. Mereka bebas dari tugas militer karena sudah terealisasinya independensi BGD dari MGD. Gelar *inlandsche arts* diubah menjadi *Indisch Arts* (Hanafiah dkk, 1976: 11). Revolusi kurikulum dan fasilitas ini berdampak pada kualitas para lulusan STOVIA menjadi lebih baik. Selain itu sejak awal abad ke-20, berkat dorongan beberapa instruktur STOVIA dan HF Roll para murid lulusan STOVIA berkesempatan

melanjutkan studi dokternya di Belanda. Menurut Hans Pols (2018:54-60), generasi pertama kelompok pribumi yang melanjutkan studi di Perguruan Tinggi Belanda terdapat dua puluh orang, diantaranya Abdul Rivai, Asmaoen, Mas Boenjamin, H.D Jan Apituley, Johannes Everhardus Tehupeiory, dan W.K Tehupeiory.

Beberapa di antara murid yang sedang belajar di Belanda menyadari banyak permasalahan yang dihadapi dokter pribumi, terutama posisinya dalam tatanan kesehatan kolonial Belanda. Mereka sering mengalami diskriminasi materil dan sosial, dianggap dokter kelas dua, dan memiliki keterbatasan otoritas kerja. WK Tehupeiory, seorang dokter pribumi asal Ambon menempuh upaya awal untuk bisa memperjuangkan kesetaraan dokter pribumi dan Eropa dengan menyatukan dokter pribumi di Hindia Belanda. Melalui penyatuan dokter pribumi dalam asosiasi, segala permasalahan para dokter pribumi akan didiagnosis dan dicari solusinya bersama. Pada saat menjalani studinya di Belanda, ditemani Raden Mas Boenjamin mereka menemui Menteri Urusan Koloni untuk mendiskusikan permasalahan dokter pribumi di Hindia Belanda. Mereka juga menulis surat kepada rekan-rekannya atas gagasan untuk mendirikan asosiasi dokter pribumi (Hans Pols, 2018: 138). Keduanya juga mendiskusikan keinginannya ini dengan Mr. Abendanon, mantan kepala DvOEN yang turut memperkenalkan *Tehupeiory dengan van Deventer, anggota de Tweede Kamer*. Artikel van Deventer "*Insulindes Teekomst*" juga semakin memperkuat keinginan Tehupeiory untuk menghimpun para dokter pribumi.

Perkenalannya dengan Mr. Abendanon mengantarkan Tehupeiory terlibat dalam *Indisch Genootschap*, sebuah kelompok politisi, akademisi, dan pengusaha yang berkomitmen mendukung politik etis Hindia Belanda. Saat itu ketuanya adalah Mr. Pierson yang menyambut WK Tehupeiory secara hangat pada pertemuan 22 Oktober 1907 (WK Tehupeiory, 1936: 2). Pada pertemuan *Indisch Genootschap* selanjutnya pada 28 Januari 1908, Tehupeiory diizinkan berpidato dan memaparkan tulisannya yang berjudul *Iets over de inlandsche geneeskundigen*. Dia membantah pernyataan JHF Kohlbrugge pada pertemuan *Indisch Genootschap* sebelumnya, yang mengatakan pendidikan di STOVIA terlalu intelektual dan menjauhkan

moral pelajar dari akar budayanya. Tehupeiory juga menyampaikan protes atas ketidakadilan moral dan materil yang dirasakan para dokter pribumi di lingkungan kerja. (Hans Pols, 2018: 136-138)

Keberhasilannya menyuarkan kondisi dokter pribumi dalam ceramah di *Indisch Genootschap* mendorong Tehupeiory lebih sering mendiskusikan gagasan pendirian asosiasi dokter pribumi bersama teman-temannya Asmaoen, Abdul Rivai, Mas Boenjamin dan saudaranya, J.K Tehupeiory. Mereka semakin bertekad bahwa di Hindia Belanda harus segera didirikan asosiasi dokter pribumi. Reaksi positif dan dukungan publik berdatangan menyambut gagasan WK Tehupeiory dan Mas Boenjamin. Publik berharap agar asosiasi yang akan didirikan tidak mencontoh BGNI. Di kalangan pribumi BGNI dikenal sebagai asosiasi dokter yang hanya menggerutu dan mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah: kurang tindakan untuk turut memperbaiki kesehatan penduduk Hindia Belanda (*De Java Post*, 14 Agustus 1909).

Pada 17 September 1909, Tehupeiory mendarat di Batavia, di gedung STOVIA yang baru dalam rangka merealisasikan pendirian *Vereeniging van Inlandsche Geneeskundigen (VIG)* secara resmi. *Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige (VIG)* merupakan sebuah perkumpulan yang terbentuk untuk menyatukan para dokter pribumi melawan dominasi dokter Eropa. VIG terbentuk pada 17 September 1909 di Batavia atas prakarsa WK Tehupeiory, Raden Mas Boenjamin dan rekan-rekan dokter pribumi lainnya (Orgaan van de VIG, Jubileumnummer 1911-1936: 5). Karena para anggota VIG merupakan tokoh-tokoh penting dalam pergerakan, akses mereka untuk menuntut beberapa hal lebih didengar oleh pemerintah. Awalnya VIG adalah sebuah asosiasi yang berfokus pada kesejahteraan para anggota di bidang materi. Mereka memulai dengan menuntut remunerasi para dokter secara berhati-hati, dengan sekadar ber kirim surat pada pemerintah kolonial. Kondisi politik dan gejolak sosial akhirnya memengaruhi VIG menjadi asosiasi yang lebih terbuka dan radikal. Beberapa anggota VIG yang memiliki hubungan dekat dengan Tjokroaminoro akhirnya membawa VIG berafiliasi dengan Sarekat Islam yang saat itu dilirik sebagai organisasi dengan basis massa yang banyak (Kongres ke-4 Sarekat Islam 26 Oktober-2 November 1919, 1919: 43). Para dokter pribumi

mulai mengancam pemerintah dengan mogok kerja hingga akhirnya pemerintah mengabdikan tuntutan kenaikan gaji dokter pribumi.

Selanjutnya, agar reputasi dan otoritas kerja dokter pribumi tidak lagi terdiskriminasi dan dianggap sebagai dokter kelas dua, VIG kemudian menuntut adanya perguruan tinggi kedokteran di Hindia Belanda agar menghilangkan kesenjangan antara dokter pribumi yang lulusan STOVIA dengan dokter Eropa yang lulusan Perguruan Tinggi. Perjuangan ini ditempuh oleh Abdul Rivai dan VIG melalui *volksraad* (Extra Number van het Orgaan VIG, Aflevering 2 volume 1919). Tahun 1925 VIG dan Abdul Rivai berhasil mengegolkan pendirian *Geneeskundige Hoogeschool* sebagai wadah memproduksi dokter yang setara dengan dokter Eropa.

Pergerakan dokter pribumi pada periode awal abad ke-20 menjadi sangat masif, baik di ranah lapangan kesehatan maupun di bidang politik. Pergerakan itu dilakukan baik mereka yang masih berstatus dokter Djawa (lulusan STOVIA sebelum gelarnya diubah menjadi *Inlandsche Arts*), lulusan STOVIA setelah *inlandsche arts* atau *indische arts* (dokter pribumi), maupun beberapa dokter pribumi yang telah melanjutkan studinya di Belanda. Perbaikan kualitas pendidikan yang diperoleh serta keberadaan VIG menjadikan para dokter pribumi lebih memiliki kepercayaan diri untuk terlibat lebih banyak dalam lapangan kesehatan maupun pengambilan kebijakan kesehatan di Hindia Belanda.

## **TANTANGAN PENANGGULANGAN WABAH DI TENGAH MINIMNYA JUMLAH DOKTER PADA MASA KOLONIAL**

Pasca 1911 dr. Paverelli, sekretaris *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië (GTNI)*, menyorot tantangan terbesar BGD sebagai institusi yang baru saja independen yaitu perihalnya ketersediaan dokter sipil. Ketersediaan dokter tidak seimbang dengan banyaknya penduduk Hindia yang perlu ditangani (Liesbeth Hesselink, 2011: 271). Kondisi itu masih terjadi hingga 8 tahun kemudian, hingga dr. Teeuwen, seorang anggota *Volksraad* berulang kali mengingatkan pemerintah untuk segera mengatasi krisis tenaga

dokter di Hindia Belanda. Teeuwen membandingkan rasio dokter di negara Belanda 1:2000 jiwa sedangkan di Hindia Belanda 1 dokter harus menangani 100.000 jiwa. (*Begrooting van Nederlandsch Indië voor het diensjaar 1919: Algemeene beschouwingen*). Pertemuan ke-6 pada 20 Juni 1918 : 174)

Upaya awal pemerintah kolonial untuk mengatasi hal itu ialah dengan mengubah skema subsidi kesehatan sejak tahun 1920. Selain untuk sarana dan prasarana fisik, subsidi juga dialokasikan untuk impor dokter Eropa (Baha'udin, 2005: 249). Menurut Leo van Bergen, dalam data DVG sepanjang tahun 1920 terdapat 65 dokter Eropa yang didatangkan ke Hindia Belanda dan tahun 1933 menjadi 110 dokter. Sementara itu, jumlah dokter pemerintah Hindia Belanda 171 dokter di tahun 1920 dan 230 dokter pada tahun 1933 (Leo van Bergen, 2018: 197).

Kondisi kurangnya dokter di Hindia Belanda juga tergambar dalam pengalaman dr. Moekiman saat ditugaskan di wilayah Karawang. Penyakit-penyakit seperti *trachoma*, *frambusia*, cacung tambang dan wabah pes banyak menyerang. Pada saat itu dia harus sekaligus memiliki kemampuan bedah, dermatologi (ahli penyakit kulit dan kelamin), dan penyakit dalam. Hal itu karena pasiennya mencapai puluhan dengan penyakit bermacam-macam. dr. Moekiman juga pernah menyuntik hingga 80 orang frambusia dan mengoperasi mata seorang pandai besi. Kemampuan menguasai semua penyakit harus dimiliki dokter saat itu mengingat sangat kurangnya dokter pada masa kolonial (Hanafiah dkk, 1976:19). Krisis tenaga dokter ini semakin terasa dampaknya ketika beberapa wilayah Hindia Belanda terserang wabah. Sementara itu, persebaran jumlah dokter masih terbatas pada daerah-daerah yang padat penduduknya. Contohnya pada tahun 1911 saat terjadi wabah pes di Malang, dalam kondisi darurat karena kekurangan dokter, pemerintah terpaksa mengangkat beberapa murid dari kelas 6 bagian medik di STOVIA untuk menjadi dokter tanpa mengikuti ujian terlebih dahulu (Hanafiah dkk, 1976: 11).

Para dokter pribumi maupun Eropa seiring berjalannya waktu dalam memberantas wabah di beberapa wilayah, mereka rajin menuliskannya. Tulisan mereka berisi ikhwal penyebaran wabah,

kondisi penduduk, perkembangan wabah hingga perdebatan pencarian vaksin atau penanggulangan suatu wabah. Mereka menuliskannya dalam bentuk catatan pribadi atau diterbitkan dalam jurnal medis. Tulisan-tulisan para dokter ini menjadi data yang sangat utama karena mereka yang berhadapan langsung dengan pasien dan situasi langsung di lapangan. Selain itu, pertimbangan para dokter sering dijadikan pedoman pemerintah dalam mengambil suatu tindakan atau kebijakan.

Jurnal medis yang digunakan untuk mempublikasikan laporan dan hasil pengamatan para dokter berbeda-beda. Untuk dokter pribumi dan kalangan STOVIA, mereka baru memiliki jurnal tersendiri yaitu *Tijdschrift voor Inlandse Geneeskundigen* (TVIG) pada 1893. TVIG merupakan jurnal medis yang diterbitkan oleh kalangan STOVIA untuk menjaga kualitas dan sirkulasi pengetahuan para siswa calon dokter di STOVIA. Meskipun menurut Suri Yani, pada terbitan pertama yang banyak mengisi adalah kalangan guru, mantan guru, Inspektur Vonderman dan siswa-siswa dari kelas yang sudah tinggi di STOVIA (Naskah Wahyu Suri Yani, 2020: 7).

Sementara itu, di kalangan dokter Eropa sendiri telah memiliki sebuah publikasi tersendiri bernama *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* (GTNI). GTNI adalah sebuah publikasi dari sebuah perkumpulan eksklusif bernama *Vereeniging tot Bevordering der Geneeskundige Wetenschappen in Nederlandsch Indie* yang didirikan 1851 atas inisiatif Willem Bosch saat menjadi kepala Jawatan Kesehatan di Hindia Belanda. Setahun kemudian GTNI didirikan untuk sarana memajukan penelitian ilmiah bagi para dokter-dokter Eropa di Hindia Belanda. Pembiasaan para dokter menulis di jurnal turut memudahkan mereka memperoleh wawasan dan menganalisis kegagalan pelaksanaan strategi dan langkah-langkah yang perlu untuk ditempuh ketika menghadapi penyakit atau wabah di Hindia Belanda. Untuk pengendalian wabah kolera, selama 1850 hingga 1942 para dokter menghasilkan lebih dari 80 artikel tentang kolera yang dimuat dalam GTNI. Laporan-laporannya beragam, dari studi kasus lokal, laporan otopsi, statistik temporal spasial, evaluasi pengobatan, serta langkah atisipatif untuk wabah yang akan datang (van Bergen dkk, 2019: 147)

## **PENELITIAN DAN SINERGITAS DOKTER EROPA-PRIBUMI DALAM MELAWAN WABAH**

### **Wabah Pes**

Untuk penyakit pes, Malang Jawa Timur merupakan daerah yang diidentifikasi sebagai episentrum penyebaran penyakit pes di Hindia Belanda. Menurut Luwis (2020), sebenarnya sebelum wabah merebak di Malang, beberapa kasus indikasi pes telah ditemukan di Pantai Timur Sumatera pada tahun 1905. Namun karena dampaknya tidak meluas akhirnya menghilang begitu saja. Pemberitaan kasus pes muncul lagi pada 1910 saat Hindia Belanda sedang mengalami gagal panen akibat serangan hama mentek. Kondisi gagal panen mengharuskan Hindia Belanda mengimpor beras dari Cina, Singapura, Bengal, Burma, Thailand dan Saigon. Di beberapa wilayah tersebut penduduknya sedang mengalami wabah pes. Beras-beras yang didatangkan ke Hindia Belanda ternyata membawa membawa bibit-bibit penyakit pes melalui kutu-kutu tikus. Beras dari Rangoon atau Burma menjadi indikasi terkuat mengingat pasokan impor beras Hindia Belanda terbanyak berasal dari daerah ini. Beras-beras impor yang sampai di Jawa Timur akhirnya didistribusikan di Malang. Kondisi geografis dan iklim Malang yang sejuk juga mendukung semakin cepat menyebarnya perkembangan penyakit pes dan meluas ke beberapa wilayah lain. (Luwis, 2020: 37-39),

Pada penanganan wabah pes di Malang para dokter Eropa lebih banyak bekerja dalam laboratorium dan pengambil kebijakan daripada pelaksananya. Mereka dikabarkan memiliki kekhawatiran berlebih ketika harus turun ke lapangan secara langsung. sehingga yang lebih banyak menangani adalah para dokter Djawa dan dokter pribumi. Pada periode terjadinya pes di Malang pada 1911-1916, dokter pribumi juga belum banyak terlibat dalam ranah penelitian dan laboratorium. Selain itu kurikulum STOVIA masih baru saja mengalami perbaikan, serta sebagian dokter pribumi baru saja berangkat untuk melanjutkan studinya di Belanda. Bahasan mengenai wabah pes di Malang, pengambilan kebijakan pemerintah terkait restorasi rumah untuk pencegahan sarang tikus, dan langkah sanitasi banyak ditemukan

dalam laman-laman GTNI yang masih ditulis oleh para dokter Eropa. (Keyse, 2018: 284). Dr. van Loghem adalah seorang dokter Eropa yang namanya juga banyak disebut dalam GTNI saat penanganan wabah pes di Malang. Van Loghem mempertegas penyebab wabah pes dibawa oleh kutu-kutu tikus, terutama yaitu jenis tikus rumah. Kebiasaan penduduk pribumi dalam menggunakan bambu untuk membuat tempat tidur dan pembuatan rumah menjadi faktor penunjang semakin banyaknya perkembangbiakan tikus. Penemuannya ini juga menjadikan pemerintah mengambil kebijakan untuk melakukan restorasi rumah penduduk yang berasal dari bambu utuh (*Mededelingen van den BGD in Ned Indie*, 1913: 4).

Para dokter bahu-membahu melakukan investigasi. Pada penanggulangan wabah ini sudah ada beberapa dokter pribumi yang terlibat dalam penelitian, tidak hanya bekerja di lapangan. Dilaporkan oleh dr. van Loghem dibantu beberapa dokter Eropa dan pribumi di beberapa daerah mengidentifikasi jumlah dan jenis-jenis kutu tikus pembawa pes. Dr. Pilj di Surabaya memberikan data jumlah kasus wabah dan juga menyerahkan hasil pengamatan jumlah kutu per ekor tikus di Surabaya. Dr. Apituley, seorang dokter pribumi dan Dr. Stibbe juga melakukan hal yang sama di Kediri. Kediri merupakan tempat yang mendadak menunjukkan peningkatan tajam pada paruh kedua tahun 1912. Keseluruhannya sebanding dengan distrik Karanglo dan Senggoeroeh di Malang dengan kutu yang sedikit mirip. Jumlah kutu per tikus ditemukan, sangat tinggi di sepanjang pantai Pasuruan, Probolinggo dan Kraksaan. Di Madiun, terdapat Mr. Otten yang telah memeriksa 1000 tikus dengan membawa 3776 kutu. Sementara itu, investigasi yang dilakukan oleh dr. ten Bosch di Batavia menunjukkan fakta bahwa kutu lebih banyak di bawa oleh tikus di Tanjung Priok daripada di Batavia (*Mededelingen van den BGD in Ned Indie*, 1913 : 31).

Selain kolaborasi dalam penelitian beberapa dokter di atas, beberapa dokter juga diberi tanggung jawab dalam sebuah residen. Ini sebagai kelanjutan instruksi kepala BGD dalam rangka pengendalian wabah pes agar tidak semakin menyebar ke beberapa wilayah yang lain. Komposisi

dokter Eropa dan dokter pribumi masih sangat timpang pada awal abad ke-20. Beberapa dokter pribumi yang diberi wewenang menjadi dokter residen, di antaranya adalah dr. M. Abdul Patah di Garut, dr. M. Soerono di Cirebon, R. Soemitro di Pekalongan, R. M Wirasmo di Semarang, R. Kodijat di Kediri, G. Tjoen Bin, K.A Tan, G. Cooke, GB. Van Hogezaand, R. Tjokrosoekarto di Bandung, Sagaf Jahja, Esnawan, The Bing Tjo, Jasir Datoek Moedo, Sadjiman, Adang Roushdy di Garut, Moh. Hoesin di Randoedongkal dan M. Soepardjo di Semarang (*Mededelingen BGD in Nederlandsche Indie 1938*: 91).

Selain nama-nama diatas, dr. Cipto Mangoenkoesoemo adalah dokter pribumi yang dikenal dalam pemberantasan pes di Malang. Cipto merupakan dokter pertama yang mengorbankan praktik dokternya yang menguntungkan dan memilih menawarkan tenaganya dalam memberantas pes yang sedang mewabah di Malang. Dia turun ke pelosok-pelosok dan mengobati penduduk secara langsung tanpa menggunakan alat pelindung diri seperti masker dan sarung tangan. Di sana dr. Cipto Mangoenkoesoemo bahkan mengangkat seorang bayi di dalam rumah yang saat itu seluruh penghuninya terkena pes dan mengharuskan rumahnya untuk di bakar. Menurut M.D Balfas, bayi itu kemudian diberi nama Pesjati untuk mengenang peristiwa tersebut. Akibat keberaniannya dalam menangani wabah pes di Malang ini, pemerintah kolonial memberikan sebuah penghargaan bintang *orde van Oranje Nassau* pada 12 Agustus 1912. Kemudian dr. Cipto Mangoenkoesoemo menuliskan pengalaman dan penelitiannya hingga memaparkan hasilnya dalam sebuah kesempatan di pertemuan ilmiah s'Gravenhage. Pada saat di Solo juga sedang mengalami wabah pes, dr. Cipto Mangoenkoesoemo menawarkan diri untuk kembali membantu penanggulangan wabah disana. Namun karena aktivitas politiknya yang dianggap membahayakan, dia ditolak. Kecewaannya mengantarkan sikapnya untuk mengembalikan bintang jasa *Oranje Nassau* miliknya kepada pemerintah kolonial dengan sambil mengenakannya di bokongnya (Luwis, 2020: 88-90). Hal ini sebagai bentuk kecewaannya terhadap pemerintah kolonial.

## WABAH INFLUENZA

Ada sejumlah tulisan terdahulu yang membahas ikhwal pandemi influenza yang melanda Hindia Belanda pada 1918-1919. Pertama Peter Boomgard dan Goozen yang menganalisis pandemi influenza dari perspektif demografis (1991). Selanjutnya Brown pada 1987 memfokuskan penelitiannya pada dampak yang cukup besar, dan dilanjutkan oleh Siddharth Chandra yang menjadikan penelitian Brown sebagai *turning point* menganalisis influenza dari perspektif mortalitas akibat pandemi influenza di Hindia Belanda. Siddharth Chandra menggunakan metode statistis dalam menghitung populasi yang berkurang di tanah Jawa. Menurut Taubenberger dan Morens pandemi influenza disebut sebagai ibu dari segala pandemi mengingat periode menyerangnya yang pendek, namun menjadi pandemi yang paling menghancurkan sepanjang abad ke-20. Karena itu, mortalitas menjadi aspek ketertarikannya (Chandra, 2013: 186). Hasil dari penelitian Chandra menyebutkan bahwa perkiraan populasi yang hilang di Jawa dan Madura sendiri berada pada kisaran 4,26-4,37 juta dan Banten-Cirebon merupakan residen di Jawa Barat yang masuk lima terbesar residen dalam hal berkurangnya populasi akibat influenza (Chandra, 2013: 189).

Melihat kembali perjalanan bangsa kita, sebelum abad ke-20 epidemi influenza diindikasikan sudah melanda Hindia Belanda sejak lama, yakni tahun 1830-1840, berlanjut tahun 1889-1893. Namun tidak terlalu menjadi sorotan dunia medis secara luas karena dampaknya yang belum meluas. Awalnya epidemi ini diteliti secara bakteriologis hingga tahun 1892, lalu penemuan dr. Pfeiffer dapat menjelaskan bahwa kuman yang menjadi penyebab utamanya. Kemudian, namanya diabadikan menjadi nama kuman yang ditemukannya.

Para dokter melihat karakter epidemi influenza berbeda-beda di beberapa wilayah. Di India, misalnya, influenza diikuti dengan pendarahan hebat, pneumonia tinggi, dan lemah jantung. Pandangan para dokter Belanda di Hindia juga awalnya mengaitkan influenza dengan kabut-kabut yang biasa muncul pada musim hujan bulan Oktober. Sementara itu di India mereka sering melihat epidemi ini muncul pada akhir

musim kemarau. Setelah penemuan dr. Pfeiffer, dokter di Hindia Belanda semakin meningkatkan penelitiannya. Namun, penemuan basil Pfeiffer baru dibuktikan di Medan oleh dr. Snijders (PB van Steenis dalam GTNI 1919: 901- 902).

GTNI mengklasifikasi dua gelombang terjadinya influenza di Hindia Belanda sejak awal abad ke-20. Pada gelombang pertama penyakit ini masuk ke Hindia Belanda pada 4 Juli 1918 melalui kapal Lemaira, tanggal 8 Juli kapal Koemai dan kapal van Goens dari Singapura dan Penang. Ketiga kapal tersebut mengabarkan seluruh awak kapalnya sakit. Beberapa saat kemudian ditemukan kasus pertama terjadi di Belawan dan Medan, hingga wabah influenza melanda Pantai Timur Sumatera pada Juli hingga Agustus 1918. Gelombang kedua serangan wabah influenza menyusul pada bulan November 1918, yang terjadi di Deli Tengah dan di Siantar. Serangan wabah gelombang kedua lebih berbahaya karena kematian pasien akibat influenza semakin banyak akibat penyakit lain seperti TBC dan beriberi. Orang-orang Cina dilaporkan lebih sedikit terdampak daripada orang-orang Jawa. Menurut Louwerier, hal itu karena orang Jawa memiliki kebiasaan mandi dengan air dingin, yang memperparah keadaan pasien ketika sedang demam.

Situasi tingginya kematian ini menimbulkan perdebatan di *Volksraad*. Menurut Vervoort, kematian akibat influenza yang semakin banyak telah digunakan oleh kalangan delegasi di *volksraad* untuk menunjukkan ketidakmampuan pemerintah memberikan bantuan medis yang tidak memadai terhadap pribumi. Pada saat itu anggota *volksraad* yang merupakan dokter pribumi, Abdul Rivai pada sesi kedua pertemuan tahun 1918 menarik perbandingan antara tingginya tingkat kematian di Pasuruan dalam empat belas hari. Dari populasi 308.286 jiwa terdapat 5.187 jiwa meninggal dan kematian terendah adalah di kalangan tentara, yaitu hanya 28 orang yang meninggal. Menurut Abdul Rivai, penyebabnya adalah kurangnya bantuan medis yang disediakan oleh pemerintah. Vervoort yang berada pada sisi pemerintah membantah pernyataan Abdul Rivai dengan mengatakan kematian akibat influenza ini juga banyak terjadi di negara-negara lainnya, misalnya di Belanda yang menembus 16.960

kematian, tiga kali lipat dari angka kematian normal.

Dr. Schuffner, seorang dokter yang sedang bekerja di Pantai Timur Sumatera melaporkan situasi Pantai Timur Sumatera pada saat itu. Daerah yang memiliki persinggungan erat dengan jalur keluar masuknya barang dan perdagangan sedang mengalami tahun-tahun yang buruk sepanjang 1918. Wabah influenza muncul lebih masif dan menelan banyak korban lebih dari tahun-tahun sebelumnya. Schuffner kemudian membuka diskusi untuk mendorong para peneliti memecahkan tiga pertanyaan besar yang mendasar. Pertama, apakah penyakit tersebut sama dengan penyakit pada tahun 1890? Kedua, sudah pastikah *Pfeiffer's Bacillus* penyebabnya? Ketiga, ketika kekebalan tubuh dapat terbentuk, apakah mungkin untuk mengimunisasi penyakit tersebut? Tanggal 25 Mei 1919 diadakan pertemuan ilmiah divisi Pantai Timur Sumatera untuk membicarakan permasalahan tersebut. Dokter Eropa bernama HR Snijders dalam laporan mengakui bahwa epidemiologi ini sangat aneh. Penyebarannya sangat cepat selinier dengan kecepatan lalu lintas, terlebih melalui pengiriman paket dan penumpang dari Singapura ke Pantai Timur Sumatera. HR Snijders mengemukakan bahwa *Pfeiffer's Bacillus* memainkan peran yang sama seperti *paratyphus B* dalam wabah virus pada babi. Meskipun begitu, dia mengatakan belum bisa memberikan statemen hasil akhir penelitiannya (GTNI, 1919: XXXV-XXXVIII).

Di Jawa dr. HH Hijlckema dan dr. Henri Williem Hoesen bekerjasama dalam penyelidikan ini di dalam Laboratorium Kesehatan Batavia. Selain melakukan penelitian di laboratorium, HH Hijlckema juga ditugaskan ke Semarang untuk melakukan penyelidikan lapangan untuk penyakit ini. Mereka memeriksa orang-orang sakit dan jenazah akibat influenza sekitar 50 orang. Dalam beberapa kasus, HH Hijlckema menemukan kuman di dahak atau cairan paru-paru, juga dalam lendir trakea dan bronkus. Komisi BGD menyebar kuisioner pada 83 rekan dokter di Hindia Belanda. Tujuannya untuk melihat gambaran klinis influenza di masing-masing daerah (*Rapport over de Influenza-Epidemi in Nederlandsch Indie 1918:116*). Para dokter di laboratorium

ini akhirnya menghasilkan sebuah tablet dan memproduksi hampir 100.000 butir untuk di bagikan kepada masyarakat luas. Kandungannya terdiri dari 0,250 aspirin, 0,150 pulvis doveri dan 0,100 camphora (*Extract from the yearly report over 1919 of the civil medical service in the Dutch East Indies dalam Mededelingen van BGD*) tahun 1922 dalam Priyanto Wibowo dkk, 2009: 109). Di Bandung, dr. R Moh Saleh mendadak menjadi sosok yang banyak diperbincangkan. Dia berhasil meracik obat anti-influenza yang dapat dikonsumsi oleh orang dewasa dan anak-anak. Dia membandrol obat tersebut dengan harga f. 2.50 per botol di luar ongkos kirim (Ravando, 2020, 295).

Sirkulasi pengetahuan para dokter di Hindia Belanda juga tidak terlepas dari beberapa penelitian para dokter di negara-negara lain. Para dokter di Hindia Belanda juga berupaya mengikuti perkembangan penelitian dari luar negeri, misalnya sebuah penelitian yang diadakan oleh Milton J. Rosenau, seorang dosen terkemuka di Universitas Harvard yang sedang melakukan eksperimen bersama para perwira Angkatan Laut dan Angkatan Darat serta para pejabat Layanan Sanitasi Amerika Serikat dan Amerika Utara. Penelitiannya untuk memperjelas cara penyebaran influenza yang kemudian diterbitkan dalam *Jurnal American Medical Association*. Selanjutnya penelitian dari Mc. Coy dan Rischeg juga melakukan hal serupa di San Fransisco (Milton J. Rosenau dalam GTNI 1919: 970- 973).

Pada wabah influenza ini, pemerintah Hindia Belanda terlihat lebih lambat dalam menangani. *Influenza Ordonantie* baru keluar pada Oktober 1920, dua tahun setelah penyebarannya di Hindia Belanda. Keterlambatan pemerintah mengambil kebijakan mencerminkan kebingungan pemerintah akan tindakan yang seharusnya dilakukan. Selain itu, persaingan dan konflik kepentingan antar-pengambil kebijakan di pemerintah pusat semakin memperumit keadaan dan menyebabkan kemoloran pelaksanaan kebijakan. Sementara itu, di beberapa wilayah sudah banyak diinformasikan kematian penduduk yang tidak sedikit, sehingga pada kondisi ini penduduk Hindia Belanda mencari sendiri jalan keluarnya. Mereka kembali banyak menggunakan obat-obatan herbal

tradisional dalam mencegah penularan wabah flu di Hindia Belanda (Priyanto, dkk. 2009: 203-206). Di tempat lain, upaya penduduk juga bermacam-macam dalam meredakan pandemi ini. Di Bandung misalnya, kerap diadakan ritual upacara meminta kepada dewa bumi untuk mengusir serangan penyakit para penduduk yang disertai dengan perarakan *toapekong*. Upacara ini diadakan dan dihadiri oleh penduduk bumiputera dan tionghoa. Mereka berbondong-bondong menghadiri prosesi dan upacara yang malah semakin memperluas penyebaran virus ke orang-orang yang sehat. Berbeda dengan di Mojowarno, para penduduk yang menganggap penyakit influenza disebabkan oleh roh halus atau kesalahan di masa lalu, akhirnya mereka memilih melakukan ziarah ke makam Kyai Abisai dan Kyai Emos untuk berdoa dan meminta perlindungan. Memotong sapi dan kerbau sebagai persembahan serta menabur kembang-kembang untuk sesajen. (Ravando, 2020: 272 dan 275).

## Wabah Lepra

Penyakit lepra atau kusta dikenal sebagai penyakit yang menggambarkan buruknya kondisi kesehatan penduduk Hindia Belanda terkait sanitasi, ketersediaan air dan kebersihan lingkungan. Menurut dr. Romer penyakit lepra yang sudah menjadi wabah sejak 1865 di Hindia Belanda dan diindikasikan juga mengancam orang-orang Eropa. Namun orang-orang Eropa tidak terlalu mempercayai bahwa penyakit ini akan menyerang mereka. Awalnya mereka mengira bahwa iklim yang berbeda dengan Belanda akan dapat menghindarkan mereka dari penyakit ini (van Bergen, 2018: 113). Hindia Belanda ternyata menjadi tempat yang subur juga dalam penyebaran lepra. Jumlah penderita lepra di Hindia Belanda memang belum diketahui secara pasti. Pada awal abad ke-20, tepatnya tahun 1905, laporan kolonial mencatat angka lebih dari 10.000 penderita di seluruh nusantara (van Bergen, 2018: 108). Persebarannya merata meliputi Kalimantan, Jawa, Sulawesi, Maluku hingga Papua. Jawa menempati jumlah penderita tertinggi karena terkait dengan demografinya yang padat (Dina dan Ita, 2018).

Terkait dengan pengendalian penyakit lepra, konferensi pertama International Leprosy pada 1897 memutuskan isolasi adalah cara terbaik dalam mencegah penyebaran penyakit ini di semua negara (Zachary Gussow dan George S. Tracy, 1970: 435). Pada abad ke-20 terdapat beberapa penanggulangan yang berusaha di tempuh oleh pemerintah. Pertama, Abendanon, yang pada waktu itu ditunjuk sebagai direktur OE&N pada akhir Mei 1901, mendesak para bupati memetakan skala penyakit lepra dan mengharuskan pelaporan setiap orang yang diduga menderita lepra tanpa memandang ras dan status. Pelaporan itu juga diikuti oleh pemeriksaan kesehatan oleh dokter kota, dokter sipil pemerintah atau dokter Djawa. Abendanon yang sejak awal mendukung politik etis, bersikeras agar kebijakan isolasi untuk para penderita lepra tidak membedakan pemberian perawatan dengan memandang status Eropa kaya ataupun pribumi. Kedua, Abendanon juga mengizinkan setiap dokter yang berkualifikasi, entah dari dokter Eropa maupun pribumi untuk mendiagnosis pasien yang menderita lepra. (van Bergen, 2018: 121). Meskipun demikian, pernyataannya banyak menimbulkan kontra di kalangan penduduk Eropa di Hindia Belanda.

Kebijakan ini terbukti diterapkan dan untuk pertama kalinya pemerintah kolonial mempercayakan program pengendalian lepra pada dokter pribumi. Pemerintah menunjuk dr. JB Sitanala untuk menyusun program pemberantasan lepra di Hindia Belanda. Sitanala merupakan seorang dokter pribumi lulusan STOVIA tahun 1912 dan melanjutkan studinya di Belanda pada 1923 dalam menekuni lepra. Pada saat yang sama Sitanala juga yang sedang memimpin sebuah perkumpulan yayasan pemeliharaan rumah anak lepra di Surabaya, yang awal pelaksanaannya dipimpin oleh dr. Soetomo. Perkumpulan serupa juga didirikan di Bandung untuk memperbaiki nasib para penderita kusta di wilayah Jawa Barat. Yayasan-yayasan ini memiliki majalah bulanan bernama "Pro Leproos". Tumbuh suburnya yayasan-yayasan untuk penderita lepra sudah gencar didirikan setelah tahun 1935. Setelah didirikannya *Koningin Wilhelmina Instituut voor Lepra Onderzoek* (KWJS) atau Institut Ratu Wilhelmina untuk Penelitian Lepra oleh pemerintah kolonial. Untuk pembiayaan kegiatan dan perawatannya,



yayasan-yayasan swasta di beberapa daerah itu mendapat suntikan dana secara eksklusif dari KWJS. Selain untuk perawatan penyakit lepra, dana-dana yang diberikan banyak dialokasikan pula untuk eksplorasi penelitian ilmiah tentang lepra. Sebelum pemerintah mendirikan KWJS sebenarnya di CBZ Semarang sudah ada bagian kusta tersendiri dengan laboratoriumnya. Ada dr. Sardjito dan Achmad Mochtar yang terlibat di laboratorium ini (*Mededelingen van den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch Indie*, 1936: No 1 :2).

Pemerintah kolonial Belanda sudah menyadari bahwa kualitas beberapa dokter pribumi mampu menandingi dokter Eropa. Karena itu pemerintah kolonial serius memberikan tanggung jawab pada tiga serangkai yang dikenal sebagai pahlawan pemberantasan lepra di Hindia Belanda. Sitanala ditunjuk sebagai penanggung-jawab *Leprabestrijding*, Dr. M Sardjito, sebagai kepala Laboratorium Lepra di Semarang dan Dr. A. Mochtar sebagai dokter kelas satu. Mereka saling bersinergi dalam melakukan penelitian dan menghasilkan beberapa karya tulisan tentang penanggulangan kusta yang diterbitkan di GTNI maupun buku. Pada langkah-langkah penanggulangannya, JB Sitanala banyak belajar dari penanganan Lepra di Filipina, meskipun sistem isolasi dan perawatan di Filipina diakui tidak terlalu banyak memberikan efek. Lalu Sitanala melirik Norwegia yang nampak menunjukkan hasil yang memuaskan dalam penanggulangan kusta. Mekanisme yang diterapkan oleh pemerintah adalah wajib lapor bagi siapa saja yang menderita kusta. Setelah masuk dalam rumah sakit kusta, penderita tidak boleh meninggalkan rumah sakit, terkecuali benar-benar sembuh. Kewajiban-kewajiban yang dibuat tidak ketat, setiap penderita kusta hanya diharuskan memiliki tempat tidur sendiri, kamar pribadi yang lebih baik, peralatan makan pribadi dan pada saat mencuci peralatan makan dan baju, cucian itu tidak boleh dicampur dengan cucian milik orang sehat.

Adopsi ide yang dipelajari Sitanala dari Norwegia terkait penanganan lepra menginspirasi dalam menjalankan programnya. Langkah pertama JB Sitanala ialah melakukan eksplorasi untuk mendapatkan data yang akurat tentang jum-

lah kasus sekaligus menilai pendapat masyarakat melalui pendekatan mereka dan metode yang nyaman yang diinginkan masyarakat. JB Sitanala sangat menghargai perasaan penduduk dan pintar melakukan pendekatan budaya dalam memberikan pemahaman pada penduduk pribumi tentang penyakit lepra. Hal ini nantinya berkaitan dengan kesadaran mereka untuk taat aturan pemerintah dan program-program yang akan dijalankan. Dalam hal eksplorasi, JB Sitanala lebih banyak menggunakan dokter pribumi karena dianggap memiliki kedekatan kultural dengan masyarakat dan masyarakat lebih terbuka untuk mengungkap-

Langkah kedua yang dilakukan JB Sitanala berkaitan dengan terapi yang akan dilakukan. Saat melakukan pendataan, para dokter harus menandai rumah dengan lingkaran merah pada peta yang nantinya akan memudahkan dalam memetakan pusat rawat jalan kusta yang akan didirikan. Kemudian setiap minggu mantri harus mengunjungi satu titik tersebut untuk mengumpulkan pasien, memberikan pil, dan membalut luka mereka.

Langkah ketiga ialah isolasi opsional seperti di Norwegia. Isolasi akan dilakukan pada penderita yang sudah berada pada kondisi parah dan pasien dengan lapang dada ingin diisolasi di barak-barak yang telah disediakan oleh pemerintah (*Nota over de Bestrijding der Lepra in Nederlandsch Indie*, dalam *Mededelingen van den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch Indie* 1936: 13-17). Isolasi atau lumrah disebut karantina sebenarnya pertama kali diperkenalkan pada 1377 di Dubrovnik Pantai Dalmatian Kroasia. Dubrovnik merupakan pelabuhan Mediterania yang menjadi tempat untuk menghentikan mobilitas bagi para pedagang dan awak-awak kapal yang terinfeksi wabah. Lalu mereka yang terindikasi wabah akan dilarikan ke Lazaretto atau rumah sakit permanen juga mulai dibuka oleh Republik Venesia pada 1423 di pulau kecil Santa Maria (Eugenia Tognotti, 2013: 255) Dalam menerapkan program-programnya, Sitanala sangat memperhatikan perasaan penduduk Hindia Belanda. Kebanyakan penduduk enggan untuk diisolasi karena waktu yang dibutuhkan dalam isolasi tidak sebentar, tidak hanya membutuhkan

waktu berminggu-minggu tetapi bisa bertahan dalam hitungan dekade. Karena itu keputusan isolasi menjadi sangat ekstrim dan cukup memakan anggaran yang besar.

Seketika keberhasilan Sitanala menjadi bahan perbincangan di kalangan dokter Eropa dan pribumi. Pendidikan yang diterimanya membawa perubahan besar terhadap kondisi masyarakat dan bangsanya. Rasa empati Sitanala menurut rekan-rekannya sudah dipupuk sejak dia lulus dari STOVIA pada tahun 1912-1913, dia melakukan ekspedisi ilmiah ke Papua Nugini Selatan. Karena keahliannya dalam penanganan wabah lepra, JB Sitanala diminta oleh Menteri Urusan Koloni, J.C Kongsberger untuk semakin memperdalam wabah penyakit lepra di beberapa negara di Eropa seperti Bergen dan Norwegia. (Hesselink, 2018: 126). Pengembangan pengetahuannya tentang lepra dia pelajari tidak hanya di Hindia Belanda, tetapi dari berbagai wilayah. Laporan *Indische Courant* mengatakan bahwa pada September 1934 dia melakukan perjalanan ke Filipina, lalu berlanjut ke Jepang atas permintaan *National Leprosy Series* Jepang yang berafiliasi dengan asosiasi dokter terkenal Mitsoeda dan Hajashi. Kemudian dia melanjutkan perjalanan ke Cina lalu ke India. Disana dia pertama kali melakukan kunjungan dari Calcutta ke Bankura, salahsatu pusat pengendalian kusta terbesar. Selain itu dia ke Purulia, Chandkuri, Dichpali, Chingliput dan terakhir ke Bombay (Het Vaderland, 13 September 1934).

Atas prestasi dan keberhasilannya, Sitanala mendapat sanjungan dari Dr. H W Wade, Dokter dari *Leonard Wood Memorial Culion Filipina*, sebuah lembaga Amerika yang membiayai penelitian tentang lepra di Filipina. Ia yang mengakui efektifitas metode dr. Sitanala yang disampaikan pada akhir kongres *Far Eastern Association of Tropical Medicine* di Singapura pada September 1923 (GTNI 20 Juni 1939 ). Naiknya Sitanala menjadi Kepala Departemen Penanggulangan Kusta dianggap sebagai lambang peningkatan pengaruh dokter pribumi yang tidak hanya menjadi seorang dokter yang mampu mengobati, tetapi juga mampu menjadi ujung tombak pengambilan kebijakan pemerintah ketika menanggulangi wabah.

Tahun 1940, Sitanala mendapat penghargaan Kesatria Ordo Wasa Kelas 1 dari Raja Swedia. Yang diserahkan di Semarang oleh wakil konsulat Swedia di Semarang, ir. F.EC Everts. Penghargaan ini diberikan oleh pemerintah Swedia atas kerja keras Sitanala selama Mei, Juni dan Juli 1938 karena mampu memberikan materi ilmiah untuk Profesor Reenstierna dari Universitas Uppsala, Swedia selama mempelajari penanggulangan lepra di laboratoriumnya (*Het nieuws van den voor Nederlandsch Indie* 24 Januari 1940).

## PENUTUP

Sejak awal abad ke-20, meningkatnya keterlibatan dokter pribumi dalam lapangan kesehatan pada masa kolonial tidak terlepas dari dua faktor, yaitu adanya revolusi kurikulum, fasilitas, serta guru-guru spesialis di STOVIA dan akibat kemunculan *Vereeniging van Inlandsche Geneeskundige*. Dua elemen ini berkontribusi menambah kepercayaan diri para dokter pribumi untuk menuntut setara dari segi materi maupun otoritas kerja dalam lapangan kesehatan. Saat wabah-wabah melanda Hindia Belanda pada awal abad-20, kuantitas dokter dalam BGD masih sangat minim. Para dokter dituntut saling bersinergi selama penanggulangan wabah pes, lepra dan influenza. Awalnya dalam jurnal dan laporan BGD para dokter Eropa mendominasi penelitian-penelitian wabah. Namun mulai 1900-an dokter-dokter pribumi semakin memasuki lapangan kesehatan kolonial hingga dapat memengaruhi dan ikut menentukan kebijakan pemerintah. Selama wabah pes di Malang, dr. Cipto naik menjadi tokoh kunci dan dikenal sebagai dokter yang berani terjun langsung ke lapangan di saat dokter-dokter Eropa lebih memilih bekerja di laboratorium. Pada wabah Influenza, dr. Rivai banyak bersuara di *Volksraad* menuntut tanggung jawab dan perhatian pemerintah atas wabah yang lamban di tangani. Selanjutnya pada penanggulangan wabah Lepra, dr. Sitanala mampu memengaruhi kebijakan secara nasional. Bahkan kiprahnya terdengar gaungnya di forum-forum kesehatan dunia internasional. Dia dipuji sebagai dokter yang cemerlang dan berhasil menangani wabah lepra di Hindia Belanda. Para dokter pribumi dengan kuantitas yang minim membuktikan diri

bahwa mampu bersinergi dengan kualitas mereka baik di lapangan kesehatan, di *volksraad* maupun di ranah penelitian dan program kesehatan.

## PUSTAKA ACUAN

- Baha'udin. (2005). "Dari Subsidi Hingga Desentralisasi: Kebijakan Pelayanan Kesehatan Kolonial di Jawa (1906-1930an)". Tesis Ilmu Sejarah UGM
- Chandra, Siddharth. (2013). Mortality from the influenza pandemic of 1918-19 in Indonesia. *Population Studies* Vol. 67, n0 2,p. 185-193.
- De Java Post. (1909, 14 Agustus)
- Dwikurniarini, Dina dan Mutiara Dewi, Ita. (2018). Penyakit Kusta di Bangkalan pada Abad ke 20. *Mozaik (Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial dan Humaniora)* Vol 9, No 1.
- Extra Number van het Orgaan VIG, Aflevering 2 volume 1919
- Hanafiah, dkk. (1976). *125 Tahun Pendidikan Dokter di Indonesia 1851-1976*. Jakarta: Panitia Peringatan 125 tahun Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran UI.
- Hesselink, Liesbeth. (2011). *Healers on the Colonial Market (Native Doctors and Midwives in the Dutch East Indies)*. Leiden: KITLV Press
- Het Vaderland*, 13 September 1934
- Het nieuws van den voor Nederlandsch Indie* 24 Januari 1940
- Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië* tahun 1919
- Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch-Indië*, 20 Juni 1939
- Gussow, Zachary and George S. Tracy. (1970) Stigma and The Leprosy Phenomenon : The Social History of a Disease in the Nineteenth and Twentieth Centuries. *Bulletin of the History of Medicine* September-October 1970, vol 44 No. 5. Pp 425-449.
- Lie, R. (2020). Perang Melawan Influenza: Pandemi Flu Spanyol di Indonesia Masa Kolonial, 1918-1919. Jakarta: Kompas Media Nusantara.
- Luwis, Syefri. (2020). *Epidemi Pes di Malang 1911-1916*. Yogyakarta : Penerbit Kendi.
- Mededelingen van den BGD in Ned Indie*, 1913
- Mededelingen van den Dienst der Volksgezondheid in Nederlandsch Indie*,1936
- Mededelingen BGD in Nederlandsch Indie*, 1938
- Mededelingen van Den Burgerlijken Geneeskundigen Diens in Nederlandsch Indie* 1920
- Pols, H. (2019). *Merawat Bangsa (Sejarah Pergerakan Para Dokter di Indonesia)*. Jakarta: Penerbit Kompas.
- Safitry, Martina. (2016). *Dukun dan Mantri Pes: Praktisi Kesehatan Lokal di Jawa pada Masa Epidem Pes 1910-1942*. Tesis Ilmu Sejarah Universitas Gadjah Mada.
- Sarekat Islam Congres (4e Nationaal Congres) 26 Oktober-2 November 1919". *Landsdrukkerij-Weltevreden* 1920.
- Tognotti, Eugenia. (2013) Lesson from the History of Quarantine, from Plague to Influenza A. *Historical Review in Emerging Infectious Disease*. Vol. 19, No 2, February 2013.
- Van Bergen, Leo. (2018). *Uncertainty, Anxiety, Frugality : Dealing with Leprosy in the Dutch East Indies*. Singapore : NUS Press.
- Voksrraad: Begroting van Nederlandsch Indie voor het diensjaar 1919 : Algemeene beschouwingen*. Pertemuan ke-6 pada 20 Juni 1918
- W.K Tehupeior. (1936). "Onze Vereeniging: De voorgeschiedenis van hare opricting en hare kleuterjaren" *Orgaan van de VIG, Jubileumnummer 1911-1936*. Batavia: Kolff A. Co.
- Wibowo, Priyanto, dkk. (2009). *Yang Terlupakan : Pandemi Indluenza 1918 di Hindia Belanda*. Jakarta : Departemen Sejarah FIB UI-UNICEF Jakarta-Komnas FBPI
- Yani, W. S. (2020) *Indonesian Authors in Geneeskundige Tijdschrift voor Nederlandsch Indie as a Constructor of Medical Science*. Paper dipresentasikan dalam workshop The Construction of Indonesian Knowledge Cultures Since Independence pada 5 February 2020

# DINAMIKA INDUSTRI MUSIK INDIE JAKARTA DAN WILAYAH SEKITARNYA PADA MASA PANDEMI COVID-19 GELOMBANG PERTAMA

## *DYNAMIC INDIE JAKARTA MUSIC INDUSTRY AND THE SURROUNDING AREA IN THE FIRST WAVE COVID-19 PANDEMIC TIME*

**Puji Hastuti**

*Departemen Antropologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Indonesia*

*E-mail: puji.hastuti01@ui.ac.id*

### **ABSTRACT**

*This paper intends to describe the dynamics of workers' lives in Jakarta's indie music industry and the surrounding areas, which experienced changes during the Covid-19 Pandemic. The indie music industry ecosystem, which previously relied heavily on physical and communal meeting spaces, adapted social restrictions due to the pandemic. This condition attracts the author's attention to observing the dynamics of the indie music industry work workers' lifesaving these limitations. In the period of stipulating social restriction policies to adapting new habits or known as new normal, the standard observations on indie music industry workers displayed on several digital media platforms. As a result, the authors found the movement of indie music industry workers in Jakarta and its surroundings in facing the Covid-19 pandemic covering the following aspects: 1) communal solidarity, 2) habitual adapt chronic exploration of digital collaborative space and 4) a period of contemplation and producing new works. The conclusion from these findings is that the Covid-19 pandemic has re-developed the spirit of communality, commonality at the same time. It also presents a gap for the absence of the state's role in ensuring decent music industry workers' welfare. Besides the strengthening of workers' communal ties, the pandemic's limitations have opened up other business opportunities for music industry workers. Finally, the Covid-19 can be a momentum for a new era of the indie music industry ecosystem, Jakarta and even other cities in Indonesia with advances in digital performance technology and the release of works both audio and video that can be worked on using simple recording media from home or home recording.*

**Keyword:** *music workers industry, Jakarta indie music, Covid-19, adaptation, digital communal space*

### **ABSTRAK**

Tulisan ini bermaksud menguraikan dinamika kehidupan pekerja industri musik indie Jakarta dan sekitarnya yang mengalami perubahan pada masa Pandemi Covid-19. Ekosistem industri musik indie yang semula sangat mengandalkan ruang pertemuan fisik dan komunal harus beradaptasi dengan kebijakan pembatasan sosial akibat pandemi. Kondisi tersebut menarik perhatian penulis untuk mengamati dinamika kehidupan para pekerja industri musik indie dalam menghadapi keterbatasan tersebut. Dalam kurun waktu pemberlakuan kebijakan pembatasan sosial hingga adaptasi kebiasaan baru atau dikenal dengan *new normal*, penulis melakukan pengamatan terhadap kegiatan pekerja industri musik indie yang ditampilkan dalam beberapa platform media digital. Hasilnya, penulis menemukan geliat para pekerja industri musik indie Jakarta dan sekitarnya dalam menghadapi pandemi Covid-19 mencakup beberapa aspek berikut: 1) solidaritas komunal, 2) adaptasi kebiasaan, 3) eksplorasi ruang komunal digital, dan 4) masa kontemplasi dan menghasilkan karya baru. Kesimpulan dari hasil temuan tersebut, pandemi Covid-19 telah menumbuh-kembangkan kembali semangat komunalitas, meski sekaligus juga menampilkan celah bagi absennya peran negara terhadap jaminan kesejahteraan layak bagi pekerja industri musik. Di samping menguatnya ikatan komunalitas pekerja, keterbatasan yang dialami akibat masa-masa pandemi justru membuka peluang usaha lain bagi para pekerja industri musik. Terakhir, pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi era baru ekosistem industri musik indie Jakarta bahkan kota-kota lainnya di Indonesia dengan kemajuan teknologi pertunjukan digital dan rilisan karya baik audio maupun video yang dapat digarap menggunakan media rekam sederhana dari rumah atau *home recording*.

**Kata kunci:** *pekerja industri musik, musik indie Jakarta, pandemi Covid-19, adaptasi, ruang komunal digital*

## PENDAHULUAN

Kemunculan pandemi Covid-19 di akhir tahun 2019 telah mempengaruhi kehidupan penduduk dunia pada seluruh lapisan pekerjaan. Termasuk, para pekerja yang bergelut dalam industri hiburan musik. Selama ini, para pekerja yang terlibat dalam ekosistem penyelenggaraan pertunjukan musik amat mengandalkan kerumunan penonton secara langsung. Terlebih para pekerja industri musik yang bergerak pada jalur indie, pertemuan fisik menjadi ruang interaksi bagi musisi dan komunitas pendengarnya untuk mengukuhkan ikatan dan nilai-nilai yang disampaikan dalam karya musik yang mereka ciptakan.

Para pekerja di industri musik indie Jakarta dan sekitarnya tidak luput dari dampak pandemi Covid-19. Sebelum kehadiran pandemi, ekosistem industri musik indie tidak bisa terlepas dari kegiatan pertemuan fisik yang menciptakan adanya kerumunan manusia dalam penyelenggaraannya, baik dalam kegiatan pertunjukan konser musik maupun dalam upaya promosi karya. Tidak hanya berorientasi pada distribusi komoditas, pertemuan fisik menjadi aktivitas “sakral” bagi musisi indie dan komunitas pendengarnya untuk mengukuhkan ikatan serta menyampaikan nilai-nilai dalam karyanya. Sehingga praktis, saat kegiatan berkerumun menjadi aktivitas yang dilarang, sumber pendapatan para pekerja pada ekosistem ini menjadi terhenti. Berbulan-bulan ekosistem industri musik harus mengalami kondisi yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya. Rantai pendapatan terhenti akibat hilangnya kerumunan penonton (*crowd*) dan panggung konser musik.

Karena itu, meskipun pandemi Covid-19 merupakan fenomena yang bersifat biologis dan epidemiologis, bukan berarti lepas dari aspek pengkajian ilmu sosial dan kemanusiaan. Persitiwa pandemi yang telah dihadapi oleh penduduk secara global telah mengubah tatanan hidup dalam masyarakat, termasuk para pekerja musik. Oleh karena itu, disamping pentingnya melihat pengaruh prevalensi virus yang tersebar, diperlukan pengkajian epidemiologi yang melibatkan ilmu antropologi baik secara pendekatan maupun metode (Lapau & Saifuddin, 2015). Di samping itu, baik antropologi maupun epidemiologi, keduanya sama-sama mengkaji persoalan yang terjadi dalam skala masyarakat

atau populasi manusia. Dengan demikian, untuk menelisik persoalan yang dihadapi oleh populasi para pekerja musik akibat peristiwa epidemiologi penyebaran Covid-19, pengkajian secara antropologis menjadi penting dilakukan.

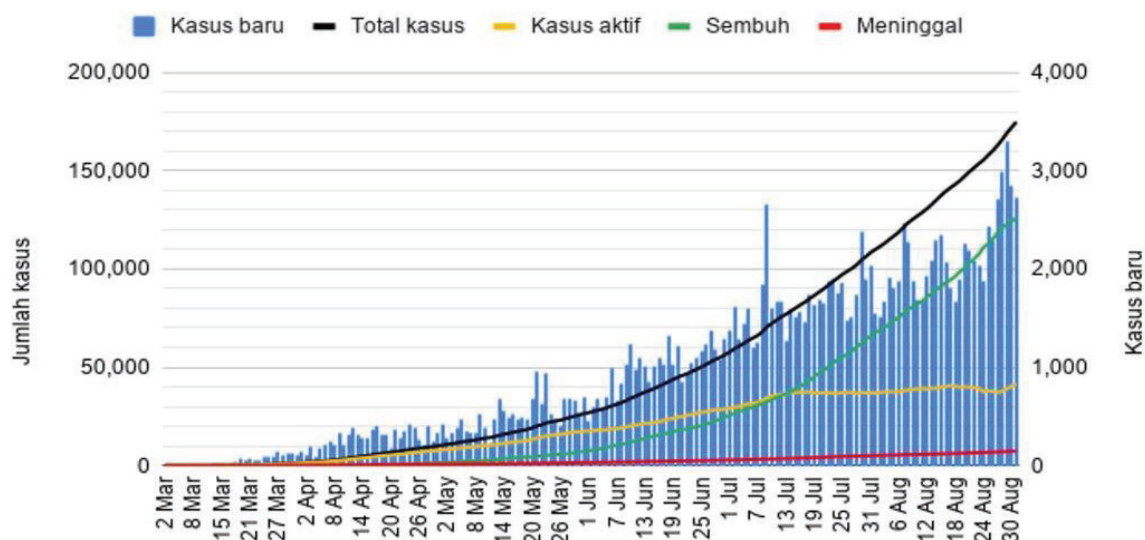
Peristiwa wabah penyakit telah mewarnai fase kehidupan populasi di masa lalu. Evolusi penyakit melalui penyebaran virus dipengaruhi oleh perkembangan peradaban manusia dan perubahan tatanan ekosistem lingkungan hidup (Foster & Anderson, 2008). Dalam perkembangannya, terjadi berbagai bentuk mutasi virus yang menimbulkan beragam penyakit baru yang tidak ditemukan pada peradaban masyarakat sebelumnya. Sebagaimana penemuan Covid-19, yang menurut para ahli epidemiologi merupakan virus jenis baru. Belum dapat diketahui secara pasti, dari mana virus tersebut berasal, meski organisasi kesehatan dunia, WHO (2020) berasumsi bahwa penyakit ini berasal dari transmisi hewan kelelawar, tapi sebenarnya penelusuran saintifik masih belum berakhir. Asal muasal virus yang masih misteri telah menciptakan evolusi penyakit modern penuh dengan tanda tanya. Ironi penjelasan virus pada kehidupan modern manusia namun masih belum sepenuhnya terjawab mengakibatkan berbagai macam gejala yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Sementara itu, prevalensi penduduk terpapar virus masih terus bergulir telah mengakibatkan seluruh sektor kehidupan manusia terganggu, tidak terkecuali apa yang terjadi ekosistem industri musik.

Meskipun dikatakan bahwa pandemi Covid-19 merupakan peristiwa khusus dan dapat digolongkan sebagai wabah baru, tetapi sebenarnya sejarah wabah dan pengaruhnya pada industri musik telah dialami pada masa lalu. Majalah *Musical Courier*, pada Oktober 1918 mencatat peristiwa “Spanish Flu” yang menyebabkan banyaknya tempat pertunjukan musik yang tutup dan terjadinya banyak pembatalan perjalanan konser selama pandemi influenza tersebut (Robin, 2020). Serupa dengan yang dialami pada masa pandemi Covid-19, penduduk menjalani masa karantina berdiam di rumah dalam upaya menghentikan penyebaran virus dan geliat industri musik pada saat itu mengalami inovasi penyesuaian. Karena itu, penelitian ini berupaya untuk merekam fenomena pada fase awal ekosistem industri musik dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Pandemi Covid-19 menjadi salah satu fase yang akan membentuk ekosistem industri musik Indonesia untuk berkembang dan beradaptasi. Dalam perjalanannya, ekosistem industri musik di Indonesia telah menghadapi berbagai persoalan seperti kebijakan yang mengekang dan melarang proses berkarya oleh rezim penguasa, pasal karet yang mengancam kebebasan berekspresi, ketidak-

jelasan payung hukum mengenai aturan mengenai royalti, dan pembajakan karya cipta musisi. Peristiwa pandemi Covid-19 seakan menjadi momentum yang menantang bagi seluruh pihak dalam ekosistem industri musik, yang terdiri atas seniman, pekerja pendukung, korporasi swasta dan pemangku kebijakan untuk berkolaborasi dalam menghadapi persoalan yang selama ini

### COVID-19 di Indonesia (31 Agustus 2020)



(sumber: kawalcovid19.id, 2020)

**Gambar 1.** Grafik Kasus Positif Baru Covid-19 pada 31 Agustus 2020

**Tabel 1.** Persebaran Kasus pada Provinsi di Indonesia pada 31 Agustus 2020

**LAPORAN MEDIA HARIAN COVID19 TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 PUKUL 12.00 WIB**  
data dapat berubah sesuai hasil verifikasi

| NO | PROVINSI                            | JUMLAH KASUS TANGGAL 31 AGUSTUS 2020 |                 |                 | JUMLAH KASUS SEMBUH |                 |               | JUMLAH KASUS MENINGGAL |                 |             |
|----|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------|------------------------|-----------------|-------------|
|    |                                     | S/D 30 AGUSTUS 2020                  | 31 AGUSTUS 2020 | KASUS KUMULATIF | S/D 30 AGUSTUS 2020 | 31 AGUSTUS 2020 | KUM           | S/D 30 AGUSTUS 2020    | 31 AGUSTUS 2020 | KUM         |
| 1  | ACEH                                | 1600                                 | 33              | 1633            | 246                 | 66              | 312           | 61                     | 2               | 63          |
| 2  | BALI                                | 5078                                 | 129             | 5207            | 4355                | 79              | 4434          | 65                     | 3               | 68          |
| 3  | BANTEN                              | 2872                                 | 31              | 2903            | 2018                | 25              | 2043          | 108                    | 0               | 108         |
| 4  | BANGKA BELITUNG                     | 239                                  | 0               | 239             | 217                 | 6               | 223           | 2                      | 0               | 2           |
| 5  | BENGKULU                            | 343                                  | 0               | 343             | 182                 | 4               | 186           | 25                     | 0               | 25          |
| 6  | DI YOGYAKARTA                       | 1397                                 | 28              | 1425            | 976                 | 50              | 1026          | 37                     | 2               | 39          |
| 7  | DKI JAKARTA                         | 39037                                | 1049            | 40086           | 30134               | 804             | 30938         | 1183                   | 14              | 1197        |
| 8  | JAMBI                               | 302                                  | 0               | 302             | 149                 | 7               | 156           | 5                      | 0               | 5           |
| 9  | JAWA BARAT                          | 10918                                | 145             | 11063           | 6093                | 57              | 6150          | 265                    | 8               | 273         |
| 10 | JAWA TENGAH                         | 13785                                | 179             | 13964           | 8873                | 100             | 8973          | 990                    | 8               | 998         |
| 11 | JAWA TIMUR                          | 33220                                | 323             | 33543           | 25756               | 383             | 26139         | 2349                   | 23              | 2370        |
| 12 | KALIMANTAN BARAT                    | 645                                  | 0               | 645             | 540                 | 17              | 557           | 5                      | 0               | 5           |
| 13 | KALIMANTAN TIMUR                    | 4120                                 | 124             | 4244            | 2318                | 72              | 2390          | 160                    | 1               | 161         |
| 14 | KALIMANTAN TENGAH                   | 2507                                 | 41              | 2548            | 1976                | 22              | 1998          | 108                    | 0               | 108         |
| 15 | KALIMANTAN SELATAN                  | 8256                                 | 37              | 8293            | 6246                | 42              | 6288          | 353                    | 1               | 354         |
| 16 | KALIMANTAN UTARA                    | 382                                  | 7               | 389             | 325                 | 4               | 329           | 2                      | 0               | 2           |
| 17 | KEPULAUAN RIAU                      | 900                                  | 90              | 990             | 552                 | 33              | 575           | 37                     | 1               | 38          |
| 18 | NUSA TENGGARA BARAT                 | 2728                                 | 14              | 2742            | 2020                | 27              | 2047          | 157                    | 2               | 159         |
| 19 | SUMATERA SELATAN                    | 4401                                 | 53              | 4454            | 3131                | 26              | 3157          | 250                    | 2               | 252         |
| 20 | SUMATERA BARAT                      | 2068                                 | 89              | 2157            | 1196                | 27              | 1223          | 56                     | 0               | 56          |
| 21 | SULAWESI UTARA                      | 3833                                 | 15              | 3848            | 2702                | 36              | 2738          | 156                    | 0               | 156         |
| 22 | SUMATERA UTARA                      | 6769                                 | 58              | 6827            | 3906                | 60              | 3966          | 311                    | 3               | 314         |
| 23 | SULAWESI TENGGARA                   | 1565                                 | 1               | 1566            | 1049                | 23              | 1072          | 28                     | 2               | 30          |
| 24 | SULAWESI SELATAN                    | 11870                                | 108             | 11978           | 9160                | 87              | 9247          | 360                    | 0               | 360         |
| 25 | SULAWESI TENGAH                     | 241                                  | 2               | 243             | 239                 | 1               | 220           | 8                      | 0               | 8           |
| 26 | LAMPUNG                             | 389                                  | 6               | 395             | 324                 | 5               | 329           | 14                     | 0               | 14          |
| 27 | RIAU                                | 1739                                 | 107             | 1846            | 965                 | 43              | 1008          | 30                     | 4               | 34          |
| 28 | MAALUKU UTARA                       | 1858                                 | 2               | 1860            | 1579                | 0               | 1579          | 66                     | 0               | 66          |
| 29 | MAALUKU                             | 1832                                 | 25              | 1857            | 1102                | 56              | 1158          | 33                     | 0               | 33          |
| 30 | PAPUA BARAT                         | 752                                  | 55              | 807             | 563                 | 6               | 569           | 13                     | 0               | 13          |
| 31 | PAPUA                               | 3796                                 | 0               | 3796            | 3114                | 0               | 3114          | 43                     | 0               | 43          |
| 32 | SULAWESI BARAT                      | 393                                  | 2               | 395             | 270                 | 0               | 270           | 7                      | 0               | 7           |
| 33 | NUSA TENGGARA TIMUR                 | 177                                  | 0               | 177             | 156                 | 0               | 156           | 2                      | 0               | 2           |
| 34 | GORONTALO                           | 2041                                 | 0               | 2041            | 1773                | 16              | 1789          | 54                     | 0               | 54          |
|    | Dalam Proses Verifikasi di Lapangan | 0                                    | 0               | 0               | 0                   | 0               | 0             | 0                      | 0               | 0           |
|    | <b>TOTAL</b>                        | <b>172053</b>                        | <b>2743</b>     | <b>174796</b>   | <b>124185</b>       | <b>1774</b>     | <b>125959</b> | <b>7943</b>            | <b>74</b>       | <b>7417</b> |

Sumber: covid19.kemkes.go.id, 2020

telah dialami. Justru di tengah keterbatasan, apakah kolaborasi dapat menjadi jalan keluar untuk melewati masa-masa sulit selama terdampak wabah ini.

Di Indonesia, tingkat penyebaran Covid-19 masih tergolong dalam fase yang mengkhawatirkan. Menurut data grafik yang disajikan akun instagram @kawalcovid19.id, Indonesia mengumumkan 2.743 kasus positif baru Covid-19 pada tanggal 31 Agustus 2020. Sebaran Covid-19 telah meluas hingga 27 provinsi di Indonesia, meski yang menjadi klaster sentral adalah Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Timur, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Jawa Barat, dan Provinsi Bali. Selain pada lima provinsi yang baru saja disebutkan, Provinsi Kalimantan Timur yang merupakan calon ibu kota baru bagi Indonesia juga masih mengalami kemunculan kasus baru yang cukup tinggi, yakni sebanyak 124 (covid19.kemkes.go.id, 2020).

Berdasarkan grafik dan tabel yang telah disajikan, kondisi penambahan kasus baru masih digolongkan dalam angka yang tinggi. Pekerja industri musik masih dihadapkan dalam kondisi yang belum sepenuhnya aman untuk benar-benar melakukan kegiatan pertunjukan fisik yang mendatangkan kerumunan manusia. Apabila dilihat pada sebaran kasus positif baru, provinsi DKI Jakarta masih menempati urutan pertama atau sekitar 42,4 % dari total kasus positif baru pada tanggal 31 Agustus 2020. Sehingga, DKI Jakarta masih belum kondusif sebagai tepat bagi dilaksanakannya pertunjukan musik yang mendatangkan *crowd*.

Selain menjadi pusat pemerintahan, DKI Jakarta juga menjadi pusat dari industri musik Indonesia. Hampir seluruh musisi lokal yang tersebar di seantero nusantara, memiliki orientasi untuk merantau ke Jakarta dan hal tersebut sekaligus menjadi penanda keberhasilan dari karir bermusik musisi tersebut. Hal senada juga diakui oleh Nadia Yustina, dari Koalisi Seni Indonesia dalam konferensi pers KMI 2019 (Konferensi Musik Indonesia), "*Provinsi DKI Jakarta masih merupakan pusat dari industri musik Indonesia*" (kompas.com, 2019). Meskipun pernyataan tersebut menjadi problematik, hal demikian mengisyaratkan bahwa industri

pertunjukan musik masih terpusat di kota besar dan belum benar-benar memiliki skema jejaring koneksi luas. Padahal, seiring dengan capaian kemajuan teknologi dan informasi, seharusnya membuka akses ketersebaran jejaring industri musik dan mengubah orientasi karir bermusik pada wilayah yang dianggap perifer. Akan tetapi, dalam penelitian ini, penulis membatasi pengamatan terhadap pekerja industri musik yang ada di Jakarta dan wilayah sekelilingnya dengan tujuan melihat potensi perubahan adaptasi, inovasi dan orientasi karir musisi yang diakibatkan oleh peristiwa pandemi Covid-19. Penentuan lokus wilayah dimaksudkan sebagai titik awal pijakan agar subjek penelitian menjadi terfokus, tetapi tidak memberi batasan ruang pengamatan apabila subjek penelitian bergerak merentang batas provinsi maupun negara melalui platform pertunjukan digital.

Secara spesifik, penelitian ini mengambil fokus subyek industri musik indie dalam menghadapi keterbatasan akibat pandemik Covid-19. Alasan mengambil subyek penelitian musik indie karena dasar yang membentuk ekosistem industri ini adalah komunitas yang terikat ide dan seperangkat nilai prinsipil yang diperjuangkan. Selain itu, musik indie juga sering dikaitkan dengan cara produksi dan promosi hasil karya yang bersifat mandiri (*independent*), terlepas dari skema industri musik besar (*mainstream music industry*). Bagi Fonarow (2006: 25), definisi "*indie*" terkait dengan "*indie community*", "*indie music*" dan *indie's "ideological foundation"*. Dalam upayanya menguraikan pengertian musik indie, Fonarow (2006: 26) membaginya dalam lima ciri sebagai berikut: 1) jenis produksi musik yang berafiliasi dengan label rekaman "*independent*" dan mode distribusi yang juga dilakukan secara "mandiri", 2) "*genre music*" memiliki kekhususan "*sound*" dan "*style*", 3) menyuarakan pesan (etos) tertentu, 4) bersifat kritis, 5) bersifat kontras dengan genre lainnya seperti, "pop arus utama (*mainstream pop*)", "*dances*", "*blues*", "*country*", atau "*classical*". Keunikan musik indie dibandingkan dengan industri musik lainnya ialah pada kelekatan hubungan antara musisi, karya musik dan komunitas audiens. Oleh karena itu, komunitas indie ikut berkontribusi dalam pembentukan diskursus yang terjadi dari proses

berkarya musisi sekaligus dan juga bagaimana karya tersebut didistribusikan.

Dalam rangka mengamati apa yang terjadi pada industri musik indie pada fase awal pandemi Covid-19, penulis melakukan pengamatan melalui beberapa platform media digital (Instagram dan Twitter) dalam kurun waktu ditetapkannya kebijakan pembatasan sosial hingga masa adaptasi kebiasaan baru atau dikenal dengan *new normal* yang dimulai sejak pertengahan Maret hingga akhir Agustus. Dalam kurun waktu tersebut, muncul beberapa pertanyaan yang menjadi pemicu tindakan observasi terus penulis lakukan yakni 1) Apakah wabah Covid-19 memutus mata rantai ekosistem pekerja industri musik di Indonesia dan bagaimana hal tersebut terjadi? 2) Jika ekosistem masih berjalan, bagaimana adaptasi yang dilakukan oleh para pekerja musik indie? 3) Apakah peristiwa pandemi Covid-19 dapat menjadi momentum bagi era baru industri musik indie Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia dan bagaimana hal tersebut terjadi? Hasilnya, penulis menemukan dinamika ekosistem para pekerja industri musik indie pada fase awal pandemik Covid-19 terdiri atas beberapa tahapan yakni terguncang, resistensi, dan adaptasi. Dari tahapan yang dialami pada fase awal pandemi Covid-19, penulis melihat bahwa rantai ekosistem masih dapat dikatakan berjalan meskipun harus mengalami berbagai penyesuaian. Bahkan pada kondisi kesulitan masif akibat pandemi yang dialami oleh seluruh lapisan ekosistem industri musik indie telah memunculkan aspek sebagai berikut: 1) solidaritas komunal, 2) kapabilitas adaptasi kebiasaan secara kreatif, 3) eksplorasi ruang komunal digital, 4) masa kontemplasi, menghasilkan karya baru, dan 5) kemungkinan perubahan (perluasan) orientasi pasar musik indie yang akan diuraikan dalam bagian pembahasan.

## PEMBAHASAN

### Wabah Covid-19 yang Mengguncang Pekerja Industri Musik Indie

Kemunculan wabah Covid-19 telah mengguncang ekosistem pekerja industri musik di Indonesia. Meskipun kemunculan wabah ini terjadi di akhir tahun 2019, akan tetapi kasus penyebaran

pandemi Covid-19 baru teridentifikasi pada Maret 2020. Bermula pada 2 Maret 2020, pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan dua warga negara Indonesia positif terpapar virus Corona. Setelahnya, organisasi kesehatan dunia WHO, pada 11 Maret 2020 menyatakan bahwa Covid-19 telah menjadi pandemi global. Pada hari yang sama saat WHO mengumumkan bahwa Covid-19 telah menjadi pandemi global, Indonesia mengumumkan kematian pertama akibat virus corona yaitu pasien kasus-25, seorang warga negara asing yang menjalani perawatan di RS Sanglah, Bali (kompas.com, 2020a). Setelahnya, bagaikan bola salju, jumlah kasus penderita yang positif covid-19 menjadi berlipat ganda dalam hitungan hari.

Pemerintah mulai melakukan respons untuk memutus mata rantai penyebaran virus Covid-19 dengan mengenalkan kebijakan pembatasan sosial atau *social distancing* pada masyarakat sesuai dengan himbauan WHO. Bermula dari kebijakan *social distancing* diberlakukan oleh pemerintah provinsi (Pemprov) DKI Jakarta, terhitung sejak 14 Maret 2020, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menutup sekolah dan tempat wisata di wilayah Jakarta. Merasa himbauan "*social distancing*" masih belum efektif memutus mata rantai penyebaran, Presiden Indonesia, Joko Widodo memberikan arahan bagi Gubernur di 34 provinsi untuk mengimbau warganya melakukan pembatasan fisik atau "*physical distancing*" (setkab.go.id, 2020). Teknis implementasi himbauan "*physical distancing*" diserahkan pada masing-masing provinsi memiliki arti bahwa pemerintah pusat menyerahkan tanggung jawab pada pemerintah daerah memiliki pengertian bahwa pemerintah nasional belum mampu menjamin kehidupan masyarakatnya apabila kebijakan "*lockdown-nasional*" yang diambil. Penyerahan wewenang pada pemerintah daerah menjadi karantina wilayah berimplikasi pada implementasi kebijakan penanggulangan pandemi yang sifatnya tidak dapat serempak karena bertumpu pada sejauh mana kemampuan masing-masing daerah untuk menjamin stabilitas sosial dan ekonomi masyarakatnya.

Akhirnya, penerapan kebijakan *physical distancing* diperkuat melalui kebijakan Pembatasan



Sosial Berskala Besar (PBBB). Kebijakan PSBB diatur dalam PP Nomor 21 Tahun 2020. Selama kurang lebih dua bulan, pergerakan warga Indonesia dibatasi dan segala kegiatan dihimbau untuk dilakukan di rumah. Meskipun menghadapi berbagai kendala warga dihimbau dapat memaksimalkan kegiatan di rumah, sehingga tersebarluaslal tagar #dirumahsaja pada berbagai

platform digital (Instagram dan Twitter) dalam kurun waktu tersebut.

Selama masa isolasi, masyarakat dengan pekerjaan selain yang bergerak di bidang kesehatan dan distribusi pangan tidak dapat melakukan kegiatan di luar rumah. Gerak keluar rumah saja dibatasi, apalagi menciptakan kerumunan untuk membuat pertunjukan musik. Akibat hal ini,

**Tabel 2.** Daftar Konser/Tur yang Batal Dilaksanakan

| No | Konser/Tur   | Tanggal Pelaksanaan |
|----|--|---------------------|
| 1  | Konser Musik Anji, Lapangan Merdeka Ambon                              | 14 Maret 2020       |
| 2  | Efek Rumah Kaca, Kalibata City, Jakarta                                | 15 Maret 2020       |
| 3  | Tour Album Agterplass The Adams  |                     |
| 4  | Konser Manu Chao, M Bloc Space, Jakarta                                | 19 Maret 2020       |
| 5  | Zeke and The Popo, UG Kuningan City, Jakarta                           | 20 Maret 2020       |
| 6  | Pertunjukan Septian Dwi Cahyo 40 Tahun Berkarya, M Bloc Space, Jakarta | 22 Maret 2020       |
| 7  | Hammersonic, Pantai Karnaval Ancol, Jakarta                            | 27-28 Maret 2020    |
| 8  | Lalala Festival 2020, Orchid Forest, Cikole Lembang, Bandung           | 18-19 April 2020    |
| 9  | We The Fest 2020, Jakarta  | 14-16 Agustus 2020  |
| 10 | Synchronize Fest, Jakarta  | 2-4 Oktober 2020    |

Sumber: diolah dari kompas.com, 2020b; akun instagram @mblocspace, 2020; Haryanto, 2020)

pertunjukan musik yang rencananya dilaksanakan secara luring dalam kurun waktu Maret-April batal dilaksanakan.

Berdasarkan data yang berhasil penulis himpun dari beberapa media, tercatat beberapa aktivitas konser musik indie Jakarta yang terpaksa dibatalkan akibat pandemi Covid-19. Salah satu band lokal Zeke and The Popo yang mulanya akan melakukan konser yang bertempat di UG Kuningan City pada tanggal 20 Maret 2020 terpaksa harus membatalkan pertunjukannya dan mengubahnya menjadi “Pre-Recorded Show”, direkam di sebuah studio tanpa penonton yang kemudian dinamakan sebagai “Crowd-less Concert”. Penonton telah membeli tiket akan mendapatkan tautan khusus untuk dapat menontonnya. Akan tetapi, pihak manajemen Zeke and The Popo juga memberikan opsi “refund” bagi penonton yang telah membeli tiket “live-show”.

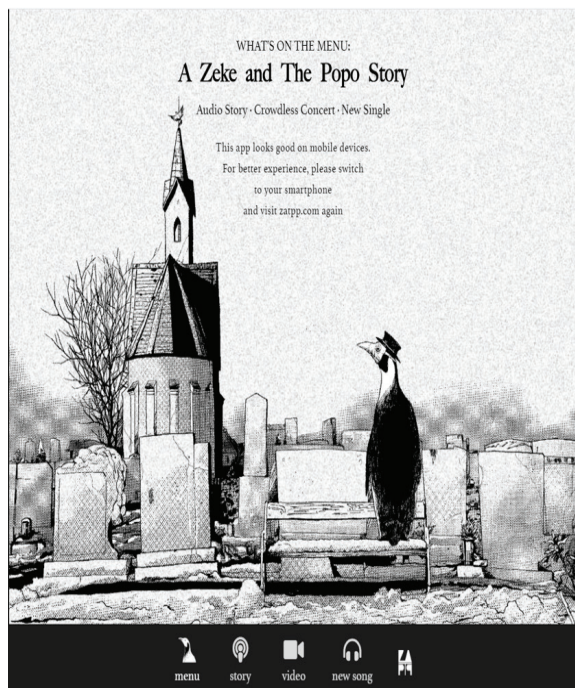


Sumber: instagram @zekeandthepopo, April 2020

**Gambar 2.** Crowd-less Concert Zeke and The Popo

Awalnya, “crowd-less concert” video Zeke and the Popo dijanjikan akan bisa ditonton oleh para pembeli tiket pada Jumat, 3 April 2020. Akan tetapi ternyata muncul kendala teknis bahwa video sulit diunggah karena memiliki ukuran file yang besar. Menunggu beberapa hari sampai tim menyelesaikan kendala teknis akibat

adaptasi baru dengan memanfaatkan teknologi *video recording* membuat akhirnya pada Senin, 6 April 2020 pukul 19.00 WIB, *crowd-less concert* Zeke and The Popo dapat dinikmati oleh semua pembeli tiket pada tautan zatpp.com.



Sumber: zatpp.com

**Gambar 3.** Pre-Recorded Show Zeke and The Popo

Tantangan terberat fase karantina dihadapi saat memasuki hari raya Idul Fitri pada akhir Mei 2020. Dalam menyambut hari raya Idul Fitri, sebagian besar masyarakat Indonesia memiliki kebiasaan untuk melakukan ritual budaya mudik ke kampung halaman. Untuk mengantisipasi terbentuknya klaster baru penyebaran virus Covid-19 akibat masyarakat yang melakukan mudik, pemerintah Indonesia semakin menghimbau masyarakat untuk tidak mudik. Hal ini juga mendapat dukungan dari warganet Indonesia melalui tagar #dirumahaja, #tundamudik, #lebaranonline dan #lebaranvirtual. Selain pemerintah dan warganet, pihak swasta yakni Perusahaan Telekomunikasi Indosat IM3 Ooredoo berkolaborasi dengan musisi yang dikenal memainkan aliran musik ber-*genre* indie (dan distribusi musiknya yang dilakukan mandiri) untuk membuat lagu mengenai situasi dan solidaritas masyarakat di kala pandemi. IM3 Ooredoo mengajak musisi indie yang saat ini memiliki komunitas pendengar cukup besar yakni Hindia, Sal

Priadi, Kunto Aji dan Yura Yunita. Keempatnya menciptakan lagu juga turut mendukung aktivitas bersilaturahmi secara virtual, berjudul “Ramai Sepi Bersama”. Informasi yang didapatkan dari “*feed*” akun instagram @wordfangs (April 17, 2020), salah satu musisi indie yang berkolaborasi, bahwa seluruh tim bekerja secara “*remotely* dari rumah masing-masing” untuk menciptakan dan memproduksi lagu tersebut. Jelang perayaan idul fitri, dalam nuasnya bulan Ramadhan, tepatnya pada 17 Mei 2020, IM3 Ooredoo menyelenggarakan konser musik virtual “*Collabonation*” untuk mengampanyekan silaturahmi daring sekaligus peluncuran lagu “*anthem*” ‘Ramai Sepi Bersama’. Kurang lebih, isi lagu tersebut menceritakan persoalan yang dihadapi pada masa pandemi dan optimisme bahwa kesulitan tersebut dapat dihadapi secara bersama.

*“Saat semua tak jelas arahnya  
Kita hanya punya bersama  
Lewati curam terjalnya dunia  
Ramai sepi ini milik bersama”*

(Petikan lirik lagu, Ramai Sepi Bersama)

Setelah melewati masa karantina wilayah dan PSBB, pada awal Juni 2020, Pemprov DKI Jakarta mulai melonggarkan kebijakan PSBB. Sayangnya, kebijakan pelonggaran PSBB ini tidak benar-benar berdasarkan pada justifikasi epidemiologis yang menyatakan situasi negara telah aman dari virus Covid-19, melainkan karena stabilitas sosial dan ekonomi yang mulai terguncang. Sebab, pada kenyatannya, masih ditemukan kasus-kasus baru positif Covid-19 setiap harinya dalam jumlah yang masih terbilang tinggi. Meski memang dilaporkan bahwa dalam hari-hari tertentu mengalami fluktuasi penurunan. Akan tetapi, data tersebut perlu ditelisik, sebab pelaksanaan *rapid test* maupun *swab test* belum benar-benar secara masif dilakukan. Oleh karena itu, sangat besar terjadinya kemungkinan masyarakat yang telah terjangkit virus Covid-19, akan tetapi belum teridentifikasi dan terekam dalam data penderita. Meskipun kondisi masih mengkhawatirkan, pelonggaran kebijakan PSBB yang dilakukan oleh pemerintah memiliki maksud memulihkan stabilitas perekonomian yang terhenti selama beberapa bulan akibat pelaksanaan kebijakan tersebut.

Berbagai sektor kegiatan yang melibatkan komunal berangsur-angsur dibuka, dengan syarat menerapkan protokol kesehatan. Akan tetapi, industri hiburan terutama pertunjukan musik yang lekat dengan *crowd* atau kerumunan penonton belum bisa sepenuhnya dilaksanakan. Penerapan protokol kesehatan sendiri yang membatasi kapasitas dan jarak manusia dalam satu tempat, sehingga dipastikan bahwa kerumunan aktivitas musik tidak mungkin dapat dilakukan apabila virus korona belum benar-benar hilang.

## **SOLIDARITAS KOMUNAL PEKERJA MUSIK**

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan banyak pekerja di industri musik kehilangan pendapatannya. Survei daring yang dilakukan oleh Sindikasi dalam kurun waktu 20 Maret hingga 4 April 2020 yang melibatkan 139 pekerja mendapati fakta bahwa para pekerja menghadapi pembatalan kontrak kerja akibat pandemi (Ekarahendy, E., dkk., 2020). Menurut survey tersebut, Sindikasi mengelompokan sub-sektor yang mengalami pembatalan kontrak kerja akibat pandemi Covid sebagai berikut: pekerja film, video, dan audio visual (17,3%); seni pertunjukan (10,85%); seni vokal dan musik (9,4%); fotografi (9,4%); penelitian (7,4%); dan desain komunikasi visual (7,2%). Survei ini dinilai oleh penulis dapat mewakili kondisi ekosistem industri musik pada masa pandemi karena sub-sektor tersebut posisinya masih terkait dan mendukung pekerjaan dalam industri musik.

Ekosistem industri musik melibatkan banyak pihak, tidak hanya para penampil di depan panggung, tetapi juga di dalamnya terdapat para pekerja pendukung dan industri terkait. Sebagaimana yang disampaikan Wikstrom (2009: 47) mengenai dunia industri musik bahwa di dalamnya terdapat “*core activities*” atau aktivitas inti, “*supporting activities*” atau aktivitas pendukung, dan “*related industry*” atau industri terkait tidak dapat dipisahkan dari ekosistem industri musik. Demikian juga yang terjadi pada industri musik di Indonesia yang digambarkan oleh Dass dan Navid (2019) melalui wawancaranya dan pendokumentasian foto pada beberapa tokoh “belakang panggung” pertunjukan musik yang terlibat di dalam ekosistem ini. Oleh karena itu, untuk

memahami silang sengkabut pada ekosistem industri musik yang terdampak pandemi Covid-19 gambaran kondisi pekerja baik dari kelompok inti, kelompok pendukung maupun industri lain yang terkait seperti perfilman juga diperlukan.

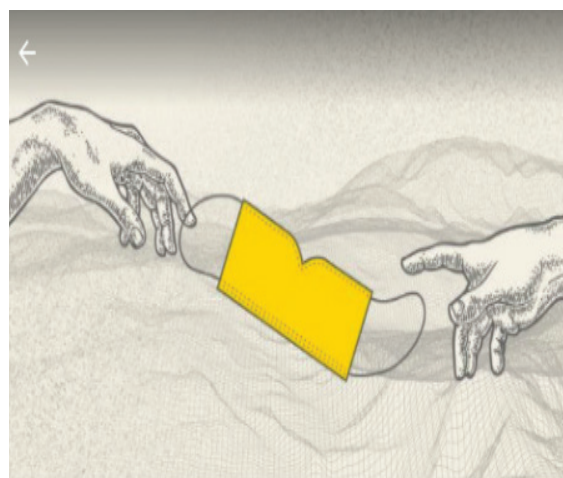
Pembatalan kontrak pertunjukan musik dan beberapa proyek terkait lainnya membuat para pekerja dalam ekosistem industri ini kehilangan pemasukan. Meskipun dampaknya akan dirasakan berbeda bagi para pekerja karena tergantung kelas pendapatan. Bagi pekerja dalam kelompok penghasilan tinggi masih dapat mengandalkan tabungan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Meskipun, dalam beberapa kasus, pekerja dalam kelompok penghasilan tinggi yang memiliki peran sebagai patron harus melakukan “pemutusan (sementara)” hubungan kerja (PHK) karena memang tidak ada proyek yang sedang dikerjakan. Bagi pekerja dalam kelompok penghasilan menengah, sebagian masih dapat bertahan dengan sisa-sisa penghasilan beberapa bulan lalu, namun ada juga yang mulai menjual beberapa koleksi, aksesoris, maupun perkakas bermusiknya. Kelas terbawah adalah golongan yang paling terdampak, yakni pekerja dengan kelompok penghasilan rendah. Selama ini gaji yang diterima berada dalam kadar cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Sehingga, pembatalan proyek pertunjukan musik akan memusnahkan satu-satunya sumber pendapatan dari para prekariat kelas terbawah.

Kondisi kerterpurukan secara masif yang dihadapi oleh pekerja seni, khususnya pekerja di industri musik Indonesia akibat pandemi telah memunculkan gerakan solidaritas bantu sesama dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Akibat kebijakan PSBB dan PSBB transisi, terutama di wilayah DKI Jakarta, telah mengakibatkan pekerja di industri musik kehilangan pendapatan akibat tidak dapat dilaksanakannya pertunjukan musik yang batal dilaksanakan. Terhitung aturan PSBB telah dimulai sejak 10–23 April 2020, yang kemudian mengalami perpanjangan selama 28 hari (24 April–21 Mei 2020) dan terakhir mengalami masa perpanjangan tambahan selama 14 hari yakni 22 Mei–4 Juni 2020. Akhirnya, masuk pada masa transisi, PSBB Jakarta juga diperpanjang selama beberapa kali mengingat kondisi peningkatan angka kasus positif yang terus meningkat, yakni mulai 5 Juni 2020 hingga 28 Agustus 2020.

Dalam kepentingan untuk perubahan sikap dan tindakan dialami oleh komunitas pekerja musik pada masa pandemi, penulis akan membuat tabulasi pengelompokan kebijakan pembatasan sosial dalam rentang masa pemberlakuan PSBB dan PSBB transisi (di wilayah DKI Jakarta) yang kemudian dikaitkan dengan fase respon yang dialami komunitas pada kondisi “terguncang”, “resistensi”, dan “beradaptasi” sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 3.

Pembatalan pertunjukan musik, konser, tur promosi karya baru dari grup musik indie pada skena Jakarta membuat pendapatan para pekerja pada ekosistem industri ini menjadi hilang. Kondisi terdampak wabah membuat justru menguatkan solidaritas yang selama ini “memudar”. Sebagai dampak dari industrialisasi, solidaritas kolektif (solidaritas mekanis, Durkheim: 1969) seringkali tidak dapat terjadi akibat perkembangan masyarakat modern yang pekerjaannya telah terdiferensiasi. Saat pandemi Covid-19 terjadi, solidaritas kolektif sesama pekerja musik yang terdampak terekam dari beberapa platform yang menghimpun dan memfasilitasi tiap individu yang ingin berdonasi bagi para pekerja industri musik yang terdampak Covid. Salah satunya gerakan pengumpulan donasi dilakukan oleh ruang kreatif M Bloc Space melalui platform kitabisa.com. Berdasarkan penggalangan dana melalui kegiatan acara virtual “Pekan Kreatif di Saat Sulit Vol 1 & 2”, M Bloc Space berhasil mengumpulkan donasi sebesar Rp60.821.368,-. Dana tersebut, berdasarkan keterangan yang tercantum dalam platform penggalangan dana kitabisa.com/kreatifdisaatsulit, kemudian didistribusikan kepada para pekerja kreatif harian yang terdampak Covid-19 seperti para kru panggung, kru band, kru acara, kru sound system, teknisi musik, penata suara, penata cahaya, musisi pen-

datang baru, musisi jalanan, fotografer musik, komunitas kreatif atau pun para pekerja harian bidang kreatif lainnya yang kehilangan pemasukan akibat pembatalan acara.



### Lawan Corona Bersama #KreatifdiSaatSulit

Rp 60.821.368 terkumpul dari Rp 100.000.000

299 Donasi

0 hari lagi

Campaign telah berakhir

### Informasi Penggalangan Dana

Penggalang Dana



Sumber: [kitabisa.com/kreatifdisaatsulit](http://kitabisa.com/kreatifdisaatsulit)

**Gambar 4.** Penggalangan Dana di platform kitabisa.com oleh M Bloc Space

**Tabel 3.** Tabulasi Periode PSBB dan PSBB Transisi dan Kegiatan Pekerja Industri Musik

| No | Masa          | Durasi                      | Fase       | Kegiatan                        |
|----|---------------|-----------------------------|------------|---------------------------------|
| 1  | PSBB (i)      | 10 April – 23 April 2020    | Terguncang | Galang donasi                   |
| 2  | PSBB (ii)     | 24 April – 21 Mei 2020      | Terguncang | Galang donasi                   |
| 3  | PSBB (iii)    | 22 Mei – 4 Juni 2020        | Resistensi | Narasi Konspirasi Covid-19      |
| 4  | PSBB Transisi | 5 Juni 2020–28 Agustus 2020 | Adaptasi   | Drive in concert (29 Juli 2020) |

Keterangan: (i), (ii), (iii) adalah tahapan perpanjangan masa PSBB Per- 31 Agustus 2020

Selain penggalangan donasi melalui platform [kitabisa.com](http://kitabisa.com), beberapa pekerja musik juga melakukan penggalangan dana dengan menjual *official merchandise* dari grup musik. Salah satunya dilakukan oleh band indie lokal, Zeke and The Popo yang berkolaborasi dengan platform [www.kolase.com](http://www.kolase.com) untuk menjual merchandise “T-Shirt”.

Setelah melewati fase terguncang, pekerja industri musik memasuki masa-masa resistensi. Dapat dikatakan bahwa fase ini merupakan situasi kegamanan dari industri musik indie. Dalam kondisi kegamanan yang dihadapi, muncul gejala kebosanan atas keberadaan virus yang selama beberapa bulan telah hidup bersama manusia. Ekspresi perlawanan *counter culture*, muncul dari musisi asal Bali Jerinx melalui narasinya tentang teori konspirasi Covid-19. Meskipun berasal dari Bali, Jerinx yang merupakan personil grup band Supermen Is Dead (SID) yang memiliki komunitas pendengar berskala nasional. Meskipun masih penulis tidak dapat mengatakan bahwa aliran musik dan komunitas pendengar

SID masuk dalam golongan ekosistem musik indie, akan tetapi narasi konspirasi corona yang Jerinx gaungkan terus menerus di media sosial menawarkan “*counter*” narasi. Sekitar enam bulan masyarakat Indonesia melewati masa-masa pandemi dan dalam kurun waktu tersebut, belum ditemukan penyelesaian dan kepastian sampai kapan kondisi dapat normal kembali. Ditambah lagi virus Covid-19 yang bersifat *invisible* (tak kasat mata) membuat masyarakat semakin mempertanyakan mengenai kebenaran dan keberadaan virus ini. Apalagi sebagian besar masyarakat menganggap bahwa bila dilihat dari gejala orang yang terjangkit virus Covid-19 hampir mirip dengan penyakit pernafasan yang umumnya dialami oleh penduduk Indonesia. Kondisi masyarakat semakin kisruh akibat pihak yang semestinya memberikan kejelasan terhadap kasus ini yakni Kementerian Kesehatan terkesan simpang siur. Pada titik ini, narasi konspirasi Covid-19 yang disuarakan oleh Jerinx SID dapat dinalar oleh sekelompok masyarakat sehingga menjadi kebenaran yang diyakini oleh pengikutnya.

The screenshot displays a campaign page on Kolase.com. On the left, there's a promotional image for 'WHAT'S ON THE MENU: A ZEKE AND THE POPO STORY' merchandise. The image includes the text 'The Official Tees' for IDR 150,000, available at bit.ly/zatppteas, and credits the artwork to Haris @shtrvicious. On the right, the campaign details are shown: 'Kolaborasi Sukses' (Successful Collaboration), 'Brand Extension', and 'A Zeke and The Popo Story'. It features an SRM VERIFIED badge and a progress bar indicating 15% LAUNCHED with a budget of Rp1.800.000 BOOSTED. A warning box at the bottom right states 'BASE NON TARGET' and explains that the campaign is declared successful without reaching 70% of the target value.

Sumber: [www.kolase.com](http://www.kolase.com)

**Gambar 5.** Fundraising melalui Penjualan official Merchandise T-Shirt Zeke and The Popo

Selain gejala teori konspirasi yang muncul dari musisi, pada sisi yang berbeda, kehidupan bersama dengan virus Covid-19 selama beberapa bulan membuat musisi untuk mulai kreatif menciptakan inovasi yang adaptif. Terlihat beberapa musisi mulai bangkit berkarya, menyebarkan rilisan digital karya terbarunya dengan mamak-simalkan promosi secara daring.

Salah satu grup musik indie yang meluncurkan karya terbarunya pada masa pandemi Covid-19 adalah Goodnight Electric. Grup band Goodnight Electric yang harus memutar otak untuk memikirkan strategi promosi single baru di kala pandemi muncul secara tiba-tiba. Single “Dopamin” diluncurkan dalam acara Dopamin Release Party di Gudskul, Jakarta Timur pada 5 Maret 2020 sekaligus merupakan terakhir kalinya Goodnight Electric mengumpulkan masa penonton untuk promosi rilis single terbarunya. Hari-hari selanjutnya Jakarta dan wilayah Jabodetabek menerapkan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) sehingga tidak mungkin untuk melakukan kegiatan apapun yang mendatangkan kerumunan massa, termasuk “gigs” musik. Untuk itu, grup Band Goodnight Electric memaksimalkan promosi single “Dopamin” melalui platform digital. Di sela-sela penyiapan rilisan album terbarunya, grup band ini tetap berkreasi menghasilkan karya seperti menghasilkan *official music video* single Dopamin dengan berkolaborasi bersama studio kreatif indie Toma Kako.

Goodnight Electric benar-benar memaksimalkan promosi single dan album melalui kanal media sosial. Tidak hanya mempromosikan rilisan digital dan music video, Goodnight Electric juga memanfaatkan fitur “filter-instagram” sebagai salah satu fitur sedang populer di kalangan pengguna media sosial instagram. Melalui fitur “filter-instagram” membuka peluang terbangunnya *engagement* antara komunitas-audien dan grup band yang diidolaknya. Menurut pengamatan penulis, admin *official account* Instagram dari Goodnight Electric (@goodnightelectric) sangat aktif merespons pengguna media sosial yang melakukan mention pada akun tersebut dengan cara *repost*-nya. Hal ini dapat digolongkan sebagai upaya dari band Goodnight Electric untuk membangun interaksi keakraban dengan penggemarnya melalui kanal media sosial. Selain

memiliki dampak bagi terbangunnya keakraban secara virtual antara pendengar dan grup musik idola, sebenarnya interaksi pada media sosial berdampak pada menyebarkan karya musik pada jaringan sosial individu yang terikat dalam kolektif-pendengar. Perlu secara kritis melihat fenomena tersebut bahwa apakah penyebaran informasi di media sosial juga ikut membawa ide, nilai dan hakikat prinsip yang diperjuangkan oleh komunitas, atau hanya meraup popularitas dan pengikut yang sifatnya sekadar mencari eksistensi di media sosial.

Memasuki masa adaptasi, terlihat dari percobaan beberapa penyelenggara pertunjukan musik yang mencoba model pertunjukan konser musik yang bisa dinikmati oleh penonton di dalam mobil. Dengan ini, kegiatan menonton konser menjadi besar dari kerumunan penonton. Penampil berada di panggung dengan alat penunjang konser lengkap, sementara penonton berada di dalam mobil dengan menaati serangkaian protokol kesehatan.



Sumber: Styawan, 2020

**Gambar 6.** Konser Musik “Drive-in di Semarang”

Sejauh ini, konser secara luring yang melibatkan kehadiran penonton dilakukan dengan konsep menonton konser dalam mobil atau *Drive-In Concert*. Pertama kali *Drive-In Concert* diselenggarakan di Semarang, Jawa Tengah pada 29 Juli 2020 bertepatan dengan pelonggaran fase pertama PSBB di wilayah tersebut. Meski diselenggarakan di luar Provinsi DKI Jakarta, pertunjukan tersebut tidak hanya melibatkan band lokal, tetapi juga band kelas nasional yakni Jikustik. Kemudian, pada 29-30 Agustus 2020, “Drive-In Concert” dilakukan di Jakarta bertempat di JI-Expo Kemayoran. Konser ini yang diberi judul “New Life Experience” menyediakan kapasitas untuk 300 mobil dengan hari pertama menampilkan band berskala nasional Kahitna

serta pada hari kedua Arman Maulana dan Afgan. Telihat konser ini merupakan upaya uji coba industri musik menyambut “*new normal*”, apalagi pada perhelatan ini didukung oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan diawasi oleh Satuan Tugas Independen “*Safety Planet*” (rekomendasi Kementerian Kesehatan) dengan ketat memberlakukan protokol kesehatan sebagai berikut:

1. Satu kendaraan maksimal hanya berisi tiga penonton.
2. Dua hari sebelum acara, setiap penonton diwajibkan mengisi data lengkap mengenai “*self-assesment*” yang menyatakan bahwa kondisi diri sehat. Formulir akan dikirimkan dalam bentuk tautan yang dikirimkan melalui email.
3. Setelah melalui pintu gerbang arena konser, tim *Safety Planet* akan melakukan pengecekan jenis dan tinggi kendaraan (mobil berbahan bakar non-diesel dan tinggi tidak lebih dari dua meter) dan penyemprotan mobil dengan menggunakan disinfektan.
4. Memasuki jalur antrian, penumpang akan diperiksa suhu tubuhnya, maksimal 37.2 derajat celsius.
5. Pengecekan jenis kendaraan harus sama dengan kendaraan yang terdaftar, pengecekan *facemask* dan *handsanitizer*. Selain itu, tim Shop and Drive memastikan kondisi kendaraan seperti Dinamo, Accu dan Radiator dalam keadaan baik sehingga aman selama menyaksikan konser.
6. Tidak diperkenankan membawa makanan dari luar. Panitia menyediakan pre-order makanan, minuman, serta merchandise maksimal H-1 pemesanan.
7. Penggunaan toilet harus melalui komunikasi dengan panitia guna menghindari antrian.
8. *Sound output* dari konser hanya dapat didengarkan melalui frekuensi gelombang Radio FM di dalam mobil penonton.
9. Untuk menjaga keseimbangan sirkulasi udara pada arena pertunjukan, disediakan “*Blower Fans*” untuk mendorong sirkulasi emisi gas buang dari kendaraan penonton.

Pada pelaksanaannya di hari pertama, konser baru dimulai pada pukul 21.32 WIB akibat pelaksanaan protokol kesehatan pelaksanaan konser yang ternyata cukup memakan waktu.

### a. Adaptasi Kebiasaan

Setelah bergulat dengan resistensi akibat perubahan yang terjadi pada awal pandemi menghantam, mulai ada pembiasaan dari pekerja musik. Pada mulanya mengandalkan solidaritas bantuan, sesama pekerja mulai memikirkan mutasi pekerjaan yang adaptif pada masa pandemi. Beberapa musisi mengeksplorasi peluang mengajar kemampuan teknis sebagai musisi secara daring. Salah satunya yang dilakukan oleh personel grup band Scaller, Reney Karamoy. Pada awal July 2020, Reney yang juga merupakan seorang “*Audio Engineer*” membuka kursus daring mengenai produksi musik dan dasar-dasar “*recording*”. Kursus yang berlangsung selama sebulan dengan empat kali pertemuan yang dilaksanakan tiap minggu ini dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan bagi para peserta agar dapat memproduksi karya musik dengan memanfaatkan instrument “*home recording*”.



Sumber: Instagram @reneykaramoy

**Gambar 7.** Publikasi Kelas Daring Produksi Musik Reney Karamoy

Keberlimpahan waktu luang juga membuat beberapa musisi justru menjadikan pandemi sebagai masa kontemplasi bahkan inspirasi sehingga dapat melahirkan karya yang rilis dalam *platform* digital. Salah satunya adalah Orkes Kedai Sari-nah yang berasal dari salah satu wilayah kota satelit Bekasi yang berhasil melahirkan single “Ah Pusing!” yang liriknya bercerita mengenai kondisi musisi menjalani masa-masa pandemi

yang kehilangan pekerjaan akibat ketiadaan pertunjukan bermusik secara langsung. Adapun petikan liriknya adalah sebagai berikut:

Bangun siang sudah biasa  
Kamar tidur kamar kerja  
Gelombang ke-dua  
sudah mulai nyata

Senang tak perlu ditanya  
Kupaksakan senyum saja  
Hari hari rebahan tidur lagi

Keluar deg-degan  
Di rumah sungguh bosan  
Pergipun taklah aman  
Aahh pusingggg

Katanya konspirasi  
Menurut Jerinx SID Mungkinkah ini fiksi?  
Aahh pusingggg

Cita cita jadi musisi  
Terancam hanya ekspektasi  
Panggung tak ada  
Kini hanya dunia maya

Kerjaan tak tentu ada  
Reguleran jangan di tanya  
Alat musik jadi sarang laba laba

Keluar deg-degan  
Di rumah sungguh bosan  
Pergipun taklah aman  
Aahh pusingggg

Katanya konspirasi  
Menurut Jerinx SID  
Mungkinkah ini fiksi?  
Aahh pusingggg  
(Sumber: Caption Official Music Ah Music <https://www.youtube.com/watch?v=IQVAKPJfe2A> )

Selain itu, masih juga ada kegiatan penggalangan dana (*crowdfunding*), akan tetapi kini bentuknya menjadi lebih terintegrasi melalui pertunjukan seperti konser amal, ataupun kerja sama penjualan “*merchandise bundling*”—yang dijual bersamaan dengan minuman kopi. Bahkan di masa pandemi justru membuat situs berita musik “Pop Hari Ini” menerbitkan edisi cetak perdana yang mengupas sosok Hindia sebagai ikon musik “pop-indie” yang digemari oleh



Sumber: Instagram @orkes\_kedai\_sarinah

**Gambar 8.** Publikasi Media Sosial Single Ah Pusing! dari Orkes Kedai Sarinah

muda-mudi penikmat musik saat ini sekaligus kontroversial.

Tanpa bermaksud membuat tulisan ini menjadi tidak berfokus, penulis ingin sedikit memberikan latar cerita situasi yang terjadi pada masa pandemi dan sosok kontroversial dari Hindia sebagai ikon musik “pop-indie”. Sosok Hindia atau yang bernama asli Baskara Putra menjadi kontroversial, puncaknya terjadi pada akhir April 2020, dirinya bersama band-nya “.Feast” dihujani cacian *netizen*. “*Chaos*” yang terjadi di dunia maya itu bermula dari petikan (potongan) sebuah wawancara Baskara Putra bersama band-nya yang tersebar luas dan memiliki tendensi mere-mehkan aliran musik dari *genre* metal: “Lagu Peradaban lebih keras dari lagu metal apapun yang kami dengar, geramnya sampai kebas”. Selama berminggu-minggu, di tengah masa isolasi, perdebatan terjadi di lini media maya antara *genre* musik metal dan para penikmat musik “indie-pop” Hindia maupun .Feast. Akhirnya Baskara Putra dan band-nya .Feast mengunggah video permohonan maaf atas pernyataannya yang ternyata menyinggung salah satu pihak. Uniknya, kondisi kontroversial tersebut justru malah semakin melambungkan popularitas Baskara Putra sebagai Hindia, semakin mengukuhkan dirinya menjadi ikon musik “pop-indie”.



Meskipun, penulis sendiri masih rancu mengenai terminologi “pop-indie”, akan tetapi sampai saat ini, definisinya mungkin bisa diarahkan pada aliran musik yang bergenre “pop” akan tetapi distribusi dan produksi album dilakukan secara “independent”. Kembali pada persoalan Hindia sebagai ikon musik “pop-indie”, tidak disangka, justru masa pandemi malah menyediakan ruang bagi pekerja dalam ekosistem bermusik untuk kembali mendokumentasikan fase “kultur musik pop-indie” ke dalam cetakan majalah.



Sumber: instagram @pophariini

**Gambar 9.** Edisi Cetak Perdana Cover Hindia

Sang “cover boy” Hindia menuliskan *caption* di salah satu *feed* instagram-nya yakni @wordfangs, sebagai berikut: “*Mungkin ada yang akan kaget dengan harganya; kayak beli buku ya, dan percayalah, bagi saya cetakan ini lebih pantas dibanding sebuah buku dibandingkan sebuah majalah, presentasi visual dan hasil produksinya tidak sembarangan. Bahkan mungkin seharusnya Ia termasuk ke dalam barang yang dijual bersamaan dengan cetakan fisik album, saking lengkapnya isi edisi pertama ini dalam membedah Menari Dengan Bayangan. Ia terasa sebagai pedoman album*”. Menari dengan Bayangan merupakan proyek solo pertama dari ikon “kultur pop-indie” yang digemari industri musik saat ini yakni Hindia. Album yang telah rilis pada 29 November 2019 terbilang sukses. Pada *showcase* perdananya yang diberi nama Perayaan Bayangan, bertempat di Studio Kemang Jakarta Selatan, Hindia telah berhasil menarik massa sebanyak 1000 orang dengan harga tiket yang tiket Rp155ribu. Tidak hanya di Jakarta, “Tur Bayangan” juga dilaksanakan di lima kota besar di Jawa yakni Malang, Surabaya, Yogyakarta, Semarang dan Bandung dan seluruh tiket habis terjual. Meski dikatakan Hindia, edisi cetak

perdana Pophariini merupakan sebuah panduan album, bagi penulis selain pendokumentasian perjalanan bermusik seorang musisi, edisi ini merupakan peluang kebangkitan kembali media cetak. Ada kelompok masyarakat mengemari rilis fisik dari karya pemusik idolanya dan majalah berpotensi menjadi artefak yang bernilai dan memiliki nilai jual terlebih bagi kolektor.

Selain adaptasi kebiasaan yang melahirkan kultur baru sebagaimana telah diuraikan pada paragraf sebelumnya, menarik untuk melihat kolaborasi eksperimental tercipta pada masa pandemi oleh grup musik Goodnight Electric. Kolaborasi eksperimental coba dilakukan oleh grup musik Goodnight Electric yang mengajak produsen coklat lokal Pipiltin Cocoa untuk membuat edisi special merchandise yang berupa bar coklat—*special edition goodnight electric chocolate baked cheese*. Bentuk kolaborasi ini dalam rangka skema promosi dari grup band tersebut atas album terbarunya yakni Misteria. Pabrik Pipiltin Cocoa terbilang dekat dari jangkauan para personil yakni di wilayah Jakarta Selatan, sehingga memudahkan koordinasi untuk penyediaan konten media yang dibutuhkan. Mengingat kondisi masih belum sepenuhnya mudah untuk dapat berpergian jauh, terutama perjalanan dengan menggunakan kendaraan umum yang memerlukan surat hasil *rapid* dan *swab test*, maka pilihan



Sumber: Instagram @goodnightelectric

**Gambar 10.** Foto Konten Produk Dopamin Chocolate & Baked Cheese

untuk berkolaborasi dengan pihak yang berlokasi di dalam kota adalah keputusan tepat. “Pipiltin Cocoa” yang merupakan produsen cokelat lokal satu-satunya di Jakarta juga mewakili semangat dari band Goodnight Electric sebagai band lokal.

## EKSPLORASI RUANG KOMUNAL DIGITAL

*Spotify* menjadi media pemutar musik streaming berbasis “cloud” yang saat ini sedang tenar. Terlebih pada masa pandemi, tercatat pelanggan *Spotify premium* mengalami peningkatan. Menurut berita yang dilansir oleh tek.id, di akhir bulan Maret, pengguna *Spotify Premium* meningkat 31% dibandingkan tahun sebelumnya (Christina, 2020). Meskipun dilema tidak dapat disangkal mengenai royalti kecil yang diperoleh musisi terutama pada ranah “indie”. Untuk itu, menarik apabila melihat betapa pentingnya kehadiran *Spotify* dalam perjalanan distribusi musik di Indonesia.

Dalam sebuah catatan yang berjudul “Musik Mati Meninggalkan Spotify”, Taufik Rahman (2017: 9-13) mengungkapkan *streaming* musik berbasis “cloud” merupakan fase perjalanan evolusi dari degradasi “effort” konsumen dalam menikmati musik. Awalnya penikmat musik tidak segan mengeluarkan uang untuk mendengarkan musik melalui piringan hitam, kemudian menurun pada media yang lebih murah yakni CD, iTunes, dan kini penikmat musik tidak perlu lagi menyediakan “storage” dalam ruang nyata maupun ruang digital yang terlampaui besar karena cukup dengan berlangganan *Spotify* dengan harga beberapa puluh ribu per-bulan, lagu dan musik kesayangan dengan kualitas audio yang baik bisa dapat didengarkan dengan praktis dan mudah. Meski demikian, *rate royalty* yang diberikan oleh *Spotify* untuk setiap pemutaran lagu dari label independen adalah sekitar \$0.005, yang Taufik Rahman menyitir Krukowski (2017: 13) sebenarnya adalah \$0.004611. Dibalik kecilnya *royalty* yang dihasilkan dari platform *Spotify*, sebenarnya penulis melihat bahwa *Spotify* bisa diumpamakan sebuah “showcase” karya musisi yang dapat membawa peluang bagi kapitalisasi karya dalam media lainnya.

Mempergunakan “*Spotify*” sebagai “showcase” karya musik dapat dilihat pada apa yang dilakukan oleh grup musik Goodnight Electric. Grup musik yang meluncurkan album barunya pada masa-masa pandemi ini memaksimalkan platform “*Spotify*” dan fitur yang terdapat di dalamnya seperti menggunakan “background” video yang dinilai *artsy*—bernilai seni. Dari *background video artsy (artwork)* tersebut kemudian diformulasikan dalam filter “Instagram Story” sebagai media untuk semakin mempromosikan karya musiknya di kanal media sosial.



Sumber: [instagram.com/goodnightelectric](https://www.instagram.com/goodnightelectric), 2020

**Gambar 11.** Filter Instagram Story dari Single Dopamin dalam Album Misteria oleh Goodnight Electric

Setelah musik beserta “artwork-nya” tersebar dalam berbagai kanal digital, mulailah Goodnight Electric menjual rilis fisik dengan sistem *pre-order* maupun *merchandise* yang bahkan beberapa di antaranya ditujukan sebagai *crowdfunding* bagi sesama pekerja di industri musik.





Sumber: [instagram.com/goodnightelectric](https://www.instagram.com/goodnightelectric), 2020

**Gambar 12.** Official Merchandise t-shirt, masker dan rilis fisik Album Misteria oleh Goodnight Electric

Selain itu, berkat strategi *marketing* yang memaksimalkan *platform* digital, Goodnight Electric (GE) juga tercatat beberapa kali mengadakan konser virtual berbayar. Pada pertengahan Agustus 2020, GE bekerja sama dengan *startup* pendokumentasian video musik *Sounds From The Corner* (SFTC). Selanjutnya, pada akhir Oktober 2020 grup band ini juga mengadakan konser berbayar bekerja sama dengan portal komunitas Supermusic. Meskipun diadakan secara virtual tanpa melibatkan kerumunan masa, setidaknya dengan diadakannya konser virtual, mulai pergerakan ekosistem pekerja musik, meskipun tidak bisa sepenuhnya seperti saat dilaksanakannya pertunjukan musik secara langsung. Dibutuhkan beberapa kru untuk mendukung jalannya pelaksanaan pertunjukan musik virtual, selain para penampil yang menghibur di panggung. Konser virtual sekaligus menjadi era baru bagi ekosistem pekerja musik untuk merombak formasi kerja dan mencari berbagai peluang kreatif dari industri ini di masa pandemi.

## MASA KONTEMPLASI DAN MENGHASILKAN KARYA BARU

Telah disinggung pada bagian tulisan sebelumnya bahwa setelah mengalami pukulan akibat pandemi dan melalui masa-masa resistensi, merupakan fase yang berharga bagi musisi untuk menghasilkan karya baru. Pada bagian sebelumnya juga telah diuraikan beberapa karya yang dihasilkan dengan memaksimalkan platform digital yang dimotori oleh senjata *marketing* media sosial. Begitu pula pembentukan solidaritas sesama pekerja yang diinisiasi melalui media sosial.

Tak ubahnya seperti dunia nyata, dunia maya juga memiliki realitas yang tidak jauh berbeda yakni ruang interaksi. Mengutip Nasrullah (2017: 8) dalam bukunya yang berjudul *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi* mengungkapkan bahwa definisi media sosial adalah medium internet yang memungkinkan pengguna merepresentasikan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual.

*Platform* digital memungkinkan segala informasi dalam berbagai bentuk baik teks, audio, visual, maupun gabungan dua atau ketiganya menjadi ter-arsip. Sehingga pada masa pandemi, semakin banyaknya musisi yang mempublikasikan hasil karyanya pada ruang-ruang digital akan menjadi bank data yang luar biasa bagi para penikmat dan juga tentunya pengkaji musik. Dalam perspektif jaringan, bank data mengenai informasi musik yang tersebar secara luas tersebut tidak dapat dilihat secara terpisah. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Appadurai (2003:17) “*the nature and distributions of its users*”, data selalu berkait dengan jaringan sebagai informasi yang memediasi antara manusia dengan mesin dan sebaliknya. Dan di sini menariknya bagi para pengkaji musik ataupun ilmu sosial lainnya untuk melihat keterhubungan di antaranya. Menjadi tantangan selanjutnya adalah bagaimana industri musik indie di Indonesia dapat melebarkan jangkauan orientasi penggemarnya.

## PENUTUP

Berdasarkan dari hasil temuan yang telah dipaparkan pada bagian isi tulisan ini, penulis memberikan kesimpulan bahwa situasi pandemi Covid-19 memberikan dampak yang bersifat multi aspek kepada pekerja dalam ekosistem industri musik. Seluruh pekerja pada sektor industri ini menjadi terganggu dan seringin berjalannya waktu mulai beradaptasi dengan situasi pandemi untuk kemudian kembali berproses kreatif dalam ekosistem industri ini. Formasi ekosistem pekerja musik akan berubah mengikuti dinamika fase masa-masa bersama pandemi yang sampai sekarang masih berlangsung dan setelah pandemi berakhir. Ekosistem pekerja musik harus bersiap menapaki situasi fase baru apabila pandemi telah usai. Dunia tidak akan pernah kembali sama.

Kondisi pandemi membuat transformasi teknologi penyiaran konser secara virtual semakin canggih dan berkualitas. Masa pandemi Covid-19 gelombang pertama ini bisa saja dapat menjadi momentum bagi era baru ekosistem industri musik Indonesia. Apalagi dengan kemajuan teknologi pertunjukan digital, rilisan karya baik audio maupun video yang dapat digarap menggunakan media rekam sederhana dari rumah atau *home recording*.

Hal yang menarik justru situasi pandemi Covid-19 telah menumbuh-kembangkan kembali semangat komunalitas gotong royong yang menjadi warisan leluhur dari bangsa Indonesia. Sebagaimana yang dikatakan oleh Koentjaraningrat (1993: 391), sesungguhnya kerja sama komunal menjadi penting dilakukan oleh masyarakat Indonesia sebagai sikap nilai budaya yang dipegang teguh untuk menghadapi era pembangunan dan globalisasi. Situasi kesengsaraan akibat pandemi ini justru membuat solidaritas sesama pekerja muncul untuk bersama bahu membahu melewati masa-masa sulit.

Sayangnya, bangkitnya komunalitas sesama pekerja seni yang tidak lagi dibatasi oleh kelas sosial pada masa pandemi ini justru membuka tabir ketidakberdayaan pemerintah Indonesia terhadap regulasi bagi para pekerja seni di masa pandemi. Seperti, belum tersedianya skema perlindungan dalam bentuk *social safety net* (jaring pengaman sosial) bagi para pekerja di industri musik yang

terdampak Covid-19. Padahal situasi ini merupakan momentum bagi negara untuk memberikan kesejahteraan bagi seluruh warganya, setidaknya menjamin tercukupinya kebutuhan dasar dari masyarakatnya yang terdampak Covid-19.

Dalam kurun waktu kurang lebih lima bulan mengalami pandemi, belum ada skema jaring pengaman sosial yang benar-benar disiapkan oleh pemerintah untuk pekerja industri musik terdampak. Skema bantuan dana pekerja seni dari Kemendikbud yang dilakukan pada awal April 2020 dinilai paling dekat dengan akses pekerja industri musik tidak sepenuhnya dapat diakses karena tidak semua kelompok kerja pada ekosistem industri musik memenuhi persyaratan yang diminta. Sementara itu, pada saat penyiapan *new normal*, pemerintah belum mampu menyiapkan formulasi regulasi mengenai protokol kesehatan yang aman bagi industri musik untuk kembali beroperasi dengan kerumunan masa. Dengan demikian, pekerja musik masih harus benar-benar memikirkan strategi untuk mendulang pundi-pundi ekonomi untuk bertahan hidup di tengah masih terbatasnya gerak di masa pandemi.

Akhirnya, justru masa pandemi menjadi tantangan bagi para pekerja industri musik untuk bersikap progresif terhadap perubahan yang terjadi. Pilihan untuk menyikapi kondisi secara adaptif membuka peluang bagi pekerja musik untuk tetap menjalankan ekosistem ditengah keterbatasan dan dinamika situasi pandemi yang terjadi. Kolaborasi menjadi peluang adaptif yang membangkitkan perjuangan kolektiva untuk keluar dari situasi yang tidak menyenangkan bagi semua pihak ini.

Perjuangan secara kolektif yang dilakukan pekerja industri musik tidak dapat berjalan otonom secara terus menerus. Pada fase selanjutnya, pekerja industri musik memerlukan keterlibatan pemerintah Indonesia dalam menjamin kesejahteraan warganya dalam menjalani masa-masa yang belum sepenuhnya pulih. Dalam mewujudkan upaya tersebut, pemerintah perlu memikirkan skema penyaluran bantuan secara cepat, mudah dan tunai akibat fluktuasi drastis dari pendapatan pekerja akibat pandemi. Upaya menjamin pemenuhan kebutuhan dasar melalui bantuan tunai untuk semua pekerja musik terdampak, akan membantu musisi untuk melakukan proses

kreatif secara maksimal. Sembari mengupayakan pemenuhan kebutuhan dasar bagi para pekerja musik terdampak, pemerintah perlu memikirkan formula regulasi yang mendukung berjalannya kembali ekosistem pertunjukan musik memasuki pasar industri era “new normal”.

Tidak kalah penting, industri musik indie tidak akan bisa terus bergerak tanpa adanya dukungan dari penikmatnya. Situasi pandemi menjadi ruang bagi penikmat musik indie untuk ikut mendukung pergulatan berkarya dari musisi yang diidolakan-nya, meski bukan dalam “crowd” pertunjukan langsung. Melainkan transfer energi dalam ruang pertunjukan digital.

## PUSTAKA ACUAN

- Appardurai, A. (2003). “Archive and Inspiration”. In J. Brouwer & A. Mulder (Eds.), *Information in Life*. Rotterdam: V2/NAI.
- Covid19.kemkes.go.id. (2020). Situasi Terkini Perkembangan Coronavirus Disease (COVID-19) 31 Agustus 2020, diakses dari [https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-31-agustus-2020/#.X2kEWi2cY\\_U](https://covid19.kemkes.go.id/situasi-infeksi-emerging/info-corona-virus/situasi-terkini-perkembangan-coronavirus-disease-covid-19-31-agustus-2020/#.X2kEWi2cY_U), pada tanggal 1 September 2020.
- Chlistina, Z. (2020). Pengguna Spotify meningkat 31% selama pandemi, diakses dari <https://www.tek.id/tek/pengguna-spotify-meningkat-31-selama-pandemi-b1ZLB9hLk> (diterbitkan pada 30 April 2020), pada 1 Agustus 2020.
- Dass, F. & Navid, J. (2019). *Musik Jakarta*. Jakarta: Bintang Press.
- Durkheim, E. (1969). *The Division of Labor in Society*. New York: the Free Press.
- Ekarahendy, E., dkk. (2020). Mengubur Pundi di Tengah Pandemi: Kerentanan Pekerja Lepas di Tengah Krisis Covid-19. Jakarta: Sindikasi. [https://www.sindikasi.org/wp-content/uploads/SurveyFreelanceCovid\\_Content\\_200415.pdf](https://www.sindikasi.org/wp-content/uploads/SurveyFreelanceCovid_Content_200415.pdf)
- Fonarow, W. (2006). *Empire of Dirt: The Aesthetics and Rituals of British Indie Music*. USA: Wesleyan University Press. <https://doi.org/10.1017/S0261143009001858>
- Foster, G. M., & Anderson, B. G. *Antropologi Kesehatan* (Terj. Priyanti Pakan Suryadarma & Meutia F. Hatta Swasono). Jakarta: UI-Press.
- Haryanto, A. (2020). Daftar Konser Musik di Indonesia yang Ditunda karena Corona (16/03/2020). 25 Agustus 2020, diakses dari <https://tirto.id/daftar-konser-musik-di-indonesia-yang-ditunda-karena-corona-eFtn>, pada 30 Agustus 2020.
- Ida, R. (2014). *Metode Penelitian Studi Media dan Kajian Budaya*. Jakarta: Kencana.
- Junaidi, M. (2016). *Ilmu Negara: Sebuah Konstruksi Ideal Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- KawalCovid19.id. (2020a). Jumlah Kasus di Indonesia, <https://kawalCovid19.id>.
- Kompas.com. (2020a). Infografik: Timeline Wabah Virus Corona (13/03/2020), diakses dari <https://www.kompas.com/tren/read/2020/03/13/070400265/infografik--timeline-wabah-virus-corona>, pada 20 Agustus 2020.
- Kompas.com. (2020b). Daftar Konser dan Festival Musik yang Ditunda karena Virus Corona (09/03/2020), diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2020/03/09/075325266/daftar-konser-dan-festival-musik-yang-ditunda-karena-virus-corona?page=all>, pada 25 Agustus 2020.
- Kompas.com (2019). Konferensi Musik Indonesia 2019 Akan Bahas Industri yang Lebih Adil (19/11/2019), diakses dari <https://www.kompas.com/hype/read/2019/11/19/174833766/konferensi-musik-indonesia-2019-akan-bahas-industri-yang-lebih-adil> pada 25 Agustus 2020.
- Klangie, N. S. (1994). *Perubahan dan Konsekuensi: Suatu Kajian Umum Mengenai Pola Penyakit dalam Konteks Perubahan-Perubahan Sosio-budaya dalam Lingkungan hidup, dalam Kebudayaan dan Kesehatan: Pengembangan Pelayanan Kesehatan Primer Melalui Pendekatan Sosiobudaya*. Jakarta: Kesaint Blanc.
- Koentjaraningrat. (1993). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan.
- Nasrullah, R. (2017). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Socioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Robin, W. (2020). “The 1918 Pandemic’s Impact on Music? Surprisingly Little” *Nytimes.com* published on May 6, 2020, diakses dari <https://www.nytimes.com/2020/05/06/arts/music/1918-flu-pandemic-coronavirus-classical-music.html>, pada 25 Agustus 2020.
- Rahman, T. 2017. *Pop Kosong Berbunyi Nyari: 19 Hal yang Tidak Perlu Diketahui tentang Musik*. Jakarta: Elevation Books.
- Saifuddin, A. F. & Lapau, B. (2015). *Epidemiologi dan Antropologi: Suatu Pendekatan Integratif Mengenai Kesehatan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Scott, J. C. (1998). *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition*

- Have Failed. New Haven: Yale University Press. <https://doi.org/10.1017/S0020859099660503>
- Styawan, A. (2020). Galeri Foto, Konser Musik “Drive-in” Semarang (30/07/2020), diakses dari <https://kompas.id/baca/hiburan/2020/07/30/konser-musik-drive-indi-semarang/> pada tanggal 25 Agustus 2020.
- Wikstrom, Patrik. (2009). The Music Industry: Music in the Cloud. Cambridge: Polity Press. <https://doi.org/10.1017/S0265051712000149>
- WHO. (2020). Origin of SARS-CoV-2 (26 March 2020), diakses dari [https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332197/WHO-2019-nCoV-FAQ-Virus\\_origin-2020.1-eng.pdf](https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/332197/WHO-2019-nCoV-FAQ-Virus_origin-2020.1-eng.pdf), pada tanggal 30 Agustus 2020.

# **RUMAH SAKIT BERI-BERI PADA PERANG DI ACEH DAN MUNCULNYA KEBIJAKAN KESEHATAN KOLONIAL 1873-1900-AN**

## ***THE BERI-BERI HOSPITAL DURING THE WAR IN ACEH AND THE EMERGENCE OF A COLONIAL MEDICAL POLICY 1873-1900S***

**Wahyu Suri Yani<sup>1</sup>, Agus Suwignyo<sup>2</sup>**

*History Department, Faculty of Cultural Sciences Universitas Gadjah Mada  
E-mail: wahyu.suri.y@mail.ugm.ac.id<sup>1</sup>, suwignyo\_agus@ugm.ac.id<sup>2</sup>*

### **ABSTRACT**

*During the war in Aceh (1873-1900s), a number of soldiers from the Dutch side suffered from beri-beri. The disease caused many casualties. Yet, it took the colonial medical force no less than twenty years to scientifically understand the disease and its cure. The aim of this article is to examine the policies that the colonial government made in the handling and mitigation of beri-beri during the war against the Aceh people. Using archives from Algemene Secreterie Atjeh Zaken, Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie and other primary sources, this article shows the changing medical concepts in the colonial policy, inter alia by the founding of beri-beri specialized hospital in Sumatra Westcoast. It is argued that the attempts to quarantine beri-beri infected soldiers in the Aceh War created a basis of colonial medical policy on beri-beri for the larger context of the Netherlands Indies. Discourses about medical topography, which emphasized the importance of local elements in the treatment of beri-beri patients, were part of the long process of the invention of beri-beri drug, tiamin.*

**Keywords:** *Aceh War, beri-beri, medical topography, colonial medical policy, Sumatra Westcoast*

### **ABSTRAK**

Selama Perang di Aceh (1873-1900an), penyakit beri-beri menyerang tentara Belanda dan menyebabkan banyak kematian di pihak Belanda. Namun tenaga medis kolonial memerlukan waktu lama—hampir 20 tahun—untuk mempelajari jenis penyakit ini dan cara pengobatannya. Artikel ini mengkaji upaya-upaya pemerintah kolonial dalam menangani dan memitigasi penyebaran penyakit beri-beri selama perang di Aceh. Melalui arsip *Algemene Secreterie Atjeh Zaken, Geneeskundig tijdschrift voor Nederlandsch-Indie* dan sumber primer lain, artikel menunjukkan perubahan konsep tentang kesehatan dalam kebijakan medis kolonial antara lain didirikannya rumah sakit khusus beri-beri di Sumatra Westkust. Artikel ini menegaskan bahwa usaha pengobatan di rumah sakit khusus dalam menghadapi beri-beri sebagai wabah baru, menjadi etalase utama dalam menjawab persoalan beri-beri yang juga telah merebak di berbagai pusat pemerintahan Hindia Belanda. Diskursus tempat sehat dan topografi kesehatan Sumatra Westkust yang menekankan pendekatan lokalitas dalam penanganan kesehatan masyarakat, menjadi bagian dari proses panjang dalam penemuan zat anti beri-beri atau tiamin.

**Kata kunci:** *Perang Aceh, wabah beri-beri, topografi kesehatan, kebijakan medis kolonial, Sumatra Westkust*

### **PENDAHULUAN**

Wabah COVID-19 yang menimpa hampir seluruh negara di berbagai belahan dunia adalah cermin benang merah sejarah wabah yang terjadi pada masa lalu. Wabah dapat menyebabkan tingginya angka kematian bila tidak dihadapi dengan kebijakan khusus terutama jika wabah

tersebut belum dikenal dan baru muncul di tengah masyarakat. Wabah COVID-19 sebagai persoalan hari ini memengaruhi berbagai sendi kehidupan. COVID-19 tidak hanya menyebabkan kematian, tetapi juga mengubah arah kehidupan dalam beraktivitas. COVID-19 telah melahirkan sistem baru dalam kehidupan masyarakat dan

mengubah gerak politik ekonomi dan sosial budaya masyarakat.

Keadaan seperti itu juga terjadi ketika wabah beri-beri merajalela pada abad ke-19. Ketika beri-beri menyerang tentara Belanda dalam perang di Aceh (1873-1929), belum ada personil medis kolonial yang tahu jenis penyakit itu. Oleh karena itu, meskipun korban di pihak tentara Belanda akibat beri-beri telah berjatuhan sejak awal perang, upaya untuk menanganinya masih belum efektif sampai jangka waktu yang lama. Banyaknya beri-beri yang menimpa tentara Belanda di Aceh, mengakibatkan berkurangnya secara drastis tentara sebagai kekuatan Belanda dalam menaklukkan Aceh. Ketika tentara sebagai tonggak utama dalam mempertahankan dan memperluas daerah koloni mendapat masalah, hal itu akan memengaruhi durasi peperangan dan mengurangi potensi kemenangan Belanda. Di daerah lain beri-beri hanya terdapat pada pusat-pusat pemerintahan Belanda, seperti di pertambangan, perkebunan, penjara, barak-barak tentara dan di sekolah yang memiliki asrama. Fakta bahwa pasien beri-beri adalah pihak Belanda dan sebagian besar pejabat pemerintah dan tentara, membuat masyarakat Aceh menyebut beri-beri sebagai “penyakit pemerintah”. Sementara itu, pasukan Kesultanan Aceh sebagai lawan Belanda dalam perang di Aceh tidak terkena beri-beri. Begitu juga dengan penduduk di sekitar lingkungan tangsi, barak tentara, perkebunan, dan pertambangan Belanda, tidak ada yang terkena beri-beri.

Pada saat itu, beri-beri mengakibatkan tingginya angka kematian yang melumpuhkan sepertiga pasukan Belanda dan menjadi hambatan Belanda mencapai kemenangan dalam memerangi Kesultanan Aceh. Ketakutan akan kekalahan dan kekhawatiran akan kepunahan tentara ras Eropa mendorong Belanda mengevakuasi pasien dan mendirikan rumah sakit khusus beri-beri di Sumatra Westkust yang jauh dari lokasi perang.

Kesulitan dan kesibukan Belanda dalam mengevakuasi pasien ke Sumatra Westkust di tengah kecamuk perang di Aceh terlihat dari berbagai arsip. Antara lain, *Algemene Secretarie Atjeh Zaken* edisi dari tahun 1876 sampai awal abad ke-20, dan *Koloniaal Verslag* atau Laporan

Pemerintah Kolonial. Sementara itu, tulisan tentang usaha penyembuhan pasien ditemukan dalam laporan kesehatan pada jurnal *Geneeskundig Tijdschrift voor Nederlandsch Indies* dari dokter yang bertugas di Aceh dan Sumatra Westkust, dan pada catatan pribadi pasien beri-beri. Namun, literatur yang membahas wabah beri-beri di tengah perang antara Belanda dengan Aceh masih sangat terbatas jumlahnya baik dalam historiografi Indonesia maupun historiografi Belanda. Beberapa penulis perang di Aceh seperti H. Mohammad Said, Ibrahim Alfian, Zentgraaff, Paul van ‘T Veer, Anthony Reid, dan M. Dien Madjid, hanya menyinggung tentang adanya wabah beri-beri di tengah perang dan hanya menonjolkan aspek politik dan ekonomi perang pada kasus perang di Aceh itu.

Hans den Hertog (1991) menulis tentang pelayanan kesehatan dalam perang di Aceh. Walaupun menyebut adanya wabah beri-beri dalam tulisannya, Hertog memfokuskan diri pada penanganan luka dalam pertempuran perang. Sementara itu Bergen (2004) melihat sudut pandang perang di Aceh dari kaca mata pelayanan Palang Merah Hindia Belanda. Penulisan sejarah Sumatra Westkust sebagai tempat evakuasi pasien dan tempat didirikannya rumah sakit khusus beri-beri juga minus dalam berbagai literatur tentang Sumatra Barat, misalnya “Paco-Paco Kota Padang” oleh Freek Colombijn, “Padang Riwayat Dulu” oleh Rusli Amran dan berbagai karya oleh Gusti Asnan tentang sejarah Sumatra Westkust. Hanya tulisan Dedi Arsyah (2015:160) yang mengulas berbagai wabah penyakit yang melanda Sumatra Westkust dan penanganannya oleh pemerintah. Dedi menyatakan bahwa beri-beri menyerang tangsi-tangsi di Kota Padang ketika evakuasi pasien beri-beri dari Aceh berlangsung.

Didorong oleh ketimpangan historiografi penulisan sejarah penyakit beri-beri semasa Perang di Aceh tersebut, artikel ini bertujuan merekonstruksi penyebaran wabah beri-beri dalam perang di Aceh dan langkah-langkah penanggulangan yang dilakukan oleh pemerintah kolonial Belanda. Langkah-langkah itu antara lain tindakan mengevakuasi pasien ke tempat yang jauh dari lokasi perang dan keputusan untuk mendirikan rumah sakit khusus beri-beri. Tulisan



ini juga memaparkan mengapa wabah beri-beri yang telah menyebar sejak awal perang Aceh tahun 1873 baru direspons dengan kebijakan kesehatan yang menyeluruh sekitar 20 tahun kemudian, yaitu pada akhir abad ke-19. Tulisan ini diharapkan berguna untuk memberikan gambaran penyakit dan konsep sehat pada masa kolonial Belanda. Tulisan ini juga diharapkan menyumbangkan pemahaman pada masa sekarang tentang pentingnya mengambil kebijakan yang akurat dan efisien dalam menangani wabah yang sedang berkembang. Peran penting rumah sakit sebagai institusi utama kesehatan dalam menghambat lajunya penyebaran wabah beri-beri pada masa kolonial menjadi contoh perbaikan pelayanan dan pengobatan dalam menghadapi wabah sekarang dan akan datang melalui kerja sama dengan berbagai pihak, terutama masyarakat sekitar.

### **MEREBAKNYA BERI-BERI**

Pembangunan rumah sakit di sebuah kota tidak terlepas dari fungsi dan perkembangan kota tersebut. Di masa kolonial, keberadaan rumah sakit juga berperan dalam penaklukan daerah koloni. Ketika awal perang Aceh pada tahun 1873, Belanda mempersiapkan petugas kesehatan berpangkat sersan sebagai perawat pasien perang. Belanda juga mempersiapkan kapal sebagai rumah sakit angkatan laut, dan tandu khusus untuk mengangkut tentara yang terluka (Mochtar, 2007). Kasus yang dihadapi adalah banyaknya tentara yang terluka karena sabetan klewang (senjata khas Aceh). Kekalahan Belanda ketika ekspedisi awal ke Aceh tidak memberi Belanda kesempatan untuk membuat *basecamp* kesehatan di sekitar Aceh. Saat itu Belanda mendapatkan informasi yang salah tentang situasi dan posisi istana Kesultanan Aceh. Ekspedisi pertama yang tidak menguntungkan menyebabkan Belanda menggunakan kapal, yang tidak hanya berfungsi sebagai wahana transportasi, tetapi juga sebagai rumah sakit, rumah, dan kantor untuk memberi komando perang.

E.B Kielstra menjelaskan bahwa untuk kebutuhan merawat pasien pada tahun-tahun awal perang telah dibangun rumah sakit sementara pada tahun 1876 (Kielstra, 1883:893). Keadaan rumah sakit sementara dikritik oleh kepala dinas kesehatan yang bertugas di Aceh karena jeleknya

kualitas infrastruktur rumah sakit tersebut. Kepala dinas kesehatan merasa sangat tidak puas karena bangunan rumah sakit terbuat dari bambu yang tidak membantu melawan cuaca dan angin.

Kekurangan rumah sakit sementara tersebut dan kebutuhan perang yang mendesak menjadi dasar pertimbangan didirikannya rumah sakit permanen di Kutaradja Aceh. Dalam meluaskan kekuasaannya ke pedalaman Aceh, Belanda juga mendirikan rumah sakit sementara lainnya seperti di Blang Oe. Laporan *Atjeh Zaken* menyebutkan, rumah sakit Blang Oe kemudian dirobohkan. Sebagai gantinya didirikan rumah sakit di Ketapang Dua dan di bagian utara dan selatan wilayah lini tenggara Aceh. Persiapan kesehatan hanya berfokus pada upaya menangani luka dalam perang. Belanda tidak memperkirakan bahwa permasalahan kesehatan yang akan mereka hadapi selama perang di Aceh adalah wabah penyakit.

Banyak penyakit mengenai tentara Belanda selama perang di Aceh, di antaranya kolera dan sipilis. Akan tetapi, penyakit yang bertahan paling lama yang menyerang tentara Belanda di Aceh adalah penyakit beri-beri. Dalam rentetan panjang perang di Aceh sejak tahun 1873, Belanda melaporkan pertama kalinya prajuritnya diserang beri-beri pada tahun 1874. Persentase tentara Belanda yang terkena beri-beri meningkat tajam di atas 10% pada tahun 1879. Puncak dari permasalahan beri-beri adalah tahun 1885, yaitu ketika sebanyak 36,5% atau sebanyak 10.633 dari 29.100 tentara Belanda menderita beri-beri dan 710 orang di antaranya meninggal. Tahun 1886 sebanyak 34,98% atau 9760 orang dari 27.900 orang tentara, menderita beri-beri dan 547 orang di antaranya meninggal. Dari 31.100 tentara tahun 1887, sebanyak 6.200 atau 24% terkena beri-beri dan yang meninggal 262 orang (Van den Burg, 1896:83-90). Dari korban beri-beri pada tahun 1885, 1886, dan 1887 itu, yang paling memukul pemerintah Belanda adalah korban beri-beri dari kalangan bangsa Eropa. Dari keseluruhan korban beri-beri di atas, pada tahun 1885 penderita beri-beri dari kalangan bangsa Eropa berjumlah 1.806 orang dan 54 orang di antaranya meninggal. Tahun 1886 ada 3.703 orang Eropa di Aceh penderita beri-beri dan 114 orang meninggal sedangkan tahun 1887, 2.060 orang Eropa menderita beri-beri dengan jumlah meninggal 12 orang.

Dalam arsip “*Beri-beri Te Atjeh*” yang ditulis oleh Niclou disebutkan bahwa, selain para tentara yang menjadi korban beri-beri adalah para budak dan orang hukuman. Mereka menjadi korban utama. Hal ini tidak terlepas dari faktor kelelahan akibat beban kerja perang yang dilimpahkan. Selain itu juga karena para budak dan orang hukuman ini mendapatkan makanan dengan mutu paling rendah dan seadanya. Akibatnya kondisi kesehatan dan stamina mereka melemah dan mereka menjadi rentan terserang penyakit beri-beri (Niclou, 1887). Penyusutan jumlah tenaga kerja paksa dan orang hukuman sangat mempengaruhi kekuatan Belanda. Peran mereka sangat krusial sebagai tameng dan umpan empuk di garda depan perang. Ketika Belanda sedang sibuk menghadapi penyakit beri-beri, di lain sisi kekuatan Kesultanan Aceh berada pada masa kegemilangan. Pengangkatan sultan baru dan lahirnya tokoh-tokoh yang kuat dan berpengaruh di tengah masyarakat melahirkan semangat dan corak baru dalam menantang Belanda. Kegemilangan ini dibuktikan dengan serangan yang bertubi-tubi ke daerah pertahanan Belanda yang sedang melaksanakan strategi konsentrasi.

Di tengah kecamuk perang kedua belah pihak diiringi wabah beri-beri yang menggerogoti tubuh ketentaraan pihak Belanda, rumah sakit permanen di Aceh baru diresmikan tahun 1880 di Kutaradja Panteh Perak Aceh. Fasilitas rumah sakit terdiri atas delapan ratus tempat tidur dan dianggap sebagai rumah sakit besar dan modern di Sumatra (Hans den Hertog, 1991:55). Fondasi utama rumah sakit mulai dibangun tahun 1877, dan keseluruhan bangunan selesai dibangun tahun 1879. Ketika baru pada tahap pembangunan, rumah sakit Panteh Perak tersebut langsung teruji ketidakidealannya. Schute menceritakan:

“Tembok rumah sakit yang setinggi tiga hingga empat meter, tidak membantu menghadapi banjir dari sungai Aceh sehingga petugas kesehatan harus melakukan tugasnya dengan sepatu bot menghadapi air tinggi. Selama banjir pada 18 Juli 1878, sejumlah warga Aceh berhasil pergi ke rumah sakit dengan perahu dan menyelip ke kamar pasien beri-beri. Sepuluh orang Jawa berhasil dibunuh dan 46 orang mengalami luka” (D. Schoute, 1936:356).

Karena militer merupakan kekuatan utama Belanda dalam menjaga kestabilan dan keamanan wilayah kekuasaan Hindia Belanda (Lucia Arter Lintang Gritantin, 2005), rumah sakit menjadi elemen utama dalam mendukung upaya militer untuk memenangi setiap pertempuran. Tetapi keberadaan rumah sakit militer di Aceh tidak menjawab permasalahan beri-beri. Dalam keadaan darurat seperti itu kebijakan Belanda untuk menghadapi beri-beri adalah dengan mengevakuasi pasien dari medan perang. Sejak awal perang di Aceh, Belanda sudah menjadikan Padang sebagai Kota Militer dan pusat perbekalan bagi tentara yang sedang beroperasi, dilengkapi rumah sakit militer tempat merawat tentara yang sakit atau cidera selama perang di Aceh (Rusli Amran, 1988:11-58). Ketika beri-beri merebak di Sumatra Westkust, pasien beri-beri yang dievakuasi awalnya disatukan dengan pasien lainnya. Tindakan itu kemudian ditingkatkan dengan kebijakan mendirikan rumah sakit khusus beri-beri. Sebelum mengevakuasi pasien beri-beri ke Sumatra Westkust, pemerintah kolonial melihat bahwa rumah sakit termodern di Kutaradja tidak bisa menampung pasien beri-beri (A.A. Loedin, 2005:216), walaupun sekedar sebagai tempat persinggahan sementara sebelum dievakuasi ke Sumatra Westkust.

Proses evakuasi pasien beri-beri dari Aceh menuju Sumatra Westkust menggunakan *ziekenschip* atau kapal rumah sakit. *Ziekenschip* yang paling terkenal dalam perang di Aceh ini adalah kapal laut Sindoro dan Salak. Kapal Salak tenggelam pada 1875 dan tidak diganti. Beberapa tahun kemudian, diadakan pelayaran teratur setiap 14 hari oleh *Nederlandsch-Indische Stoomvaart Maatschappij* (Perusahaan Pelayaran Kapal Uap Hindia Belanda) dan sesudah 1890 dibantu kapal-kapal *Koninklijke Paketvaart Maatschappij* (Perusahaan Kerajaan untuk Pelayaran Barang) (Salm, 1919:131-148). Aktivitas kesibukan *ziekenschip* selalu tercatat dalam *Gedeponeerd Agenda Atjeh Zaken* setiap harinya. *Ziekenschip* pertama membawa 70 tentara dan 5 orang buruh/kuli ditambah 90 orang tentara Eropa pasien kolera. Proses evakuasi pasien dari Aceh ke *Sumatra Westkust* dan ke Batavia mempersibuk dan menekan Belanda karena biaya evakuasi yang tinggi.

Sebagian tentara Belanda terpaksa dipulangkan karena menderita beri-beri (Erni, 1884a:95-109; Erni, 1884b:177-192), karena dianggap berpotensi menularkan ke tentara yang sehat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap kekuatan tentara Belanda yang menyebabkan jumlahnya berkurang secara signifikan dan menjadi kendala utama dalam upaya penaklukan daerah Aceh. Di tengah kondisi perang di Aceh, pemerintah Belanda mengalami masalah ganda, yaitu keterbatasan kekuatan untuk menghadapi tentara Aceh dan kesibukan mengatur evakuasi tentara yang terkena wabah beri-beri. Di lain sisi, rakyat sekitar benteng Belanda di Aceh tidak mengenal dan tidak pernah menderita beri-beri, begitu juga dengan tentara Kesultanan Aceh.

### **Evakuasi Pasien Beri-Beri dari Aceh ke Sumatra Westkust**

Lokasi rumah sakit khusus untuk pasien beri-beri ditentukan oleh kota sebagai pusat pemerintahan Belanda. Belanda membuat kota yang saling melengkapi seperti Batavia sebagai kota pemerintahan dan pusat bekerja menyandingkan dengan Bogor sebagai tempat istirahat, Kota Medan dengan Deli dan sebagainya. Begitu juga di Sumatra Westkust, Belanda menyandingkan Padang sebagai ibu kota yang sibuk dengan administrasi pekerjaan dan Fort de Kock atau Bukittinggi sebagai pusat “Padang Pedalaman” dan tempat peristirahatan.

Keputusan Belanda mengevakuasi pasien perang Aceh ke Sumatra Westkust, tidak terlepas dari faktor internal di Aceh dan faktor eksternal yang ditawarkan Sumatera Westkust. Keberadaan Kota Padang dan Fort de Kock yang jauh dari lokasi perang menjadi pertimbangan sebagai tempat evakuasi pasien Aceh agar aman dari gangguan perang, apalagi orang Aceh juga menjadikan rumah sakit sebagai target untuk diserang. Faktor kedua adalah karena kurang memadainya rumah sakit di Aceh, yang tidak mampu menampung jumlah pasien yang kian membengkak (Dien Madjid, 2014:39). Keadaan Aceh sebagai daerah baru yang belum dikenal dan sebagai medan perang tidak terlalu mendukung tujuan untuk menyembuhkan pasien

akibat keadaan keamanan dan fasilitas yang terbatas.

Ketiga adalah asumsi wabah beri-beri sebagai penyakit yang menular secara langsung. Anggapan ini muncul karena banyaknya tentara terserang penyakit beri-beri dan meninggal, seperti ketika diserang penyakit kolera. Karena anggapan beri-beri sebagai penyakit menular, maka pemerintah memperlakukan pasien beri-beri sama dengan perlakuan terhadap penderita penyakit lainnya, seperti kolera. Pasien harus dibawa jauh dari lokasi orang-orang yang masih sehat. Pedoman mengobati beri-beri sebagai penyakit menular sudah diterbitkan oleh pemerintah Belanda dalam buku yang ditulis oleh Van Den Burg. Van der Burg menjelaskan cara penyembuhan penyakit beri-beri sebagai berikut:

“Obatnya beri-beri yaitu orang sakit tidak boleh tinggal pada tempat ia kena penyakit itu, mesti mengalih. Jikalau ada sakit biri-biri di dalam sebuah rumah dan pada negeri atau desa itu tidak ada penyakit itu, mesti berpindah dari rumah itu dan tiada boleh banyak-banyak orang yang sakit begitu diobati didalam sebuah tempat. Orang yang sakit itu mesti banyak keluar pada hawa yang bersih, jangan berkurung saja, dan berjalan-jalan perlahan-lahan. Maka orang sakit beri-beri tiada boleh mengisap madat (*makan njandoe, njeret*) dan tiada boleh dikasih morpin atau laudanun.”(Van Der Burg, 1896:10-12)

Van Den Burg menjelaskan bahwa pasien beri-beri tidak boleh tinggal di tempat terkena penyakit, tidak boleh banyak pasien yang diobati dalam satu tempat dan pasien dianjurkan banyak bergerak atau berjalan keluar di udara yang bersih. Hal ini menjawab mengapa pasien beri-beri dibawa keluar jauh dari Aceh ke Sumatra Westkust dan Batavia. Pasien harus mendapat udara yang bersih, sehingga tempat-tempat yang dipilih adalah daerah pegunungan dengan suhu sejuk. Tulisan Van den Berg diterbitkan tahun 1896 ketika penyebab beri-beri masih dalam perdebatan para ilmuwan sebagai penyakit menular. Bersamaan ketika Eijkman sedang sibuk meneliti dan memecahkan teka-teki tentang beri-beri. Mengevakuasi pasien jauh dari medan perang dan mendirikan rumah sakit khusus adalah sebagai langkah awal menjawab rahasia beri-beri.

Faktor yang ditawarkan Sumatra Westkust adalah Sumatra Westkust sudah menjadi *basecamp* utama Belanda setelah menaklukkan Padang Pedalaman dalam Perang Padri. Padang sudah menjadi kota pertahanan dan pusat pemerintahan Belanda, sedangkan Fort de Kock atau Bukittinggi menjadi pusat pemerintahan Padang Bovenlanden atau Padang Tanah Tinggi. Di kedua kota ini Belanda sudah membangun basis militer dengan berbagai fasilitas pemerintahan dan telah mendirikan rumah sakit militer. Belanda sudah mengenal dengan baik daerahnya, suhunya, struktur masyarakat melalui berbagai kajian antropologi dan budaya serta topografi kesehatan Sumatra Westkust.

Kajian topografi kesehatan tentang Sumatra Westkust menjadi sebuah rujukan untuk mengetahui kelayakan tempat tersebut sebagai daerah tinggal orang Eropa (Gani Jaelani, 2017:37-46). Berdasarkan hasil itu, Sumatra Westkust terutama daerah Padang Pedalaman menjadi salah satu daerah yang direkomendasikan untuk pemulihan kesehatan dan liburan karena udaranya seperti musim gugur di Eropa. Peperangan di Aceh mendorong semakin berkembangnya perekonomian Kota Padang karena Padang menjadi pangkalan militer kapal-kapal yang membawa perbekalan dan bala tentara baru yang mendorong perdagangan. Pergerakan tentara memerlukan jalan yang lebih baik dari Padang ke Dataran Tinggi Padang. Hal ini menjadi pemicu dibangunnya jalur-jalur transportasi baru menyusul sebuah jalan yang selesai dibangun melewati Lembah Anai pada tahun 1841, yang cocok dilewati pedati sekaligus sebagai transportasi mengangkut kopi (Freek Colombijn, 2006: 67-147).

Padang menjadi kota militer dan pusat perbekalan bagi tentara yang sedang beroperasi di Aceh, baik sebagai tempat peristirahatan atau tempat merawat tentara yang sakit atau cedera perang. Berbagai fasilitas yang lengkap memperkuat posisi Padang sebagai kota pertahanan. Di sepanjang sungai Batang Harau sebagai pusat pemerintahan Belanda terdapat bangunan militer, pemerintahan dan kantor-kantor dagang. Sebelum pelabuhan Teluk Bayur dibuka, kapal berlabuh di dekat Pulau Pisang Gadang di kawasan Air Manis. Di sana terdapat *bedeng* (barak) prajurit

dan perwira, rumah sakit sederhana, gedung batubara, kuburan, dan sebuah tiang tinggi (mercusuar) hampir 30 meter di bagian selatan yang berfungsi untuk memberikan tanda kedatangan kapal. Di tepi Muara Batang Arau terdapat gedung penyimpan senjata kebutuhan perang Aceh. Di belakangnya juga terdapat rumah sakit khusus bagi “Orang Rantai” yakni para narapidana yang diwajibkan melakukan kerja paksa. Kemudian terdapat rumah sakit tentara, dulunya menyerupai benteng kalau dilihat dari luar. Di dekat rumah sakit terdapat rumah-rumah perwira (Rusli Amran, 1988:11-58). Berbagai fasilitas tersebut memperkuat posisi Sumatera Westkust sebagai tempat konsolidasi peperangan di Aceh.

Pasien beri-beri yang dievakuasi awalnya masih disatukan dengan pasien berpenyakit lain di rumah sakit militer Padang dan Fort de Kock. Ketika beri-beri yang diasumsikan sebagai penyakit menular semakin luas penyebarannya, maka pemerintah kolonial Belanda mendirikan rumah sakit khusus untuk pasien beri-beri, ditambah dengan jumlah pasien beri-beri dalam perang di Aceh yang sangat banyak. Belanda mulai memberikan perhatian serius dengan mengeluarkan surat keputusan pendirian rumah sakit khusus beri-beri.

Tempat evakuasi pasien beri-beri di Sumatra Westkust dibagi menjadi dua. Pertama *Gezondheid Etablissement* (Kompleks Kesehatan) di Oeloe Limau Manis, Kota Padang atau dikenal dengan Rumah Sakit Khusus Beri-beri Oeloe Limau Manis. Kompleks kesehatan tersebut khusus didirikan untuk menampung tentara yang dievakuasi dari perang Aceh karena menderita Beri-beri (Keizer, 1932:251-252. Kedua, pasien beri-beri juga ada yang dikirimkan ke rumah sakit di pedalaman Minangkabau yang oleh Belanda disebut sebagai Rumah Sakit Fort de Kock (Bukittinggi). Rumah sakit Fort de Kock diperluas dari fungsi sebelumnya sebagai rumah sakit umum dan dimanfaatkan untuk menampung pasien beri-beri (Salm, 1919:131-148). Karena jumlahnya demikian banyak, penderita juga dikirimkan ke beberapa rumah sakit di Jawa, antara lain ke rumah sakit beri-beri di Batu Tulis Bogor. Rumah sakit beri-beri Batu Tulis ini memiliki fasilitas 250 tempat tidur. Rumah sakit beri-beri

Batu Tulis menampung tidak hanya pasien beri-beri dari Aceh tetapi juga dari beberapa daerah lainnya.

### ***Evacitatie Hospitaal Beri-Beri Oeloe Limau Manis Padang***

Dievakuasinya dengan kapal tentara Belanda yang terkena beri-beri dari Aceh ke Oeloe Limau Manis sudah menjadi memori khusus bagi masyarakat Padang. Pada umumnya penduduk Padang dapat mengetahui kedatangan kapal berkat isyarat-isyarat yang terdapat pada sebuah tiang bendera di puncak bukit. Dari isyarat-isyarat itu, penduduk sudah mengetahui jenis kapal yang datang. Apakah kapal membawa tentara, atau membawa orang berpenyakit menular, membawa mayat, atau membawa seorang petinggi pemerintah, atau hanya sebuah kapal dagang. Semua itu diketahui dengan melihat warna bola-bola dan cara bola-bola itu digantungkan di tiang bendera (Rusli Amran, 1988). Pasien beri-beri berada dalam bagian kapal yang diperuntukkan bagi orang berpenyakit menular. Ketika kapal merapat, keberadaan orang berpenyakit menular harus dihindari dan segera dipindahkan ke tempat khusus di darat. Maka dibuatkan tempat khusus atau diisolasi agar orang tersebut tidak menularkan penyakitnya kepada yang lainnya. Padang sebagai ibukota Sumatra Westkust terletak di tepi pantai yang berudara panas yang tidak ideal untuk perawatan pasien. Bagaimana panasnya Padang diungkapkan dalam catatan harian Pavel Durdik:

“Saya telah selesai menulis di Padang yang panas, gerah dan berat, dengan malam-malamnya yang panas. Di Aceh, setidaknya ada kesegaran dan kelegaan di malam hari, tetapi di sini, ketika tidak hujan, anda terus-menerus berada dalam oven. Air dingin apapun yang kita minum disini tidak berefek.” (Pavel Durdik, 2010)

Pavel Durdik adalah salah satu dokter perang di Aceh, yang dievakuasi ke Sumatra Westkust karena sakit malaria. Dalam buku hariannya Pavel Durdik mengeluhkan betapa panasnya Kota Padang. Panasnya Kota Padang tidak sesuai dengan kriteria pendirian rumah sakit beri-beri yang membutuhkan udara segar yang sejuk. Tetapi Lokasi yang digunakan untuk tempat evakuasi pasien beri-beri adalah di Oeloe Limau

Manis Padang. Dalam berbagai literatur sejarah Padang, misalnya “Paco-Paco Kota Padang” tulisan Freek Colombijn, “Padang Riwayat Dulu” oleh Rusli Amran, dan juga tulisan-tulisan Gusti Asnan disebutkan bahwa Padang merupakan kota tempat evakuasi pasien perang dari Aceh. Namun studi-studi tersebut tidak menjelaskan bahwa di Padang pernah ada rumah sakit khusus untuk pasien beri-beri. Studi-studi itu lebih menyorot kawasan pemerintahan kolonial dengan fasilitas rumah sakit militer dan daerah pecinan di sekitar muara Batang Arau sedangkan daerah lainnya adalah kawasan penduduk pribumi.

Lokasi Oeloe Limau Manis cocok untuk penyembuhan pasien beri-beri yang waktu itu masih digolongkan sebagai penyakit menular. Dalam menghadapi “penyakit menular” beri-beri, salah satu metode penyembuhannya oleh Belanda disamakan dengan penyembuhan penyakit kolera. Penyembuhan beri-beri membutuhkan tempat khusus yang dikenal dengan nama *asylum*. Informasi keberadaan Oeloe Limau Manis sebagai tempat rumah sakit khusus beri-beri pada masa perang di Aceh terdapat dalam koran-koran Belanda dan *koloniaal verslag*. Lokasi Oeloe Limau Manis berbeda dengan Limau Manis lokasi tempat berdirinya kampus Universitas Andalas saat ini. Oeloe Limau Manis bersuhu sejuk dibandingkan daerah lainnya di Kota Padang karena letaknya yang jauh dari pantai, tepatnya di Bukit Karamunting. Bukti yang kuat tentang keberadaan rumah sakit beri-beri Oeloe Limau Manis ini ditunjukkan oleh *Topografisch Bureau* yang di cetak tahun 1889, seperti pada Gambar 1.

Oeloe Limau Manis dalam peta tersebut berada dalam ruang lingkup Afdeeling Padang, posisi persisnya dekat daerah Ambacang Padang. Peta tersebut menjelaskan lokasi Oeloe Limau Manis sebagai *Evacuatie Hospitaal* atau rumah sakit evakuasi. Oeloe Limau Manis adalah timurnya Padang dan terletak jauh dari pantai. Gusti Asnan menuliskan kawasan timur, yang relatif jauh dari bibir pantai, memang lebih sehat dan bisa dikatakan aman dari bencana tsunami (Gusti Asnan, 2013). Penempatan rumah sakit beri-beri di Oeloe Limau Manis yang terletak di daerah kawasan penduduk pribumi menyimpang dari tata pembangunan kota kolonial. Apalagi rumah sakit



**Sumber Foto:** Topographisch Bureau (1889), *Oeloe Limau Manis [peta] Topographisch Bureau* (Batavia: Topographisch Bureau).

**Gambar 1:** Peta Oeloe Limau Manis dalam kawasan Kota Padang (Koleksi Perpustakaan Nasional Republik Indonesia).

itu berada di daerah kekuasaan pribumi. Kawasan rumah sakit berada di perbukitan yang banyak pohon dan sampai sekarang memiliki udara yang sejuk dingin, berbeda dengan kawasan pusat perkantoran pemerintahan Belanda yang terletak di tepi pantai yang memiliki udara panas. Salah satu alasan Oeloe Limau Manis dekat Padang dipilih sebagai tempat didirikannya rumah sakit beri-beri adalah karena udara dan lingkungannya yang sejuk (Sjoerd Zondervan, 2016:80).

Kessler melaporkan pengalamannya Ketika berada di Gezondheid Etablissement (Kompleks Kesehatan) di Oeloe Limau Manis, Sumatera Barat. Kompleks kesehatan tersebut khusus didirikan untuk menampung tentara yang dievakuasi dari perang di Aceh karena menderita beri-beri. *Evacuatie Hospitaal* Oeloe Limau Manis dalam peta adalah lokasi yang sama dengan Gezondheid

Etablissement (Kompleks Kesehatan) di Oeloe Limau Manis tempat Kessler melakukan praktek pengobatan beri-beri (Kessler, 1897: 339-358).

Pengalaman Sumatra Westkust dalam menangani penyakit beri-beri sudah dimulai sejak awal perang. Tahun 1873, para awak kapal api Hertog Bernard setelah cukup lama berada di Teluk Lampung berlayar ke Padang. Sesampai di Padang separuh awak kapal terpaksa di rawat karena penyakit beri-beri (Neeb, 1873:88-100). Begitu juga ketika para kuli di Pulau Pisang Padang yang bekerja untuk membangun mercusuar terkena beri-beri pada tahun 1880. Para kuli tersebut masih muda dan sejak awal datang dalam keadaan sehat. Tuduhan karena keracunan, kemudian pemeriksaan makanan dan kualitas air tidak menghindarkan kematian di antara mereka (Erni, 1885:177-192). Sementara itu pada tahun

1884 narapidana di penjara-penjara Kota Padang yang terkena beri-beri ketika dipulangkan ke desa-masing-masing tanpa pengobatan, ternyata sembuh begitu saja (Nicolou, 1887:12; Dedi Arsyah, 2015:160). Berbagai kasus beri-beri yang dihadapi di Sumatra Westkust menjadi gambaran bagi para dokter dalam menghadapi pasien beri-beri dari perang di Aceh.

Selama dirawat di Rumah Sakit khusus beri-beri Oeloe Limau Manis Padang pasien beri-beri dari Aceh dirawat dengan berbagai metode pengobatan. Salah satunya adalah dengan pengobatan simptomatis dan pemberian makanan standar rumah sakit, ditambah sedikit minuman anggur, susu dan telur. Penderita dengan cepat sehat kembali (Keizer, 1932). Metode pemberian makanan yang lebih bergizi daripada menu makanan dalam perang di Aceh tidak terlepas dari pengalaman yang dibagi oleh Van Leent dalam menyembuhkan pasukan angkatan laut Belanda yang terkena beri-beri selama di kapal. Teori Van Leent mengatakan bahwa beri-beri disebabkan oleh perubahan komposisi darah karena kekurangan protein dan lemak (Van Leent, 1880:272-310). Untuk melengkapi kekurangan tersebut para pasien harus diberi makanan yang mengandung protein dan lemak. Dan itu yang dilakukan dengan menu makanan bagi pasien beri-beri di Oeloe Limau Manis Padang, yaitu memberikan susu, telur, dan juga daging. Namun kesembuhan pada pasien beri-beri di Rumah Sakit Oeloe Limau Manis tidak berkaitan langsung dengan manajemen pengobatan melalui makanan. Perubahan menu dan pola makan yang diberikan kepada pasien seperti dilaporkan Keizer, tidak disertai informasi tentang tingkat kesembuhan pasien. Karena penyakit beri-beri berhubungan dengan konsumsi beras putih selama perang di Aceh, factor penyumbang kesembuhan pasien utamanya adalah lokasi rumah sakit yang berada di sekitar kawasan penduduk pribumi memudahkan diperolehnya jenis beras yang dikonsumsi masyarakat pribumi dan akses pada sayuran dan kacang-kacangan. Hal ini menjadi penunjang utama untuk suplai atas kekurangan vitamin B1. Hal ini juga dibuktikan nantinya di manajemen rumah sakit Fort de Kock.

## **Hill Station Fort de Kock dan Rumah Sakit Khusus Beri-beri**

Fort De Kock, dengan nama asal Bukittinggi terletak di kaki gunung Marapi tepatnya di daerah Agam. Fort de Kock sebagai salah satu pusat perlawanan pasukan Imam Bonjol ketika Perang Padri, sudah menjadi pusat perekonomian, pendidikan dan kebudayaan Minangkabau sebelum Belanda datang. Bukittinggi sebagai lambang pusat aktivitas budaya Minangkabau dan pusat ekonomi di dataran tinggi yang terletak di tengah-tengah Lembah Agam, salah satu dari tiga lembah yang bersama-sama membentuk jantung Minangkabau. Daerah dataran tinggi Agam disebut juga dengan Luhak Agam (Mansoer *et al.*, 1970:2-3). Wilayah tersebut dilalui banyak sungai, bersumber dari pinggang Gunung Marapi, dua di antaranya Batang Agam dan Batang Tambuo yang melewati Bukittinggi (Zulqayyim, 2006:15).

Sebelum Belanda membangun bentengnya tahun 1825, Fort de Kock sudah hidup sebagai pusat ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Pasar Bukittinggi adalah pusat dari berbagai daerah pedalaman untuk melakukan transaksi bisnis. Aktivitas ekonomi Bukittinggi diperkuat oleh daerah di sekitar Bukittinggi sebagai daerah penghasil kopi, kulit kayu manis sebagai produk ekspor (Christine Dobbin, 1992:14-35). Produk tersebut bermuara di Pakan Kurai. Pakan Kurai berkembang menjadi Pasar Bukittinggi yang memenuhi kebutuhan Bukittinggi dan daerah selingkaran pedalaman Minangkabau.

Pada 29 November 1837 ketika benteng terakhir Padri di Bonjol jatuh ke tangan Belanda, para petinggi sipil dan militer Belanda memandang Bukittinggi sebagai awal baru dari kekuasaan mereka di wilayah Sumatra Westkust (Gusti Asnan, 2006:43-44). Legitimasi kekuasaan Belanda diperkuat dengan pembangunan berbagai fasilitas kota seperti barak tentara, gedung pemerintahan, sekolah, pasar dan rumah sakit. Pembangunan Fort de Kock sebagai basis kekuasaan Belanda di Pedalaman Padang tidak terlepas dari persoalan dualisme pusat kekuasaan. Yaitu, keberadaan Padang sebagai kota pusat bisnis dengan daerah perbatasan di perairan pesisir Sumatra bagian barat sekaligus sebagai pusat administrasi. Sejak Belanda memperkenalkan

sistem pemerintahannya, Agam memperoleh kedudukan sebagai daerah administratif setingkat *afdeeling* dengan ibu kota Fort de Kock yang terletak di kaki Gunung Marapi dan Singgalang (*Ibid.*).

Sejak awal keberadaan kota ini telah dikenal akan pasarnya. Pada awal abad ke-20 ruang perdagangan dibangun dan pasar Sabtu menarik 40.000 pengunjung (Paulus, 1917:12). Berbagai kebutuhan serdadu Belanda tersedia, mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai penunjang perlengkapan perang, seperti beras, daging, dan kuda. Seiring dengan berfungsinya, Pasar Bukittinggi berkembang pula sebagai Pakan Garnizun (Pasar Garnisun) (Christine Dobbin, 1992:186). Sebagai pasar Garnisun yang juga memenuhi kebutuhan para tentara, dibuat kesepakatan antara Belanda dengan Dewan Penghulu Nagari Kurai V Jorong untuk meningkatkan jumlah hari pelaksanaan pasar Bukittinggi menjadi setiap hari. Pasar harian disebut Pakan Borong-Borong, untuk membedakan dengan Pakan Gadang yang dilaksanakan tiap hari sabtu (Zulqayyim, 2006:65). Hal ini semakin mendukung Fort De Kock sebagai kota terkuat setelah Padang. Keberadaan pasar turut mendukung kebutuhan rumah sakit militer Belanda.

Rumah sakit Fort de Kock sebagai tempat evakuasi pasien beri-beri dibangun sejak turunnya Instruksi atau *opdrachten* tahun 1874 sebagai tahun kedua perang di Aceh. Instruksinya berisi “Pembukaan suatu yayasan di Fort De Kock; banyak tentara jatuh sakit beri-beri, lalu dievakuasi ke Ford de Kock tapi sangat sulit transportasi bagi pasien.” Instruksi inilah yang menjadi dasar penetapan lokasi Fort de Kock sebagai kawasan penyembuhan pasien beri-beri. Ini juga mendorong pembuatan jalan yang lebih memadai karena keterbatasan transportasi. Pendirian rumah sakit di Fort De Kock sebagai kelengkapan dalam membangun kota dan didukung oleh suhu Fort de Kock, antara 19 C malam dan 22 C padang siang hari (Paulus, 1917:720-724). Rumah sakit Fort de Kock didirikan menghadap ke Gunung Marapi seperti Gambar 2.

Rumah sakit militer di Fort De Kock adalah rumah sakit tipe B yang berfungsi sebagai rumah sakit militer yang terletak di Jorong Guguak Panjang. Ketika Belanda berkuasa lokasinya berdekatan dengan bangunan benteng Fort De Kock (Zul ‘Asri, 2001:107-148). Terkait pertanyaan apakah rumah sakit militer ini terpisah dari rumah sakit beri-beri, tidak ada penjelasan yang kuat. Yang jelas adalah rumah sakit militer juga



Sumber Foto: Tropen Museum Collection

**Gambar 2:** Gambar Rumah Sakit Militer Fort De Kock



difungsikan sebagai rumah sakit khusus beri-beri. Keberadaan rumah sakit yang strategis, dengan keberadaan pasar yang kuat untuk memenuhi kebutuhan garnisun itu menjadi alasan kuat mengapa pasien beri-beri mudah disembuhkan di Fort de Kock. Tak lain karena terpenuhinya kebutuhan harian beras dari penduduk setempat yang juga penghasil beras terbaik, misalnya dari daerah Solok.

Di rumah sakit itulah para tentara dari perang di Aceh dirawat. Rumah sakit tersebut juga dikunjungi oleh Pekelharing dan Winkler ketika menuju Aceh. Gempa bumi 28 Juni 1926 meruntuhkan banyak jejak peradaban di Sumatra Barat. Rumah-rumah roboh dan bangunan-bangunan batu yang lebih tua juga hancur. Barak-barak militer, stasiun kereta, dan rumah asisten residen runtuh bersama toko-toko dan rumah-rumah Minangkabau (Jeffrey Hadler, 2010:239-268). Rumah sakit Fort De Kock tak terkecuali, terkena dampak gempa bumi tersebut.

Faktor utama pemilihan Fort De Kock tidak terlepas dari iklim sebagai tempat evakuasi. Iklim tropis yang panas masih dianggap membahayakan kesehatan bagi masyarakat Belanda, bahkan dianggap penyebab kemandulan bagi pasangan suami-istri Belanda dan keguguran dan kematian anak-anak ketika lahir. Pengaruh iklim yang berbeda antara Eropa dengan Asia dianggap sebagai penyebabnya (Ann Laura Stoler, 2010:48-49). Jawaban ini masih menjadi perdebatan, karena bukan hanya masalah iklim, tetapi juga cara hidup orang Eropa ketika datang tidak menyesuaikan dengan lingkungan hidup Hindia Belanda, malahan mereka hidup sebagaimana cara hidup mereka di Eropa. Akibatnya menaklukkan iklim juga menjadi bagian penelitian Eijkman nantinya di laboratorium patologi Weltevreden di Jakarta sekarang. Situasi panas itu tidak dijumpai di Fort de Kock yang udaranya selalu sejuk seperti musim gugur di Eropa. Hal ini diceritakan oleh Pavel Durdik ketika dia terkena penyakit malaria dan dikirim ke Fort De Kock.

“Kami tiba di Padang pada tanggal 25 Desember. Dari sini, saya akan pergi ke pedalaman Sumatra, di gunung yang lebih dingin, di Fort de Kock. Ini adalah tempat pemulihan bagi orang sakit dari Aceh yang akan sembuh atau mati di sana sesuai

dengan apa yang tertulis di dahi mereka” (Pavel Durdik 2010:122)

Evakuasi ke Fort de Kock yang dialami oleh Pavel Durdik tidak bisa disamakan dengan tentara pribumi yang terkena beri-beri. Pavel Durdik seorang Dokter Eropa. Pelayanan kesehatan yang ia terima termasuk bagian dari istirahat dan penyembuhan melalui liburan ke *Hill Station* seperti halnya para pejabat Inggris di India, atau pejabat Belanda di Batavia dirawat di Bogor. Bogor juga menjadi tempat rumah sakit beri-beri didirikan, yang dikenal dengan *Beri-beri Gesticht Buitenzorg*. Di daerah lain, rumah sakit beri-beri juga didirikan, antara lain *Beri-beri Hospitaal Loeboek Pakam* (Medan) dan *Beri-beri Hospitaal Wangkal* (Probolinggo).

Fort de Kock sebagai tempat evakuasi pasien beri-beri tidak hanya mengandalkan udara yang dingin bersih di pegunungan. Padang Panjang sebagai daerah yang dilewati oleh Pavel Durdik menuju Fort de Kock bisa dijadikan tempat evakuasi. Belanda tidak hanya mempertimbangkan masalah iklim tetapi juga keberadaan Fort de Kock sebagai *Hill Station*.<sup>1</sup> Konsep *Hill Station* yang berkembang di Eropa juga berlaku dalam koloni Inggris di India yang berhubungan dengan kesehatan, kecantikan dan produktifitas kerja. *Fort de Kock (Bukit Tinggi) was a Dutch administrative centre with a reputation among the health resort Fort de Kock* (C Joseph Kenedy, 1989). Kata-kata ini diungkapkan oleh Joseph Kenedy ketika melewati Fort De Kock dalam melarikan diri dari Singapura. *Hill Station* seperti Fort De Kock ini, berasal dari usaha tenaga kerja pribumi dan pajak. Langkah-langkah kesehatan, seperti *hill station* dirancang hanya untuk manfaat dan keuntungan pemerintah kolonial terutama untuk kepentingan pejabat Eropa (Norman G Owen, 1987:48-79). Jadi layanan kesehatan ini jelas untuk mendukung jalannya pemerintahan kolonial, belum ada benih untuk mendukung

<sup>1</sup> Hill station adalah konsep penyembuhan penyakit berdasarkan bukit sebagai tempat yang sehat, iklimnya bagus pemandangannya indah. Konsep Hill station sama dengan Health resort, yang mirip dengan spa dan resor pegunungan Eropa, tempat yang sudah lama dikunjungi oleh orang Inggris yang kaya sebagai bagian dari Grand Tour. Pemandangan gunung di sekitar stasiun bukit juga berkorelasi dengan tradisi lanskap yang indah akan membantu kesembuhan dan mengalirkan semangat baru (John E. Crowley, 2011: 11-61).

kehidupan pribumi walaupun itu berasal dari bangsa pribumi.

Reputasi Fort de Kock yang baik menarik banyak orang untuk berkunjung, terutama untuk berdagang. Di sana sudah tinggal orang-orang selain Minangkabau, misalnya orang China, India dan bangsa Eropa (C Joseph Kenedy, 1989:81-82). Selain perdagangan yang mengundang mereka, budaya Minangkabau dengan adat istiadat serta arsitekturnya menarik pengunjung untuk datang. Reputasi tersebut membuat Bukittinggi menjadi salah satu daerah tujuan berwisata yang dipromosikan oleh Belanda (Wahyu Suri Yani, 2018:107-126). Fort de Kock menjadi daya tarik, tidak terlepas dari fasilitas yang sudah mulai dibangun Belanda seperti jalur kereta api dan jalan raya yang terhubung ke Padang (William A. Withington, 1961:418-423). Ditambah dengan hijaunya pedalaman Minangkabau, pemerintah kolonial juga menyediakan resort dan pelayanan hotel-hotel (Hans Meulendijks, 2017:63). Fort De Kock digambarkan sebagai tempat tinggal penduduk, pasar, dan tempat peristirahatan bagi tentara karena iklimnya yang sejuk, dengan Ngarai Sianok menambah daya tarik sebagai sebuah kota garnisun (Peter J.M. Nas dan Martin A. van Bakel, 2002:462-481). Fort de Kock dipilih sebagai kota garnisun tidak terlepas dari posisinya yang strategis di tengah dataran tinggi Agam, dengan ketinggian 3000 kaki di atas laut, dan menjadi resort favorit bagi orang Eropa (Arthur Stuart Walcot. 1914:308).

Fort de Kock sebagai lokasi rumah sakit khusus beri-beri tidak terlepas dari kajian berbagai ilmuwan Belanda tentang Minangkabau sebagaimana diuraikan di atas. Pertimbangan utama selain politik dan sumber ekonomi adalah topografi kesehatan Fort de Kock. Jauh sebelum peperangan di Aceh, E.W.A Ludeking, seorang tenaga kesehatan Belanda, melakukan penelitian kajian topografi kesehatan di daerah Agam. Lapornya diterbitkan tahun 1862 di *Geneeskundige Tijdschrift voor Nederlandsch Indie* (GTNI, Jurnal Kesehatan Hindia Belanda) jauh sebelum perang di Aceh dimulai. Ludeking menjelaskan berbagai hal tentang Agam baik dari segi budaya masyarakat Minangkabau, iklim, geologi, pertanian, perdagangan dan lebih spesifik flora dan

fauna. Dia juga melaporkan jenis wabah penyakit yang pernah diderita masyarakat dan bagaimana pengobatan lokal masyarakat Minangkabau (Ludeking, 1862:1-154). Pada tahun 1867 penelitian Ludeking tentang Agam diterbitkan menjadi sebuah buku. Ruang lingkup yang dikaji Ludeking juga meliputi daerah Tanah Datar dan menyorot secara spesifik tentang Fort de Kock. Pada saat penelitian Ludeking Barak Militer Fort de Kock dibangun dari bambu dilapisi dengan tikar dan ditutupi dengan ilalang (Ludeking, 1867:159-161). Kajian topografi ini menjadi dasar pemerintahan Belanda mengembangkan rumah sakit Fort de Kock sebagai rumah sakit khusus beri-beri dan *hill station* khusus untuk para tentara Belanda berkebangsaan Eropa.

Pelayanan kesehatan di rumah sakit Fort de Kock menunjukkan hasil dengan sembuhnya para pasien beri-beri, dengan pengobatan simptomatis (A.A Loedin, 2005:59), tetapi ketika dikembalikan ke Aceh, mereka kembali terkena beri-beri. Di lain sisi masyarakat pribumi Minangkabau dan Aceh tidak menderita beri-beri. Faktor ini semakin mendorong Belanda untuk meneliti tentang pola hidup dan pengobatan Minangkabau. J.P. Kleiweg de Zwaan melakukan studi etnologi berfokus pada obat dan sakit dalam masyarakat Minangkabau. Dalam studinya Kleiweg tidak menemukan adanya penyakit beri-beri dalam kehidupan masyarakat Minangkabau (Kleiweg de Zwaan, 1910).

Tugas rumah sakit khusus beri-beri di Sumatra Westkust menjadi semakin berat karena semakin banyaknya pasien beri-beri dari Aceh. Karena itu pada tahun 1886 pemerintah Kerajaan Belanda mengirinkan komisi beri-beri ke Hindia Belanda. Komisi beri-beri yang terdiri atas Profesor Pekelharing dan Winkler. Tak lama setelah sampai di Batavia, mereka melanjutkan perjalanan menuju Aceh. Namun mereka singgah ke Sumatra Barat guna mengamati pengobatan pasien beri-beri di Padang dan Fort de Kock. Hasil studi mereka yang menyimpulkan bahwa beri-beri adalah penyakit menular, membuat Rumah Sakit Khusus beri-beri Padang dan Fort de Kock semakin difungsikan sebagai tempat karantina pasien. Hal ini terjadi sebelum pada akhirnya dibuktikan bahwa beri-beri tidak menular dan

bahwa penyebabnya adalah kekurangan vitamin B1. Namun jawaban ilmiah ini baru diperoleh nanti oleh penelitian Eijkman dan kawan-kawan di *Laboratorium voor Pathologische Anatomie en Bacteriologie* di Batavia. Eijkman dan kawan-kawan akan memberikan kesimpulan yang berbeda dengan kesimpulan Komisi Beri-beri, yaitu bahwa beri-beri berhubungan dengan jenis beras giling putih yang mereka makan. Masyarakat pedesaan pribumi tidak terkena beri-beri karena mereka memakan beras tumbuk yang masih berwarna coklat.

Jenis beras yang terdapat di Sumatra Westkust dan sistem kuliner mereka turut mempengaruhi kenapa pasien beri-beri sembuh di Rumah Sakit, tetapi ketika dikembalikan ke Aceh, mereka kembali menderita penyakit beri-beri. Pertanian padi tidak hanya diperlakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan oleh masyarakat Minangkabau. Padi sudah menjadi bagian kehidupan masyarakat Minangkabau dan mendarah daging dalam budaya keseharian masyarakat. Perayaan dan ritual sebelum ke sawah dan setelah panen begitu hidup. Padi diibaratkan manusia yang bernyawa sehingga diberi gelar “Ande Gadih” (Lisa Klopfer, 1994), atau dalam bahasa Indonesia *ande* itu adalah ibu, *gadiah* adalah gadis atau muda. Ketika beri-beri merebak di kalangan tentara Belanda, masyarakat pribumi tidak terserang. Kesembuhan dalam perawatan di rumah sakit beri-beri di Fort de Kock tidak terlepas dari konsumsi dari jenis beras yang sama dengan masyarakat pribumi.

## KESIMPULAN

Wabah beri-beri yang menimpa pihak Belanda ketika perang di Aceh terutama dari golongan militer telah mendorong Belanda mengambil kebijakan penanganan khusus. Penanganan khusus tidak terlepas fakta bahwa beri-beri yang menyerang golongan tentara sangat mempengaruhi usaha Belanda dalam menaklukkan Aceh. Kebijakan ini berbeda dengan ketika beri-beri mengenai para pekerja Belanda di perkebunan dan pertambangan. Langkah awal dengan mengevakuasi pasien ke Sumatra Westkust diiringi dengan mendirikan rumah sakit khusus.

Pendirian rumah sakit khusus beri-beri yang jauh dari lokasi perang yang terpisah dari rumah

sakit militer memfokuskan para dokter dalam merawat dan mengamati bagaimana gejala penyakit beri-beri. Lokasi rumah sakit beri-beri di Oeloe Limau Manis Padang dan Fort de Kock yang berada di tengah masyarakat lokal yang tidak terkena beri-beri mempengaruhi cara pemerintah kolonial Belanda dalam menangani penyakit beri-beri. Cara awal hanya memperhatikan pola menularnya beri-beri dengan fokus pada iklim, udara lingkungan, dan kebersihan lokasi rumah sakit. Faktor mengapa hanya golongan pekerja Belanda yang terkena beri-beri, mengapa penduduk lokal tidak terpengaruh penyakit beri-beri telah mendorong keingintahuan lebih lanjut di kalangan tenaga medis kolonial. Ini mendorong pemerintah Belanda selain memperbaiki manajemen pengobatan dalam rumah sakit tetapi juga mempelajari pengobatan lokal dan pola hidup sehat masyarakat Minangkabau. Fakta bahwa pasien pribumi yang dipulangkan ke desa masing-masing sembuh begitu saja dari beri-beri tanpa diobati secara khusus sedangkan tentara Belanda yang sembuh setelah perawatan di Fort de Kock kembali menderita beri-beri ketika diterjunkan lagi ke medan tempur di Aceh, membuat pemerintah kolonial berupaya keras mempelajari pola kehidupan sehat masyarakat pribumi khususnya di tanah Minangkabau.

Ketika Eijkman menemukan bahwa kunci penyembuhan penyakit beri-beri ada pada perbedaan jenis beras yang dimakan pasien, maka muncul kebutuhan untuk melakukan penelitian sampel jenis beras yang ada di masyarakat. Hasilnya mendorong pasien beri-beri di rumah sakit diberi asupan nasi dari beras yang sama yang beredar di tengah masyarakat. Begitu juga dengan pasien yang sembuh begitu saja ketika dipulangkan ke desa masing-masing, selain jenis beras mereka mendapat asupan sayuran dan kacang-kacangan. Percontohan menu makan desa mengubah pola pelayanan menu makanan pasien di rumah sakit. Tercapainya kesembuhan oleh manajemen perobatan di rumah sakit dipengaruhi oleh sistem kesehatan masyarakat yang ada di lingkungan rumah sakit tersebut.

## PUSTAKA ACUAN

### ARSIP

- ANRI. Atjeh Zaken. 1541: Gedeponceerd Agenda 8 Agustus 1876, No. 592 az
- ANRI. Atjeh Zaken. 1496 gedeponceerd kommissorial 3 Juli 1876, No. 466 az
- ANRI. Atjeh Zaken 1541: Gedeponceerd Agenda 8 Agustus 1876, No. 592 az
- ANRI. Atjeh Zaken 00610 Gedeponceerd Agenda 30 Desember 1873, No. 1264 az
- ANRI. Atjeh Zaken 839: Gedeponceerd Agenda 15 Desember 1874, No. 1240 az
- Koloniaal Verslag 1878, hlm. 45.
- Koloniaal Verslag 1879, hlm.53.
- Topographisch Bureau. (1889). *Oeloe Limau Manis [peta] Topographisch Bureau*. Batavia: Topographisch Bureau.
- Tropen Museum Collection. Rumah Sakit Fort de Kock.

### ARSIP GTNI

- Bercer, D.H. Aan Merkingen Gehouden op een Reize door eenige Districten Padangsche Bovenlanden”, *Verhandelingen van het Koloniaal Instituut voor taal-, Land-en Volkenkunde*, 16: 181-182.
- Burg, C.L. van der. (1896). *Statistiek der beri-beri in het Nederlandsch Oost-Indische leger van 1873 tot en met 1894*, NTVG 1: 83-90.
- Burg, C.L. Van Der. (1896). *Boekoe Segala Roepa penyakit dan obatnja, Bergoena kepada orang segala Boemi Poetra di Hindia -Nederland dan orang Tjina*. Batavia-Solo: Albrecht & Rushee.
- Erni, H. (1884). Eene Beri-beri Epidemie op Sumatra. GTNI Deel XXIII. Batavia: Ernst & Co. Batavia es Noordwijk.
- Erni, H. (1885). *Nog eens Beri-beri*. GTNI Deel XXIV. Batavia: Ernst & Co. Batavia es Noordwijk.
- Kessler, H.J. (1897). Beri-beri geen Rijstvergiftiging. GTNI Deel XXXVII. Batavia: Ernst & Co. Batavia es Noordwijk.
- Kielstra, E.B. (1883). *Beschrijving Van Den Atjehoorlog Met Gebruikmaking Der Officieele Bronnen, Door Het Departement Van Koloniën Daartoe Afgestaan Jilid II*. 's-Gravenhage: Van Cleef.
- Leent, Dr. F.J. Van. (1880). Mededeelingen over Beri-beri. GTNI deel IX. Batavia: H. M. van Dorp & CO.
- Ludeking, E.W.A. (1862). Nutuur- en Geneeskundige Topograpische Schets der Residentie Ag am, (Westkust van Sumatra). GTNI Deel IV. Batavia: Lange & Co.

- Ludeking, E.W.A. (1867). Nutuur- en Geneeskundige Topographie Van Agam (Sumatra Van Westkust). 'S Gravenhage: Martinus Hijhoff.
- Neeb, A.E. (1873). Beschouwing over Beri-beri. GTNI Deel XV. Batavia: H. M. van Dorp & CO.
- Niclou, H.A.A. (1887). *Beri-beri te Atjeh: Overgedrukt uit den Java-Bode van 12, 13 en 14 Jan. 1887 Nos. 9, 10 en 11*. Batavia: H. M. van Dorp & CO.
- Salam, Dr. AJ. (1919). *Iets over Atjeh en de Beri-beri*. GTNI Deel LIX. Batavia: Ernst & Co. Batavia es Noordwijk.
- Zwaan, Dr.J.P Kleiweg De. (1910). *De Geneeskunde Der Menangkabau-Maleiers*. Amsterdam: Meulenhoff & Co.

### Buku dan Jurnal

- A.A. Loedin. (2005). *Sejarah Kedokteran Di Bumi Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- Azwar Dt Mangiang. (1998). Hari Jadi Kota Bukittinggi, 18 Desember 1820. Makalah seminar hari jadi Kota Bukittinggi. Bukittinggi: t & p.
- Bas Mochtar. (2017) *Medicine and warfare during the colonial wars in Sumatra (1850-1910) and the Boer War in South Africa (1901-1903)*; dalam Leo van Bergen, Liesbeth Hesselink, Jan Peter Verhave (eds.) *The Medical Journal of the Dutch Indies 1852-1942. A Platform for Medical Research*, hlm. 106-109. Jakarta: AIPI.
- Bercer, D.H. (1939). Aan Merkingen Gehouden op een Reize door eenige Districten Padangsche Bovenlanden *Journal Verhandelingen van het Koloniaal Instituut voor taal-, Land-en Volkenkunde*, 16: 181-182.
- Crowley, John E. *Imperial Landscapes, Britain's Global Visual Culture*. Yale: Yale University Press.
- Colombijn, Freek. (2006). *Paco-Paco Kota Padang, Sejarah Sebuah Kota di Indonesia pada Abad ke-20 dan Penggunaan Ruang Kota*. Yogyakarta: Penerbit Ombak.
- Dien Madjid. (2014). *Catatan Pinggir Sejarah Aceh: Perdagangan, Diplomasi, dan Perjuangan Rakyat*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Dobbin, Christine. (1992) *Kebangkitan Islam dalam Ekonomi Petani yang sedang Berubah, Sumatra Tengah, 1784-1847*. Terjemahan Lilian Tedjasudhana. Jakarta: Inis.
- Durdik, Pavel. (2010). *Un Médecin Militaire a Sumatra: Récits De La Guerre D'Atjeh (1877-1883)*. Cahier D'Archipel 046715487. Paris: L'Harmattan.

- Gani A. Jaelani. (2019). Naturalis, Dokter, dan Ahli Ilmu Bumi: Penyelidikan Gempa dan Gunung Meletus di Hindia-Belanda pada Abad ke-19. *Jurnal Sejarah*, 2(2): 32–49.
- Gani A. Jaelani. (2017). La question de l'hygiène aux Indes-Néerlandaises: Les enjeux médicaux, culturels et sociaux. *Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales, Paris*: 37–46.
- Gusti Asnan. (2013). Sejarah Perkembangan kawasan Kota Lama di Daerah Rawan Gempa Sumatera Barat. *Suluah*, 13(17).
- Gusti Asnan. (2006). *Pemerintahan Sumatera Barat dari VOC Hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka.
- Asnan, G. (2003). *Kamus Sejarah Minangkabau Padang*: Pusat Pengkajian Islam dan Minangkabau.
- Hadler, J. (2010). *Sengketa Tiada Putus, Matriarkat, Reformis Islam dan Kolonialisme di Minangkabau*. Jakarta: Freedom Institute.
- Hertog, Hans den. (1991). *De militairgeneeskundige verzorging in Atjeh 1873 -1904*. Amsterdam: Thesis Publisher.
- Kenedy, C Joseph. (1989). *When Singapore Fell: Evacuations and Escapes, 1941-1942* Basingstoke: Palgrave Macmillan UK.
- Klopper, Lisa. (1994). *Confronting Modernity in a Rice-Producing Community: Contemporary Values and Identity among The Highland Minangkabau of West Sumatra Indonesia*. Disertasi. Tidak Dipublikasikan. Antropologi, University of Pennsylvania.
- Lucia Arter Lintang Gritantin. (2005). Penyakit Kelamin Di Kalangan Korps Militer Hindia Belanda 1860an – 1920an. Tesis. Tidak dipublikasikan, Program Studi Sejarah Pascasarjana, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Ludvik, Kalus. & Guillot, Claude. (2010). *Pavel Durdik: Un Médecin Militaire a Sumatra Récits De La Guerre D'Atjeh (1877-1883)*. Paris: L'Harmattan.
- Mansoer, et al. (1970). *Sedjarah Minangkabau*. Jakarta: Bhratara.
- Meulendijks, Hans (2017). *Tourism and imperialism in the Dutch East Indies Guidebooks of the Vereeniging Toeristenverkeer in the late colonial era (1908-1939)*. MA Thesis Cultural History of Modern Europe. Utrecht: Utrecht University.
- Nas, Peter J.M. & Bakel, Martin A. van. (2002). *Small Town Symbolism The Meaning of the Built environment In Bukittinggi and Payakumbuh. The Indonesian Town Revisited*. Singapura: Institut Of Southeast Asian Studies.
- Owen, Norman G. (1987). *Toward a History of Health in Southeast Asia*; dalam Norman G. Owen (ed.), *Death and Disease in Southeast Asia, Exploration in Social, Medical and Demographic History*. Singapore: Oxpord University Press, Oxpord New York.
- Paulus. (1917). *Encyclopaedie van Nederland Indie*, Vol. 1. A-G. S'-Gravenhage. Nijhoff Leiden: Brill.
- Rusli Amran. (1988). *Padang Riwayat Dulu Cetakan ke- II (Diperlengkap)*. Jakarta: CV Yasaguna, 1988.
- Stoler, Ann Laura. (2010). *Carnal Knowledge and Imperial Power: Race and the Intimate in Colonial Rule*. California: University of California Press.
- Schoute, D. (1936). *De Geneeskunde in Nederlandsch-Indië Gedurende De Negentiende Eeuw*. Batavia: s.n.
- Wahyu Suri Yani. (2018). *Pesona Pariwisata Minangkabau Pedalaman Sebagai Mooi Indie Pada Masa Kolonial Belanda (1900-1942)*, dalam Yudhi Andoni (ed.) *Prosiding Seminar Nasional 90 Tahun Sumpah Pemuda (1928-2018): Memperkuat Komitmen Keindonesiaan di Era G. 4.0*. Padang: Labor Sejarah Universitas Andalas.
- Walcott, Arthur Stuart. (1914). *Java and Her Neighbours: A Traveller's Notes in Java, Celebes, The Moluccas*. New York: Punam Son.
- Withington, William A. (1961). Upland Resorts and Tourism in Indonesia: Some Recent Trends. *Journal American Geographical Society*, 51 (3): 418-423
- Zondervan, Sjoerd (2016). *About the rise of a hospital system, dalam Patients of the colonial state: the rise of a hospital system in the Netherlands Indies 1890-1940*.
- Zulqayyim. (2006). *Boekittinggi Tempo Doeloe*. Padang: Andalas University Press.
- Zul 'Asri. (2001). *Bukittinggi 1945-1980 (Perkembangan Kota Secara Fisik dan hubungannya dengan pemilik tanah)*. Tesis Tidak Dipublikasikan. Program Pascasarjana, Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya, Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Sastra Universitas Indonesia, Depok.

## TINJAUAN BUKU

# **COVID-19 DAN PERJALANANNYA: DARI KRISIS KESEHATAN HINGGA DINAMIKA KEBIJAKAN DAN TATA KELOLA**

**Riqko Nur Ardi Windayanto**

*Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada*

*E-mail: [riqko.nur.ardi@mail.ugm.ac.id](mailto:riqko.nur.ardi@mail.ugm.ac.id)*

**Judul Buku:** *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal.*

**Penulis:** Para Akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada serta Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti (Eds) (2020). Penerbit: Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, xxii + 372 hlm.

### PENGANTAR

#### **Krisis Kesehatan hingga Kebijakan dan Tata Kelola: Suatu Pengantar**

Meminjam gagasan Žižek (2020a) dalam *Pan(dem)ic!: COVID-19 Shakes the World* bahwa bumi adalah satu geladak perahu, tempat umat manusia terus berlayar sepanjang waktu. Dalam pelayaran itu, masyarakat dunia dikejutkan oleh badai virus yang menerjang bumi dan mewabah sebagai pandemi, yaitu COVID-19. Virus ini hadir dengan membawa dua sisi: sisi pandemi dan sisi kepanikan. Kedua sisi ini menunjukkan bahwa COVID-19 tidak hanya menjadi krisis kesehatan, tetapi telah bertransformasi dan bermanifestasi menjadi krisis kemanusiaan, kebijakan, dan tata kelola, dengan segala disrupsi terhadap aspek politik, sosial, ekonomi, dan kebudayaan (Taherian, 2020). Dengan demikian, pandemi COVID-19 seharusnya tidak hanya dipahami secara medis, melainkan perlu diteropong dari berbagai perspektif, baik kelembagaan, sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi, pendidikan, kesehatan, maupun aspek-aspek kemanusiaan lainnya.

Berangkat dari pernyataan tersebut, para akademisi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIPOL), Universitas Gadjah Mada, menuangkan hasil kajian dalam buku bertajuk *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Buku ini diterbitkan oleh Gadjah Mada University Press dengan Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti sebagai editor. Buku yang

mengompilasi kajian-kajian para akademisi FISIPOL UGM ini disusun dengan beberapa pertimbangan. *Pertama*, kondisi negara-negara di dunia yang memiliki respons beragam dalam menanggapi COVID-19. *Kedua*, dalam konteks di Indonesia, kebijakan pemerintah kerap menimbulkan ambiguitas, ketidakjelasan, simpang siur informasi, pengabaian, dan fragmentasi. *Ketiga*, kurangnya akumulasi pengetahuan non-medis-sosial politik-yang sejatinya juga berperan dalam menentukan laju persebaran wabah. *Keempat*, pandemi COVID-19 tidak hanya menyebabkan krisis kesehatan, tetapi juga menimbulkan krisis sosial dan politik.

Buku ini memuat 1 bab prolog, 17 bab kajian dan analisis, serta 1 bab epilog. Prolog dan epilog ditulis oleh Wawan Mas'udi dan Poppy S. Winanti. Sementara itu, 17 bab kajian terkait aspek tata kelola dalam penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia diklasifikasi menjadi empat bab besar dan pokok tulisan sebagai berikut.

1. Bab I diisi oleh tulisan Poppy S. Winanti, Paska B. Darmawan, dan Treviliana E. Putri; Ambar Widaningrum dan Wawan Mas'udi; Arya Budi dan Irham Nur Anshari; serta Muhammad Rum, Yunizar Adiputera, dan Randy W. Nandyatama. Bab ini menjelaskan respon pemerintah global, nasional, dan sub-nasional (daerah) untuk menangani pandemi COVID-19 dalam konteks *governance*.
2. Bab II diisi oleh tulisan Agus Suwignyo dan Erwan Agus Purwanto; Hatma Suryatmojo,

Sri Suning Kusumawardani, Irwan Endrayanto Aluicius, dan Wirastuti Widyatmanti; Tania Delavita Malik dan Erwan Agus Purwanto; serta Yodi Mahendradhata. Bab ini mengemukakan dampak pandemi COVID-19 dan resiliensi sektoral pada arena pendidikan tinggi, industri BUMN, dan kesehatan.

3. Bab III diisi oleh tulisan Wahyu Kustiningsih dan Nurhadi; Supriyanti; Suzanna Eddyono, Ayu Diasti Rahmawati; dan Tantri Fricilla Ginting; serta Tim *Forbil Institute* dan *Institute of Governance and Public Affairs* MAP FISIPOL UGM. Bab ini memaparkan respons dan solidaritas masyarakat dalam kaitannya untuk menghadapi dampak pandemi COVID-19 dan kerentanan sosial masyarakat.
4. Bab IV diisi oleh tulisan Amalinda Savirani dan Dias Prasongko; Zainuddin Muda Z. Monggilo; Wisnu Prasetya Utomo; dan Gilang Desti Parahita. Bab keempat ini menyajikan aspek pengetahuan dan komunikasi publik sebagai dimensi penting dalam tata kelola penanganan pandemi COVID-19.

Buku ini menawarkan proyeksi dan menegosiasikan wacana kepada publik terkait tata kelola penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia. Wacana ini tidak hanya terbatas pada aspek medis, tetapi secara komprehensif dan holistik telah menjangkau arena-arena sosial politik, seperti pemerintahan, kelembagaan, pendidikan, industri, kesehatan, masyarakat, pengetahuan, dan komunikasi publik. Buku ini telah menghimpun kajian dan analisis reflektif yang dapat memberikan pemahaman secara luas mengenai dinamika kebijakan dan tata kelola COVID-19 di Indonesia. Oleh karena itu, secara spesifik buku ini bertujuan untuk mengompilasi analisis awal tentang aspek tata kelola COVID-19 di Indonesia, sebagai langkah merumuskan rekomendasi kebijakan (*policy brief*) bagi pengembangan tata kelola penanganan pandemi COVID-19 ke depannya, baik ketika pandemi saat ini maupun pandemi serupa di masa mendatang.

## **BAB I KUASA NEGARA DAN LEMBAGA: DI BAWAH BAYANG-BAYANG WABAH**

Pada bab pertama, buku ini memuat tiga tulisan yang mengkaji kegamangan negara dan lembaga internasional WHO dalam merespons wabah COVID-19. Kebijakan-kebijakan yang ditempuh oleh masing-masing negara menjadi indikator untuk melihat sejauh mana negara-negara di dunia mampu merespons pandemi COVID-19 secara tanggap. Negara-negara yang menjadi objek kajian tulisan ini meliputi Taiwan, Singapura, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Untuk mengukur ketanggapan negara-negara, variabel yang digunakan adalah beberapa rekomendasi kebijakan WHO kepada pemerintah nasional dalam menangani pandemi, yaitu (1) kepemimpinan, perencanaan, dan koordinasi; (2) pengawasan dan penilaian atas situasi, berkaitan dengan ketersediaan data dan informasi; (3) pencegahan penyebaran penyakit; (4) keberlanjutan pelayanan kesehatan; dan (5) komunikasi publik. Setelah memaparkan respons masing-masing negara berdasar kelima indikator tersebut, buku ini mengomparasi daya tanggap dari keempat negara. Komparasi yang telah dilakukan menghasilkan dua kategori-negara tanggap dan negara kurang tanggap dan atau lamban (lihat tabel 1).

Berdasar Tabel 1, buku ini menyimpulkan bahwa Taiwan, Singapura, dan Korea Selatan, merupakan negara-negara yang mengambil tindakan tepat dengan transparansi komunikasi publik dan pengendalian untuk mencegah bencana nasional. Sementara itu, Amerika Serikat yang diasumsikan sebagai *Super Power* justru tidak membuatnya sigap terhadap pandemi. Buku ini tampaknya mencoba membuktikan tesis Zabala (2020) dalam “The Corona-virus Pandemic Is A Threat to Populist Strongmen”, bahwa pandemi COVID-19 telah membuka sisi gelap dari inkompetensi dan kepemimpinan di seluruh dunia. Mereka justru mempersiapkan gejolak pasar, alih-alih bersiap diri menghadapi kemungkinan terburuk, yaitu pandemi COVID-19 yang bermula di Wuhan, China. Transparansi publik dan pengendalian untuk mencegah bencana nasional membuat Taiwan dan Korea Selatan mampu menghadapi pandemi ini (Zabala, 2020).

**Tabel 1.** Komparasi Kebijakan Negara

| Aspek                                  | Taiwan  | Singapura                           | Korea Selatan  | Amerika Serikat   |
|--|---|-------------------------------------|--|---|
| Kasus terdeteksi pertama               | 20 Januari 2020   | 23 Januari 2020                     | 20 Januari 2020  | 20 Januari 2020   |
| Transmisi lokal                        | 28 Januari 2020   | 4 Februari 2020                     | 30 Januari 2020  | 26 Februari 2020  |
| Data sampai 15 April 2020              | 395 kasus positif<br>6 meninggal  | 3.252 kasus positif<br>10 meninggal | 10.591 kasus positif<br>225 meninggal  | 609.685 kasus positif<br>26.059 meninggal   |
| Kelembagaan terpadu                    | <i>Central Epidemic Command Center (CECC) for Severe Special Infectious Pneumonia</i> | Kementerian Kesehatan               | <i>Korean Centers for Disease Control and Prevention</i> di bawah Ministry of Health and Welfare | <i>White House Coronavirus Task Force</i>   |
| Informasi dan <i>data-base</i> terpadu | Kanal resmi pemerintah  | Kanal resmi pemerintah              | <a href="https://corona.board.kr/">https://corona.board.kr/</a>                                  | Kanal resmi pemerintah  |
| Pembatasan aktivitas lintas negara     | 21 Maret 2020   | 20 Maret 2020                       | 21 Januari 2020  | 31 Maret 2020   |
| Pembatasan sosial-karantina            | 2 Februari 2020   | 26 Maret 2020                       | <i>Self-isolation</i> sejak 2 Februari 2020  | <i>Lockdown</i> tergantung negara bagian<br><br>Karantina pendatang secara nasional mulai 27 Maret 2020 |
| Sanksi <i>social distancing</i>        | Ya  | Ya                                  | Ya   | Tidak   |
| Pemanfaatan teknologi                  | <i>Digital fence</i>  | <i>Trace Together</i>               | <i>Smart self-health check mobile app</i> untuk <i>inbound traveller</i>                         | N/A   |
| Penganggaran                           | Ya  | Ya                                  | Ya   | Ya  |

Sumber: Winanti, Darmawan, & Putri (2020)

Sementara itu, selaras dengan Harari (2020a), Amerika Serikat justru keluar dari posisinya sebagai refleksi kepemimpinan global yang hanya mementingkan kepentingannya sendiri.

Setelah memaparkan penanganan pandemi COVID-19 dalam konteks global, buku ini membedah respon-respon pemerintah nasional-Indonesia-dan pemerintah subnasional (provinsi dan kabupaten/ kota). Secara umum, respon pemerintah Indonesia tergolong lamban dan kurang tanggap. Hal ini terlihat pada kasus-kasus pengabaian pejabat publik terhadap kemungkinan persebaran COVID-19 di Indonesia, nihilnya koordinasi dan sinergi lintas aktor, kebijakan yang kontradiktif dan tumpang tindih, serta ketiadaan justifikasi ilmiah pada pernyataan-pernyataan pemerintah. Akibatnya, kelambanan pemerintah pusat tentu berpengaruh pada pemerintah daerah. Sebagai kajian awal, buku ini tentu saja hanya

mengkaji dan menelusuri respons pemerintah daerah pada bulan Maret yang diasumsikan sebagai ‘tangga’ pertama kasus COVID-19 di Indonesia. Respon pemerintah daerah terdiri atas dua kategori: menunggu keputusan pemerintah pusat atau justru mendahului keputusan politik ‘istana’. Respon kedua terjadi ketika pemerintah daerah dengan nalar dekonsentrasi dan desentralisasinya menutup akses transportasi, membatasi wilayah administrasi, dan proteksionisme, ketika pemerintah pusat sama sekali belum mengambil keputusan.

Melihat respons pemerintah daerah yang selangkah di depan pemerintah pusat, buku ini menawarkan terminologi baru, yang disebut dengan konsep *administration distancing*. Kesenjangan (*gap*) kebijakan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ini membuktikan gagasan Harari (2020a) dalam “In the Battles



Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership”, bahwa dunia sedang dalam keadaan tanpa pemimpin. Krisis kepemimpinan terjadi karena ketiadaan pemimpin yang mampu menginspirasi, mengatur, dan mengkoordinasi respons nasional. Padahal, pemimpin adalah kompas yang meyakinkan masyarakat bahwa peran dan tanggung jawabnya pada masa krisis menjadi instrumen untuk mencapai keselamatan bersama (Gerung, 2010). Namun, sebagai kajian awal, buku ini masih belum menguraikan mengapa setiap daerah mengambil kebijakan-kebijakan yang mendahului keputusan pusat. Hal ini mengingatkan bahwa setiap daerah memiliki keberagaman aspek-aspek sosial yang akan memengaruhi setiap pengambilan kebijakan. Terlepas akan hal itu, buku ini juga mengajukan sejumlah rekomendasi kebijakan untuk perbaikan tata kelola COVID-19.

1. Kebijakan berbasis *science* dan *evidence*, melalui akumulasi pengetahuan, data faktual, kondisi terkini dari pandemi, dan *policy learning*.
2. Membangun kanal kebijakan yang integratif dan koordinatif antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan masyarakat.
3. Menempatkan pandemi sebagai *common agenda* yang membutuhkan koordinasi dan sinergi seluruh level pemerintahan.
4. Merancang ketersediaan dan keandalan infrastruktur penanganan COVID-19.

Selanjutnya, bab pertama dari buku ini membuka ruang diskusi terkait analisis tata kelola kesehatan global oleh WHO dalam menangani pandemi COVID-19. Dengan mengambil inspirasi dari pemikiran Koremenos, Lipson, dan Snidal tentang teori rezim, kajian ini menunjukkan bahwa WHO memiliki lima kelemahan, yaitu *membership*, *scope*, *centralization*, *control*, dan *flexibility*. Analisis dari masing-masing kelemahan tersebut akan diuraikan sebagai berikut.

1. *Membership*. WHO mengalami kekurangan atas konsistensi dukungan dan dana. Kecenderungan anggota, khususnya negara-negara maju, enggan menanggung *side payment* dan *transaction cost* dalam membangun dan meningkatkan kualitas layanan kesehatan.

2. *Scope*. WHO memiliki horizon kerja sama yang sempit. Selama ini, pendanaan WHO kerap dialokasikan untuk mendanai tindakan intervensi ketika wabah sedang berlangsung atau pendekatan *pre-emptive containment of epidemic/pandemic*. Padahal, pendanaan WHO semestinya dialokasikan untuk membangun pelayanan kesehatan inklusif bagi seluruh masyarakat dunia.
3. *Centralization*. Sebagai lembaga kesehatan dunia, WHO berperan sentral dalam menghimpun informasi terkini sebagai simpul kebijakan. Namun, alih-alih bertindak demikian, WHO justru mengalami kegagalan dengan minimnya ketersediaan informasi pada awal indentifikasi virus.
4. *Control*. Sejauh ini, pendanaan WHO berasal dari negara-negara kontributor. Akibatnya, WHO mengalami ketidakindependenan ketika berbeda pendapat, khususnya dengan negara-negara kontributor dana terbesar yang memainkan patron kepemimpinan di tubuh birokrasi.
5. *Flexibility*. WHO menunjukkan langkah yang kompromistis dan lamban dalam menangani pandemi COVID-19. WHO sebagai organisasi sentral di bidang kesehatan tidak menunjukkan langkah yang tegas, tetapi justru memberi ruang bagi negara-negara untuk menentukan skala prioritasnya masing-masing.

Kajian ini menyempurnakan analisis Douthat (2020) dalam “In the Fog of Coronavirus, There Are No Experts”, yang mengemukakan bahwa kesalahan terbesar dalam penanganan pandemi COVID-19 berada di pundak WHO. Sebagai organisasi kesehatan universal, WHO justru mengabaikan fakta saintifik dengan mengikuti imperatif politiknya berpihak pada Tiongkok, menerima penilaian yang salah, dan menegasi bukti-bukti penting. Oleh sebab itu, sebagai organisasi internasional yang dinamis, reformasi kinerja WHO dan redesain tata kelola kesehatan global menjadi agenda yang perlu dikampanyekan sebagai upaya memperbaiki norma baru tata kelola kesehatan global.

## BAB II RESPONS-RESPONS DAN RESILIENSI SEKTORAL DI TENGAH PANDEMI

Pada bab kedua, buku ini menjelaskan implikasi pandemi COVID-19 terhadap sektor-sektor tertentu dan resiliensi sektoral yang diambil oleh masing-masing sektor. Bab ini secara khusus mengkaji sektor pendidikan tinggi, industri BUMN pada bidang transportasi dan farmasi, serta kesehatan.

### Resiliensi Sektor Pendidikan Tinggi

Situasi pandemi COVID-19 telah mendesak perguruan tinggi untuk mentransformasi praktik pengelolaan dan kebijakan secara transformatif, drastis, dan cepat. Transformasi ini terlihat dari ditutup dan dihentikannya aktivitas akademik di lingkungan kampus serta penyelenggaraan pembelajaran melalui kanal-kanal atau *platform online* sebagai tuntutan kemajuan teknologi informasi digital. Resiliensi perguruan tinggi yang dipaparkan oleh buku ini tampaknya tidak terlepas dari konteks Revolusi Industri 4.0. White (2004) dalam *Anthropology in Theory: Issues in Epistemology* menyatakan bahwa *Big Data*, *Artificial Intelligence*, dan *Computing Computer* telah mendorong regresivitas dan memengaruhi sistem sosial manusia. Kita-manusia-semakin terobsesi untuk menerima beragam kemudahan yang dijanjikan oleh teknologi dan anak turunya. Pernyataan ini diaminikan oleh Whitehead (2004), dalam buku yang sama, mengemukakan bahwa manusia dipicu oleh neuropsikologi untuk menghasilkan kreativitas dan teknologi-teknologi baru pada berbagai bidang, salah satunya adalah pendidikan.

Akan tetapi, buku ini seakan membongkar dan menyanggah kedua pernyataan tersebut dengan mengkomparasikan bahwa pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19 berbeda dengan tuntutan Revolusi Industri 4.0. Pembelajaran yang terintegrasi dengan sistem digital sebagai tuntutan Revolusi Industri 4.0 merupakan wacana yang terencana sejak tahun 1990-an dan penerapannya berlangsung secara gradual, prosedural, dan transisional. Tuntutan ini merupakan upaya untuk mengintensifikasi regresivitas, kemudahan, dan kreativitas pembelajaran. Sementara itu,

pembelajaran daring akibat pandemi COVID-19 merupakan suatu keterdesakan, keterpaksaan, kedaruratan sebagai alasan yang utama—bukan pada kemajuan dan kemudahan, melainkan pada upaya menyesuaikan diri di tengah pandemi. Hal ini disebabkan oleh praktik perguruan tinggi yang berupaya untuk memutus persebaran virus, namun pada sisi lain juga berupaya untuk tetap memberlangsungkan pembelajaran.

Bab ini selanjutnya memaparkan hasil riset Suryatmojo *et al.* (2020) dari Pusat Inovasi dan Kajian Akademik (PIKA) UGM terkait resiliensi mahasiswa dan dosen terhadap sistem pembelajaran daring. Berdasarkan hasil survei terhadap 3.353 mahasiswa UGM, data yang diperoleh meliputi (1) 81,3% responden menyatakan bahwa kualitas koneksi internet dirasa cukup baik (sangat baik, baik, dan sedang); (2) 50,5% responden menyatakan bahwa pembelajaran daring memiliki kemiripan dengan kualitas pembelajaran luring; (3) 66,9% responden menyatakan mampu memahami materi perkuliahan daring dengan memadai (sangat baik, baik, dan sedang); (4) 85% responden berperspsi bahwa kemampuan dosen dalam penyampaian materi perkuliahan daring berjalan dengan baik; dan (5) 83% responden menyatakan kualitas pembelajaran daring cukup baik. Sementara itu, survei terhadap 318 dosen UGM diperoleh data bahwa 79,6% dosen memiliki pengalaman pembelajaran daring; 67% dosen pernah menyelenggarakan perkuliahan daring sebelum darurat COVID-19; dan 87,4% dosen menggunakan laptop sebagai infrastruktur pembelajaran daring. Dengan demikian, pelaksanaan pembelajaran daring di UGM selama masa pandemi COVID-19 relatif berjalan dengan baik (Suryatmojo *et al.*, 2020).

Namun, dengan mengelaborasi hasil kajian Tello, Park & Choi, Rovai & Downay, Tu & McIsaac, Jun, Hill *et al.*, dan Gunawardena *et al.*, Mahle, Thurmond *et al.*, Willging & Johnson, Levy, Rochester & Pradel, dan Croxton, kajian ini juga mengemukakan bahwa keberhasilan pembelajaran digital ditentukan oleh faktor internal, eksternal, dan kontekstual. Faktor internal berkaitan dengan motivasi, disiplin, dan manajemen waktu; faktor eksternal meliputi tekanan keluarga, waktu, lingkungan, dan finansial;

sedangkan faktor kontekstual berkaitan dengan penguasaan teknologi, interaktivitas, psikologi, dan infrastruktur teknologi.

Mengacu pada berbagai faktor tersebut, hasil survei yang disajikan dalam buku ini masih belum akurat dan perlu ditilik lebih mendalam terkait indikator-indikator yang digunakan. Hal ini terlihat dari jumlah responden yang tidak mencakup keseluruhan civitas akademika UGM dan indikator-indikator yang digunakan dalam survei belum mencakup faktor internal, eksternal, dan kontekstual secara menyeluruh.

### **Resiliensi Sektor Industri BUMN (Transportasi dan Farmasi)**

Sektor industri BUMN yang dikaji pada buku ini difokuskan pada industri transportasi dan farmasi. Meskipun dalam payung yang sama-BUMN, keduanya mengalami model dampak akibat pandemi COVID-19 yang berbeda. Ketika sektor transportasi mengalami penurunan atas permintaan pelayanan jasa, sektor farmasi justru mengalami peningkatan permintaan. Paradoks ini disebabkan oleh asumsi bahwa sektor transportasi turut menentukan laju persebaran virus sehingga masyarakat menghindari sektor transportasi umum (kereta api, pesawat, kapal laut), sedangkan sektor farmasi sebagai produsen dan penyedia alat-alat kesehatan sangat dibutuhkan oleh masyarakat pada masa pandemi. Meskipun demikian, keduanya menyikapi pandemi dengan menghasilkan respons-respons, baik bagi lingkungan internal perusahaan maupun respons eksternal berkaitan dengan kontribusinya membantu negara dalam menangani pandemi COVID-19.

Bab ini menunjukkan bahwa perusahaan-perusahaan sektor transportasi, seperti Garuda Indonesia, Kereta Api Indonesia (KAI), dan Pelayaran Indonesia (Pelni) mengalami penurunan layanan. Garuda Indonesia dan KAI merespons hal ini dengan fokus pada upaya meminimalkan kerugian perusahaan dan melindungi pegawai. Garuda Indonesia, misalnya, mengalihkan rute penerbangan ke dalam negeri, memberlakukan kebijakan *Work from Home*, dan mengimplementasikan protokol kesehatan. Sementara itu, KAI mengurangi operasi kereta api dan mewajibkan para penumpang untuk mematuhi protokol kes-

ehatan secara ketat. Berbeda dengan keduanya, Pelni tetap beroperasi dengan tetap berupaya menghindari persebaran virus melalui penerapan protokol kesehatan yang ketat. Ketiga perusahaan BUMN tersebut menghasilkan respons eksternal untuk membantu pemerintah dengan mendistribusikan logistik, rantai pangan, medis, dan alat protokol kesehatan, baik di dalam negeri maupun ke luar negeri.

Berbeda dengan industri transportasi, industri farmasi, seperti Bio Farma, Kimia Farma, dan Indofarma, memang mengalami kenaikan permintaan, baik dalam maupun luar negeri. Namun, industri farmasi masih mengandalkan pasokan bahan produksi yang diperoleh dari impor. Akibatnya, ketika nilai rupiah melemah, industri farmasi mengalami tekanan. Sampai terbitnya buku ini, hasil kajiannya menunjukkan bahwa industri farmasi belum menunjukkan langkah-langkah manajemen yang cepat dan tepat di lingkungan internal. Namun, terlepas dari tekanan tersebut, industri farmasi berkontribusi terhadap masyarakat luas dengan menjamin ketersediaan dan harga APD, masker, dan produk-produk sanitasi bagi masyarakat. Selain itu, Bio Farma juga berupaya menjalin sinergi lintas aktor untuk mengembangkan dan memproduksi vaksin COVID-19.

### **Resiliensi Sektor Kesehatan**

Selanjutnya, bab ini memaparkan kondisi sistem kesehatan di berbagai negara dengan meminjam lima karakteristik resiliensi sistem kesehatan menurut Kruk *et al.* (2015): (1) sistem informasi kesehatan yang menyajikan status terkini secara akurat dan *real time*; (2) memenuhi berbagai layanan kesehatan secara merata—sistem kesehatan semesta; (3) mengisolasi ancaman sistem kesehatan, tetapi tetap mempertahankan pelayanan; (4) berbasis jejaring lintas aktor; serta (5) sistem kesehatan yang adaptif. Sebagaimana bab pertama, bab kedua ini juga memulai pemaparannya dengan mengambil pengalaman *best practice* sistem kesehatan resilien di beberapa negara, seperti Spanyol, Singapura, Hongkong, dan Jepang. Negara-negara tersebut melakukan beberapa tindakan, seperti penambahan sumber daya finansial, investasi di bidang kesehatan,

pengendalian perilaku masyarakat untuk menangani COVID-19, serta koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah.

Berbeda dengan teori Kruk et al., buku ini menyajikan analisis terkait resiliensi sistem kesehatan di Indonesia dengan teori yang dikemukakan oleh Khan et al., yaitu *surge capacity* (kapasitas lonjakan), efektivitas skrining, dan perlindungan bagi tenaga kesehatan. Penggunaan tiga karakteristik menurut Khan *et al.* ini sepertinya memang lebih spesifik untuk melihat kondisi sistem kesehatan ketika COVID-19 pertama kali menyebar ke Indonesia sejak diumumkan oleh pemerintah. Hal itu berdasar alasan, kajian ini memang difokuskan untuk melihat kondisi awal pada sektor kesehatan saat pandemi COVID-19. Dengan melihat kebijakan-kebijakan yang ditempuh pemerintah, buku ini menunjukkan bahwa *surge capacity* di Indonesia dikembangkan melalui pembukaan rumah sakit yang telah ditutup pemerintah (Pulau Galang) dan pemanfaatan bangunan nonmedis (Wisma Atlet, Wisma Haji). Akan tetapi, kapasitas perlindungan tenaga kesehatan dari penularan COVID-19 masih belum memadai. Hal ini ditunjukkan oleh jumlah APD bagi tenaga medis yang kurang dari jumlah yang diproyeksikan (lihat Tabel 2).

Kriteria yang terakhir, yaitu kapasitas pemeriksaan COVID-19 di Indonesia. Bab ini memaparkan bahwa rata-rata pemeriksaan spesimen per hari dari tanggal 28 Maret sampai 15 April 2020 sebanyak 1.433 spesimen per hari. Sementara itu, jumlah pemersiksaan COVID-19 per 1000 penduduk per 15 April 2020 hanya mencapai 0,12%. Kedua jumlah ini menempatkan Indonesia jauh di bawah Korea Selatan, Malaysia, Vietnam,

Thailand, dan Filipina. Oleh karena itu, bab kedua dari buku ini juga memberikan beberapa rekomendasi, seperti (1) mengembangkan *surge facilities* di daerah-daerah dengan kasus yang cukup tinggi, (2) meningkatkan ketersediaan APD dengan mendorong produksi APD dalam negeri, dan (3) meningkatkan pemeriksaan COVID-19 melalui PCR *Test Kit*.

### BAB III MASYARAKAT DAN MODAL SOSIAL: MENGADU NASIB, MENAWAR PANDEMI

Bab ketiga dari buku ini membicarakan implikasi pandemi COVID-19 terhadap sejumlah kelompok masyarakat dan respons-respons masyarakat sebagai modal sosial dalam menangani pandemi COVID-19.

#### Masyarakat Marginal dan Pekerja Informal

Kajian mengenai masyarakat marginal dan kelompok pekerja informal pada buku ini menjadi jawaban sekaligus memperkuat gagasan yang diajukan Zabala (2020) dan Lassa dan Booth (2020) tentang kepemimpinan populis. Pemimpin populis mengejawantahkan diri mereka dengan sikap pengabaian terhadap krisis dan perhitungan atau kalkulasi yang berorientasi pada kepentingan ekonomi maupun politik—*business as usual*. Krisis dan pilihan *business as usual* membuat kelompok yang selama ini telah marginal semakin termarginalkan. Bab ini menyajikan hasil wawancara terhadap beberapa kelompok marginal, seperti (1) lansia, (2) penyintas pelanggaran Hak

**Tabel 2.** Proyeksi jumlah kebutuhan APD bagi tenaga medis di enam provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sulawesi Selatan) dengan prediksi jumlah pasien per 13 Mei.

| Provinsi         | Estimasi total pasien ICU per 13 Mei | Minimal set APD  | Maksimal set APD |
|------------------|--------------------------------------|------------------|------------------|
| DKI Jakarta      | 4.958                                | 59.50001         | 95.2001          |
| Jawa Barat       | 1.225                                | 14.6981          | 235.169          |
| Jawa Timur       | 998                                  | 119.762          | 191.620          |
| Banten           | 646                                  | 77.573           | 124.117          |
| Jawa Tengah      | 506                                  | 60.698           | 97.116           |
| Sulawesi Selatan | 460                                  | 55.254           | 88.406           |
| Total            | <b>8.794</b>                         | <b>1.055.269</b> | <b>1.688.430</b> |

Sumber: Irwandy, 2020

Asasi Manusia (HAM), seperti kekerasan 1965 di Yogyakarta dan Jawa Tengah, (3) perempuan dan anak-anak, (4) kelompok minoritas gender dan orientasi seksual, seperti transgender dan transpuan, serta (5) penyandang disabilitas. Sebagai kelompok marginal, mereka tidak dapat mengakses informasi COVID-19, mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), meningkatnya kekerasan pada perempuan dan anak, luput dari jaring pengaman sosial, dan diskriminasi ketika mengakses kesehatan.

Selain memarginalkan kelompok yang sudah marginal, pandemi COVID-19 dengan segala dampak dan perubahan yang diakibatkannya juga memunculkan kelompok marginal baru. Mereka adalah, antara lain (1) masyarakat miskin yang tidak memperoleh penghasilan dan pekerjaan akibat kebijakan *lockdown* atau pemberlakuan kedaruratan-pembatasan, (2) pekerja di sektor informal, (3) mereka yang tidak memiliki akses internet dan teknologi, (4) masyarakat yang tidak memiliki akses air bersih untuk sanitasi, serta (5) korban pandemi COVID-19 dan tenaga medis. Buku ini memang tidak mengkaji setiap kelompok marginal baru tersebut. Akan tetapi, pembahasan pada bagian ini secara spesifik dilanjutkan dengan pemaparan tentang kerentanan yang dialami oleh pekerja informal. Penulis tampaknya menggunakan fakta bahwa kuantitas pekerja informal di Indonesia sangat tinggi, yaitu mencapai 56,84% (BPS, 2018). Fakta tersebut mendasari pilihan penulis untuk melanjutkan pembahasan mengenai pekerja informal secara spesifik.

Lokus pembahasan terkait pekerja informal adalah kasus di DIY, mengingat ketimpangan pekerja informal di provinsi ini adalah yang tertinggi di Indonesia. Responden sebagai sumber data meliputi pedagang makanan atau minuman, pengelola destinasi wisata, karyawan, sentra industri kreatif, dan pengemudi jasa transportasi daring (ojol). Secara garis besar, para pekerja informal mengalami penurunan pendapatan. Akan tetapi, kajian ini sejatinya masih bersifat “mengambang di permukaan”, tanpa memberikan analisis yang lebih mendalam bagi setiap pekerja informal. Meskipun berada pada cakupan yang sama, antara satu pekerja informal dengan pekerja informal lain tentu berbeda karena memiliki karakteristik masing-masing. Contohnya

adalah pengemudi ojol. Kajian ini akan lebih komprehensif apabila dikaitkan dengan konteks perekonomian, misalnya pengemudi ojol dalam *frame* fenomena *Gig Economy*.

Riandy (2020) menjelaskan bahwa ojol termasuk dalam fenomena *Gig Economy* dengan relasi antara pekerja (pengemudi ojol), perusahaan penyedia jasa, dan klien (pengguna jasa). Pengemudi ojol memiliki sistem jam kerja yang situasional dan fleksibel yang berperan sebagai “mitra bisnis” dengan perusahaan. Akan tetapi, penurunan permintaan jasa dan pembatasan ketika pandemi menuntut pengemudi ojol untuk menambah jam operasi dan melayani jasa-jasa lain dari klien agar memperoleh pemasukan. Eksploitasi jam kerja dan ketiadaan hak kontraktual antara pekerja dan perusahaan menunjukkan bahwa “mitra bisnis” hanyalah gimik dari perusahaan. Kondisi ini menunjukkan bahwa relasi antara pekerja dan perusahaan yang seharusnya berbasis kemitraan dan kesetaraan hanyalah paradoks. Kajian pada buku ini akan lebih mendalam jika masing-masing sektor informal dikaitkan dengan konteks perekonomian yang juga turut memengaruhi dan membentuknya.

### **Gerakan Solidaritas Filantropis dan Altruisme sebagai Penguatan Modal Sosial**

Sebagaimana pembahasan sebelumnya, kelambanan pemerintah pusat akan mengkonfigurasi langkah-langkah pemerintah daerah. Bab ketiga dari buku ini juga menunjukkan bahwa respons lamban dan kompromistis pemerintah pusat juga memengaruhi masyarakat untuk tanggap dalam mitigasi pandemi COVID-19. Namun, dengan kondisi geografis, demografis, dan sosial yang berbeda, setiap daerah memiliki respons beragam sesuai karakteristik sosialnya. Hal tersebut mendasari bahwa lokus pembahasan ini adalah melihat respons masyarakat di DI Yogyakarta, provinsi yang diasumsikan memiliki nilai komunalitas yang cukup tinggi. Kajian ini memaparkan solidaritas filantropis dan altruisme sebagai wujud *best practice* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Panggungharjo, Bantul, DI Yogyakarta, dan kerelawanan mahasiswa di Universitas Gadjah Mada.

Masyarakat Desa Panggungharjo menangani pandemi COVID-19 dengan nilai-nilai komunal, kekeluargaan, kerja sama, dan musyawarah. Secara teknis, masyarakat desa terkait membangun kanal informasi pandemi COVID-19 dan *call center* serta mengembangkan *fundraising* atau donasi dana yang dilakokasikan sebagai pendukung bagi masyarakat yang kehilangan pekerjaan. Selain itu, masyarakat desa juga memanfaatkan bangunan desa sebagai ruang karantina. Di tengah keterbatasan dan kedaruratan, pemuda desa secara inovatif juga menciptakan aplikasi sebagai *platform* untuk memasarkan hasil pertanian masyarakat Desa Panggungharjo. Dengan merefleksikan tindakan-tindakan masyarakat desa Panggungharjo, kondisi ini relevan dengan temuan Padmawati & Nichter (2008) bahwa partisipasi masyarakat dalam sebuah program didukung oleh sensitivitas politik. Dalam konteks masyarakat desa, UU Desa memberikan sensitivitas bagi masyarakat desa untuk secara optimal merespons pandemi COVID-19. UU Desa memberikan ruang kewenangan bagi pemerintah dan masyarakat desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, termasuk pada persoalan pandemi COVID-19.

Sementara itu, Universitas Gadjah Mada melalui Tim *Health Promoting University* membuka rekrutmen relawan COVID-19. Rekrutmen ini berhasil menyerap 650 civitas akademika yang terdiri atas mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan alumni. Gerakan kerelawanan ini meliputi skrining, kampanye dan edukasi kepada masyarakat, layanan psikologis, dan *call center*. Selain itu, tiap fakultas di UGM juga turut berkontribusi melalui latar belakang akademiknya masing-masing. Misalnya, Fakultas Teknik mengembangkan alat-alat pelengkap kesehatan bagi tenaga medis; Fakultas Farmasi mengembangkan *handsanitizer*; Fakultas Psikologi menyelenggarakan layanan konseling; dan Fakultas Ilmu Sosial dan Politik mengeluarkan sejumlah rekomendasi kebijakan atau *policy brief*. Meminjam gagasan Symaco & Tee (2019), aksi-aksi kerelawanan civitas akademika UGM di atas menunjukkan bahwa masyarakat perguruan tinggi merupakan aktor yang berkompetensi sehingga pelibatannya bagi masyarakat amat dibutuhkan untuk menangani suatu permasalahan.

Tindakan di atas dan tindakan-tindakan sejenis lain, sejatinya adalah wujud penguatan modal sosial masyarakat. Modal ini berkaitan dengan kapasitas adaptif masyarakat untuk merespons perubahan akibat pandemi COVID-19 sebagai sebuah strategi untuk bertahan atau resiliensi. Solidaritas yang dilakukan, baik oleh masyarakat umum maupun masyarakat perguruan tinggi, saling bersinergi membentuk jejaring modal sosial (*networking social capital*), yaitu ikatan sosial yang lebih luas. Melalui pemaparan dua studi kasus tersebut, kajian ini telah menjawab permasalahan yang diajukan Harari (2020b) dalam “The World after Coronavirus” dan Žižek (2020b) dalam “Global Communism or The Jungle Law, Coronavirus Forces Us to Decide”. Keduanya mempersoalkan pilihan yang perlu diambil di antara dua opsi: opsi perpecahan dan opsi solidaritas atau “komunisme” (komunisme dalam arti ‘bersama’). Kajian ini menunjukkan bahwa dari kedua pilihan itu, solidaritaslah yang mutlak harus dan perlu kita pilih.

#### **BAB IV RELASI TRILOGIS DALAM TATA KELOLA COVID-19**

Bab keempat dari buku ini menguraikan keterkaitan antara ilmu pengetahuan, komunikasi publik, dan jurnalisme dalam konteks tata kelola COVID-19 di Indonesia. Ilmu pengetahuan berperan sentral dalam setiap pengambilan kebijakan terkait penanganan pandemi COVID-19. Setiap kebijakan yang diambil harus memenuhi kaidah dasar dan justifikasi ilmiah agar penerapannya dapat memberikan kebermanfaatannya bagi masyarakat. Analisis mengenai relasi pengetahuan ilmiah dengan kebijakan penanganan pandemi terbagi atas dua fase, yaitu sikap anti pengetahuan dan sikap yang mulai pro terhadap pengetahuan. Pada fase pertama (Desember 2019-Februari 2020), tampak para pejabat publik mengeluarkan pernyataan yang anti pengetahuan, cenderung mere-mehkan virus dan kemungkinan terburuknya, serta abai terhadap justifikasi ilmiah. Pernyataan semacam itu seakan-akan menyangkal bahwa COVID-19 sangat mungkin menyebar di dan ke Indonesia.

Pada fase kedua (Maret 2020), pemerintah mulai bergerak dari sikap anti menuju pro penge-

tahuan. Hal ini terlihat dari sejumlah imbauan bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah-*social distancing* atau *physical distancing*, serta kampanye yang bersifat preventif, seperti memakai masker, mencuci tangan, dan menggunakan *handsanitizer*. Berbagai kebijakan yang diambil disesuaikan dengan target, agenda, dan prioritas pemerintah. Namun, kajian ini tampaknya belum menjelaskan posisi dan peran ilmu pengetahuan dalam pengambilan kebijakan. Kajian yang dilakukan masih terbatas pada analisis diakronis terkait kebijakan-kebijakan pemerintah pra dan saat pandemi untuk melihat apakah setiap kebijakan telah mengacu pada ilmu pengetahuan atau tidak. Oleh karena itu, kajian ini kiranya dapat disempurnakan dengan merujuk pada tiga peran ilmu pengetahuan menurut Siegel (2020) dalam “The 3 Ways Science to Get us Through The COVID-19 Pandemic” sebagaimana berikut.

1. Ilmu pengetahuan dikelola oleh para ilmuwan, tenaga medis profesional, institusi medis, dan industri kesehatan. Mereka mengintensifikasi pengetahuan dan sumber daya untuk menghasilkan pengetahuan ilmiah, mengembangkan vaksin, dan memberikan sejumlah rekomendasi kesehatan.
2. Ilmu pengetahuan adalah “anak kandung” dari rasa ingin tahu (*curiosity driven*). Riset yang didorong oleh rasa ingin tahu oleh para virolog, ekolog penyakit, biofisikawan, dan ilmuwan saintifik memberikan kajian mutakhir kepada dokter dan pemangku kebijakan.
3. Ilmu pengetahuan dasar memungkinkan pengembangan riset lintas disiplin. Tidak hanya pengetahuan saintifik, tetapi riset lintas disiplin, khususnya antropologi, psikologi sosial, dan ilmu budaya, dapat memberikan gambaran *behavioural* terkait perilaku masyarakat pada masa pandemi. Dengan memahami masyarakat, kita dapat menentukan langkah-langkah yang perlu dan tepat untuk diambil.

Pengabaian ilmu pengetahuan di lingkungan pemerintah dan pejabat publik memicu kritik terhadap komunikasi publik pemerintah, seperti ketidakpastian informasi, ketidakterukuran, ketidakjelasan koordinasi, lemah, dan tumpang

tindih. Bab ini juga memaparkan secara deskriptif kanal-kanal komunikasi publik pemerintah, yaitu media digital Situs Web COVID-19 dari Kementerian Kesehatan RI dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19; Facebook, Instagram, dan Twitter; serta *Chatbot* Whatsapp COVID-19. Berkaitan dengan komunikasi publik, jurnalisme berperan dalam hilirisasi arus informasi yang terverifikasi kepada publik. Karena itu, bab ini selanjutnya mencoba menguraikan pemberitaan COVID-19 pada media-media besar, seperti Tirto, Jakarta Post, Tempo, Kompas, Media Indonesia, Kompas TV, Metro TV, dan TV One.

Untuk melihat peran dan posisi media pada masa krisis, bab ini menggunakan tiga elemen Crisis and Emergency Risk Communication (CERC) yang dirumuskan oleh Reynolds & Seeger, yaitu *pre-crisis*, *initial event*, dan *maintenance*. Pada elemen *pre-crisis* (Januari-Februari 2020), media-media di Indonesia belum menunjukkan *sense of crisis*. Ketika *initial event* (awal ditemukannya kasus positif COVID-19 di Indonesia), media-media seolah memproyeksikan ketakutan dan hiperbolisasi pemberitaan. Berita dan reportase semacam ini menimbulkan ketakutan dalam komunikasi publik dan bagi masyarakat. Sementara itu, pada masa *maintenance* (selama masih pandemi COVID-19), beberapa media mulai bersikap keras terhadap pemerintah. Hal ini dipicu oleh eskalasi kasus COVID-19 yang semakin meningkat, sedangkan respons pemerintah “terkesan lamban” dan dengan banyaknya *blunder* yang dilakukan para pejabat publik.

Setelah menilik peran dan posisi media, bab ketiga ini dilanjutkan dengan paparan terkait jurnalisme krisis COVID-19 di Indonesia dengan mencermati lima dimensi: sinyal awal, liputan terkait intervensi pemerintah untuk menangani krisis, kedalaman dan akurasi penyampaian informasi, keberpihakan terhadap kelompok rentan, serta keamanan jurnalis. Informan dalam kajian ini adalah himpunan Jurnalis Krisis dan Bencana (JKB), *Society of Indonesia Science Journalist* (SISJ), Komisi Keselamatan Jurnalis (KKJ), Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan sejumlah jurnalis dari beberapa media. Berdasarkan lima dimensi tersebut, jurnalis menjadi pihak pertama yang menyampaikan informasi kepada publik; berupaya kritis menuntut keterbukaan pemerintah;

mempertahankan verifikasi informasi; mengupas persoalan kelompok rentan di masyarakat; serta membangun kesiapan dan respons terhadap krisis bagi jurnalis.

## EPILOG DUNIA PASCAPANDEMI COVID-19: SEBUAH PINTU GERBANG

Roy (2020) dalam “The Pandemic Is A Portal” mengemukakan sebuah adagium menarik, bahwa berbagai pandemi yang pernah melanda kehidupan telah memaksa umat manusia untuk putus dengan masa lalu, lantas membayangkan dunia baru. Pandemi adalah sebuah pintu gerbang yang menghubungkan dunia satu dengan dunia berikutnya. Adagium tersebut tampaknya menjadi pemantik buku ini untuk menghadirkan analisis reflektif terkait kehidupan pascapandemi COVID-19 kelak. Analisis ini menjadi penutup dari berbagai kajian yang telah ditawarkan. Bagian penutup dari buku ini memaparkan sisi gelap tatanan kontemporer yang terbuka oleh COVID-19, momentum dan aspek perubahan, serta skenario pasca-COVID-19.

Sebagaimana telah disampaikan di awal, pandemi COVID-19 tidak hanya sekadar krisis kesehatan, tetapi telah bermanifestasi sebagai krisis kemanusiaan, kebijakan, dan tata kelola. Sepanjang pergulatan melawan pandemi ini, kehadirannya telah mengungkap kerapuhan sistem kebijakan, khususnya kesehatan, membuka jurang kerentanan sosial masyarakat, dan mempertontonkan karakteristik dari rezim yang sesungguhnya. Pandemi COVID-19 juga membuka ruang probabilitas terciptanya berbagai perubahan, seperti relasi kemanusiaan, deglobalisasi, rekonstruksi dan redesain tatanan global, serta melahirkan solidaritas meluas (*extended solidarity*) berbasis kesetaraan dan kemanusiaan.

Analisis pada penutup buku ini selaras dengan teori budaya yang dikemukakan oleh Koentjaraningrat (2015) dalam *Pengantar Ilmu Antropologi* terkait dinamika masyarakat dan kebudayaan. Pandemi COVID-19 sebagai masa krisis merupakan suatu masa yang menimbulkan banyak temuan baru dan rekonfigurasi. Ketika suatu krisis membuka sisi gelap dari sistem yang ada, maka masyarakat akan merespons dan menentang

keadaan tersebut sebagai suatu ketidakpuasan dan kesadaran akan kekurangan-kekurangan yang ada di sekitarnya. Maka, kebermuaan dari ketidakpuasan dan kesadaran itu adalah terciptanya tatanan hidup dan adaptasi baru.

## PENUTUP

Tujuan tinjauan buku ini adalah menganalisis, menguraikan, dan memaparkan dinamika tata kelola penanganan pandemi COVID-19 di Indonesia; respons-respons berbagai pihak, seperti pemerintahan, pendidikan atau perguruan tinggi, industri, kesehatan, dan masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19; serta relasi antara ilmu pengetahuan, komunikasi publik, dan jurnalisme dalam tata kelola COVID-19. Buku bertajuk *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* ini telah menghimpun pengetahuan dan kajian awal terkait aspek tata kelola COVID-19 di Indonesia dengan serangkaian analisis dan pengembangan rekomendasi.

Meskipun kajian-kajian yang dikompilasi masih bersifat kajian awal (*rapid appraisal*), buku yang ditulis oleh para akademisi Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UGM ini menyajikan perspektif dan analisis sektoral yang beragam. Kerangka yang beragam ini mencakup konteks *governance*, kepemimpinan, kelembagaan, sumber daya, solidaritas, dan komunikasi krisis. Berbagai “warna” yang disajikan di dalamnya memperkuat dan memperjelas kondisi senyatanya bahwa pandemi COVID-19 bukan hanya krisis kesehatan, tetapi mewujud sebagai krisis kemanusiaan, kebijakan, dan tata kelola.

## PUSTAKA ACUAN

- Badan Pusat Statistik (BPS). (2018). *Keadaan Ketenagakerjaan Indonesia Februari 2018*. Jakarta: BPS RI.
- Douthat, R. (2020). “In the Fog of Coronavirus, There Are No Experts”, Dalam K. Maqin *et al.* (Eds), *Wabah, Sains, dan Politik* (pp. 9-16). Yogyakarta: Antinomi.
- Gerung, R. (2010). “Pemimpin Peradaban”, Dalam Y. Sutanto *et al.*, (Eds), *The Dancing Leader: Hening, Mengalir, Bertindak*. Jakarta: Buku Kompas.
- Harari, Y.N. (2020a). “In the Battle Against Coronavirus, Humanity Lacks Leadership”, Dalam K.



- Maqin *et al.* (Eds), *Wabah, Sains, dan Politik* (pp. 65-75). Yogyakarta: Antinomi.
- Harari, Y.N. (2020b). "The World After Coronavirus", Dalam K. Maqin *et al.* (Eds), *Wabah, Sains, dan Politik* (pp. 93-106 ). Yogyakarta: Antinomi.
- Irwandy. (2020, April 14). Pertengahan Mei, Indonesia terancam krisis tempat tidur, ICU, ventilator, dan APD karena kasus COVID-19 bisa melewati 50.000. *The Conversation*. Retrived from <https://theconversation.com/pertengahan-mei-indonesia-terancam-krisis-tempat-tidur-icu-ventilator-dan-apd-karena-kasus-covid-19-bisa-melewati-50-000-35442>, August 9, 2020.
- Koentjaraningrat. (2015). *Pengantar Ilmu Antropologi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Lassa, J. & Booth, M. (2020, April 8). Are populist leaders a liability during COVID-19? *The Jakarta Post*. Retrieved from <https://www.thejakartapost.com/academia/2020/04/08/are-populist-leaders-a-liability-during-covid-19.html>, August 8, 2020.
- Mas'udi, W. & Winanti, P.S. (Eds). (2020). *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Padmawati, S. & Nichter, M. (2008). Community response to avian flu in Central Java, Indonesia. *Anthropology and Medicine*, 15, 31-51. <https://doi.org/10.1080/13648470801919032>.
- Riandy, D.P.S. (2020). *Implikasi Fenomena Gig Economy bagi Para Pekerja*. Naskah tidak dipublikasikan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Roy, A. (2020). "The Pandemic is a Portal", Dalam K. Maqin *et al.* (Eds), *Wabah, Sains, dan Politik* (pp. 43-58). Yogyakarta: Antinomi.
- Siegel, E. (2020). "The 3 Ways Science Will Get Us Through The COVID-19 Pandemic", Dalam K. Maqin *et al.* (Eds), *Wabah, Sains, dan Politik* (pp. 1-8). Yogyakarta: Antinomi.
- Suryatmojo, H., Kusumawardani, S.S., Aluicius, I.E., & Widyatmanti, W. (2020). "Disrupsi dan Resiliensi Pendidikan Tinggi dalam Menangani Dampak COVID-19", Dalam W. Mas'udi & P.S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (pp. 125-142). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Symaco, L.P. & Tee, M.Y. (2019). Social responsibility and angagement in higher education: Case of the ASEAN. *International Journal of Educational Development*, 66, 184-192. <https://doi.org/10.1016/j.ijedudev.2018.10.001>.
- Taherian, S. (2020, April 7). The New World: How The World Will Be Different After COVID-19. *Forbes*. Retrived from <https://www.forbes.com/sites/suzytaherian/2020/04/07/the-new-world-how-the-world-will-be-different-after-covid-19/#6e93bcf35d15>, August 9, 2020.
- White, L.A. (2004). "Energy and The Evolution of Culture", Dalam H.L. Moore & T. Sanders (Eds.), *Anthropology in Theory: Issues in Epistemology* (pp. 109-122). West Sussex: John Wiley & Sons, Inc.
- Whitehead, C. (2004). "Why the Behavioural Science Need the Concept of The Culture-Ready Brain", Dalam H.L. Moore & T. Sanders (Eds), *Anthropology in Theory: Issues in Epistemology*. West Sussex: John Wiley & Sons, Inc, pp. 236-244.
- Winanti, P.S., Darmawan, P.B., & Putri, T.E. (2020). "Komparasi Kebijakan Negara: Menakar Kesiapan dan Kesigapan Menangani COVID-19", Dalam W. Mas'udi & P.S. Winanti (Eds.), *Tata Kelola Penanganan COVID-19 di Indonesia: Kajian Awal* (19-45). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Zabala, S. (2020). "The Coronavirus Pandemic is A Threat to Populist Strongmen", Dalam K. Maqin *et al.* (Eds), *Wabah, Sains, dan Politik* (pp. 59-64 ). Yogyakarta: Antinomi.
- Žižek, S. (2020a). *Pan(dem)ic!: COVID-19 Shakes the World*. New York and London: OR Books.
- Žižek, S. (2020b). "Global communism or jungle law, coronavirus forces us to decide", Dalam K. Maqin *et al.* (Eds), *Wabah, Sains, dan Politik* (pp. 85-92 ). Yogyakarta: Antinomi.